



SALINAN

WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH (RPJM) DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2013-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2015-2019 Pasal 2 ayat (3) huruf b menyatakan bahwa RPJMN berfungsi sebagai bahan penyusunan dan perbaikan RPJM Daerah dengan memperhatikan tugas Pemerintah di Daerah dalam mencapai sasaran Nasional yang termuat dalam RPJM Nasional;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dalam hal terjadinya perubahan yang mendasar, rencana pembangunan Daerah dapat diubah;
- c. bahwa dalam kerangka upaya pencapaian visi, misi, dan program Walikota perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta dinamika yang berkembang dalam masyarakat, sehingga RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018 perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Sawahlunto 2013-2018.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun 2012-2032
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
20. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

dan

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2013-2018.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 17), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I :Pendahuluan
- b. BAB II :Gambaran Umum Kondisi Daerah
- c. BAB III :Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah *yl*

- Serta Kerangka Pendanaan
- d. BAB IV : Analisis Isu-Isu Strategis
 - e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
 - f. BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan
 - g. BAB VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
 - h. BAB VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
 - i. BAB IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah
 - j. BAB X : Pedoman Transisi Dan Kaidah Pelaksanaan

(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 17 April 2017
WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ttd

ALI YUSUF

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 17 April 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

ttd

ROVANLY ABDAMS

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2017 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT :
(1/23/ 2017)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


HARISMAN, SH
NIP. 19601210 198302 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2013 – 2018

I. UMUM

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang hirarki perencanaan, proses perencanaan, mekanisme perencanaan, isi rencana, waktu pelaksanaan serta stakeholder perencanaan pembangunan pada setiap tingkatan yakni nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Selanjutnya, undang-undang tersebut juga mengamanatkan tentang perlunya dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan yang telah atau sedang dijalankan untuk dapat mengetahui tingkat capaian pelaksanaan pembangunan berikut masukan kebijakan dan program yang perlu dilakukan untuk menjamin suksesnya pelaksanaan rencana pada periode yang tersisa.

Perencanaan pembangunan lima tahunan Kota Sawahlunto yang sedang dilaksanakan adalah *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)* Tahap III dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Periode 2005-2025. RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018 tersebut berisikan Visi Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018 yaitu "Terwujudnya Masyarakat Kota Sawahlunto yang Produktif, Mandiri, Religius, Sejahtera dan Pemerintah yang Melayani" dengan 7 misi. Ketujuh misi tersebut sebagai berikut: Misi (1) Mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif dan Menciptakan Peluang Usaha Melalui Keunggulan Pariwisata dan Produk Lokal. Misi (2) Mewujudkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah. Misi (3) Memupuk Kehidupan Sosial yang Agamais dan Berakhlak Mulia serta Mengoptimalkan Pelaksanaan Pendidikan Berkarakter. Misi (4) Menumbuhkan Masyarakat yang Berintelektualitas, Sehat dan Sejahtera yang Menguasai Berbagai Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni dan Budaya. Misi (5) Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Bersih, Melayani, Kreatif, Inovatif dan Efisien. Misi (6) Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Daerah dan Misi (7) Memperluas Jaringan Sosial, Ekonomi secara Nasional dan Internasional.

Pelaksanaan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018 tersebut telah memasuki tahun ketiga. Untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, konsistensi RPJMD dan RPJMN, RKPD dan RPJMD serta kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan dilakukan evaluasi pertengahan jalan terhadap pelaksanaan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018.

Hasil dari pelaksanaan evaluasi pertengahan jalan pelaksanaan RPJMD Sawahlunto, terdapat beberapa kebijakan yang harus disesuaikan disebabkan karena adanya perubahan kebijakan nasional dan daerah sehingga kebijakan daerah yang telah direncanakan harus disesuaikan kembali dengan perubahan kebijakan

dimaksud. Perubahan kebijakan nasional dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 memuat Nawa Cita yang meliputi antara lain perubahan kebijakan nasional di bidang pendidikan, bidang pariwisata, bidang pertanian, bidang pekerjaan umum, penerapan standar pelayanan minimal, serta adanya perubahan struktur organisasi. Perubahan kebijakan tersebut membawa dampak terhadap indikator capaian pembangunan, yang selanjutnya untuk sisa tahun rencana perlu dilakukan kesesuaian kembali antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang ditetapkan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta visi, misi, tujuan, sasaran dan program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas serta dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 pasal 50 serta Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 282, Pasal 283, dan Pasal 284 maka Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto perlu dilakukan perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan hak dan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola dan mengatur urusan rumah tangganya dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada pasal 263 ayat (3) dinyatakan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025 merupakan salah satu pedoman dalam penyusunan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018. RPJPD Kota Sawahlunto telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sawahlunto. Saat ini RPJMD Kota Sawahlunto merupakan tahap ke 3 dari periode RPJPD Kota Sawahlunto dalam rangka mewujudkan visi Kota Sawahlunto 2005-2025 yaitu Sawahlunto Tahun 2020 menjadi Kota Wisata Tambang yang Berbudaya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018 yang menjabarkan visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto tanggal 16 Mei Tahun 2013. Hal ini juga sebagai pelaksanaan ketentuan yang diatur dalam pasal 264 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1) huruf a dan b ditetapkan dengan Perda.

Dalam periode pelaksanaannya, RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018 telah memasuki tahun ketiga yaitu tahun 2016. Dalam perkembangannya banyak perubahan dan dinamika lingkungan, baik lingkungan eksternal (provinsi, nasional bahkan internasional) maupun lingkungan internal Kota Sawahlunto. Beberapa perubahan lingkungan eksternal antara lain:

- Telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Telah ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang menjabarkan strategi, arah dan kebijakan pembangunan nasional dengan Trisaktinya dan 9 (sembilan) agenda pembangunan nasional "Nawa Cita" dari presiden dan wakil presiden terpilih, Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla.
- Adanya pergantian kepemimpinan Provinsi Sumatera Barat dari Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi, M.Sc dan Drs. H. Nasrul Abit sehingga perlu penyesuaian terhadap agenda pembangunan Provinsi Sumatera Barat.

Sedangkan dinamika kondisi internal Kota Sawahlunto yang perlu diakomodasi antara lain:

- Perlunya penyesuaian permasalahan dan isu-isu strategis Kota Sawahlunto;
- Perlunya penyesuaian program berdasarkan kondisi umum Kota Sawahlunto dan penyesuaian pada Renstra Kementerian/Lembaga yang berlaku;

- Penyesuaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja program berdasarkan SPM kementerian/lembaga;
- Penetapan target capaian indikator kinerja program untuk periode lanjutan 2016, 2017 dan 2018 sesuai realisasi capaian indikator kinerja program 2013-2015;
- Upaya untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Kota Sawahlunto dan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Sawahlunto.

Perubahan RPJMD diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, karena akan menjadi acuan dalam penyusunan perubahan Renstra Organisasi Perangkat Daerah, penyusunan RPKD dan Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah. Kemudian juga diharapkan akan meningkatkan kualitas dari Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto sampai pada akhir periode pelaksanaan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan Idiil penyusunan Perubahan RPJMD ini adalah Pancasila dan Landasan Konstitusional adalah UUD 1945. Sedangkan landasan operasional Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Undang - Undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19), jo Peraturan pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
7. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 - 2025.
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun 2012-2032
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021.
26. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032;
27. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 21);
28. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 22);
29. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pemberntukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14).

1.3 HUBUNGAN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAIN

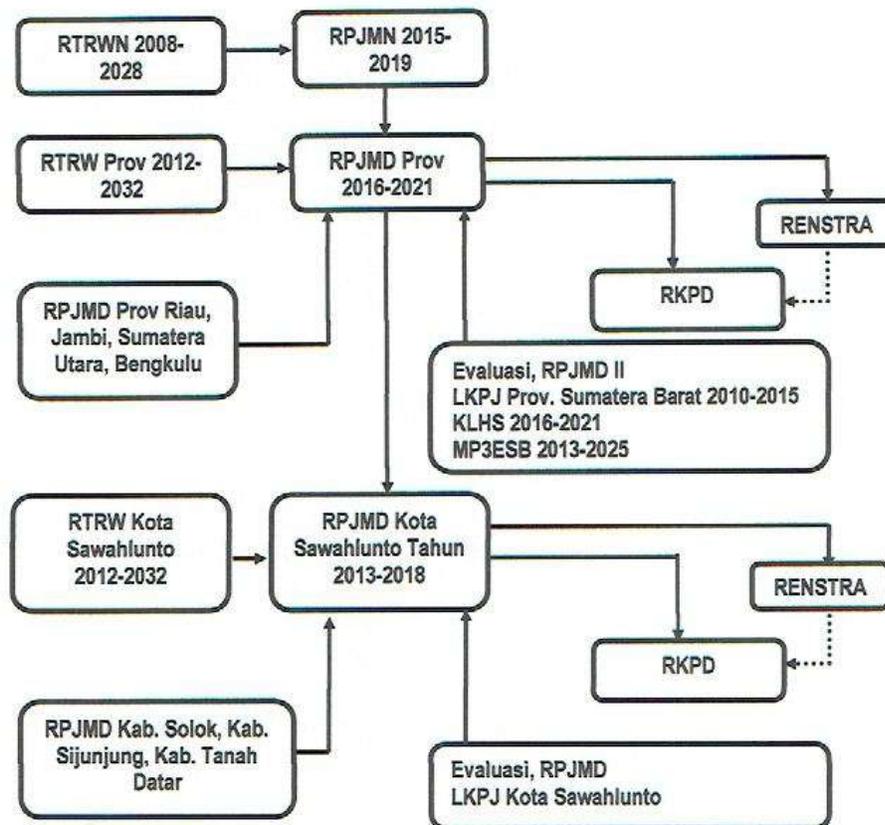
Keberadaan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto, khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lain, secara skematis terlihat sebagai berikut :

1. RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
2. RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018 berpedoman pada RPJPD Kota Sawahlunto 2005-2025 yang merupakan tahap ketiga dalam pelaksanaannya dengan fokus pembangunan diarahkan pada (1) terwujudnya sumber daya manusia berkualitas (2) terwujudnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur (3) terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas (4) terwujudnya pemerintahan yang bersih dan supremasi hukum dan (5) terwujudnya pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.
3. RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018 berpedoman pada RPJM Nasional 2015-2019 serta memperhatikan RPJMD Kab/Kota tetangga sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 54 ayat (2) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.
4. RPJMD Kota Sawahlunto 2013-2018 telah mengintegrasikan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang

Wilayah Kota Sawahlunto tahun 2012-2032 (Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012).

5. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) selama kurun waktu lima tahunan. Renstra OPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu lima tahun, yang disusun oleh OPD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
6. Secara operasional RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kota Sawahlunto yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja OPD.

Gambar 1.1
Hubungan RPJMD dengan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lainnya



1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan
	1.3 Hubungan Antar Dokumen
	1.4 Sistematika Penulisan
	1.5 Maksud dan Tujuan
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
	2.1 Aspek Geografi dan Demografi
	2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
	2.3 Aspek Pelayanan Umum
	2.4 Aspek Daya Saing Daerah
BAB III	GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
	3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu
	3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
	3.3 Kerangka Pendanaan
BAB IV	ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
	4.1 Pemasalahan Pembangunan
	4.2 Isu Strategis
	4.3 Keterkaitan dengan Dokumen Lainnya
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
	5.1 Visi
	5.2 Misi
	5.3 Tujuan dan Sasaran
BAB VI	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VII	KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
	7.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
	7.2 Sinkronisasi Antar Dokumen Perencanaan
	7.3 Kebijakan Pembangunan Berdimensi Kewilayahan
	7.4 Kebijakan Pembangunan Lintas OPD
BAB VIII	INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB IX	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
BAB X	PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

1.5 MAKSUD DAN TUJUAN

1.5.1 MAKSUD

Penyusunan Dokumen Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang mampu memberikan rumusan strategi, arah kebijakan, program pembangunan yang lebih terarah, efektif, efisien dan terpadu serta responsif terhadap perubahan yang bergerak secara dinamis, sehingga kebijakan dan program yang direncanakan

dapat mendorong percepatan terwujudnya visi, misi dan program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Walikota dan Wakil Walikota.

1.5.2 TUJUAN

Tujuan disusunnya Perubahan RPJMD Kota sawahlunto Tahun 2013-2018 adalah untuk :

1. Menjabarkan visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota ke dalam bentuk kebijakan dan program pembangunan daerah yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan.
2. Menjadi acuan dan pedoman dalam menyusun Renstra OPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) OPD.
3. Menjadikan RPJMD sebagai dokumen rujukan resmi bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Sawahlunto dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kota, Provinsi dan APBN serta sumber dana lainnya.
4. RPJMD sebagai sarana untuk menampung aspirasi masyarakat dan membangun konsensus antar *stakeholders* untuk menentukan strategi dan prioritas pembangunan daerah.
5. Sebagai instrumen untuk mempermudah dalam mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto.
6. Membangun kebersamaan melalui bentuk kerjasama dan kemitraan pembangunan, baik antar Pemerintah Kota Sawahlunto, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota berbatasan maupun *stakeholders* lainnya (pemerintah daerah, swasta dan masyarakat).

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. KARAKTERISTIK WILAYAH

Secara astronomis Kota Sawahlunto terletak antara 0° 33' 40" – 0° 48' 33" Lintang Selatan dan 100° 41' 59" – 100° 49' 60" Bujur Timur dengan luas 27.345 Ha atau 274,45 km² atau sekitar 0,65 persen dari Luas Propinsi Sumatera Barat. Kota Sawahlunto berada pada ketinggian 250-785 m dari permukaan laut.

Secara administratif Kota Sawahlunto terdiri dari 4 Kecamatan, 10 Kelurahan dan 27 Desa. Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Silungkang dengan luas 32,93 km² sedangkan kecamatan terluas adalah Kecamatan Talawi dengan luas 99,39 km². Untuk lebih jelasnya mengenai luas wilayah administrasi Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kota Menurut Kecamatan

Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)
Kecamatan Silungkang	32,93
Kecamatan Lembah Segar	52,58
Kecamatan Barangin	88,55
Kecamatan Talawi	99,39
Jumlah	273,45

Sumber: BPS Tahun 2015

Secara Geografis Kota Sawahlunto berbatasan dengan beberapa Kabupaten, yaitu:

- Sebelah Utara : dengan Kabupaten Tanah Datar
- Sebelah Selatan : dengan Kabupaten Solok
- Sebelah Timur : dengan Kabupaten Sijunjung
- Sebelah Barat : dengan Kabupaten Solok.

2.1.2. POTENSI PENGGUNAAN LAHAN

1. Topografi dan Morfologi

Secara topografi wilayah Kota Sawahlunto terletak di perbukitan dengan ketinggian antara 250-650 meter dari permukaan laut, terbentang dari utara ke selatan. Bagian timur dan selatan memiliki topografi yang relatif curam dengan kemiringan lebih dari 40%, yang keseluruhan luasnya mencapai 28,52% dari luas wilayah kota, sedangkan bagian utara bergelombang dan relatif datar. Permukiman perkotaan hanya dijumpai di Kecamatan Talawi, Pusat Kota Lama dan sebagian wilayah Kecamatan Barangin, yang wilayahnya relatif datar dengan total luas 18% dari luas wilayah. Selengkapnya kelerengan lahan di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2 Kelerengan Lahan di Kota Sawahlunto Tahun 2015

Kecamatan	Luas Lahan Dengan Kelerengan (Ha)					Jumlah (Ha)
	0 - 2%	2 - 15%	15 - 25%	25 - 40%	> 40%	
Talawi	991	1.420	2.680	3.195	1.653	9.939
Barangin	343	1.514	1.432	3.450	2.136	8.855
Lh. Segar	240	358	694	1.836	2.110	5.258
Silungkang	29	288	735	340	1.901	3.293
Jumlah	1.603	3.580	5.541	8.821	7.800	27.345

Sumber: BPN Kota Sawahlunto

2. Geologi dan Jenis Tanah

Kota Sawahlunto terletak di atas Formasi Sawahlunto, batuan yang terbentuk pada zaman yang diberi istilah kala (epoch) Eocen sekitar 40 - 60 juta tahun yang lalu, serta berada di cekungan pra-tersier Ombilin yang berbentuk belah ketupat panjang dengan ujung bulat, selebar 22,50 km dan Panjang 47,00 km. Dalam cekungan ini diperkirakan 2,00 km, diisi oleh lapisan yang muda yang disebut dengan Formasi Brani, Formasi Sangkarewang, Formasi Sawahlunto, Formasi Sawah Tambang dan Formasi Ombilin. Formasi Ombilin merupakan lapisan paling muda menurut kategori zaman tersier atau berumur sekitar 2 juta tahun.

3. Iklim dan Meteorologi

Secara umum suhu rata-rata di Sumatera Barat tercatat antara 22°- 28°C sedangkan perbedaan antar temperatur siang dan malam antara 5°-7°C, kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi yang ada di Kota Sawahlunto berkisar antara 22°-28°C.

Peta Curah Hujan Indonesia memberikan gambaran bahwa Kota Sawahlunto berada di dalam isohyat (garis curah hujan) antara 1.500 - 2.000 mm per tahun dengan rata-rata curah hujan per tahunnya sebesar 1.716,37 mm dengan rata-rata hari hujan 130 hari. Sepanjang tahun terdapat dua musim yaitu musim hujan pada bulan November sampai Juni dan musim kemarau pada bulan Juli sampai Oktober.

4. Hidrologi dan Sumber Daya Air

Kota Sawahlunto dilalui oleh Daerah Aliran Sungai (DAS) INDRAGIRI yang terdiri dari 5 (lima) buah sungai atau batang utama yaitu:

- Batang Ombilin

Sungai Ombilin merupakan sungai terbesar yang mengalir dari utara ke selatan dari Desa Talawi Mudik ke Desa Rantih Kecamatan Talawi. Sungai ini berhulu dari Danau Singkarak dan bermuara di Batang Kuantan Riau, dengan debit sungai di daerah Sikalang-Rantih lebih dari 10 m³/detik.

- Batang Malakutan

Sungai ini mengalir dari barat yang berhulu di Desa Siberambang, Kecamatan X Koto, Kabupaten Solok ke timur melewati Desa Kolok Mudiak dan Desa Kolok Nan Tuo di Kecamatan Barangin yang akhirnya bertemu dengan Batang Ombilin.

- Batang Lunto

Sungai ini berhulu di Desa Lumindai, Kecamatan Barangin dan mengalir dari arah barat menuju timur dan membelah kota dan bermuara di Batang Ombilin.

- *Batang Sumpahan*

Sungai ini berhulu di Kubang Utara Sikabu di Kecamatan Lembah Segar kemudian bertemu dengan Batang Lunto di Kelurahan Pasar dan akhirnya bermuara di Batang Ombilin.

- *Batang Lasi*

Sungai ini berhulu di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok yang mengalir menyusuri jalan Nasional Solok ke Sijunjung di Kecamatan Silungkang, dan keluar di perbatasan Kota Sawahlunto - Sijunjung. Sungai ini kemudian bertemu juga dengan Batang Ombilin di Sungai Kuantan atau Indragiri.

5. Air Tanah

Keberadaan air tanah terbatas pada kedalaman dibawah 400 m sementara celahan batuan batu pasir penyusun Formasi Sawah Tambang dan Formasi Sawahlunto kurang mengindikasikan adanya lapisan pembawa air sehingga potensi air tanah sangat kecil. Kecilnya potensi ini menyebabkan air tanah tidak dapat diandalkan sebagai salah satu sumber air baku.

6. Mata Air

Mata air ini muncul pada lereng bukit, dimana debit kurang dari 2 lt/detik terdapat di Sikalang, yang mengalir sepanjang tahun, sumber mata air ini umumnya jernih dan digunakan sebagai salah satu sumber air bersih penduduk setempat dan PDAM. Mata air lain dijumpai ke arah tenggara Sawahlunto di Bukit Sibantar Desa Sikalang, sementara itu sumber mata air dengan debit cukup besar yaitu lebih 5 lt/detik dan mengalir sepanjang musim terdapat di Desa Balai Batu Sandaran. Mata air tersebut muncul pada kontak antara batu gamping dan lapisan tufa yang ditampung pada kolam permanen dan dialirkan melalui pipa besi sebagai salah satu sumber air bersih Kota Sawahlunto.

2.1.3. WILAYAH RAWAN BENCANA

Bencana pada umumnya dipengaruhi oleh faktor-faktor geologi, litologi, struktur geologi (patahan) kemiringan lereng, geomorfologi, air tanah dan daya dukung tanah. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa bencana alam yang sering terjadi berupa tanah longsor dan patahan (sesar).

Morfologi dan kemiringan lereng dapat menentukan potensi tingkat bahaya bencana gempa bumi dan longsor. Pertambangan batubara yang dilakukan oleh PT. Bukit Asam dan perusahaan lainnya di daerah Sawahlunto dan sekitarnya, berperan cukup besar dalam pembentukan bentang alam atau morfologi saat ini sehingga sewaktu waktu bentang alam tersebut berubah setiap saat terutama dalam kemiringan lerengnya.

a. Struktur Geologi (Patahan)

Di Sawahlunto terdapat dua buah sesar geser yaitu sesar geser Sawahlunto dan sesar geser Batu Tajam berarah barat laut - tenggara, mengikuti arah sesar besar Sumatera, jalur kedua sesar tersebut berada di daerah pebukitan sebelah barat daya jalan raya Sawahlunto-Santur.

Secara regional struktur geologi yang berkembang di cekungan Ombilin berarah barat laut-tenggara dan timur laut - barat daya, baik itu berupa sesar/patahan maupun perlipatan. Cekungan Ombilin ini terbagi menjadi dua bagian oleh sesar normal Tanjung Ampalu/sesar Pamuatan yaitu bagian timur merupakan blok yang turun (mengarah kebawah) sedangkan bagian

barat yaitu daerah Sawahlunto dan sekitarnya merupakan blok yang relatif naik.

Sesar turun Ombilin terlihat pada kontrol arah aliran Sungai Ombilin yaitu barat laut-tenggara, sedangkan sesar turun lainnya yaitu sesar Padang Malintang, sesar Batukunit, sesar Sugar, sesar Salak dan sesar Sipang berarah timur laut-barat daya.

Berdasarkan analisa struktur mikro yaitu dengan pengamatan langsung dilapangan menunjukkan adanya bidang sesar (gores garis) dan arah kekar/retakan yang dapat memberikan petunjuk arah umum dan jenis patahan. Sedangkan identifikasi adanya seretan (*drag fold*) akibat patahan dengan skala kecil, terlihat pada pemotongan tebing-tebing jalan raya propinsi, jalan raya kota dan jalan desa, serta dalam skala besar seretan pebukitan.

Beberapa sesar geser (*thrust fault*) diantaranya adalah sesar Sawahlunto merupakan sesar utama (orde pertama) yang berarah barat laut - tenggara dan sesar Sugar berarah utara selatan telah mempengaruhi pola aliran sungai Batang Lunto, sedangkan sesar Padang Malintang dan sesar Parambahan telah mempengaruhi pola aliran sungai Batang Ombilin dan anak-anak sungainya yang membentuk pola aliran sungai menangga (*trellis*).

b. *Gerakan Tanah atau Longsoran (Mass Movement).*

Longsoran bahan rombakan yang diakibatkan oleh ulah manusia terutama dalam pemotongan lereng untuk pembangunan perluasan perumahan ditemui sebagian di Kecamatan Lembah Segar dan Kecamatan Barangin.

Berdasarkan data, informasi, dan kenampakan di lapangan daerah Kota Sawahlunto dan sekitarnya kendala geologi yang dominan umumnya berupa bencana alam yang disebabkan oleh proses bersifat alami, seperti gerakan tanah, zona lemah patahan dan erosi. Lebih lanjut, kendala geologi yang berupa bahaya lingkungan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut.

Longsoran tanah tipe rayapan terjadi yang menyeret jalan Santur -Talawi atau tepatnya disekitar Washing Plant Sawah Rasau V pada km.7, terjadi pada lapisan batulempung (Formasi Sawahlunto) disebabkan karena kestabilan lereng bagian bawah terganggu oleh erosi Sungai Lurah Gadang.

c. *Gempa Bumi*

Kota Sawahlunto memiliki potensi kebencanaan yang kemungkinan akan terjadi yaitu gempa bumi, sedangkan longsoran dan bidang lemah patahan akan cenderung menjadi faktor kendala dalam pengembangan wilayah. Kegempaan di Daerah Cekungan Ombilin berdasarkan catatan episenter (pusat gempa) dengan radius 400 km dari Kota Sawahlunto dari tahun 1973 sampai tahun 1999 telah terjadi sebanyak 420 kali kejadian gempa bumi. Dari catatan gempa bumi tersebut menunjukkan bahwa daerah Sawahlunto dan sekitarnya banyak terjadi gempa bumi dangkal yang rata-rata mempunyai kedalaman 33 km, dengan intensitas antara 4,5 sampai 5,5.

Kerusakan yang ditimbulkan oleh kegempabumian, dalam banyak hal dipengaruhi oleh karakteristik tanah dan batuan setempat, di samping karakteristik guncangan (*ground shaking*) yang dihasilkan oleh suatu besaran kegempabumian (*magnitude*). Untuk memprediksi terjadinya gempa bumi di wilayah Sawahlunto secara makro didasarkan atas Peta Zonasi gempa-gempa yang bersifat merusak di Indonesia, menunjukkan posisi wilayah Ombilin atau Sawahlunto berada pada zone 3 dan 4 dengan besaran intensitas berkisar antara 0,13 - 0,25 g. Bencana alam geologi merupakan peristiwa alam dimana proses terjadinya merupakan bagian dari dinamika bumi baik itu kaitannya secara langsung yaitu berupa pergerakan

patahan/sesar maupun gempabumi, sedangkan yang tidak langsung berupa gerakan tanah/ longsoran.

2.1.4. DEMOGRAFI

Dengan luas wilayah Kota Sawahlunto sekitar 273,45 km², kepadatan penduduk Kota Sawahlunto tahun 2015 adalah sebanyak 220.10 jiwa/km². Kecamatan paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Silungkang dengan 332.43 jiwa/km², kemudian diikuti dengan Kecamatan Lembah Segar sebesar 232,59 jiwa/km², dan Kecamatan Barangin sebesar 204.40 jiwa/km². Sedangkan Kecamatan Talawi merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terendah yaitu 190.26 jiwa/km². Berikut perbandingan tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2011 sampai tahun 2015 :

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015

No	Kecamatan	Rincian	TAHUN				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Talawi	Jumlah Penduduk	17.945	18.143	18.448	18.681	18.910
		-. Laki-laki	9.017	9.117	9.267	9.403	9.554
		-. Perempuan	8.928	9.026	9.181	9.278	9.356
		Luas wilayah	99,39	99,39	99,39	99,39	99,39
		Kepadatan	180,55	182,54	185,61	187,96	190,26
2	Barangin	Jumlah Penduduk	17.174	17.377	17.681	17.918	18.099
		-. Laki-laki	8.457	8.547	8.715	8.850	8.871
		-. Perempuan	8.717	8.830	8.966	9.068	9.228
		Luas wilayah	88,55	88,55	88,55	88,55	88,55
		Kepadatan	193,95	196,24	199,67	202,34	204,40
3	Lembah Segar	Jumlah Penduduk	12.150	12.111	12.206	12.214	12.230
		-. Laki-laki	5.876	5.849	5.911	5.926	5.950
		-. Perempuan	6.274	6.262	6.295	6.288	6.280
		Luas wilayah	52,58	52,58	52,58	52,58	52,58
		Kepadatan	231,08	230,33	232,47	232,29	232,59
4	Silungkang	Jumlah Penduduk	10.298	10.437	10.298	10.795	10.947
		-. Laki-laki	5.158	5.243	5.312	5.401	5.496
		-. Perempuan	5.140	5.194	5.325	5.394	5.451
		Luas wilayah	32,93	32,93	32,93	32,93	32,93
		Kepadatan	312,72	316,95	323,02	327,82	332,43
5	Kota	Jumlah Penduduk	57.567	58.068	58.972	59.608	60.186

No	Kecamatan	Rincian	TAHUN				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
	Sawahlunto	- Laki-laki	28.508	28.756	29.205	29.580	29.871
		- Perempuan	29.059	29.312	29.767	30.028	30.315
		Luas wilayah	273,45	273,45	273,45	273,45	273,45
		Kepadatan	210,52	212,35	215,66	217,99	220,10

Sumber : BPS Kota Sawahlunto tahun 2015

Berdasarkan data diatas kecenderungan setiap kecamatan mengalami peningkatan kepadatan penduduk setiap tahunnya dengan kepadatan yang relatif masih sangat rendah. Namun jika dibandingkan dengan luas wilayah kota yang memiliki kelerengan relatif landai, maka angka kepadatan akan meningkat karena hanya 39,2% wilayah yang memiliki kelerengan dibawah 25%. Kota Sawahlunto pada tahun 2015 memiliki penduduk laki-laki 29.871 orang dan wanita 30.315 orang dengan sex ratio (SR) 98,51%, berarti jumlah penduduk wanita lebih banyak daripada laki-laki.

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1. FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI

1. Jumlah Kasus Pelanggaran Hukum yang tertangani

Kasus pelanggaran hukum yang terjadi berpengaruh pada angka kriminalitas suatu daerah. Tingginya jumlah kasus pelanggaran hukum makan tinggi pula angka kriminalitas didaerah tersebut. Tingginya angka kriminalitas ini berpengaruh terhadap iklim investasi di daerah, karena jaminan keamanan daerah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keinginan dan minat investor untuk menanamkan modalnya di daerah. Perkembangan kasus pelanggaran hukum di Kota Sawahlunto dari tahun 2011 -2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4 Jumlah Kasus Pelanggaran Hukum dari Tahun 2011-2015

No	Jumlah kasus pelanggaran Hukum	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1.	Jumlah perkara dilaporkan	1551	1386	1888	1509	576
2.	Jumlah perkara tersisa	14	24	14	61	8
3.	Jumlah perkara terselesaikan	1537	1362	1886	1503	578

Sumber: Profil Kota Sawahlunto tahun 2015

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2011 sampai tahun 2015 jumlah perkara yang dilaporkan mengalami turun naik setiap tahunnya , peningkatan terjadi pada tahun 2013 yaitu sebanyak 1.888 kasus yang dilaporkan, ini dikarenakan pada tahun 2013 merupakan masa transisi jabatan kepala daerah dan berlangsungnya proses pemilihan kepala daerah di Kota Sawahlunto. Suasana politik ini berpengaruh terhadap

masyarakat sehingga jumlah perkara yang dilaporkan seperti pidana, perdata, dan lalu lintas meningkat terutama pelanggaran lalu lintas.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang kerap digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah. Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan regional. Suatu daerah dikatakan mengalami pertumbuhan apabila terjadi peningkatan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) riil daerah tersebut. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi pada satu tahun menggambarkan bahwa pada tahun tersebut pembangunan ekonomi tumbuh dan berkembang lebih cepat dibanding tahun sebelumnya. Begitupun sebaliknya, menurunnya laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan perlambatan pembangunan ekonomi pada tahun tersebut dibanding tahun sebelumnya. Dalam rangkaian penghitungan PDRB, laju pertumbuhan ekonomi diukur dari pertumbuhan PDRB.

Tabel 2.5 Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015 (Persentase)

URAIAN	Tahun	Kota Sawahlunto	Provinsi Sumatera Barat
Pertumbuhan Ekonomi	2011	5,45	6,34
	2012	5,53	6,31
	2013	6,11	6,02
	2014	6,01	5,85
	2015	6,00	5,41

Sumber Data : BAPPEDA Kota Sawahlunto

Selama 5 tahun terakhir perekonomian Kota Sawahlunto menunjukkan pertumbuhan yang cukup menggembirakan, karena Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto berada diatas Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2011 perekonomian Kota Sawahlunto tumbuh sebesar 5,45 persen, terus mengalami peningkatan menjadi 5,53 persen pada tahun 2012, dan sebesar 6,11 persen pada tahun 2013. Meski pada 2 tahun terakhir yaitu pada tahun 2014 dan tahun 2015 mengalami perlambatan menjadi 6,01 dan 6,00 persen. Ini dikarenakan perekonomian global mengalami perlambatan

3. PDRB Perkapita

PDRB perkapita adalah nilai dari hasil pembagian PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, dalam arti bahwa semakin tinggi jumlah penduduk akan semakin kecil besaran PDRB perkapita daerah tersebut. Semakin tinggi PDRB perkapita suatu daerah, semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk. Meskipun masih terdapat keterbatasan, indikator ini sudah cukup memadai untuk mengetahui tingkat perekonomian suatu daerah dalam lingkup makro, paling tidak sebagai acuan memantau kemampuan daerah dalam menghasilkan produk domestik barang dan jasa. Nilai tambah yang bisa

diciptakan oleh penduduk Kota Sawahlunto sebagai akibat adanya aktifitas produksi menurut harga berlaku, menunjukkan trend yang positif.

Tabel 2.6 PDRB Perkapita ADHB Kota Sawahlunto dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015 (Jutaa Rupiah)

URAIAN	TAHUN	KOTA SAWAHLUNTO	PROVINSI SUMATERA BARAT
PDRB Perkapita	2011	32,91	24,06
	2012	35,99	26,29
	2013	39,3	28,99
	2014	42,66	32,13
	2015	45,27	34,41

Sumber Data : BAPPEDA Kota Sawahlunto

Berdasarkan perhitungan atas dasar harga berlaku (tahun dasar 2010) PDRB per kapita penduduk Kota Sawahlunto dalam setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, dari sebesar Rp. 32.910.000,- pada tahun 2011 menjadi Rp.42.660.000,- pada tahun 2014. Dengan perkiraan laju pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto tahun 2015 akan menacapai 6,29 persen dan total PDRB diperkirakan mencapai Rp. 2.885.730,78 (dalam jutaan), maka PDRB perkapita penduduk Kota Sawahlunto pada tahun 2015 akan mencapai sebesar Rp.45.270.000/tahun.

PDRB Perkapita Kota Sawahlunto Tahun 2015 adalah sebesar Rp.45.270.000,-. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan dengan PDRB per kapita Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 34.410.000,- pada tahun 2015. Angka ini menjadi indikator bahwa penduduk Kota Sawahlunto secara rata-rata relatif lebih baik tingkat kehidupannya dibandingkan dengan rata-rata masyarakat Sumatera Barat.

4. Angka Kemiskinan

Persentase Penduduk Miskin

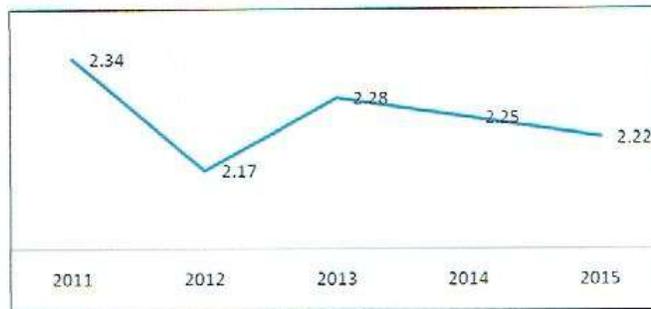
Semakin rendahnya persentase penduduk miskin menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional pada kisaran 10-11%, maka tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto sangat rendah dengan kisaran 2%-3%.

Grafik 2.1 Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin (%) Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat 2014



Sementara itu untuk persentase perkembangan penduduk miskin di kota Sawahlunto dalam kurun 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.2 Tingkat Kemiskinan Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015



Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah penggunaan satu data tunggal hasil pemutakhiran basis data terpadu (PBDT) 2015 yang proses pendataan yang melibatkan unsur pemerintah terdepan dan unsure masyarakat. Sehingga diharapkan semua stakeholders penanggung jawab penanggulangan kemiskinan dapat focus untuk bergerak bersama - sama dalam menanggulangi kemiskinan dengan satu data yang disepakati ditingkat kota.

Melihat trend angka kemiskinan di Kota Sawahlunto, angka ini terlihat sudah stagnan karena tidak mungkin suatu wilayah akan menurunkan angka kemiskinan dibawah 2 %, hal ini terkait dengan penduduk miskin yang tidak produktif seperti miskin lansia, orang cacat dan sebagainya.

Disamping itu juga akan digunakan pendekatan Pengarusutamaan Penanggulangan Kemiskinan (PPK) dalam proses perencanaan program/kegiatan. Beberapa program/kegiatan yang berpotensi memiliki sasaran Rumah Tangga Miskin akan diidentifikasi dan secara kuantitatif

ditentukan berapa alokasi dari manfaat program/kegiatan tersebut yang memiliki sasaran individu atau Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Penanggulangan Kemiskinan.

5. Indeks Pembangunan Manusia

Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat dilihat dari perkembangan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Untuk menuju titik keseimbangan mutu Sumber Daya Manusia maka seharusnya penambahan penduduk secara kuantitas harus diikuti oleh pembangunan dari sisi kualitas SDM itu sendiri. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: Umur panjang dan hidup sehat, Pengetahuan dan Standar hidup layak. Metodologi IPM telah mengalami perubahan, alasannya adalah:

1. beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Pertama, angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Angka Melek Huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik. Kedua, PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.
2. Penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain. Metode agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometric

Keuntungan IPM metode baru menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif). Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, dapat diperoleh gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

Perkembangan Angka IPM kota Sawahlunto dengan Menggunakan IPM Metode Baru dapat dilihat sebagai berikut:

**Grafik 2.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015**



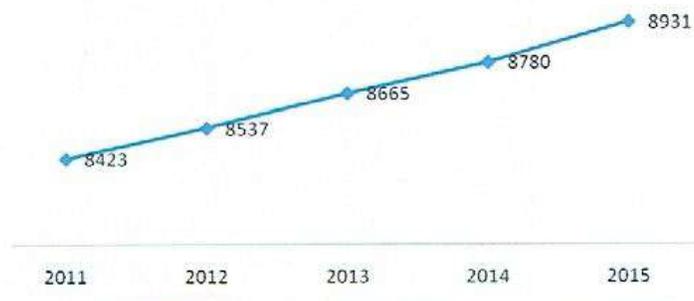
Sumber : BPS Kota Sawahlunto

Dari grafik diatas, dari tahun 2011 - 2015, seluruh variabel pokok pembentuk IPM di Sawahlunto mengalami kemajuan yang mengindikasikan semakin baiknya kualitas pembangunan manusia di Sawahlunto. Angka IPM Sawahlunto terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2011 angka IPM Sawahlunto adalah 67,97 meningkat menjadi 68.59 pada Tahun 2012, selanjutnya pada Tahun 2013 naik menjadi 69.07 pada Tahun 2013 dan 69,61 di Tahun 2014. Pada tahun 2015 IPM Kota Sawahlunto mengalami kenaikan cukup kecil dibandingkan tahun sebelumnya yaitu hanya 69.87. IPM Sawahlunto termasuk klasifikasi sedang karena berada dalam rentang 60 - 70.

6. Indeks Daya Beli

Indeks daya beli diukur dari jumlah pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan, dan selama periode 2010-2014 selalu mengalami kenaikan yang dapat dilihat dari grafik berikut:

**Grafik 2.4 Daya Beli Masyarakat Kota Sawahlunto
Tahun 2011-2015**



Sumber : BPS 2015

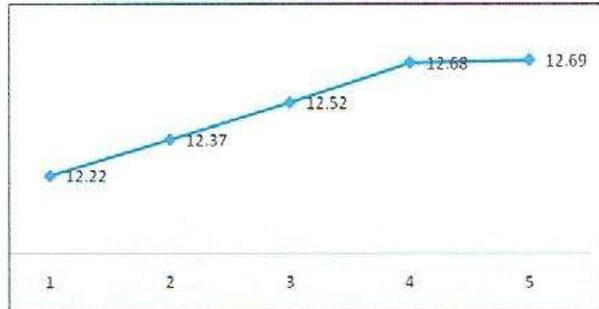
Meskipun terjadi peningkatan indeks daya beli setiap tahun namun jika dibandingkan dengan peningkatan PDRB perkapita maka indeks daya beli ini masih sangat kecil.

2.2.2 FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL

1. Angka Harapan Lama Sekolah

Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kota Sawahlunto dari tahun 2011 sampai 2015 seperti terlihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.5 Angka Harapan Lama Sekolah Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015



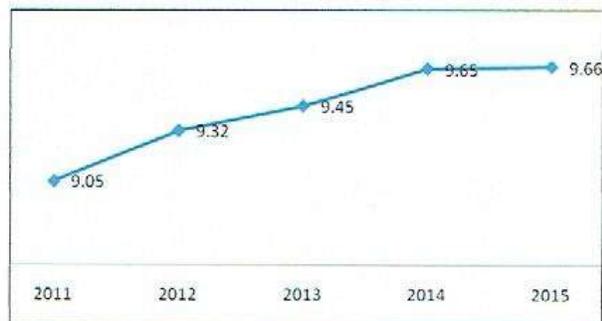
Sumber : BPS Kota Sawahlunto Tahun 2015

Dilihat dari grafik angka harapan lama sekolah dari tahun 2011-2015 mengalami peningkatan, tahun 2015 menjadi 12.69, walaupun rata-rata kenaikannya relatif masih kecil.

2. Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)

Angka Rata-rata Lama Sekolah adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk Usia 15 Tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal yang mengindikasikan makin tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat disuatu daerah. Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kota Sawahlunto tahun 2015 telah mencapai 9,66.

Grafik 2.6 Rata-rata Lama Sekolah Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015



Sumber : BPS Kota Sawahlunto Tahun 2015

3. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan berapapun usianya, terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

Jika Angka Partisipasi Kasar (APK) pada suatu jenjang pendidikan tertentu melebihi 100% berarti bahwa jumlah seluruh siswa yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu melebihi jumlah penduduk yang berusia sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut, demikian juga sebaliknya jika APK kurang dari 100%.

Jumlah siswa yang tidak sama dengan jumlah penduduk berusia sesuai dengan jenjang pendidikan ini dapat disebabkan oleh adanya siswa yang berusia kurang dari yang seharusnya atau yang berusia melebihi yang seharusnya serta pengaruh penduduk yang bersekolah di luar daerah dan siswa yang berasal dari luar daerah, serta adanya penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah.

Tabel 2.7 Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015

No	Tahun	SD/MI/ Paket A (%)	SMP/MTs/ Paket B (%)	SMA/SMK/MA/ Paket C (%)
1.	2011	98,62	106,42	76,26
2.	2012	109,68	68,11	88,35
3.	2013	107,09	91,48	98,77
4.	2014	112,98	89,13	79,76
5.	2015	110,73	86,45	95,25

Sumber: BPS Kota Sawahlunto

Dilihat dari tabel di atas pada tahun 2015 APK jenjang pendidikan SD sederajat sudah melampaui 100%, yang berarti jumlah siswa SD sederajat melebihi jumlah penduduk usia 7-12 tahun, sedangkan APK SMP sederajat sebesar 86,45% dan SMA sederajat yang hanya 95,25% menunjukkan bahwa jumlah siswa SMP sederajat dan jumlah siswa SMA sederajat lebih kecil dari jumlah penduduk usia 13-15 tahun dan jumlah penduduk usia 16-18 tahun.

4. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu. Dari tahun 2011 sampai 2015 Angka Partisipasi Murni dari tiap jenjang pendidikan mengalami naik turun tiap tahunnya. Pada tahun 2012 s/d 2014 terjadi kenaikan pada semua jenjang pendidikan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8 Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015

No	Tahun	SD/MI/ Paket A (%)	SMP/MTs/ Paket B (%)	SMA/SMK/MA/ Paket C (%)
1.	2011	89,02	68,83	64,42
2.	2012	97,52	50,77	55,36
3.	2013	92,52	68,16	79,07
4.	2014	100	85,63	76,43
5.	2015	96,39	76,43	82,47

Sumber: BPS Kota Sawahlunto

5. Jumlah Kematian Bayi

Jumlah kematian bayi adalah jumlah bayi yang meninggal sebelum berusia satu tahun.

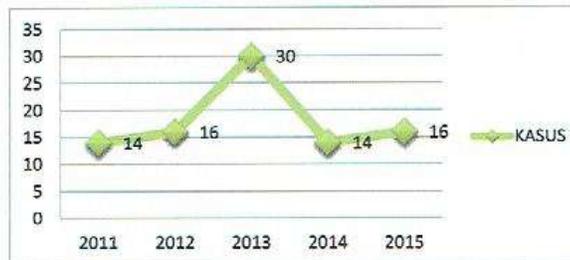
Grafik 2.7 Jumlah Angka Kematian Bayi Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015



Sumber: BPS Kota Sawahlunto

Dilihat dari grafik diatas Jumlah kematian bayi di Kota Sawahlunto mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai tahun 2015. Ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti Asphiksia (terlambat mendapatkan pertolongan serta kehamilan yang telah lewat bulan/serotinus), Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) yang disebabkan asupan gizi ibu kurang pada waktu hamil/ibu hamil anemia, Ibu yang tidak memeriksakan kehamilannya pada petugas kesehatan dan Penyakit kelainan jantung, kelainan kongenital dan aspirasi paru.

Grafik 2.8 Jumlah Kasus Kematian Bayi Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015

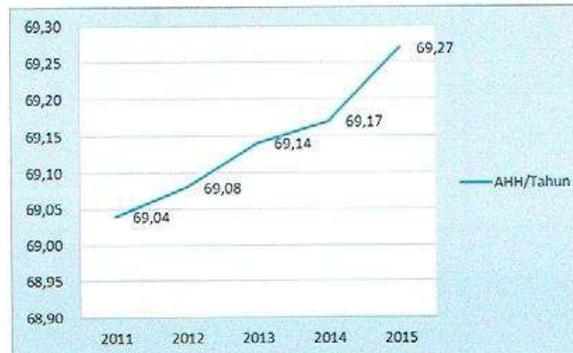


Sumber : Data Olahan Bappeda

6. Angka Usia Harapan Hidup

Angka Usia Harapan Hidup adalah angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka ini mencerminkan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang sejak lahir.

Grafik 2.9 Angka Harapan Hidup Kota Sawahlunto pada Tahun 2011-2015



Sumber : RPS 2015

Angka usia harapan hidup masyarakat Kota Sawahlunto sejak tahun 2011-2015 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini mencerminkan meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat seiring dengan membaiknya tingkat pendapatan.

2.2.3 FOKUS ADAT, SENI, BUDAYA DAN OLAH RAGA

Pembangunan seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu (i) untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Pencapaian pembangunan seni, budaya dan olahraga dapat dilihat berdasarkan indikator sebagai berikut :

1. Kebudayaan

Seni dan budaya daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan di Kota Sawahlunto, selama ini telah di kenal sebagai salah satu Kota Seni Budaya dan dewasa ini berkembang masyarakat yang heterogen dan bahkan multikultural. Faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan tersebut antara lain keterbukaan wilayah dan komunikasi bagi pendatang untuk bermukim tetap dalam wilayah Kota Sawahlunto. Kesadaran akan pentingnya peran seni dan budaya daerah dalam pembangunan muncul dikalangan masyarakat, Pemerintah Kota Sawahlunto. Hal ini terbukti dengan dicanangkannya Kota Sawahlunto sebagai Kota Wisata Tambang dan Budaya.

Pembangunan di bidang seni dan budaya sudah mengalami kemajuan dengan ditandainya peningkatan terhadap pemahaman keanekaragaman

budaya, pentingnya toleransi dan pentingnya sosialisasi penyelesaian masalah tanpa adanya kekerasan serta mulai berkembangnya interaksi budaya.

Pembangunan Kebudayaan di kota Sawahlunto ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Tantangan pembangunan di bidang kepemudaan adalah mengoptimalkan partisipasi pemuda dalam pembangunan. Sedangkan untuk budaya sejarah ditandai dengan adanya beberapa cagar budaya yang dapat dilihat pada Tabel :

Tabel 2.9 Cagar Budaya di Kawasan Kota Lama

NO	NAMA BANGUNAN	ALAMAT	KLASIFIKASI
1	Gedung Kantor Pusat PT.BA	Kel. Saringan	A
2	Mess Bujangan Saringan	Kel. Saringan	B
3	Mess Bujangan II/W-1	Kel. Saringan	B
4	Kantor Polsek Sawahlunto	Kel. Saringan	B
5	Kantor Periska	Kel. Saringan	A
6	Rumah Dinas Polsek	Kel. Pasar	B
7	Rumah Hunian Keluarga	Kel. Pasar	B
8	Rumah Hunian	Kel. Pasar	B
9	Gedung Societet	Kel. Pasar	B
10	Wisma Ombilin	Kel. Pasar	B
11	Gcdung Koperasi Ombilin	Kel. Pasar	B
12	Rumah Hunian	Kel. Pasar	A
13	Bank BRI/Eks. Pengadaian	Kel. Pasar	A
14	Gereja Katolik	Kel. Pasar	A
15	Gedung Sekolah ST, Lucia	Kel. Pasar	A
16	Asrama Susteran St. Lucia	Kel. Pasar	B
17	Bangunan Gudang Ransum	Kel. Pasar	B
18	Komplek Rumah Potong Hewan	Kel. Air Dingin	B
19	Rumah Barisan Muka	Kel. Air Dingin	C
20	Rumah Sakit Umum Daerah	Kel. Aur Mulyo	B
21	Rumah Dinas Dokter RSUD	Kel. Aur Mulyo	B
22	Rumah Dinas Kepala DKK	Kel. Aur Mulyo	B
23	Rumah Dinas Peg. Pengadilan Negeri	Kel. Aur Mulyo	B
24	Rumah Dinas Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto	Kel. Aur Mulyo	B
25	Rumah Kejaksaan Negeri	Kel. Kubang Sirakuak Utara	B
26	Rumah Dinas Walikota	Kel. Kubang Sirakuak Utara	B
27	Rumah Hunian	Kel. Kubang Sirakuak Utara	C
28	Mesjid Agung	Kel. Kubang Sirakuak Utara	A
29	Bunker dibawah Mesjid Agung	Kel. Kubang Sirakuak Utara	B
30	Rumah Dinas Kejaksaan	Kel. Kubang Sirakuak Utara	B
31	Rumah Karyawan PJKA	Kel. Kubang Sirakuak Utara	C
32	Rumah Hunian Keluarga	Kel. Sungai Durian	C
33	Rumah Hunian Keluarga	Kel. Sungai Durian	C
34	Mess Canada	Kel. Lubang Panjang	C
35	Mess Australia	Kel. Lubang Panjang	C
36	Rumah Hunian Keluarga	Kel. Lubang Panjang	C

NO	NAMA BANGUNAN	ALAMAT	KLASIFIKASI
37	Kantor Satpol PP/ Gedung 100 Jendela	Kel. Lubang Panjang	B
38	Mesjid Nurul Huda	Kel. Durian I	B
39	Rumah Tinggi	Desa Sikalang	C
40	PLTU Salak	Desa Salak	C
41	Bangunan Asrama Salak	Desa Salak	B
42	Poliklinik Tugu Mandiri	Desa Salak	C
43	Rumah Tabuah Silungkang	Silungkang Tigo	C
44	Tugu Perjuangan Silungkang	Silungkang Tigo	C
45	Rumah Hunian Keluarga	Desa Salak	C
46	Rumah Adat Kolok	Desa Kolok	B
47	Stasiun KA Silungkang	Silungkang Tigo	B
48	Rumah Gadang Talawi	Desa Talawi Hilir	B
49	Rumah Hunian	Kel. Aur Mulyo	B
50	Stasiun KA Kota Sawahlunto	Kel. Pasar	B
51	Situs Makam Belanda	Kel. Lubang Panjang	B
52	Situs Makam Syec Kolok	Desa Sijantang	B
53	SSitus Makam Syec Tumpok	Desa Talawi Mudik	C
54	Rumah Hunian W-30	Kel. Saringan	C
55	Rumah Hunian W-29	Kel. Saringan	C
56	Rumah Hunian W-28	Kel. Saringan	C
57	Rumah Hunian W-27	Kel. Saringan	C
58	Rumah Hunian A	Kel. Saringan	B
59	Rumah Hunian Absetter	Kel. Saringan	B
60	Sizing Plan	Kel. Saringan	A
61	Bengkel Utama	Kel. Saringan	A
62	Saringan Tua	Kel. Saringan	B
63	Terowongan KA Kalaban/Lubang Kalam	Desa Muaro Kalaban	A
64	Lubang/ Terowongan Saringan	Kel. Saringan	B
65	Jembatan Kuto Silungkang	Silungkang Tigo	C
66	Makam Keramat Silungkang	Silungkang Tigo	B
67	Stasiun KA Muaro Kalaban	Desa Muaro Kalaban	B
68	Lubang Transpor Cemara	Kel. Lubang Panjang	B

Perkembangan seni dan budaya Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel 2.10

Tabel 2.10 Perkembangan Seni dan Budaya di Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah grup Kesenian	35	35	35	35	35
2.	Jumlah Gedung Kesenian	10	10	10	10	10

Sumber : Profil Kota Sawahlunto 2015

Pemerintah kota sawahlunto telah melakukan berbagai upaya untuk pengembangan nilai budaya dan pengelolaan keragaman budaya melalui :

a. Pegelaran berupa :

1. Musisi kreatif Sawahlunto
2. Orgen Tunggal
3. Shalawat Dulang
4. Campur Sari Tambo Ati
5. Tumerco Band
6. Paguyuban Ki Sapu Jagad
7. Salawat Dulang Gebu Minang dan KAP
8. Musisi Kualo Sawahlunto
9. Salawat Dulang dan Group Kualo
10. Group Randai Minang Saiyo dan Rabab
11. Galang maimbau, mutiara minang, kom kualo
12. campur sari irama masa, salawat gebu minang, komunitas kualo
13. Keroncong OK Lapseg
14. Sanggar parmato hitam, keroncong OK Lapseg
15. Band KUALI, Salawat dulang bintang setia
16. Salawat dulang badai sunami, Rabab karang taruna silungkang
17. KIM, Komunitas KUALI
18. Sanggar parmato hitam
19. Keroncong Lapaloma
20. Sanggar parmato hitam
21. Rabab karang taruna silungkang, tumerco band
22. Langitakuistik
23. Komunitas KUALI
24. KIM
25. Group Kompatitif Padang Panjang
26. Kuda Kepang Harapan Jaya
27. Sanggar Permato Hitam
28. Randai SDN 10 Taratak Bancah
29. Saluang Tunas Harapan, Komiditas Kualo
30. KIM
31. Kuda Kepang Harapan Jaya, Gambus Al ikhwan
32. Kuda Kepang Kalimohusodo, Tumerco band, Sanggar Galang Mahimbau
33. Rabab Karang Taruna Silungkang
34. Kuda Kepang Sapu Jagad, Kuda Kepang Bina Satria
35. Randai dan Saluang
36. Teater Kualo
37. Isi Padang Panjang
38. Salawat Dulang dan Orgen
39. Band Kualo
40. Band Pillow, Rabab Silungkang, Salawat Dulang Mutiara Minang
41. Gamaik Pusako Sawahlunto
42. Paguyuban Batak
43. Band Tumerco Junior
44. Festifal Wayang
45. Group Susandra Jaya
46. Salawat Dulang Intan Biduri, Ringgo Musik
47. Gamaik Pusako Sawahlunto
48. Ringgo Musik
49. Kuda Kepang Sapu Jagad, Salawat Dulang Gajah Mada, Orkes Gambus Karisma, Rabana Al. Khwatib, Tunas Harapan Taratak Bancah
50. Kelompok Pemusik Padang Panjang Kreatif
51. Band Kualo Kota Sawahlunto
52. Teater Kualo Kota Sawahlunto
53. Band Kualo Kota Sawahlunto dan Mak Lepai

b. Pagelaran di luar daerah berupa pelaksanaan lomba :

NO	ACARA	PENYAJI	TEMPAT
1	Jambore Kader Tingkat Provinsi	Kota Arang Perkusi	INS Kayu Tanam, Padang Pariaman
2	Pawai Budaya Muskomwil APEKSI I	B & G Entertainment	GOR Agus Salim, Padang
3	Minangkabau Fashion Week	Ikatan Uda Uni Kota SWL	Auditorium Gubernur Sumbar
4	Festival Randai Kreasi Remaja	SMKN 2 SWL	Auditorium Gubernur Sumbar
5	Festival Selawat Dulang	Selawat Dulang Gajah Mada	Taman Budaya Provinsi Sumbar
6	Pawai Budaya Yogyakarta	Ikatan Uda Uni Kota Sawahlunto	Yogyakarta
7	Pesta Budaya Tabuik Pariaman	Malakutan Bunian, Kolok	Kota Pariaman
8	Festival paket Seni Tradisi	Tunas Harapan Tak Boncah	Taman Budaya Provinsi Sumbar
9	Pagelaran seni/Art Performance	Sanggar Badantiang Canang	Propinsi Jambi
10	Musda V ASITA	Dendang KIM Ompit	Bumi Minang Hotel, Padang
11	Inacraft	Sanggar Badantiang Canang	Jakarta Convention Center
12	Festival Akustik	Kota Arang Perkusi	Pelataran Jam Gadang Bukittinggi

Grup kesenian juga masih sama antara lain 35 grup kesenian dan 10 gedung kesenian.

2. Olahraga

Pembangunan di bidang olahraga berkaitan erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Oleh karena itu, kesediaan sarana dan prasarana olahraga yang layak dan memadai menjadi salah satu perhatian penting pemerintah. Perkembangan minat dalam bidang olahraga di Kota Sawahlunto cukup tinggi, hal ini di buktikan dengan prestasi Kota Sawahlunto di event - event daerah, propinsi dan nasional. Fokus pembinaan olahraga dilakukan pada olahraga yang sering diperlombakan, baik pada kelompok masyarakat maupun pelajar. Olahraga di masyarakat diwujudkan dalam bentuk klub - klub olahraga. Kondisi sarana dan prasarana terus ditingkatkan. Dalam berolahraga, selain dengan memanfaatkan gedung olahraga yang ada, masyarakat juga melakukan aktifitas olahraga di luar gedung seperti jalan sehat, bersepeda, senam bersama dan lain sebagainya. Tantangan pembangunan di bidang olahraga adalah perlunya pembinaan keolahragaan yang komperensif dan berkesinambungan agar seluruh potensi olahraga dapat dikembangkan secara baik, penguatan peran dan tanggung jawab masyarakat beserta pemangku pembangunan.

Perkembangan klub dan gedung olahraga dari Tahun 2010 s/d 2014 dilihat pada table 2.11

Tabel 2.11 Perkembangan Klub dan Gedung Olahraga di Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Jumlah Klub Olahraga per penduduk 59.608	91	67	67	67	70

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
2.	Jumlah Gedung Olahraga per 59.608 penduduk	11	11	11	11	11

Sumber : Profil Kota Sawahlunto 2015

Dilihat dari tabel diatas ternyata untuk klub olahraga pada tahun 2014 bertambah dibandingkan tahun sebelumnya dari 67 klub menjadi 70 klub, sedangkan untuk gedung olahraga yang ada di Kota Sawahlunto masih sama dari tahun 2011-2015 yaitu 11 gedung olahraga. Perubahan jumlah klub olahraga ini karena hanya klub yang benar-benar memiliki kepengurusan yang aktif yang dilaporkan, sedangkan yang tidak aktif tidak lagi dilaporkan.

2.2.4 FOKUS PENGAMALAN AJARAN AGAMA

Penduduk Kota Sawahlunto memiliki keberagaman multietnis dengan beberapa agama yang dianut, dan pembangunan disektor agama didorong untuk menciptakan kondisi terbaik dalam pengamalan nilai-nilai agama dilingkungan komunitas rancangan terkecil yaitu keluarga dan tidak terlepas dari perkembangan lingkungan. Komposisi penduduk menurut agama yang dianutnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12 Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015

No	Agama	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Islam	55.817	57.778	58.649	59.226	61.849
2.	Khatolik	152	133	119	122	167
3.	Protestan	192	157	214	260	137
4.	Hindu	-	-	-	-	-
5.	Budha	-	-	-	-	-
6.	Konghucu	-	-	-	-	-
	TOTAL	57.806	58.068	58.972	59.608	62.153

Sumber : Data Profil Kota Sawahlunto Tahun 2015

Pemeluk agama Islam dari tahun 2011 sebanyak 57.806 orang, selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga pada tahun 2015 menjadi 62.153 orang, hal ini disebabkan oleh pertumbuhan secara alami penduduk yang mayoritas Islam. Penganut agama Katolik dan Protestan mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2015 menjadi 167 dan 137 di tahun 2015.

1. Jumlah Penyuluh Agama dan Mubaligh

Selain tempat pendidikan agama, peranan mubaligh dan penyuluh agama sangat berpengaruh terhadap pengamalan ajaran agama bagi masyarakat, di mana perkembangan jumlah mubaligh dan penyuluh agama dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.13 Jumlah Mubaligh dan Penyuluh Agama di Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Mubaligh	141	141	162	162	162
2.	Jumlah Penyuluh Agama	103	103	107	106	104

Sumber: Data Profil Kota Sawahlunto 2015

Jumlah mubaligh selalu mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai tahun 2015. Pada tahun 2015 menjadi 162 mubaligh. Jumlah penyuluh agama

mengalami perubahan setiap tahunnya dari tahun tahun 2012 tetap sebanyak 103 orang, namun pada tahun 2013 meningkat menjadi 107 orang dan turun menjadi 104 orang di tahun 2015.

2. Jumlah Tempat Ibadah

Agama mayoritas penduduk Kota Sawahlunto adalah Agama Islam, agama lain yang dianut sebagian penduduk Kota Sawahlunto adalah Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Perkembangan kehidupan beragama sangat ditentukan oleh pemahaman dan pengamalan ajaran agama oleh penganutnya serta tidak terlepas dari keberadaan sarana ibadah sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.14
Jumlah Tempat Ibadah Di Kota Sawahlunto
Tahun 2011 - 2015

No	Tempat Ibadah	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Mesjid	46	48	48	48	48
2.	Mushalla/Langgar	203	203	220	342	342
3.	Gereja	2	2	2	2	2

Sumber: Data Profil Kota Sawahlunto 2015

Dilihat dari jumlah tempat ibadah di Kota Sawahlunto, untuk agama yang mayoritas yaitu Islam, mesjid bertambah 2 dari tahun 2011 menjadi 48 di tahun 2013 demikian juga mushalla/langgar yang sempat bertambah di tahun 2014 sebanyak 342 dan tidak berubah/tetap di tahun 2015, sedangkan gereja tidak mengalami perubahan.

3. Tempat Pendidikan Agama

Agama Islam mempunyai tempat pendidikan agama Islam untuk meningkatkan pengetahuan tentang agama Islam itu sendiri, di Kota Sawahlunto ada beberapa tempat pendidikan agama sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.15 Jumlah Tempat Pendidikan Agama Islam
di Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015

No	Tempat Pendidikan Agama	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	TPQ	158	172	177	177	177
2.	TPSQ	9	9	9	9	9
3.	MDA	15	15	15	13	13
4.	Pondok Taman Al-quran	4	4	4	4	4
5.	Pondok Pesantren	2	2	2	2	2

Sumber : Data Profil Kota Sawahlunto Tahun 2015

Taman Pendidikan Quran (TPQ) dari tahun 2011 yang jumlahnya hanya 158 meningkat menjadi 177 sampai tahun 2015, hanya saja MDA di Kota Sawahlunto mengalami pengurangan menjadi 13 MDA.

2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1 LAYANAN URUSAN WAJIB

1. Urusan Wajib Pendidikan

Sektor pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan tingkat kualitas Sumber Daya Manusia yang diharapkan yaitu, yang mampu melakukan inovasi, kreasi serta memiliki karakter dan budi pekerti.

a. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah ini memperlihatkan seberapa besar anak usia sekolah menurut tingkat pendidikan tertentu berada dalam lingkup pendidikan dan penyerapan dunia pendidikan formal terhadap penduduk usia sekolah. APS digunakan untuk mengetahui cakupan pelayanan pendidikan untuk setiap kelompok usia sekolah dan menggambarkan jumlah anak kelompok usia tertentu yang sedang sekolah tanpa membedakan jenjang pendidikan yang ditempuh. APS anak usia 7-12 tahun adalah persentase anak usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah ditingkat SD dan MI serta yang telah bersekolah di SLTP dan MTS dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun dikalikan 100 persen. Penurunan dan kenaikan nilai APS sangat dipengaruhi oleh banyaknya jumlah murid usia sekolah. Pada tabel berikut dapat dilihat Perkembangan APS Kota Sawahlunto berdasarkan jenjang pendidikan dari tahun 2011-2015:

Tabel 2.16 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Sawahlunto Tahun 2012-2015

No	Tahun	Kelompok Umur		
		7 - 12 tahun	13 - 15 tahun	16 - 18 tahun
1.	2011	98,96	94,62	77,17
2.	2012	99,52	89,62	70,54
3.	2013	99,80	94,97	68,49
4.	2014	100,00	99,58	83,45
5.	2015	100	93	88,84

Sumber: BPS Tahun 2015

Dilihat dari perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kota Sawahlunto dari tahun 2011 - 2015, secara umum telah mengalami peningkatan, terutama pada tahun 2015 meningkat pesat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada umur 7 - 12 tahun sudah mencapai 100% artinya penduduk usia 7-12 tahun semuanya sudah berada disekolah, dan pada usia 13-15 tahun sudah mencapai 93% di tahun 2015, sedangkan usia 16-18 tahun baru mencapai 88,84% artinya ada 11,16% penduduk usia 16-18 tahun tidak berada dijenjang pendidikan formal.

b. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk usia sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah berdasarkan tingkat pendidikan per jumlah penduduk usia pendidikan. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan.

Tabel 2.17 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015

NO	JENJANG PENDIDIKAN	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI					
1.1	Jumlah Sekolah	65	65	65	65	59
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12	7087	7160	7847	7491	7.305
1.3	Perbandingan Jumlah Sekolah Dengan Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12	1:109,03	1:110,15	1:120,72	1:115,25	1:123,81
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah Sekolah	13	14	14	14	11

NO	JENJANG PENDIDIKAN	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15	3223	3190	3430	3760	3809
2.3	Perbandingan Jumlah Sekolah Dengan Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15	1:247,92	1:227,86	1:245	1:268,57	1:346,27
3	SMA/MA/SMK					
3.1	Jumlah Sekolah	9	9	9	10	4
3.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 16-18	2836	2750	3491	3489	3403
3.3	Perbandingan Jumlah Sekolah Dengan Jumlah Penduduk Kelompok Usia 16-18	1:315,1	1:305,5	1:387,88	1:348,90	1:850,75

Sumber : Profil Tahun 2015

Dari tabel diatas dapat di jelaskan bahwa tahun 2015 rasio ketersediaan sekolah pada tingkat SD, SLTP dan SLTA mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan pertumbuhan penduduk kelompok usia tidak disertai dengan peningkatan jumlah sekolah.

c. Rasio Guru dan Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan per jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Tabel 2.18 Rasio Jumlah Guru Terhadap Jumlah Murid Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	TK					
1.1	Jumlah Guru	203	195	142	161	186
1.2	Jumlah Murid	1241	1231	1295	1585	1537
1.3	Perbandingan Jumlah Guru Terhadap Jumlah Murid	1:6,11	1:6,31	1:9,11	1:9,84	1:8,26
2	SD/MI					
2.1	Jumlah Guru	627	751	691	672	611
2.2	Jumlah Murid	7668	7951	7661	7386	7036
3.3	Perbandingan Jumlah Guru Terhadap Jumlah Murid	1:12,2	1:10,59	1:11,08	1:10,99	1:11,5
3	SMP/MTs					
3.1	Jumlah Guru	319	280	378	341	350
3.2	Jumlah Murid	2517	2045	2834	2790	2482
3.3	Perbandingan Jumlah Guru Terhadap Jumlah Murid	1:7,89	1:7,30	1:7,49	1:8,18	1:7,09
4	SMA/SMK/MA					
4.1	Jumlah Guru	363	364	356	364	301
	Jumlah Murid	2511	1288	2614	2658	2602
	Perbandingan Jumlah Guru Terhadap Jumlah Murid	1:6,92	1:7,22	1:7,34	1:7,30	1:8,64

Sumber : Profil Kota Sawahlunto Tahun 2015

Selama kurun waktu 2011 – 2015 rasio ketersediaan guru di Kota Sawahlunto mengalami peningkatan untuk setiap jenjang pendidikan. Pada

tahun 2015 kondisi ketersediaan guru terhadap murid untuk jenjang pendidikan TK adalah untuk 1 guru melayani 8,26 murid TK, untuk tingkat SD/MI 1 guru melayani 11,51 murid SD/MI, untuk SMP 1 guru melayani 7,09 murid SMP/MTs, untuk SMU 1 guru melayani 8,64 murid SMU.

d. Rasio Murid Dan Kelas

Rasio Murid dan kelas sangat penting untuk menentukan ketersediaan kelas terhadap murid yang ada. Pada tabel berikut dapat dilihat perkembangan rasio murid terhadap kelas di Kota Sawahlunto.

Tabel 2.19 Rasio Jumlah Murid terhadap Jumlah Kelas Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	TK					
1.1	Jumlah Murid	1241	1231	1295	1585	1537
1.2	Jumlah Kelas	69	67	73	73	104
1.3	Perbandingan Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas	17,98:1	18,37:1	17,73:1	21,71:1	1:14,77
2	SD/MI					
2.1	Jumlah Murid	7668	7951	7661	7386	7036
2.2	Jumlah Kelas	411	435	362	363	376
2.3	Perbandingan Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas	18,65:1	18,28:1	21,16:1	20,35:1	1:18,71
3	SMP/MTs					
3.1	Jumlah Murid	2517	2045	2834	2790	2482
3.2	Jumlah Kelas	106	90	113	116	107
3.3	Perbandingan Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas	23,74:1	22,72:1	25,07:1	24,47:1	1:23,19
4	SMA/SMK/MA					
4.1	Jumlah Murid	2511	2628	2614	2658	2602
4.2	Jumlah Kelas	89	106	95	111	103
4.3	Perbandingan Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas	28,21:1	24,79:1	27,51:1	23,94:1	1:25,26

Sumber : Profil Kota Sawahlunto Tahun 2015

Dilihat dari tabel diatas dari tahun 2011 sampai 2015 Kota Sawahlunto mengalami peningkatan jumlah murid disetiap jenjang pendidikannya. Tahun 2015, pada jenjang pendidikan TK 1 kelas mempunyai 14,77 murid, SD 1 kelas dengan 18,71 murid, SMP 1 kelas dengan 23,19 murid, SMU 1 kelas dengan 25,26.

e. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Hal ini sering digunakan sebagai salah satu indikator berhasil atau tidaknya pembangunan dibidang pendidikan.

Tabel 2.20 Angka Putus Sekolah Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015

NO	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI					
1.1	Jumlah Putus Sekolah	18	8	5	0	0
1.2	Jumlah Murid	7.216	7.668	7.023	7.661	7.386

NO	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.3	Angka Putus sekolah (%)	0,249	0,104	0,071	0	0
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah Putus Sekolah	17	40	47	4	32
2.2	Jumlah Murid	2.517	2.260	2.617	2.834	2.790
2.3	Angka Putus sekolah (%)	0,675	1,769	1,795	0,141	0,44
3	SMA/MA/SMK					
3.1	Jumlah Putus Sekolah	0	14	19	19	49
3.2	Jumlah Murid	2.486	2.511	2.628	2.614	2.658
3.3	Angka Putus Sekolah (%)	0	0,557	0,860	0,726	1,85

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto

untuk tingkat sd/mi angka putus sekolah mengalami penurunan dari tahun 2011-2015 dan tingkat smp/mts juga mengalami penurunan untuk tahun 2015, ini dapat disebabkan sudah pahamnya masyarakat akan pentingnya pendidikan. tingkat sma/ma/smk angka putus sekolah naik dari tahun sebelumnya, ini bisa disebabkan karena banyaknya yang memilih bekerja daripada sekolah dan merasa cukup dengan pendidikan yang sudah ada dan tingginya biaya pendidikan sehingga tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan.

f. Angka Kelulusan Siswa

Angka kelulusan siswa pada berbagai jenjang pendidikan setiap tahun mencerminkan kemampuan dan penguasaan siswa atas materi pelajaran yang disampaikan serta kemampuan dalam menghadapi evaluasi belajar. Angka kelulusan siswa perjenjang pendidikan di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.21 Angka Kelulusan Siswa Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	SD					
	Ikut Ujian	969	1012	1076	1076	1088
	Lulus Ujian	969	1012	1076	1076	1088
	Persentase (%)	100	100	100	100	100
2.	MT					
	Ikut Ujian	49	49	61	60	51
	Lulus Ujian	49	49	61	60	51
	Persentase (%)	100	100	100	100	100
3.	SMP					
	Ikut Ujian	824	608	753	751	780
	Lulus Ujian	798	572	745	749	779
	Persentase (%)	96,84	94,07	98,93	99,73	99,90
4.	MTs					
	Ikut Ujian	115	114	81	81	123
	Lulus Ujian	105	111	81	81	122
	Persentase (%)	91,30	97,36	100	100	99,90
5.	SMA					
	Ikut Ujian	340	279	370	370	375
	Lulus Ujian	335	279	370	370	374
	Persentase (%)	98,53	100	100	100	99,90
6.	MA					
	Ikut Ujian	48	47	35	35	400
	Lulus Ujian	48	43	35	35	400

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
	Persentase (%)	100	91,48	100	100	100
7.	SMK					
	Ikut Ujian	356	338	408	406	53
	Lulus Ujian	356	336	408	404	53
	Persentase (%)	100	99	100	99,51	100

Sumber: Profil Kota Sawahlunto Tahun 2015

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2011 sampai 2015 tingkat SD/MI di Kota Sawahlunto kelulusan siswa sudah mencapai 100%. Tingkat SLTP kelulusan siswa tahun 2015 naik dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 99,90n% untuk tingkat SMP sedangkan untuk tingkat MTs mengalami penurunan sebesar 99.90. Tingkat SLTA kelulusan siswa untuk SMA mengalami penurunan menjadi 99,90% sedangkan untuk MA 3 tahun berturut turut mencapai kelulusan sebesar 100% dan untuk SMK mengalami kenaikan kelulusan dari tahun sebelumnya mencapai 100%. Secara umum kelulusan siswa di setiap jenjang pendidikan di Kota Sawahlunto sangat baik sekali mendekati 100%, hanya saja tingkat SMP perlu menjadi perhatian karena angkanya tidak pernah mencapai 100% dalam kurun waktu 2011-2015, tetapi untuk tahun 2015 sudah sangat baik karena telah mencapai 99,73%.

2. Urusan Wajib Kesehatan

a. Rumah Sakit

Rumah Sakit Sawahlunto merupakan rumah sakit tipe C yang mempunyai tenaga dokter spesialis yang tetap sebanyak 9 orang, yaitu, kebidanan, penyakit dalam, bedah umum, mata, patologi klinik, anak, kulit dan kelamin serta anastesi, sedangkan reveral meliputi dokter spesialis syaraf dan spesialis telinga hidung dan tenggorokan. Dokter umum 8 orang serta dokter gigi 7 orang diperkuat oleh tenaga paramedis 124 orang, tenaga penunjang 84 orang dan tenaga administrasi 50 orang.

b. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per satuan balita

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk bersama masyarakat, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat, dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

**Tabel 2.22 Jumlah Posyandu dan Balita
Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015**

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Posyandu	97	98	99	100	102
2.	Jumlah Balita	5.965	5.969	5.989	6.147	6.230
3.	Rasio Posyandu/ jumlah balita	1 : 61,49	1 : 61,91	1 : 61.98	1 : 62,09	1 : 62.12

Sumber : Profil Kota Sawahlunto tahun 2015

Jumlah posyandu pada tahun 2011 – 2015 mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah balita. Dilihat dari rasio posyandu dan balita mengalami peningkatan pada tahun 2011 dan 2012 yaitu 1 : 61,91, ini berarti bahwa setiap posyandu pada tahun 2011 dan 2012 rata-rata melayani 61 sampai 62 balita. Pada tahun 2012 rasio posyandu

terhadap balita 1 : 60,91, ini berarti bahwa rata-rata setiap posyandu yang ada pada tahun 2015 dapat melayani sebanyak 60 sampai 61 balita.

c. Rasio Puskesmas, Praktik Dokter dan Puskesmas Pembantu (Pustu) per satuan Penduduk

Puskesmas, Praktek Dokter dan Pustu merupakan salah satu penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, semakin banyak jumlah ketersediaannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan.

Tabel 2.23 Rasio Puskesmas, Praktik Dokter dan Pustu Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Puskesmas	6	6	6	6	6
2.	Jumlah Praktek Dokter	13	16	29	29	29
3.	Jumlah Pustu	25	25	23	23	23
	Jumlah Total Puskesmas, Praktek Dokter dan Pustu	44	45	58	58	58
4.	Jumlah Penduduk	57.567	58.068	58.571	59.608	65.235
	Rasio Puskesmas persatuan penduduk	1 : 9.595	1 : 9.678	1 : 9.762	1 : 9.935	1 : 10.038
	Rasio Praktek Dokter persatuan penduduk	1 : 4.428	1 : 1.3629	1 : 1.2020	1 : 2.055	1 : 2.425
	Rasio Pustu persatuan penduduk	1 : 2.303	1 : 2.525	1 : 2.547	1 : 2.592	1 : 2.870
	Rasio Puskesmas, Praktek Dokter dan Pustu persatuan penduduk	1 : 1.308	1 : 1.290	1 : 1.010	1 : 1.028	1 : 1,040
5.	Jumlah Kecamatan	4	4	4	4	4
6	Jumlah Desa/Kelurahan	37	37	37	37	37

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka 2015

Rasio Puskesmas, Praktek Dokter dan Pustu terhadap jumlah penduduk di Kota Sawahlunto pada tahun 2015 mencapai 1 : 1.290,40, ini artinya bahwa 1 puskesmas/praktek dokter/pustu harus melayani jumlah penduduk sebanyak 1.291 jiwa. Adapun rasio Puskesmas terhadap jumlah kecamatan mencapai 3 : 2, ini artinya bahwa dalam dua kecamatan terdapat 3 unit puskesmas.

Jumlah penduduk yang harus dilayani Puskesmas/Praktek Dokter/Pustu tahun 2015 lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya, karena berkurangnya jumlah praktek dokter. Pada tahun 2014 setiap satu Puskesmas/Praktek Dokter/Pustu harus melayani 844 penduduk, pada tahun 2015 harus melayani 813 penduduk, tahun 2015 harus melayani 836 penduduk dan untuk tahun 2015 harus melayani 1.308 penduduk. Berkurangnya praktek dokter tidak terlepas dari semakin meningkatnya kualitas dan fasilitas pelayanan yang ada pada Puskesmas/Pustu serta RSU dan bertambahnya jumlah penduduk yang tercover jaminan pemeliharaan kesehatan.

3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Aspek pelayanan umum terkait dengan bidang Pekerjaan Umum terdiri dari Sarana Prasarana Kota dan Infrastruktur Kebinamargaan, Keciptakarya dan Sumber Daya Air seperti uraian berikut :

a. Jaringan Jalan

Jaringan jalan yang baik, memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi social budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal masyarakat dalam menjalani roda perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai.

Berikut secara lengkap disajikan data mengenai panjang jaringan jalan Kota Sawahlunto berdasarkan kondisi selama kurun waktu 2011-2015.

Tabel 2.24 Kondisi dan Panjang Jalan Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015

NO	URAIAN	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Kondisi Baik (Km)	288,48	291,27	306,12	302,82	324,15
2	Kondisi Sedang (Km)	89,37	88,82	94,98	89,09	84,99
3	Kondisi Rusak Sedang (Km)	34,65	33,45	33,45	29,35	30,35
4	Kondisi rusak berat (Km)	27,79	26,75	26,75	19,03	15,03
5	Jalan Kota secara keseluruhan (Km)	440,29	440,29	440,29	440,29	454,52
6	Proporsi kondisi baik (%)	65,52	66,15	69,52	68,78	71,32
7	Proporsi Kondisi rusak ringan (%)	20,30	20,17	21,57	20,23	18,70
8	Proporsi Kondisi Rusak Sedang (%)	7,87	7,60	7,50	6,67	6,67
9	Proporsi Kondisi rusak berat (%)	6,31	6,08	6,08	4,32	3,31

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka 2015

Jaringan jalan berdasarkan kondisi dapat dikategorikan dengan jalan kondisi baik, rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Proporsi kondisi jalan baik di Kota Sawahlunto pada tahun 2012 mencapai 66,15% pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 66,72%, demikian halnya dengan proporsi kondisi jalan rusak berat mengalami penurunan yaitu dari 6,08% pada tahun 2012 menjadi 5,51% pada tahun 2015.

b. Jembatan

Jembatan merupakan salah satu infrastruktur yang sangat penting dalam memperlancar sistem transportasi. Di Kota Sawahlunto terdapat 41 buah jembatan sampai tahun 2015 yang tersebar di empat kecamatan dengan total panjang 740 M. Berikut jumlah dan sebaran jembatan tahun 2014 - 2015 sebagai berikut:

Tabel 2.25 Jumlah dan Panjang Jembatan per Kecamatan Tahun 2014-2015

No	Kecamatan	Tahun 2014		Tahun 2015	
		Jumlah (unit)	Panjang (M)	Jumlah (unit)	Panjang (M)
1	Silungkang	5	141	6	111
2	Lembah Segar	6	66	7	79
3	Barangin	19	276	20	291
4	Talawi	8	233	10	259
	Jumlah	38	716	43	740

Sumber: Dinas PU Tahun 2015

Pada tahun 2017 mendatang akan dibangun 7 (tujuh) unit jembatan dengan totla panjang hampir 100 M, diantaranya jembatan tompok simotung, jembatan SMA/SDI, jembatan TPU air dingin, jembatan sawah ambacang. Jembatan yang akan dibangun ini umumnya berada pada jalan lokal pedesaan untuk mendukung kelancaran hasil transportasi hasil pertanian dan fasilitas sosial lainnya.

c. Sungai

Potensi sumber daya air sungai yang ada di Kota Sawahlunto terdiri dari sungai Batang Ombilin, Batang Lasi, Batang Lunto, Batang Malakutan dan Batang Sumpahan disamping sungai-sungai kecil lainnya yang tersebar di beberapa wilayah desa. Berikut ini data sebaran sungai, kapasitas debit, fungsi manfaat dan lokasi wilayah aliran seperti tabel berikut;

Tabel 2.26 Data Sebaran Sungai Kota Sawahlunto

No	Nama Sungai	Lokasi Wilayah Sungai	Kapasitas Debit	Fungsi Manfaat
1	2	3	4	5
1.	Batang Ombilin	Talawi Hilir, Talawi Mudik, Sijantang, Salak, Rantih	17.130 L/dtk	IPA PDAM, PLTU, Irigasi, Pengambilan galian C
2.	Batang Lasi	Silungkang Oso, Silungkang Duo, Silungkang Tigo, Muaro Kalaban	210 L/dtk	Pengambilan galian C, Mandi, Cuci, Umum
3.	Batang Lunto	Lumindai, Lunto Barat, Lunto Timur, Pasar Kubang, Kubang Tengah, Pasar, Tanah Lapang, Air Dingin	160 L/dtk	IPA PDAM, Irigasi, Pengambilan Galian C, Mandi, Cuci, Umum
4.	Batang Malakutan	Talago Gunung, Kolok Mudik, Kolok Nan Tuo	80 L/dtk	Irigasi, Pengambilan Galian C
5.	Batang Sumpahan	Kubang Utara Sikabu, Saringan, Pasar	51 L/dtk	Embung, Air Minum
6.	Batang Ngungun	Taratak Bancah	55 L/dtk	Irigasi
7.	Batang Dili	Taratak Bancah	60 L/dtk	Irigasi
8.	Batang Piruko	Taratak Bancah	85 L/dtk	Irigasi
9.	Batang Mindai	Lumindai, Balai Batu Sandaran	40 L/dtk	Irigasi
10.	Batang Sinamo	Rantih	40 L/dtk	Irigasi
11.	Batang Siasam	Sijantang Koto	10 L/dtk	Irigasi
12.	Batang Mansiruk	Batu Tanjung	40 L/dtk	Irigasi

No	Nama Sungai	Lokasi Wilayah Sungai	Kapasitas Debit	Fungsi Manfaat
1	2	3	4	5
13.	Batang Kumanis	Data Mansiang, Tumpuak Tengah	40 L/dtk	Irigasi

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2015

Untuk mengendalikan daya rusak air pada sungai tersebut terutama yang melintasi di kawasan permukiman dan lahan pertanian sawah, perlu dibuatkan bangunan penahan tebing berupa batu beronjong, daam pemasangan batu atau tiang pancang yang berfungsi sebagai turap untuk menahan gerusan air dan menahan tebing agar tidak longsor. Pada tahun 2017 akan dilakukan normalisasi saluran sungai sepanjang 3,5 KM yaitu pada sunga-sungai Batang Loban, Anak Sungai Rumbio, Kaki Jembatan Salak II, Sawah Karak-Ambacang, Kabu-kabu, Binuang-Katimhar-Lubuk Kubang-Cuma lagi, Batang Sumpahan, Belakang Pasar Talawi, dan Belakang Kantor Camat Talawi, Jembatan Batu Sampik Kolok, Sungai Sitanang Talanguang, Dekat SMA/DI, Tapian Namar, Pasar Usang Silungkang dan Air Dingin.

d. Jaringan Irigasi

Salah satu infrastruktur sumber daya air yang sangat diperlukan untuk peningkatan produksi padi adalah jaringan irigasi, Jaringan irigasi diperlukan untuk pengaturan air, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya, Perkembangan jaringan irigasi selama 2011-2015 dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 2.27 Jaringan Irigasi
Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015**

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah daerah irigasi (DI)	87	87	87	87	87
2	Luas Potensial (Ha)	1.772	1.772	1.722	1.704	1.690
3	Luas Terairi (Ha)	1.772	1.772	1.722	1.704	1.690
	a. 1/2 Teknis	534	508,88	660	690	750
	b. Sederhana	258	277,58	145	47	27
	c. Non-PU	20	27	27	27	27
	d. Tadah Hujan	960	960	940	940	940
4	Panjang Saluran (Km)	35,20	35,20	35,20	35,20	35,20

Sumber : SIPD Tahun 2015

Jumlah Daerah Irigasi (DI) dari tahun 2011 sampai tahun 2015 tidak ada peningkatan yaitu sebanyak 87 DI, dengan luas potensial seluas 1.772 ha Tahun 2011 berkurang menjadi 1.690 Ha Tahun 2015. Hal ini disebabkan terjadinya alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan perumahan seperti Lunto Barat, Lunto Timur, Kubang Tengah, Talago Gunung, Kolok Mudik, Kolok Nan Tuo, Talawi Mudik, Talawi Hilir, Bukik Gadang dan Kumbayau. Daerah irigasi yang terairi menggunakan sistem pengairan ½ teknis pada tahun 2011 seluas 543 ha meningkat pada tahun 2015 menjadi 750 ha, sistem pengairan sederhana pada tahun 2011 seluas 258 ha menurun pada tahun 2015 menjadi 27 ha, sistem pengairan Non - PU pada tahun 2015 bertambah menjadi seluas 27 ha, sistem pengairan tadah hujan pada tahun 2011 seluas 960 ha menurun pada tahun 2015 menjadi seluas 940 ha dengan total panjang saluran irigasi sepanjang 35,2 km. Peningkatan kuantitas bangunan irigasi tersebut disebabkan dengan bertambahnya bantuan alokasi anggaran DAK irigasi setiap tahun.

Untuk meningkatkan produksi hasil pertanian terutama padi perlu direncanakan sistem yang potensial dalam upaya peningkatan kapasitas penyediaan air baku terutama pada Daerah Irigasi tadah hujan sehingga mampu mengairi lahan pertanian secara permanen. Sistem yang direncanakan dimaksud antara lain berupa pembangunan bangunan penampung air (embung) saluran Tersier dan Talang. Sedangkan pada Daerah Irigasi yang potensial perlu dilakukan pemberdayaan Petani Pemakai Air dan penambahan pembangunan saluran permanen sampai ke daerah hulu dan peningkatan saluran tersier lainnya. Berikut jumlah embung yang dibangun sampai tahun 2015:

Tabel 2.28 Jumlah Pembangunan Embung Kota Sawahlunto sampai Tahun 2015

No	Nama Embung	Kapasitas (M ³)	Lokasi	Fungsi
1.	Embung Sumpahan	7.500	Kubang Utara Sikabu	Air Minum dan Irigasi
2.	Embung Sungai Bac	1.500	Taratak Bancah	Irigasi
3.	Embung Lubuk Laju	1.000	Silungkang Duo	Irigasi
4.	Embung Ladang Laweh	800	Talago Gunung	Irigasi
5.	Embung Kataping	700	Talago Gunung	Irigasi
6.	Embung Banda Panjang	700	Talago Gunung	Irigasi
7.	Embung Parigi	500	Sijantang Koto	Irigasi
8.	Embung Data Rambutan	500	Sijantang Koto	Irigasi
9.	Embung Ibus	500	Salak	Irigasi
10.	Embung Koto Alah	800	Talawi Hilir	Irigasi
11.	Embung Tabek Jaya	600	Bukik Gadang	Irigasi
12.	Embung tapian Nambar	500	Talawi Mudik	Irigasi
13.	Embung Lubuk Simauang	500	Talawi Mudik	Irigasi
14.	Embung Pasaunan	1.000	Talawi Mudik	Irigasi
15.	Embung Bungo Lamo	500	Tumpuk Tengah	Irigasi
16.	Embung Sopan Tupai	500	Tumpuk Tengah	Irigasi
17.	Embung Mansiruk	1.200	Batu Tanjung	Irigasi

Sumber: Dinas PU & Dipertahut, 2015

Untuk meningkatkan luas sawah beririgasi dalam mencapai target produksi panen pada tahun 2017 akan dibangun saluran irigasi baru sepanjang 2.030 M pada 15 (lima belas) daerah irigasi, disamping akan merehab sepanjang 535 M saluran irigasi yang rusak akibat bencana alam dan lainnya.

e. Danau

Danau yang dikenal di Kota Sawahlunto terbentuk akibat aktifitas tambang terbuka berupa cekungan dan kemudian secara alamiah terisi oleh air resapan dan limpahan air hujan. Potensi danau ini kemudian dimanfaatkan sebagai objek wisata air. Semenjak terbentuk dan tidak ada lagi kegiatan penambangan di kawasan tersebut, pengelolaan cekungan bekas galian tambang tersebut menjadi tidak jelas. Baru pada tahun 2005 lahan kawasan Kandi seluas 363 Ha tersebut diserahkan oleh PT.BA-UPO kepada pemerintah Daerah yang selanjutnya dikelola menjadi objek wisata. Berikut ini data luas danau dan pemanfaatannya:

Tabel 2.29 Luas Danau dan Pemanfaatannya

No	Nama Danau	Luas (Ha)	Pemanfaatan
1.	Kandih	8,15	Objek Wisata, Perikanan
2.	Tandikek	3,50	Wisata Air
3.	Tanah Hitam	3,00	Wisata Air
4.	Danau Biru	4,0	Wisata Air

Sumber: Dinas Perindagkopnaker & Dinas Pariwisata, 2016

Sampai saat ini pengelolaan danau tersebut menjadi kewenangan bersama Dinas Pariwisata, Dinas Pertambangan, Dinas Pertanian dan Kehutanan. Untuk pengelolaan yang lebih terarah masing-masing kawasan tersebut perlu disusun perencanaan Master Plan Kawasan danau terutama Danau Kandi dan Danau Tandikek.

f. Sanitasi

Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi dasar berhasil dicapai dengan adanya berbagai program yang telah digulirkan oleh Pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berikut tabel perkembangan proporsi Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Dasar di Kota Sawahlunto tahun 2011 s/d 2015 :

Tabel 2.30 Persentasi Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Dasar Tahun 2011-2015

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Rumah Tangga	14.209	14.642	15.113	15.556	15.808
2	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Dasar	9.601	10.253	10.889	11.371	11.902
3	Persentase (%)	67,57	70,03	72,10	73,10	75,30

Sumber : Dinkessos Kota Sawahlunto

Persentase proporsi Rumah Tangga dengan akses Sanitasi Dasar terus mengalami peningkatan yaitu 67,57 % (2011), dan 75,30 % (2015). Dengan meningkatnya jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi dasar (jamban keluarga) berdampak terhadap meningkatnya jumlah Desa / Kelurahan yang telah dinyatakan sebagai Desa/Kelurahan **ODF (Open Defecation Free)/SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan)** yang semula 19 desa ditahun 2012, menjadi 22 desa di tahun 2015.

g. Tempat Pemakaman Umum (TPU)

Sebagai Kota kecil di Sumatera Barat, Pemerintah Kota Sawahlunto berkewajiban menyediakan Tempat Pemakaman Umum bagi masyarakatnya. Hal ini, diuntungkan dengan luasnya status tanah ulayat suku/kaum di desa - desa yang menyediakan Pandam Pekuburan Umum bagi masyarakat/kaumnya meringankan kewajiban pemerintah daerah dalam penyediaan Tempat Pemakaman Umum tersebut. Begitu juga dengan tersedianya lahan bekas tambang untuk pekuburan umum masyarakat perkotaan dan kuburan umum untuk masyarakat keturunan. Berikut ketersediaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota Sawahlunto kondisi Tahun 2015 :

Tabel 2.31 Ketersediaan TPU Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	Ketersedian TPU (lokasi/ha)	7/2,5	7/2,5	7/2,5	7/2,5	7/2,5
2	Daya Tampung	1.100	1.100	2.750	2.750	2.750

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
	(kuburan/ha)					
3	Ketersediaan TPU (kuburan/m ²)	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
4	Kebutuhan TPU (kuburan/m ²)	6.124	6.387	8.300	8.300	8.300
5	Kebutuhan TPU yang harus disediakan (kuburan/m ²)	3.374	3.637	5.550	5.550	5.550

Sumber: Buku Profil Daerah (Bappeda)

Jumlah Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota Sawahlunto sebanyak 7 lokasi dengan total luas 2,5 ha. Kebutuhan TPU untuk Kota Sawahlunto di Tahun 2012 adalah sebanyak 8.300 kuburan/ha, sementara yang teredia baru 2.750 kuburan/ha. Untuk memenuhi kebutuhan TPU harus tersedia sebanyak 5.550 kuburan/ha. Disamping itu masing-masing kaum dalam hubungan kekerabatan suku juga memiliki tempat pemakaman sendiri (kuburan keluarga) yang luasnya bervariasi dan tersebar di permukiman perdesaan. Begitu juga dengan adanya TMP di Kubang Sirakuk, Talawi dan Silungkang serta TPU khusus warga turunan di Pondok Kapur.

h. Kebakaran

Bencana kebakaran di Kota Sawahlunto termasuk yang jarang terjadi. Keberadaan rumah penduduk yang tidak begitu rapat juga mempermudah jangkauan pelayanan pemadaman kebakaran. Hal ini berdampak positif dengan pelayanan prima terkait pemadaman kebakaran kepada masyarakat. Berikut data pemadaman kebakaran di Kota sawahlunto dua tahun terakhir :

Tabel 2.32 Penanggulangan Bencana Kebakaran Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran (unit)	2	4	4	4	4
	Kebutuhan Mobil Pemadam (unit)	6	6	6	6	6
2	Jumlah Hidran Umum (unit)	0	0	0	0	0
	Kebutuhan Hidran Umum (unit)	±100	±100	±100	±100	±100
3	Jumlah Kasus Kebakaran	36	17	33	47	37
4	Perkiraan Kerugian (Juta Rupiah)	438,568	413,833	550,500	1,525,000	798,000

Sumber: Profil Kota Sawahlunto Tahun 2015

Khusus kebakaran rumah sebagian besar disebabkan oleh hubungan pendek arus listrik. Oleh karena itu instalasi listrik rumah tangga setiap 5 (lima) tahun harus diganti. Jumlah sarana pemadam kebakaran masih kurang 2 unit pemadam kebakaran dimana pada tahun 2015 tersedia 4 unit mobil pemadam kebakaran (3 unit mobil besar dan 1 unit mobil kecil) dimana mobil kecil untuk melayani kawasan (gang) permukiman yang sempit. Selain itu sangat dibutuhkan hidran umum (bak reservoir kapasitas 50 M³) sebagai cadangan air yang sewaktu-waktu siap dioperasikan apabila terjadi bencana kebakaran di Kota Sawahlunto, dan tugas-tugas bantuan lainnya ke luar daerah.

i. Rasio Panjang Jalan per Luas Wilayah

Rasio panjang jalan dengan luas wilayah diperoleh dengan membagu panjang jalan (km) dengan luas wilayah daerah terkait (km²). Nilai rasio ini memiliki arti panjang jalan yang terdapat di suatu daerah dalam 1 km² luas wilayah. Rasio ini juga dapat dijadikan sebagai informasi tingkat aksesibilitas suatu daerah. Semakin tinggi nilai rasio panjang jalan dengan luas wilayah, maka aksesibilitasnya semakin baik, sehingga konektivitas jalan di daerah tersebut juga semakin baik dilihat dari ketersediaan jaringan jalannya. Berikut data panjang jalan di Kota Sawahlunto dengan dibandingkan luas wilayah selama Tahun 2011-2015 sebagai berikut :

Tabel 2.33 Rasio Panjang Jalan dengan Luas Wilayah Tahun 2011-2015

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jalan Negara (Km)	35,24	30,95	30,95	30,95	11,35
2	Jalan Provinsi (Km)	-	4,65	4,65	4,65	30,65
3	Jalan Strategis Provinsi (Km)	-	-	-	9,40	-
4	Jalan Kota (Km)	440,29	440,29	440,29	440,29	454,52
5	Total Panjang Jalan (Km)	475,53	475,89	475,89	485,29	496,52
6	Luas Wilayah (Km ²)	273,45	273,45	273,45	273,45	273,45
	Rasio	1,74	1,74	1,74	1,77	1,82

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2015

Di tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 rasio panjang jalan terhadap luas wilayah adalah 1 km² tersedia jalan sepanjang 1,74 km, dimana tidak terjadi penambahan ruas jalan hanya ada pengalihan sebagian ruas status jalan negara menjadi jalan provinsi. Untuk tahun 2014 ada penambahan ruas jalan strategis provinsi sehingga rasio panjang jalan terhadap luas wilayah meningkat 1,77, dimana setiap 1 km² tersedia jalan sepanjang 1,77 km. Pada tahun 2015 dilakukan penambahan ruas jalan provinsi dan jalan kota sehingga rasio panjang jalan terhadap luas wilayah meningkat menjadi 1,82 dimana setiap 1 km² tersedia jalan sepanjang 1,82 km.

Penataan Ruang

RTRW Kota Sawahlunto menghasilkan suatu wujud keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar sektor yang ada di dalam ruang pada aspek arahan RTRW Kota tersebut bisa dilaksanakan dan menjadi pedoman dalam pembangunan wilayah kota maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012, tentang RTRW Kota Sawahlunto 2012-2032 tersebut akan dijadikan pedoman untuk pedoman untuk pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang.

Kondisi Kota Sawahlunto terkait dengan urusan penataan ruang salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

a. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau kawasan Perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, social, budaya, ekonomi dan estetika. Kebutuhan luas RTH Kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota terdiri dari 20 (dua puluh) persen ruang terbuka hijau publik dan 10 (sepuluh) persen

ruang terbuka hijau privat, sehingga total kebutuhan RTH adalah 8.203 ha meliputi RTH privat 2.734 ha, dan RTH publik seluas 5.469 ha. Perkembangan RTH kota Sawahlunto sejak 2011-2015 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.34 Rasio RTH per satuan Luas di Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Luas Ruang Terbuka Hijau (ha)	2.571	2.946	3.502	3.949	4.326
2	Luas Wilayah (ha)	27.345	27.345	27.345	27.345	27.345
3	Persentase (%)	9,40	10,77	12,80	14,44	15,82

Sumber: Bappeda Kota Sawahlunto

Ketersediaan RTH di Kota Sawahlunto dari tahun 2011 seluas 2.571 ha atau sebesar 9,40% terus meningkat hingga pada tahun 2015 menjadi seluas 4.326 ha atau sebesar 15,82% dari luas kota, sehingga Kota Sawahlunto masih membutuhkan tambahan RTH minimal sebesar 14,18% dari luas wilayah kota yang harus diupayakan dari berbagai program dan sumber pendanaan untuk memenuhinya sehingga target dapat tercapai sesuai amanat Undang-Undang.

b. Rasio Bangunan yang Memiliki IMB

Setiap orang/badan usaha di Kota Sawahlunto yang akan mendirikan/membangun gedung baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku harus memiliki izin membuat bangunan (IMB). Hal ini dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang Kota sehingga kawasan perumahan memiliki keteraturan bangunan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan. Perkembangan rumah dan bangunan yang memiliki IMB dari tahun 2011 sampai 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.35 Rasio Bangunan ber IMB Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Bangunan	12.090	13.117	13.717	14.214	14.670
2	Jumlah Bangunan ber-IMB	5.219	5.824	6.041	6.088	6.150
3	Rasio	0,44	0,45	0,44	0,43	0,42

Sumber: BPS Kota Sawahlunto

Pada tahun 2011 jumlah bangunan yang memiliki IMB sebanyak 5.219 unit dari 12.090 unit bangunan yang ada dengan rasio bangunan ber IMB mencapai 0,44 sedangkan pada tahun 2015 jumlah bangunan yang telah memiliki IMB sebanyak 6.150 unit dari 14.670 unit rumah/bangunan dengan rasio 0,42. Hal ini memperlihatkan bahwa jumlah bangunan di Kota Sawahlunto yang memiliki IMB relatif masih rendah, sehingga penataan lingkungan permukiman kawasan perumahan belum tertata sebagaimana mestinya.

4. Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Persentase Luas Permukiman Yang Tertata

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau



lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Salah satu permasalahan permukiman yang ditangani Pemerintah Kota Sawahlunto terkait dengan penataan permukiman adalah penanganan kawasan kumuh yang pada tahun 2012 terdapat 6 (enam) Desa/Kel kumuh dengan total luas 16,10 Ha. Berdasarkan indikator tingkat kekumuhan yaitu kepadatan bangunan, luas bangunan, dan ketersediaan prasarana sarana dan utilitas, maka pada tahun 2015 terdapat 13 (tiga belas) Desa/Kel kumuh dengan total luas kawasan kumuh adalah 42,58 Ha. Dalam gerakan RPJM Kementerian PU-PERA, pada tahun 2019 harus mencapai Universal Acces 100% air aman, 0% kawasan kumuh dan 100% sanitasi layak. Berikut data persentase permukiman tertata dan luas kawasan kumuh 2011-2015.

Tabel 2.36 Persentase Luas Permukiman yang Tertata Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	Luas area permukiman tertata (ha)	1.134	1.134	1.241	1.550	1.720
2	Total Luas area permukiman (ha)	3.063	3.086	3.156	3.240	3.240
3	Persentase Luas Permukiman yang Tertata (%)	37,02	36,70	39,30	47,80	53,10
4	Jumlah Desa/Kel kumuh (D/K)	6	6	6	6	13
5	Luas kawasan kumuh (Ha)	16,10	16,10	16,10	16,10	42,58

Sumber : RTRW, RP4D

b. Persentase Rumah Tidak Layak Huni

Dalam upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan kurang mampu, dengan tujuan untuk mendorong penurunan angka kemiskinan dan ketersediaan perumahan layak dan sehat menjadi kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan rumah layak huni, sehat dan terjangkau.

Tabel 2.37 Persentase Rumah Tidak Layak Huni Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah rumah tidak layak huni (unit)	1.904	1.829	1.702	1.634	1.438
2.	Jumlah rumah tangga (RT)	12.090	14.090	15.663	16.002	16.542
3.	Persentase rumah tidak layak huni	13,07	12,98	10,90	10,20	8,70

Sumber : RP4D, Laporan FNPMP P2KP tahun 2015

Pada tahun 2011 jumlah rumah tidak layak huni mencapai 1.904 unit dan berkurang menjadi 1.438 unit rumah pada tahun 2015. Penurunan rumah tidak layak huni ini ditangani dari berbagai program dalam bentuk rehabilitasi dan bantuan biaya rehab rumah tidak layak huni dari Kementerian PU-PERA, Kemensos dan Pemerintah Daerah sendiri, saat ini masih terdapat 1.438 unit rumah tidak layak huni yang umumnya rumah keluarga miskin di pedesaan yang harus ditentaskan sampai dengan tahun 2018.

5. Urusan Wajib Kebudayaan

Kebudayaan merupakan salah satu kekayaan daerah yang harus dijaga dan dilestarikan, sekaligus sebagai salah satu asset pusaka yang memiliki nilai-

nilai kearifan lokal. Sebagai kota yang telah eksis sejak zaman Belanda, Sawahlunto memiliki banyak benda cagar budaya yang perlu dikelola dengan baik dan dijadikan sebagai salah satu keunggulan local yang dimiliki.

Berikut ini dapat dilihat tabel sarana penyelenggara seni dan budaya dan benda cagar budaya yang dilestarikan sebagai berikut :

Tabel 2.38 Perkembangan Sarana Seni dan Pelestarian Cagar Budaya Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah sarana Penyelenggaraan kesenian (Set)	9	9	7	7	7
2.	Jumlah Penyelenggaraan Seni (Kali)	2	2	2	2	2
3.	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang di lestarikan	23	23	23	68	68
4.	Jumlah Total Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Daerah	74	74	74	74	74
5.	Presentase jumlah Benda Cagar Budaya, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang di lestarikan (%)	31,08 %	31,04%	31,04%	91.89%	91.89%

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Sampai tahun 2015 sebanyak 91.89 % benda situs dan kawasan cagar budaya telah dikelola dan dilestarikan dengan sangat baik, karena itu dalam rangka pelestarian budaya salah satu langkah yang dilaksanakan pemerintah daerah adalah revitalisasi kawasan cagar budaya. Dalam konteks pelestarian budaya, Pemerintah kota juga telah memelihara Benda Cagar Budaya (BCB) seperti bangunan tua dengan arsitektur Eropa peninggalan Belanda yang direhabilitasi dengan mempertahankan keaslian bentuknya dan dijadikan sebagai objek wisata.

6. Urusan Wajib Tenaga Kerja

Dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat, salah satu indikator yang sering digunakan adalah jumlah penduduk yang bekerja, karena angka tersebut akan berdampak pada peningkatan pendapatan yang berpengaruh pada pemenuhan kehidupan yang layak serta stabilitas ekonomi. Untuk itu diperlukan pembangunan ketenagakerjaan dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Memperdayakan dan mendayagunakan tenagakerja secara optimal dan manusiawi
- b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenagakerja dalam mewujudkan kesejahteraan
- c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan
- d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya

Persentase penduduk Kota Sawahlunto usia 15 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan usaha secara rinci mulai tahun 2010 sampai tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.39
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas di Kota Sawahlunto
yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2014

NO	LAPANGAN USAHA	2010	2011	2012	2013	2014
1	Pertanian	19,35	23,50	20,58	17,75	17,47
2	Pertambangan & Penggalian	9,46	13,10	11,85	7,74	11,19
3	Industri Pengolahan	10,13	4,40	6,82	4,06	5,02
4	Listrik, Gas & Air Bersih	1,42	1,50	2,92	1,39	1,23
5	Bangunan	6,53	6,70	3,56	5,03	4,01
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	15,84	21,10	22,00	23,89	22,28
7	Pengangkutan & Komunikasi	6,34	5,20	4,25	3,79	4,74
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	1,87	2,10	3,01	4,79	2,74
9	Jasa-Jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan	29,05	22,40	25,00	31,57	31,32
	Jumlah	100	100	100	100	100

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka 2015

Kondisi ekonomi Kota Sawahlunto dilihat dari aspek ketenagakerjaan menunjukkan bahwa rentang tahun 2010 - 2014 terjadi kenaikan persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang signifikan di Kota Sawahlunto yang bekerja pada lapangan usaha Perdagangan, Hotel dan Restoran dengan lapangan usaha jasa-jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan. Rata-rata kenaikan pada lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran dari tahun 2011 sampai tahun 2015 sekitar 1,61 persen, walaupun di tahun 2014 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk lapangan kerja dari sektor Jasa-jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan dari tahun 2010 sampai tahun 2014 mulai mengalami peningkatan di Tahun 2012 sampai tahun 2014. rata-rata setiap tahunnya naik sebesar 0,57 persen, walaupun di tahun 2011 dan 2014 mengalami penurunan. Ini dikarenakan dominan dari penduduk Kota Sawahlunto bekerja sebagai pegawai negeri maupun swasta. Sektor jasa-jasa ini terdiri dari sub sektor pemerintahan umum/pertahanan dan sub sektor jasa swasta. Untuk sub sektor pemerintah umum/pertahanan ini mencakup semua departemen dan non departemen, kantor-kantor dan badan-badan yang berhubungan dengan administrasi pemerintah dan pertahanan sedangkan sub sektor jasa swasta terdiri dari sosial kemasyarakatan, jasa hiburan dan rekreasi dan jasa perorangan dan rumah tangga. Untuk tenaga kerja pada lapangan usaha Bangunan mengalami penurunan dari di lima tahun terakhir ini, ini disebabkan banyaknya pkerja bangunan yang didatangkan dari luar Kota Sawahlunto karena kemampuan dan keterampilan yang dimiliki tenaga luar lebih baik dari daerah sendiri, untuk itu perlunya pelatihan-pelatihan untuk penduduk yang berusia 15 tahun keatas yang bekerja sehingga mempunyai kemampuan dan keterampilan yang bersaing dengan tenaga kerja luar daerah. Kegiatan pelatihan ini dikontribusi dari program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang ada di Dinas Perindagkopnaker dalam menciptakan tenaga kerja yang siap pakai dan ahli dibidangnya.

Angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja maupun belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan untuk melakukan pekerjaan yang produktif. Gambaran secara lengkap mengenai penduduk usia 15 Tahun keatas menurut angkatan kerja dan bukan angkatan kerja di Kota Sawahlunto selama kurun waktu 2011-2015 sebagai berikut :

Tabel. 2.40 Penduduk Usia 15 Tahun keatas Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Tahun 2011-2015

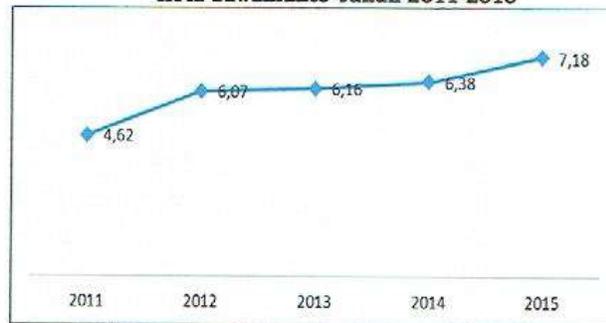
NO	URAIAN	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)
1	ANGKATAN KERJA					
	a. Bekerja	64,45	68,35	63,34	61,33	92,81
	b. Tidak Bekerja/ Pengangguran	3,12	4,42	4,16	4,18	7,18
	c. Angkatan kerja (a+b)	67,57	72,77	67,5	65,51	69,91
	d. Rasio bekerja (a:b)	0,95	0,94	0,94	14,67	
	BUKAN ANKATAN KERJA					
	Bukan angkatan kerja	32,43	27,23	32,5	34,50	30,09
2	TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja)	67,57	72,77	67,5	65,50	69,91
3	TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)	4,62	6,07	6,16	6,38	7,18

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka 2014

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja yang mana penduduk ini terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi. TPAK Kota Sawahlunto dari tahun 2011 sampai tahun 2015 mengalami penurunan rata-rata sebesar 2,32 persen, meskipun di tahun 2014 mengalami peningkatan 15,20 persen dari tahun sebelumnya. Rasio ini khusus untuk penduduk yang bekerja dan mencari kerja terhadap usia kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara pencari kerja dengan angkatan kerja. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Perkembangan TPT Kota Sawahlunto dari Tahun 2011 sampai tahun 2015 mengalami penurunan 2 persen artinya terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja oleh dunia sebesar 2 persen. Tahun 2015 TPT kota Sawahlunto 7,18 persen artinya dari 100 jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja terdapat 6 orang adalah pengangguran seperti terlihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.10 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015



Sumber : Sawahlunto Dalam Angka 2015

Menurunnya TPT ini menandakan terlaksananya program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dan program peningkatan kesempatan kerja yang ada di Dinas Perindagkopnaker. Berjalannya program ini dapat meningkatkan kualitas dari tenaga kerja daerah sehingga bisa diterima diperusahaan yang membutuhkan tenaga kerja yang berkualitas tersebut. Ini terbukti dengan realisasi capaian indikator kinerja program untuk urusan ketenagakerjaan ini dari tahun awal RPJMD sampai tahun 2014 diatas 70 persen.

7. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak salah satunya dapat dilihat dari 40 indikator kinerja sebagai berikut :

Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran didalam kehidupan berumah tangga. Data tentang Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.41 Jumlah KDRT di Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah KDRT	8	2	27	9	23
2.	Jumlah Rumah Tangga	14.051	14.244	14.209	14.578	14.578
3.	Rasio KDRT	1 : 0,01	1 : 0,02	1 : 0,19	1 : 0,06	1 : 0,05

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2015

Jumlah kejadian KDRT di Kota Sawahlunto pada tahun 2015 sebanyak 23 kasus KDRT dari jumlah rumah tangga yang ada. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2014 yang berjumlah 9 KDRT, namun meningkat tajam dibandingkan tahun 2012 dengan 2 kasus.

8. Urusan Wajib Pangan

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Urusan Ketahanan Pangan merupakan urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dalam pemenuhan kebutuhan hidup minimal.

Dalam penyelenggaraan ketahanan pangan, peran pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota dalam mewujudkan ketahanan pangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 adalah melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan di wilayah masing-masing dan mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan, dilakukan dengan : (a) memberikan informasi dan pendidikan ketahanan pangan; (b) meningkatkan motivasi masyarakat; (c) membantu kelancaran penyelenggaraan ketahanan pangan; (d) meningkatkan kemandirian ketahanan pangan.

Ketahanan pangan dengan prinsip kemandirian dan berkelanjutan senantiasa harus diwujudkan dari waktu ke waktu, sebagai prasyarat bagi

keberlanjutan eksistensi bangsa Indonesia. Upaya mewujudkan ketahanan pangan tidak terlepas dari pengaruh faktor-faktor internal maupun eksternal yang terus berubah secara dinamis. Dinamika dan kompleksitas ketahanan pangan menimbulkan berbagai permasalahan dan tantangan serta potensi dan peluang yang terus berkembang yang perlu diantisipasi dan diatasi melalui kerjasama yang harmonis antar seluruh pihak terkait dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Terdapat dua indikator dalam mengukur aspek pelayanan umum focus urusan wajib ketahanan pangan sebagaimana yang terdapat pada lampiran 1 Permendagri 54-2010 yaitu:

1. Regulasi tentang kebijakan ketahanan pangan di daerah dalam bentuk Perda, Perkada, dsb.
2. Ketersediaan pangan utama yang diukur dari persentase rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun. Regulasi tentang kebijakan ketahanan pangan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Sawahlunto No. 10 tahun 2014 tentang Keamanan Pangan. Sementara itu untuk ketersediaan pangan utama dapat dilihat pada table-tabel berikut:

Tabel 2.42 Perkembangan Indikator Urusan Wajib Pangan Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015

Padi	2011	2012	2013	2014	2015
Produksi GKG(ton)	12,397	16,192	17,634	15,116	16.651
Konsumsi Beras (ton)	97,42	99,61	99,61	87,30	91,35
Beras* (Ton)	7,777.88	10,158.86	11,063.57	9,483.78	10.456,83
Luas Area Panen Kotor (ha)	2,473	3,426	3,537	3,104	3.482
Produktifitas (Ton/ha)	5.01	4.73	4.99	4.87	4.99

Sumber: Sawahlunto Dalam Angka 2015 dan data diolah

Jika dibandingkan rata-rata konsumsi beras nasional lima tahun terakhir yang dihitung oleh BPS sebesar 85 Kg/Kapita/Tahun dan Prov. Sumbar sebesar 92 Kg / Kapita / Tahun, maka ketersediaan beras di kota Sawahlunto melebihi konsumsi per kapita per tahun. Akan tetapi yang harus diperhatikan dalam komoditas beras ini adalah penjualan padi baik dalam bentuk GKP ataupun GKG keluar kota Sawahlunto untuk diproses dan kemudian dijual lagi ke Sawahlunto dalam bentuk beras. Sehingga yang menikmati nilai tambah dari komoditas ini adalah masyarakat diluar kota Sawahlunto.

Tabel 2.43 Ketersediaan Daging Sapi

Daging Sapi	2011	2012	2013	2014	2015
Produksi (Kg)	422,828	468,372	468,372	446,891	441.858
Konsumsi (Kg)	19,44	27,03	39,3	15,66	16,51
Ketersediaan daging sapi (Kg/kapita/tahun)	7.34	8.07	7.94	7.50	7.35

Sumber: Sawahlunto Dalam Angka 2015

Rata-rata konsumsi daging nasional per kapita per tahun dalam lima tahun terakhir sebesar 0.34 Kg / tahun. Sementara itu konsumsi daging

provinsi Sumbar sebesar 0.5 Kg / Kapita / Tahun. Jika rata-rata ketersediaan daging per kapita pertahun di Sawahlunto sebesar 7 Kg, maka jumlah ini melebihi dari rata-rata kebutuhan per tahun.

Tabel 2.44 Ketersediaan Ayam Ras Pedaging

Ayam Ras Pedaging	2011	2012	2013	2014	2015
Produksi (Kg)	750,705	3,089,765	3,334,354	5,288,699	6.368.431
Ketersediaan Ayam Ras Pedaging (Kg/kapita/tahun)	13.04	53.21	56.54	88.72	120.67

Sumber: Sawahlunto Dalam Angka 2015

Rata-rata konsumsi daging ayam nasional dalam lima tahun terakhir adalah sebesar 4 Kg / Kapita / Tahun. Sedangkan untuk Sumbar sebesar 4.8 Kg / Kapita / Tahun. Sehingga jika dibandingkan dengan produksi local, maka kebutuhan daging ayam kota Sawahlunto jauh melebihi dari produksi.

Tabel 2.45 Ketersediaan Telur Ayam Ras

Telur Ayam Ras	2011	2012	2013	2014	2015
Produksi (Kg)	53.380	40.832	34.089	39.388	55.086
Konsumsi (Kg)	5,22	4,68	3,61	2,5	2,14
Ketersediaan Telur Ayam Ras (Kg/kapita/tahun)	8.90	4.47	3.68	4.20	6.99

Sumber: Sawahlunto Dalam Angka, 2015

Rata-rata ketersediaan telur ayam ras dari produksi local di Sawahlunto sebesar 6 Kg/kapita/tahun. Jika dibandingkan dengan rata-rata konsumsi nasional sebesar 9.5 Kg/kapita/tahun dan konsumsi provinsi Sumbar sebesar 11.8 Kg/kapita/tahun, maka ketersediaan telur ayam ras di kota Sawahlunto masih jauh dari tingkat kebutuhan masyarakat. Sehingga masih banyak telur ayam ras yang dipasok dari Kab./kota tetangga seperti Tanah Datar dan Lima Puluh Kota. Hal ini adalah peluang bagi peternak ayam ras petelur untuk meningkatkan kapasitas produksinya.

Tabel 2.46 Ketersediaan Ikan Darat

Ikan Darat	2011	2012	2013	2014	2015
Produksi Ikan (Ton)	112.3	147.96	191.08	134,22	164,83
Ketersediaan Ikan (Kg/kapita/tahun)	1.95	2.55	3.24	3.24	2.48

Rata-rata konsumsi ikan nasional dan provinsi Sumbar berkisar diantara 13-16 Kg / kapita / tahun (termasuk ikan laut dan udang segar). Ketersediaan ikan dikota Sawahlunto yang hanya 2-3 Kg / kapita / tahun menunjukkan bahwa kebutuhan ikan di Kota Sawahlunto masih mayoritas dipasok dari luar daerah. Sehingga peluang untuk pengembangan perikanan darat masih terbuka lebar.

9. Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan lingkungan hidup dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

a. Persentase Penanganan Sampah

Municipal solid waste atau lebih dikenal dengan sebutan limbah padat perkotaan adalah suatu produk yang dihasilkan oleh masyarakat perkotaan dan dianggap sebagai bahan buangan tidak berguna. Penanganan sampah yang tidak tepat secara teknis tidak hanya dapat menimbulkan gangguan kebersihan, tapi juga dapat menimbulkan malapetaka, baik terhadap lingkungan lokal, regional, maupun global, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sampah yang menumpuk disekitar sumbernya dapat mengundang vektor penyakit, di perjalanan pada saat pengangkutan dapat menimbulkan pencemaran dan banjir, sedangkan di tempat pembuangan akhir dapat menimbulkan ledakan, kebakaran, efek rumah kaca, dan pencemaran air.

Salah satu masalah persampahan yang cukup rumit dalam penyelesaiannya adalah pengadaan dan pengelolaan fasilitas tempat pembuangan sampah akhir (TPSA) yang layak, baik secara teknis maupun non teknis. Keberadaan TPSA selain dapat menampung timbulan sampah yang dihasilkan juga harus dapat meminimalisasi bahaya yang mungkin timbul akibat penimbunan sampah tersebut. Perkembangan persentase sampah yang tertangani dari tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.47 Persentase Penanganan Sampah Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rata-rata volume sampah yang tertangani di TPA (m ³ /hari)	21,27	19,43	24	28	32
2	Rata-rata volume sampah yang dihasilkan (m ³ /hari)	99,30	100,16	36	44	40
3	Persentase Penanganan Sampah di TPA (%)	16,06	14,55	66,67	63,64	80

Sumber : BPS, 2015

Pada tahun 2011 sampai tahun 2013 rata-rata volume penanganan sampah di TPA sebesar 22 M³/hari, pada tahun 2015 meningkat sebesar 32 M³/hari dan volume sampah yang dihasilkan meningkat dari 40 M³ di tahun 2015 menjadi 40 M³ di tahun 2015. Persentase penanganan sampah di TPA masih berfluktuasi yaitu pada tahun 2015 masih 80% yang dikelola di TPA Kayu Gadang. Masih rendahnya penanganan sampah di TPA Kayu Gadang dikarenakan oleh masih kurangnya truk sampah dan masih ada daerah yang belum dapat dijangkau oleh truk sampah.

b. Rasio Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS)

Sebelum sampah diangkut/dibuang ke TPA, terlebih dahulu sampah dikumpulkan di beberapa lokasi TPSS yang sudah ditentukan. Rasio Jumlah TPSS di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel berikut;

**Tabel 2.48 Rasio Jumlah TPSS
di Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015**

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah TPSS (unit)	246	251	271	112	112
2	Jumlah Daya Tampung TPSS (m ³)	106,2	107,7	127,7	48,70	48,70
3	Jumlah Penduduk (jiwa)	57.567	58.068	58.991	59.608	60.186
4	Rasio Daya Tampung TPSS thd Jumlah penduduk (m ³ /1000 jiwa)	1,8	1,9	2,2	8,17	8.09

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto

Jumlah TPSS di Kota Sawahlunto tahun 2011 sebanyak 246 unit dengan daya tampung 106,2 M3, di tahun 2015 menurun menjadi 112, artinya untuk setiap 1000 jiwa tersedia TPSS 8,17 unit. Hal ini sudah mencukupi mengingat produksi sampah setiap 1000 jiwa adalah 1,698 m3 per hari, namun perlu diperhatikan sebaran lokasi TPSS tersebut.

c. Rasio Jumlah Truk Pengangkut Sampah

Pengangkutan sampah yang dihasilkan rumah tangga dan lainnya dari TPS menuju TPA menggunakan truk pengangkutan sampah setiap hari. Berikut disajikan data rasio truk pengangkut sampah terhadap jumlah penduduk di Kota Sawahlunto

**Tabel 2.49 Rasio Jumlah Truk Pengangkut Sampah
Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015**

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Truk Pengangkut Sampah (unit)	7	7	7	7	7
2	Jumlah Daya Tampung Truk (m ³)	28	28	28	28	28
3	Jumlah Penduduk (jiwa)	57.567	58.064	58.991	59.608	59.608
4	Rasio Daya Tampung Truk thd Jumlah penduduk	0,00049	0,00048	0,00047	0,00047	0,00047

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto

Jumlah truk pengangkut sampah yang ada di Kota Sawahlunto tahun 2010 sejumlah 8 unit berkurang pada tahun 2014 menjadi 7 unit, dengan kapasitas 28 m3, sehingga rasio daya tampung truk terhadap 1000 penduduk tahun 2014 adalah 0,00047 yang berarti kemampuan untuk mengangkut sampah dengan truk hanya sebanyak 470 kg untuk setiap 1000 penduduk. Kemampuan daya tampung ini dirasa sangat kurang karena setiap 1000 penduduk menghasilkan sampah 1.698 kg per hari, dan dibutuhkan tambahan truck sampah sebanyak 4 unit lagi.

10. Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kependudukan dan catatan sipil salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

a. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk positif jika jumlah kelahiran dan perpindahan penduduk dari luar kedalam lebih besar dari jumlah kematian dan perpindahan penduduk dari dalam keluar.

Tabel 2.50 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2015

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (orang)					Laju Pertumbuhan (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	2015
1.	Silungkang	10.298	10.437	10.637	10.795	10.947	1,49
2.	Lembah Segar	12.150	12.111	12.206	12.214	12.230	0,07
3.	Barangin	17.174	17.377	17.681	17.918	18.099	1,34
4.	Talawi	17.945	18.143	18.448	18.681	19.090	1,26
Total		56.866	57.567	58.972	59.608	60.186	1.08

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2015

Dilihat dari tabel diatas pertumbuhan penduduk selalu bervariasi dari tahun 2011 sampai 2015 dimana pada tahun 2015 Kecamatan Silungkang merupakan kecamatan dengan pertumbuhan penduduk tertinggi yaitu sebesar 1.49%. hal ini tidak terlepas dari posisinya yang berada di jalan lintas nasional yang sangat potensial dalam pengembangan usaha perdagangan dan jasa.

b. Penduduk yang sudah terdaftar dalam catatan sipil

Indikator ini digunakan untuk menggambarkan tertib administrasi kependudukan yang dapat dilihat dari jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, Akte kelahiran dan Akte Nikah. Berikut disajikan data mengenai kepemilikan dokumen administrasi kependudukan sebagai berikut:

Tabel 2.51 Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP, AKTE LAHIR, AKTE NIKAH Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015

No	Kepemilikan	2011	2012	2013	2014	2015
1.	KTP					
	Sudah Memiliki (jiwa)	42.590	40.110	41.207	43.554	41.175
2.	Jumlah Bayi Lahir ber Akte Kelahiran					
	Sudah Memiliki (bayi)	910	938	1.093	1.445	2.316
	Belum Memiliki (bayi)	-	-	-	-	-
3.	Surat Nikah					
	Sudah Memiliki (pasangan)	13.273	-	14.258	-	-
	Belum Memiliki (pasangan)	410	-	454	-	-

Sumber : Profil Kota Sawahlunto Tahun 2015

Pada tahun 2015 jumlah penduduk yang sudah memiliki KTP tercatat sebanyak 41.175 jiwa atau sekitar 95.82% dari keseluruhan penduduk usia wajib KTP sebanyak 45.452 jiwa.

11. Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Rata-rata Jumlah Anak per keluarga

Tujuan Program Keluarga Berencana secara demografi adalah untuk menurunkan angka kelahiran dan secara filosofis adalah untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Jumlah anak dalam keluarga yang dianjurkan oleh pemerintah adalah 2 (dua) anak lebih baik.

Tabel 2.52 Rata-rata Jumlah Anak per Rumah Tangga di Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Rumah Tangga	14,244	14,532	14,209	14,578	14,578
2.	Jumlah Penduduk	57,567	58,068	58,972	59,608	60.186
2.	Rata - rata jumlah anak perumah Tangga	4,04	4,04	4,04	1,58	1,62

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2015

Dilihat dari data di atas dapat dijelaskan bahwa rata-rata jumlah anak setiap rumah tangga di Kota Sawahlunto mengalami fluktuatif. Tahun 2011 rata-rata jumlah anak setiap rumah tangga 1,94 orang. Tahun 2015 rata-rata jumlah anak setiap rumah tangga mengalami sedikit peningkatan menjadi 2,04 orang. Jika dibandingkan dengan target 2 orang anak setiap rumah tangga pada program Keluarga Berencana tingkat nasional, maka dapat dikatakan program Keluarga Berencana di Kota Sawahlunto sudah berjalan.

b. Rasio Akseptor KB

Program KB dimaksudkan untuk menciptakan keluarga kecil yang berkualitas sekaligus menekan laju pertumbuhan penduduk disamping itu juga mengurangi resiko tingkat kematian anak serta tingkat kematian ibu.

Tabel 2.53 Rasio Akseptor KB di Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah PUS	9.575	9.575	9.641	9.739	10.292
2.	Jumlah Peserta KB (Jumlah Akseptor KB)	6.841	7.019	7.123	7.231	8.585
3.	Jumlah Tidak ber KB	2.487	2.617	2.518	2.468	1.797
4.	Rasio Akseptor KB	71,45	73,31	73,88	74,66	83.00

Sumber : PMPKB

Rasio akseptor KB tahun 2014 sebesar 74,66 ini berarti sudah cukup tinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya KB.

12. Urusan Wajib Perhubungan

Pemerintah Kota Sawahlunto selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perhubungan untuk keamanan dan kenyamanan berlalu lintas sebagai penghubung wilayah untuk menunjang, mendorong dan menggerakkan pembangunan ke semua pusat-pusat kegiatan dalam wilayah sehingga memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan. Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat, yang menjamin kendaran berjalan dengan nyaman dan perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana. Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan tersebut tercermin dengan ketersediaan moda transportasi dan sarana lalu lintas seperti data berikut ini.

a. Moda Transportasi

Tabel 2.54 Jumlah dan Jenis Moda Transportasi Tahun 2011-2015

NO	JENIS ANGKUTAN	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Truck	Unit	236	281	286	298	296
2	Bus/Mikro Bus	Unit	25	19	33	63	98
3	Pick Up	Unit	353	303	440	593	850
4	Angkot	Unit	49	46	46	42	47
5	Sedan	Unit	119	128	141	154	147
6	Jeep	Unit	123	123	133	141	145
7	Kereta Api	Unit	2	2	2	2	2
8	Travel Biro	Buah	25	25	17	2	20
9	Sepeda Motor	Unit	10.980	11.631	12.006	12.222	9.629
10	Bus Pariwisata	Unit	2	2	7	7	7

Sumber: SAMSAT Kota Sawahlunto

Dari data-data tersebut dapat dilihat bahwa dalam 4 tahun terakhir jumlah sepeda motor dari tahun 2011 sebanyak 10.980 unit mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2015 berkurang menjadi 9.629 unit. Sedangkan angkutan kota terjadi penurunan pada tahun 2015 menjadi 47 unit dari 49 unit di tahun 2011.

b. Sarana Lalu Lintas

Dalam mendukung kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan, telah dibangun berbagai sarana lalu lintas antara lain rambu lalu lintas, kaca tikungan, warning light dan pendukung lainnya. Namun penyediaan sarana pendukung ini masih perlu ditingkatkan, khususnya pada ruas-ruas jalan utama, pada kawasan yang ramai aktivitasnya dan pada kawasan yang rawan kecelakaan lalu lintas. Ketersediaan sarana pendukung lalu lintas ini sangat diperlukan dengan semakin tingginya arus lalu lintas harian kendaraan di ruas-ruas jalan Kota.

Berikut ini perkembangan sarana lalu lintas jalan sejak tahun 2011 sampai 2015 sebagai berikut :

Tabel 2.55 Sarana Lalu Lintas Jalan Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015

NO	SARANA LALU LINTAS	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kaca Tikungan	Unit	79	79	79	60	68
2	Warning Light	Unit	5	5	5	3	6
3	Traffic Light	Unit	-	-	-	-	1
4	Rambu-rambu	Unit	342	415	444	483	483
5	Guadril	Unit	123	167	188	146	146
6	Deliniatur	Unit	100	100	100	100	100
7	Trapikun	Unit	100	100	100	100	100
8	Marka Jalan	M ²	1650	1650	24.000	38.450	102.611

NO	SARANA LALU LINTAS	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
9	Penyebrangan	Unit	-	-	-	-	-
10	Papan Penunjuk Arah	Buah	5	6	18	24	26
11	Papan Informasi Lalu Lintas	Buah	5	6	6	6	8

Sumber: Kantor Perhubungan Kota Sawahlunto

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa ketersediaan sarana lalu lintas di Kota Sawahlunto dalam upaya mewujudkan visi Kota Wisata Tambang Yang Berbudaya selalu terus ditingkatkan, Rambu-rambu lalu lintas dari 324 unit di tahun 2008 meningkat menjadi 415 unit pada tahun 2012, guardril juga mengalami peningkatan dari 163 unit di tahun 2008 menjadi 167 unit di tahun 2012, papan penunjuk arah dan informasi lalu lintas tahun 2008 sebanyak 5 buah dan tahun 2012 bertambah menjadi 6 buah, sedangkan jumlah deliniatur juga berkurang dari 272 unit menjadi 100 unit di tahun 2012. Ketersediaan sarana lalu lintas ini dirasakan masih kurang sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh jalan. Selain sarana transportasi diatas, di Kota Sawahlunto juga terdapat 3 (tiga) buah stasiun Kereta Api. Panjang lintasan kereta api yang menghubungkan Pusat Kota Sawahlunto, Muaro Kalabang dan Silungkang ini mencapai 18 (delapan Belas) Km. Kedepannya, Pemerintah Kota Sawahlunto mendukung semua kebijakan PT. KAI dalam mengembangkan sarana transportasi ini. Saat ini, sarana angkutan massal ini tidak beroperasi lagi sebagai alat transportasi umum, akan tetapi pihak Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dan PT. KAI Cabang Sawahlunto telah menyepakati Kereta Api yang ada digunakan sebagai kereta api Wisata dengan stasiun utamanya di Pusat Kota dijadikan sebagai Museum Kereta api.

13. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

Sarana/prasarana (teknologi) komunikasi dan informasi saat ini telah berkembang dengan pesat dan telah merevolusi cara hidup manusia, baik cara berkomunikasi, cara belajar, cara bekerja, cara berbisnis dan lain sebagainya. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan komunikasi dan informatika dapat dilihat dari indikator kinerja tabel berikut;

Tabel 2.56 Layanan Komunikasi dan Informatika Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Kantor Pos (unit)	4	4	4	4	4
2	Jumlah Sambungan Telepon (SST)	3.008	3.008	3.008	3.008	3.008
3	Jumlah Warnet (unit)	27	45	39	33	29

Sumber : Bappeda Kota Sawahlunto

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa Kantor Pos di Kota Sawahlunto masih tetap sebanyak 4 unit sementara itu jumlah Warnet pada tahun 2011 sebanyak 27 unit mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 29 unit.

14. Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Program pembangunan dalam mengembangkan koperasi dan UKM di Kota Sawahlunto, salah satunya dengan memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah yang disinergikan dengan kebijakan program pemerintah pusat. Koperasi yang aktif di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.57 Persentase Koperasi Aktif Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah koperasi aktif (unit)	74	65	63	65	66
2	Jumlah koperasi (unit)	74	76	78	78	80
	Persentase koperasi aktif	100	85,53	80,52	83,33	80

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka 2015

Dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 perkembangan koperasi yang aktif di Kota Sawahlunto mengalami penurunan rata-rata 1,32 persen, walaupun pada tahun 2011 persentase koperasi aktif 100 persen. Perkembangan koperasi tidak terlepas dari usaha pemerintah dalam meningkatkan kualitas koperasi dan mensosialisasikan koperasi sehingga meningkatkan minat dan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi. Kualitas koperasi ini dapat dilihat dari kemampuan manajerial para pengurus dalam mengelola koperasi untuk itu sangat perlu pembinaan dan peningkatan SDM untuk pengurus koperasi. Untuk lebih jelasnya perkembangan koperasi dan permodalannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.58 Perkembangan Koperasi dan Permodalan Kota Sawahlunto Tahun 2011-2014

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Koperasi	74	76	78	78	80
Jumlah Anggota	9.058	9.297	9.214	9.213	9.128
Volume Usaha	99.015.274.542	114.189.960.996	127.653.266.020	117.904.950	111.702.420
Modal Sendiri	23.387.528.513	25.732.931.505	29.138.864.565	30.320.097.524	35.146.505.339
Modal Luar	45.983.468.261	51.883.774.362	53.641.939.657	48.290.715.741	38.909.707.203
Asset	69.370.996.774	77.777.598.397	82.780.804.222	78.610.813.264	79.328.495.127
SHU	2.367.557.967	2.335.969.509	2.848.812.267	2.564.001.418	3.183.074.400

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka 2015

Dilihat dari tabel diatas perkembangan koperasi Kota Sawahlunto dari Tahun 2011 sampai tahun 2015 mengalami peningkatan jumlah, anggota, volume usaha, modal, asset dan SHU koperasi. Tahun 2015 dari 80 jumlah koperasi yang aktif 66 koperasi dengan modal sendiri 35.146.505.339. Meskipun jumlah dan perkembangan koperasi sudah memadai namun belum cukup berperan signifikan dalam pergerakan perekonomian Kota Sawahlunto, untuk itu fasilitasi Pemerintah Daerah dan kerjasama dengan dunia usaha dinilai perlu ditempuh untuk mengoptimalkan potensi koperasi dan UKM yang telah ada. Selain koperasi keberadaan Usaha Kecil dan Menengah serta Bank Perkreditan Rakyat dan lembaga Keuangan Mikro sangat penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat serta dalam menyediakan modal bagi pelaku usaha lokal. Berikut ini perkembangan UKM, BPR dan LKM selama 2011-2015:

Tabel 2.59 Jumlah UKM Non BPR/LKM UKM dan Jumlah BPE/LKM Tahun 2011-2015

NO	UKM NON BPR/LKM UKM	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah UKM NON BPR/LKM UKM Aktif	452	413	417	437	331
2	Jumlah BPR /LM Aktif	34	34	34	34	34

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka 2015

Tahun 2015 jumlah BPR/LKM aktif sebanyak 34 unit, tidak mengalami peningkatan kurun waktu tiga tahun terakhir ini, sedangkan untuk jumlah UKM non BPR/LKM UKM Tahun 2015 adalah 331 unit turun dari tahun sebelumnya sebanyak 106 unit. Peningkatan jumlah UKM tahun 2015 dari tahun sebelumnya di Kota Sawahlunto menunjukkan bahwa semakin banyak tersedianya layanan pendukung untuk menggerakkan perekonomian daerah.

15. Urusan Wajib Penanaman Modal

Penanaman Modal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Terwujudnya daya saing penanaman modal untuk menunjang kualitas perekonomian nasional merupakan visi dari penanaman modal nasional. Peningkatan kualitas pelayanan merupakan indikator utama pencapaian daya saing penanaman modal.

Kota Sawahlunto Investasi terbesar dilaksanakan oleh pemerintah melalui APBD atau APBN, sedangkan investasi swasta masih sangat kecil dengan nilai tidak terlalu besar. Masih kurangnya kerjasama promosi penanaman modal dan masih rendahnya minat investor untuk berinvestasi, sehingga perlunya menyajikan data terkini (up to date) peta potensi sumber daya, terkoneksiya kemitraan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan investor/perusahaan besar, tersedianya SDM promosi yang mempunyai kemampuan marketing investasi. Untuk lebih jelasnya perkembangan investasi di Kota Sawahlunto dari tahun 2009 sampai dengan 2014 dapat terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.60 Indikator Ekonomi, Investasi dan Tenaga Kerja di Kota Sawahlunto 2011-2015

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Proyek Investasi berskala Nasional (PMA dan PMDN)(proyek)	14	14	15	15	132
2.	Nilai total investasi PMA skala Nasional (\$)	-	-	-	-	3.300
3.	Nilai total investasi PMDN skala Nasional (Rp.Milyar)	23,03	23,03	23,03	19,58	504.8
4.	Jumlah Perusahaan (PMA dan PMDN) (unit)	14	113	118	128	20
5.	Jumlah tenaga kerja pada perusahaan PMDN dan PMA (orang)	2.595	3.258	3.664	4.183	1.728

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka 2015

Dari tabel di atas perkembangan investasi PMA dan PMDN dari tahun 2011 sampai 2015 mengalami peningkatan dilihat dari indikator jumlah proyek dan nilai total investasi PMDN skala Nasional, walaupun peningkatannya tidak begitu signifikan. Kurangnya minat dari pada investor untuk menanamkan modalnya di kota Sawahlunto disebabkan oleh kurangnya promosi yang dilakukan mengenai potensi-potensi yang ada kota Sawahlunto selain batubara. Salah satu usaha pemerintah adalah pada akhir

tahun 2013 diresmikanlah kantor pelayanan terpadu satu pintu dan penanaman modal untuk lebih memfokuskan kegiatan penanaman modal dan perizinan. Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan investasi terbukti dengan telah dilaksanakannya program peningkatan promosi dan kerjasama investasi serta program penyiapan potensi sumber daya sarana dan prasarana daerah yang dilaksanakan oleh SKPD Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan penanaman modal. Sesuai dengan peraturan Walikota nomor 6 tahun 2014 tanggal 17 maret 2014 tentang pendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal maka tidak ada lagi SKPD teknis yang mengeluarkan perizinan.

Peran pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan investasi di daerahnya sangatlah penting. Dengan melaksanakan pelayanan yang prima, peningkatan transparansi dan mutu pelayanan yang cepat untuk mendukung pembangunan ekonomi regional berbasis potensi lokal, meningkatkan sarana prasarana yang memadai adalah faktor yang dapat mendukung peningkatan investasi di daerah.

16. Urusan Wajib Kepemudaan dan olah Raga

Berkaitan dengan urusan kepemudaan dapat dilihat dari organisasi pemuda dan olahraga. Semakin banyak organisasi pemuda menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah dalam membudayakan pemuda. Organisasi kepemudaan berperan dalam pembangunan daerah khususnya dalam menciptakan pelayanan penunjang dibidang olahraga dan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.61 Jumlah Organisasi Pemuda dan Olahraga Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Organisasi Pemuda	14	14	15	17	17
2.	Jumlah Organisasi Olahraga	24	24	24	24	25

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2015

Jumlah Organisasi Pemuda di Kota Sawahlunto dari Tahun 2011 sampai Tahun 2015 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2011 organisasi pemuda berjumlah 14 organisasi dan Tahun 2015 menjadi 17 Organisasi Pemuda di Kota Sawahlunto. Begitu juga dengan jumlah Organisasi Olahraga di Kota Sawahlunto juga mengalami peningkatan.

17. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dari tahun 2011 hingga saat ini berjumlah 37 buah, dengan rincian masing-masing Desa/Kelurahan memiliki satu buah LPM yang merupakan mitra kepala desa /kelurahan dalam menjalankan pemerintahan di tingkat terdepan.

Disamping itu peranan PKK dalam pembinaan masyarakat diwujudkan dalam bentuk kelompok binaan yang berada dan meyebar ditengah masyarakat. Pembinaan yang dilakukan meliputi bidang pemberdayaan ekonomi keluarga serta kehidupan social rumah tangga. Jumlah unit PKK yang ada di Kota Sawahlunto sebanyak 42 unit, yakni 37 PKK Desa/Kelurahan, 4 PKK Kecamatan dan 1 PKK Kota Sawahlunto. Setiap PKK yang ada di Kota Sawahlunto memiliki kelompok binaan, yang total berjumlah 626 buah kelompok binaan. Perkembangan kelompok binaan PKK selama kurun waktu 2011-2015 sebagai berikut :

Tabel 2.62 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Tahun 2011-2015

NO	KELOMPOK BINAAN PKK	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Kelompok Binaan PKK	222	222	222	262	262
2	Jumlah PKK	42	42	42	42	42
	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	100	100	100	100	100

Sumber : SDA 2015

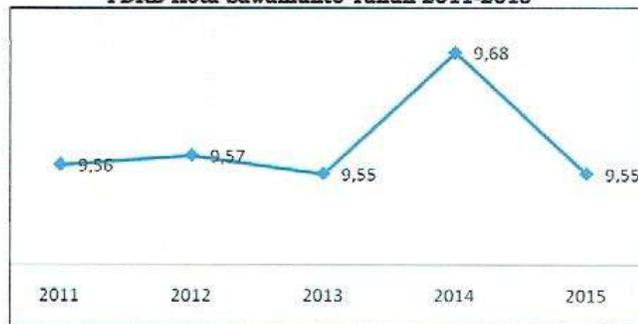
Jumlah unit PKK yang ada di Kota Sawahlunto sebanyak 42 unit, yakni 37 PKK Desa/Kelurahan, 4 PKK Kecamatan dan 1 PKK Kota Keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menjadi sangat penting sebagai perwujudan dan wadah masyarakat dalam berpartisipasi terhadap pembangunan daerah dan pada tahun 2015 LSM di Kota Sawahlunto tercatat 11 buah LSM.

2.3.1 FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN

1. Urusan Pilihan Pertanian

Sebagai sebuah kota, sector pertanian di Sawahlunto tidak terlalu tinggi kontribusinya terhadap total output perekonomian yang dihasilkan. Kontribusi sector pertanian terhadap PDRB dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.11 Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015



Sumber: BPS Kota Sawahlunto

Meskipun kontribusi sector pertanian hanya berkisar 9 %, akan tetapi jumlah tenaga kerja yang bekerja di sector ini mencapai 17,5% dari total angkatan kerja di kota Sawahlunto (SDA, 2015). Sehingga tidak mengherankan jika sector ini masih menjadi prioritas intervensi. Sementara itu produktifitas komoditas pertanian pilihan di kota Sawahlunto dapat dilihat pada table-table berikut:

Grafik 2.12



Sumber: Data SIPD

Dari data lima tahun terakhir, peningkatan luas areal tanam padi berbanding lurus dengan produksinya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tambahan luas areal panen berdampak pada peningkatan produksi. Tahun 2013 merupakan tahun dimana peningkatan kedua indikator ini mencapai titik puncaknya dan kembali menurun ditahun berikutnya. Sementara itu, untuk melihat perbandingan dengan provinsi dan nasional dapat digunakan indikator produktifitas tanaman padi sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

Grafik 2.13



Sumber: Data SIPD dan EPS

Secara umum, produktifitas tanaman padi dikota Sawahlunto masih dibawah produktifitas provinsi dan nasional. Penurunan produksi dan luas areal tanam ditahun 2014, tidak diiringi dengan kemampuan untuk mempertahankan produktifitas minimal sama dengan tahun sebelumnya.

Tanaman Perkebunan

Komoditas perkebunan andalan kota Sawahlunto adalah karet dan kakao. Berikut adalah informasi terkait dengan kedua komoditas tersebut.

Grafik 2.13



Sumber: Data SIPD

Produksi karet kota Sawahlunto menunjukkan peningkatan yang signifikan terutama dari tahun 2012 s/d 2015. Jika di tahun 2012 produksi masih berada di kisaran 300 ton, maka pada tahun 2015 atau dalam kurun waktu 3 tahun telah meningkat sebanyak 3 kali lipat. Walaupun terjadi penurunan luas areal tanam ditahun 2014, akan tetapi ini justru diiringi dengan peningkatan produksi. Ini berarti bahwa tanaman-tanaman muda yang sebelumnya belum produktif sudah memasuki masa-masa produktif.

Jika dilihat dari sisi produktifitas masih banyak tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah kota Sawahlunto sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

Grafik 2.16



Sumber: Data SIPD dan EPS

Jika dibandingkan dengan produktifitas karet nasional, produktifitas karet kota Sawahlunto masih jauh tertinggal. Hal ini disebabkan oleh revitalisasi perkebunan karet di kota Sawahlunto baru dimulai sejak satu dasawarsa yang lalu. Sehingga dampaknya terhadap peningkatan produktifitas belum terlalu signifikan. Hal ini menjadi tantangan bagi kota Sawahlunto ditahun-tahun yang akan datang.

Komoditas kedua yang menjadi andalan di sub sector perkebunan adalah Kakao. Jumlah produksi dan luas areal tanam dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 2.17



Sumber: Data SIPD

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, telah terjadi penurunan produksi kakao Sawahlunto yang disebabkan oleh penurunan luas areal tanam. Penurunan produksi sebanyak 47% ini disebabkan oleh menurunnya jumlah luas areal tanam sebanyak 45%. Ini berarti bahwa setiap penurunan 1% luas areal tanam, juga berdampak pada penurunan kurang lebih 1% produksi kakao di Sawahlunto. Akan tetapi ada hal yang mengembirakan dari sisi produktifitas sebagaimana terlihat pada grafik berikut ini:

Grafik 2.18



Sumber: Data SIPD dan BPS

Jika dibandingkan dengan produktifitas nasional, produktifitas kakao di kota Sawahlunto berada diatas rata-rata produktifitas nasional. Jika produktifitas nasional berada pada kisaran 0,39 - 0,41 ton / ha, produktifitas kakao di kota Sawahlunto berada pada kisaran 0,44-0,72 ton / ha. Selain komoditas perkebunan, komoditas lain yang juga banyak dikembangkan usahanya oleh masyarakat Sawahlunto adalah dari sub sector peternakan seperti sapi, ayam ras pedaging dan ayam ras petelur.

2. Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral

Kota Sawahlunto dikenal dengan kota tambang batu bara, pertambangan batu bara ini berperan penting dalam pembangunan Kota Sawahlunto walaupun tahun terakhir produksi dari batubara menurun. Menipisnya cadangan batubara pada tambang terbuka sangat mempengaruhi terhadap produksi batubara yang cenderung menurun,

meskipun secara nominal nilai PDRB sektor ini terus meningkat sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

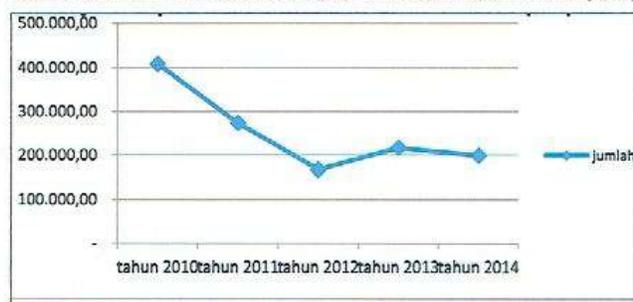
Tabel 2.63 Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015

PDRB	2011	2012	2013	2014	2015*
Atas Dasar Harga Berlaku (Juta)	203.487,56	201.155,42	202.052,84	205.793,20	205.959,99
Total PDRB (Juta)	1.898.005,06	2.102.672,29	2.317.727,00	2.605.217,97	2.885.730,78
Kontribusi (%)	10,72	9,57	8,72	7,90	7,14

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka 2015

Dilihat dari perkembangan PDRB atas dasar berlaku dari Tahun 2010 sampai tahun 2015 mengalami peningkatan setiap tahunnya seiring dengan peningkatan total PDRB, namun secara kontribusi terhadap PDRB dari tahun 2010 sampai 2015 mengalami penurunan, namun akan tetap memberikan pertumbuhan yang positif bagi perekonomian kota Sawahlunto. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya produksi batu bara yang ada di Kota Sawahlunto sehingga berpengaruh terhadap royalti yang diterima Pemerintah Daerah. Usaha Pemerintah Daerah dengan adanya program pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan menutup bagi penambang ilegal melakukan usahanya di Kota Sawahlunto. Mulai Tahun 2016 ini kewenangan terhadap pertambangan di daerah dipindahkan ke propinsi, sehingga program kegiatan yang mendukung bidang pertambangan dipindahkan ke propinsi. Untuk lebih jelasnya jumlah produksi batubara di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Grafik 2.19 Jumlah Produksi Batubara Kota Sawahlunto (Ton)



3. Urusan Pilihan Pariwisata

Pariwisata adalah perjalanan untuk melakukan rekreasi atau bersenang-senang dan untuk tujuan bisnis. Menurut Organisasi Pariwisata Dunia (World Tourism Organization), wisatawan diartikan sebagai orang yang melakukan perjalanan dan bermukim di suatu tempat atau tempat-tempat tertentu diluar tempat tinggalnya dalam waktu kurang dari satu tahun untuk tujuan bersenang-senang (leisure), bisnis dan tujuan lainnya.

Pada tahun 1994 Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) mengklasifikasikan bentuk pariwisata secara umum menjadi:

1. Pariwisata domestik, artinya orang-orang dalam negeri yang melakukan perjalanan di dalam negeri.
2. Pariwisata inbound, artinya orang-orang luar negeri yang melakukan perjalanan di dalam negeri.
3. Pariwisata outbound, artinya orang-orang dalam negeri yang melakukan perjalanan ke luar negeri.

Seiring dengan perjalanan waktu, bentuk pariwisata mengalami evolusi sehingga digolongkan berdasarkan pasar yang lebih kecil (niche market) seperti:

1. Agritourism
2. Culinary Tourism
3. Cultural Tourism
4. Ecotourism
5. Educational Tourism
6. Extreme Tourism
7. Geotourism
8. Heritage Tourism
9. Leisure Tourism
10. Meeting, Incentives, Convention and Exhibition or Event (MICE) Tourism
11. Medical Tourism
12. Religious Tourism
13. Wildlife Tourism

Sawahlunto mengadopsi konsep "One Stop Tourism" dalam perencanaan strategis pengembangan wisatanya. Konsep ini dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan untuk memberikan banyak alternatif wisata kepada wisatawan di satu tempat—dalam hal ini Kota.

Berdasarkan objeknya, jenis pariwisata di Sawahlunto digolongkan menjadi:

Tabel 2.64 Jenis Pariwisata Kota Sawahlunto

Jenis	Objek
Agritourism	Kebun Buah
Educational Tourism	IPTEK Centre
Leisure Tourism	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waterboom 2. Kandi Park 3. Taman Satwa Kandi 4. Puncak Cemara 5. Puncak Polan 6. Desa Wisata Rantih 7. Kampung Tenun Silungkang 8. Kereta Api Wisata 9. Taman Kupu-Kupu 10. Penangkaran Buaya
Heritage Tourism	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Kota Lama 2. Masjid Agung dengan Manara** 3. Museum Gudang Ransoem 4. Museum Kereta Api 5. Kantor PTBA-UPO 6. Lubang Tambang Mbah Socro & Gedung Info Box 7. Gereja Katolik** 8. Makam Sych Kolok**
MICE Tourism	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sawahlunto International Music Festival (Simfest) 2. Makan Bajamba 3. Tour de Singkarak 4. Pacu Kuda Tingkat Lokal

Jenis	Objek
	5. Kejurnas Pacu Kuda 6. Roadrace 7. Kota Tua Trail Adventure 8. Pasar Malam 9. Family Gathering 10. Event Festival Musik
Religious Tourism	1. Masjid Agung** 2. Gereja Katolik** 3. Makam Syeh Kolok**

**Objek-objek ini mengandung unsur heritage dan religious

A1. Agritourism

Objek wisata yang termasuk kategori agritourism di Sawahlunto adalah kebun buah, terletak di Kawasan wisata Kandi berjarak sekitar 50 meter dari taman satwa kandi. Pada saat ini jenis tanaman yang ditanam adalah Naga, Pepaya, Sirsak dan Lengkeng. Dengan mengandalkan pengairan dari taman satwa Kandi, kebun buah ini diharapkan sudah dapat segera dibuka untuk umum.

A2. Educational Tourism

IPTEK Centre berada satu komplek dengan Museum Gudang Ransoem terletak di daerah Air Dingin yang berjarak sekitar 50 meter dari kawasan lapangan segitiga. Pendirian IPTEK centre ditujukan untuk mengakrabkan siswa-siswa dari tingkat SLTP s/d SLTA dengan sains melalui alat-alat peraga yang tersedia. Pengunjung misalnya dapat langsung melihat bagaimana sebuah teori dipraktikkan dengan menggunakan alat peraga yang ada. Pengelola juga membuat kerjasama dengan sekolah-sekolah untuk mendemonstrasikan ilmu pengetahuan dalam praktik.

A3. Leisure Tourism

A3.1. Berlokasi di Muaro Kalaban tepat ditepi jalan lintas Sumatera berjarak sekitar 5 KM dari pusat kota Sawahlunto, Waterboom merupakan pusat rekreasi keluarga berupa kolam renang dengan berbagai kedalaman. Kolam-kolam yang tidak dalam ditujukan bagi anak-anak. Pada saat ini telah dibangun kawasan pada sisi atas kolam lama yang ditujukan bagi anak-anak. Struktur pendukung kawasan ini adalah Musholla, tenda-tenda permanen bagi yang tidak berenang, cafe-cafe yang berada didalam lokasi, WC dan kamar bilas serta ruang ganti pakaian dalam jumlah yang cukup. Struktur pendukung lain yang tak kalah menarik adalah hotspot area. Waterboom dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT . Wahana Wisata Sawahlunto.

A3.2. Kandi Park atau taman wisata Kandi merupakan suatu kawasan wisata yang berjarak sekitar 12 KM dari pusat kota Sawahlunto ke arah. Didalamnya terdapat Taman Satwa Kandi, Wisata Wahana Air di danau Tandikek, Paint Ball, Flying Fox dan pakaian Indian untuk berfoto. Taman Satwa memiliki koleksi hewan seperti orang utan, buaya, siamang, aneka jenis burung, ular, gajah, unta, kuda, beruang, kangguru, kura-kura, kelinci dan lain-lain. Pengunjung dapat menikmati naik tunggangan seperti gajah, unta dan kuda. Taman wisata Kandi dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT . Wahana Wisata Sawahlunto.

A.3.3. Pada saat ini telah dibuka untuk umum objek penangkaran buaya yang masih berlokasi disekitar Kandi Park. Ditahun 2012 ini juga telah dibuka untuk umum taman kupu-kupu yang berlokasi disebelah Taman Satwa Kandi. Taman Kupu-Kupu ini merupakan yang ketiga di Indonesia.

A.3.4. Puncak polan dan puncak cemara adalah puncak-puncak tertinggi disisi barat dan utara pusat kota Sawahlunto. Diberi nama puncak Polan karena berdasarkan cerita turun temurun, orang yang pertama kali sampai di puncak ini adalah seorang berkebangsaan Polandia. Pada sisi atas puncak Polan dibuat ornamen bertuliskan SAWAHLUNTO yang dapat dilihat dari jarak yang cukup jauh. Puncak Polan merupakan puncak yang sangat cocok digunakan untuk hiking dan camping. Pada sisi kiri puncak ini telah dibangun homestay untuk memenuhi keinginan wisatawan menikmati udara sejuk perbukitan.

A.3.5. Sementara itu puncak cemara merupakan puncak yang direncanakan menjadi terminal atas objek wisata Skylift. Pada kaki puncak ini dapat dilihat pemandangan kota Sawahlunto yang akan sangat indah sekali terutama bila dilihat di malam hari. Seluruh sisi puncak dan lembahnya ditanami oleh pohon cemara dan cocok untuk melakukan hiking. Jalur mobil telah tersedia sampai ke puncak, akan tetapi belum untuk jalur pejalan kaki yang ingin menyusuri lembah puncak ini.

A.3.6. Desa Rantih merupakan desa tujuan wisata unggulan di Sawahlunto. Berjarak sekitar 11 Km dari pusat kota Sawahlunto, disini pengunjung dapat menikmati keseharian kehidupan masyarakat termasuk kegiatan-kegiatan seperti menaiki sampan menyusuri sungai Ombilin, menangkap belut dan menikmati pemandangan air terjun.

A.3.7. Kampung tenun di kecamatan Silungkang merupakan suatu tempat dimana pengunjung dapat melihat-lihat proses pembuatan songket tradisional atau biasa disebut alat tenun bukan mesin (ATBM). Pengunjung juga dapat langsung berbelanja atau memesan songket kepada pengrajin disana. Kampung tenun berjarak sekitar 6 Km dari pusat kota Sawahlunto menuju arah Solok. Kecamatan Silungkang berada pada jalur lintas tengah Sumatera.

A4. Heritage Tourism

Kawasan kota lama terdiri dari gedung-gedung peninggalan dari zaman kolonial Belanda yang masih digunakan sampai saat ini, baik sebagai tempat tinggal, tempat ibadah, gedung pertemuan, kantor, toko, rumah sakit dan museum. Kawasan ini meliputi Masjid, Agung, gedung pegadaian, rumah Pek Sin Kek, gedung Koperasi, Pasar Remaja, Hotel Ombilin, Museum Kereta Api, sekolah Santa Lucia dan Gereja Katolik, GPK, Kantor PTBA, perumahan gang disamping Lapangan Bola, galeri info box, lubang tambang mbah Soero dan Museum Goedang Ransoem.

A4.1. Lubang Tambang Mbah Soero merupakan lobang tambang pertama di patahan Soegar. Mulai digali pada tahun 1898, oleh orang rantai dan para pekerja tambang dengan mandor bernama Mbah Soero. Dibuka kembali tahun 2007 dan dijadikan objek wisata dengan nama "Lubang Tambang Mbah Soero".

Disamping pintu lubang ini, terdapat sebuah bangunan yang dibangun pada tahun 1947 dengan nama gedung pertemuan buruh. Sekarang dijadikan gedung info box untuk menyajikan informasi mengenai objek wisata tambang.

A4.2. Gedung Societeit atau Gluck Auf ini dibangun pada tahun 1910. Gedung ini merupakan tempat bermain bowling dan billiard oleh para pejabat Belanda di Sawahlunto. Setelah dilakukan revitalisasi, pada 1 Desember 2006 gedung ini difungsikan sebagai gedung pusat kebudayaan (GPK) Sawahlunto.

A4.3. Rumah Pek Sin Kek dibangun pada tahun 1906 dan pernah dipergunakan sebagai Gedung Teater, tempat perhimpunan masyarakat Melayu dan sebagai pabrik es. Setelah direvitalisasi tahun 2005-2006, bangunan khas berarsitektur cina ini menjadi salah satu kekayaan warisan masa lampau.

A4.4 Gedung Koperasi Ombilin dibangun tahun 1920an dengan nama Koperasi "Ons Belang". Koperasi ini dibuat untuk memenuhi melayani kebutuhan orang-orang Belanda dan Indo-Belanda yang ada di Sawahlunto. Sampai saat ini masih menjadi Gedung Koperasi Ombilin Kota Sawahlunto.

A4.5 Pajak pegadaian demikian disebut gedung dengan arsitektur Pecinan nan unik. Gedung ini dibangun tahun 1917. Gedung ini juga pernah digunakan sebagai Gedung Komedi atau tempat pertunjukan, saat ini gedung ini difungsikan kembali sebagai Kantor Pagadaian.

A4.6 Bangunan dengan arsitektur Belanda ini dibangun pada tahun 1916. Gedung yang terletak di kawasan Lapangan Segitiga Kota Sawahlunto ini berdiri dengan megah sebagai sebuah landmark kota. Gedung ini berfungsi sebagai sebuah kantor perusahaan tambang Bukit Asam unit Pertambangan Ombilin.

A4.7 Untuk penginapan para ahli tambang yang didatangkan Belanda, maka pada tahun 1918 dibangunlah Wisma persis didepan gedung Societeit. Dengan nuansa arsitektur belanda yang masih kental, bangunan ini sekarang dijadikan hotel Ombilin Sawahlunto dan menjadi salah satu pilihan tempat menginap bagi wisatawan yang datang ke Sawahlunto.

A4.8 Untuk kecerdasan anak-anak Belanda yang tinggal di Sawahlunto pada zaman kolonial, maka dibangunlah sekolah Santa Lucia dipusat kota berdampingan dengan rumah ibadah bagi umat Katolik, gereja Santa Barbara.

A4.9 Bangunan Mesjid Agung dahulunya merupakan Bangunan PLTU yang megah yang dibangun pada tahun 1952. Sedangkan cerobong asap PLTU yang berketinggian lebih dari 75 meter dijadikan menara mesjid.

A4.10 Museum Gudang Ransoem pada zaman kolonial Belanda dijadikan Dapur Umum yang dibangun pada tahun 1918, merupakan cerminan sejarah masa lalu yang direpresentasikan melalui beberapa galeri yang ada diantaranya galeri etnografi, galeri foto tempo dulu, iptek center dan galeri malaka yang hadir sebagai bentuk kerjasama Kota Sawahlunto dengan Negeri Malaka (twin city).

A4.11 Stasiun Kereta Api yang dibangun pada tahun 1912, terletak di atas pasar Kota Sawahlunto dan masih digunakan sebagai stasiun kereta Wisata hingga saat ini. Pada tanggal 17 Desember 2005, stasiun ini diresmikan sebagai Museum Kereta Api.

A5. MICE Tourism

Istilah MICE merupakan singkatan dari *Meetings, Incentives, Conferences dan Exhibitions*. Terkadang C juga diartikan *Conventions* dan E untuk *Events*. MICE tourism dapat diartikan sebagai salah satu jenis pariwisata yang membawa banyak orang dalam satu kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya untuk tujuan tertentu seperti family gathering, konferensi, seminar dan lain-lain. Sub industri untuk jenis pariwisata ini sering disebut dengan *meeting* atau *event industry*.

Even akbar di Sawahlunto adalah pada saat merayakan ulang tahun kota setiap tanggal 1 Desember. Rangkaian acara pada ulang tahun tersebut terdiri dari Sawahlunto International music Festival (SIMFEST), makan

bajamba, pagelaran seni dan budaya seperti kuda kepang, tabuik, barongsai, pasar malam, kota tua trail adventure dan pacu kuda. Even roadrace juga rutin dilaksanakan beberapa kali dalam setahun. Even internasional yang tak kalah menariknya adalah lomba balap sepeda tour de singkarak.

A6. Religious Tourism

Makam Syekh Kolok berlokasi di desa Sijantang kecamatan Talawi. Syekh Kolok diyakini sebagai tokoh Islam Minangkabau yang punya kaitan dengan Syekh Burhanuddin di Pariaman. Makam ini ramai di kunjungi masyarakat dari berbagai daerah terutama para peziarah dan pengikut ajarannya pada hari-hari besar Islam dan pada waktu menjelang bulan Ramadhan.

Berikut dapat dilihat jumlah pengunjung tempat wisata di Kota Sawahlunto yang paling banyak dikunjungi wisatawan.

Tabel 2.64 Tempat Wisata yang Sering Dikunjungi oleh Wisatawan di Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015

Objek Wisata	2011	2012	2013	2014	2015
MICE	48.379	249.870	116.083	190.505	441.585
Taman Satwa Kandi	279.958	302.566	262.334	50.000	160.838
Water Boom	167.073	170.305	158.745	131.949	101.063
Makan Bajamba	20.000	*	20.000	20.000	29.500
Pacu Kuda	25.000	*	50.000	-	50.000
Museum Gudang Ransum	8.014	9.359	14.000	13.725	20.943
Simfest	17.000	*	10.000	20.000	15.000
Lubang Mbah Socro	3.891	6.560	10.279	10.764	12.938

Sumber: Sawahlunto Dalam Angka 2016, BPS

4. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

Potensi bagi pengembangan perikanan di Kota Sawahlunto sangat terbatas akibat ketersediaan air bagi budidaya perikanan sangat kecil. Pada sisi lain seiring perkembangan jumlah penduduk kebutuhan atas ikan terus meningkat sehingga ketersediaan ikan produksi lokal tidak mampu memenuhi kebutuhan.

Berikut dapat dilihat luas areal budidaya perikanan darat menurut jenis.

Tabel 2.65 Luas Areal Budidaya Perikanan Darat menurut Jenis (Ha)

Jenis	2011	2012	2013	2014	2015
Sungai	164,95	164,95	164,97	164,97	164,97
Kolam	59,01	59,01	58,21	58,20	58,20
Sawah	15	14	-	123	123
Sungai Irigasi	-	-	-	-	-
Karamba	5	-	-	-	-
Total	351,98	351,98	223,18	237,15	238,15

5. Urusan Pilihan Perdagangan

Perkembangan sektor perdagangan sangat dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi pada sektor lain terutama sektor pertanian, industri, pertambangan

dan sumberdaya mineral serta perkembangan di bidang pariwisata. Salah satu aspek yang penting dalam perdagangan adalah perlindungan dan pengamanan perdagangan/perlindungan konsumen sesuai dengan program yang telah dijalankan pemerintah kota sawahlunto. Program ini untuk meningkatkan perlindungan konsumen sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga membawa dampak pada kenyamanan atas keamanan barang dan jasa.

Perkembangan kontribusi sektor Perdagangan, pedagang besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dalam PDRB selama 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.66 Kontribusi Sektor Perdagangan, Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB Tahun 2011-2015

KONTRIBUSI	2011	2012	2013	2014	2015*
Atas Dasar Harga Berlaku (Juta)	285.259,66	312.837,76	345.832,65	387.290,51	426.557,19
Total PDRB (Juta)	1.898.005,06	2.102.672,29	2.317.727,00	2.605.217,97	2.885.730,78
Kontribusi (%)	15,03	14,88	14,92	14,87	14,78

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2015

Dari tabel diatas perkembangan kontribusi atas dasar harga berlaku sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motormengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya dengan peningkatan rata-rata setiap tahun Rp. 32.024,69 juta. Meningkatnya sektor ini sejalan perkembangan pedagang besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor di Kota Sawahlunto yang merupakan sektor utama pemberian kontribusi terbesar terhadap PDRB Kota Sawahlunto. Ini terbukti bahwa perdagangan di Kota Sawahlunto sangat berperan penting dalam peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja lokal, pemberdayaan sumber daya lokal serta mengembangkan usaha kecil, mikro dan koperasi. Dapat dilihat dari peningkatan penataan empat pasar tradisional yang ada di Kota Sawahlunto.

6. Urusan Pilihan Perindustrian

Sektor industri termasuk penyumbang peringkat ketiga pada pembentukan PDRB daerah. Sektor industri di kota Sawahlunto didominasi oleh industri kecil pada skala rumah tangga dengan berbagai produk yang dihasilkan. Pembangunan industri diarahkan untuk menumbuh kembangkan industri secara intensif dan mengutamakan industri/usaha kecil dan menengah melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia. Perkembangan kontribusi sektor industri terhadap PDRB selama tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.67 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Tahun 2011-2015

KONTRIBUSI	2011	2012	2013	2014	2015*
Atas Dasar Harga Berlaku (Juta)	238.106,71	262.483,84	288.525,20	313.075,23	333.971,12
Total PDRB (Juta)	1.898.005,06	2.102.672,29	2.317.727,00	2.605.217,97	2.885.730,78
Kontribusi (%)	12,55	12,48	12,45	12,02	11,57

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka 2015

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kontribusi atas dasar harga berlaku dari sektor industri pengolahan dari tahun 2010 sampai 2015 mengalami peningkatan setiap tahunnya sebesar Rp. 25.698,62 juta. Peningkatan ini tidak lepas dari usaha pemerintah kota dalam meningkatkan industri Kota Sawahlunto. Dengan telah dilaksanakannya program yang ada di RJMD kota seperti program pengembangan industri kecil dan menengah, program pengembangan sentra-sentra produksi dan program pengembangan industri agro. Selain kegiatan rutin seperti pembinaan dan pelatihan terhadap industri yang ada, Pemko Sawahlunto tahun 2015 mengadakan kegiatan Sawahlunto Internasional Songket Carnival(SISCA) sehingga memberikan peluang bagi pengrajin untuk berkreasi dengan songket silungkang. Pemko Kota Sawahlunto terus meningkatkan kegiatan promosi dan pengembangan jaringan pemasaran hasil-hasil industrinya, ini terbukti dengan songket silungkang telah dijadikan sebagai bahan dasar model fashion oleh rumah mode SHAFIRA di New York pada bulan September tahun 2015. Selain songket silungkang yang merupakan produk unggulan kota sawahlunto, masih ada industri-industri kecil, menengah dan rumah tangga yang perkembangannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.68 Jumlah Industri dan Omset di Kota Sawahlunto Tahun 2014 s/d 2015

No	Uraian	Industri Kecil (Industri makanan dan kerajinan)		Industri Menengah		Industri Rumah Tangga	
		2014	2015	2014	2015	2014	2015
1	Unit Usaha (unit)	437	440	3	3	1121	1116
2	Tenaga Kerja (orang)	1870	1872	100	102	1347	1329
3	Nilai Produksi (Rp)	18.603.928.890	18.882.832.400	3.818.969.000	4.105.392.500	4.379.143.244	5.899.426.200
4	Omzet (Rp)	19.290.815.750,-	20.967.519.100,-	3.202.337.619,-	3.818.015.000,-	6.433.082.523,-	5.639.460.648,-

Sumber : SIPD Kota Sawahlunto 2015

Berdasarkan Pemuktahiran dan database industri di Kota Sawahlunto dimulai dari tahun 2014 dan 2015. Dari tiga jenis industri yang ada, peningkatan untuk tahun 2015 ini terdapat pada industri kecil (industri makanan dan kerajinan) dan industri rumah tangga. Industri kecil (industri makanan dan kerajinan) dan industri rumah tangga mengalami peningkatan dalam jumlah unit usaha, tenaga kerja, nilai produksi dan omzetnya. Sedangkan untuk industri menengah tidak mengalami peningkatan di tahun 2015 untuk jumlah unit usahanya tetapi mengalami peningkatan pada jumlah tenaga kerja, nilai produksi dan omzetnya. Meningkatnya perkembangan dari industri yang ada di Kota Sawahlunto ini tidak lepas dari peranan pemerintah, melalui kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh Dinas Perindagkopnaker, mulai dari fasilitasi kemasan produk, pengembangan industri kerajinan, pelatihan dan workshop untuk industri kecil dan rumah tangga.

2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka kepada persaingan dengan provinsi lain. Suatu daya saing

merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Kondisi Kota Sawahlunto terkait aspek daya saing daerah dapat dilihat dari : kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/ Infrastruktur dan iklim berinvestasi.

2.4.1 KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH

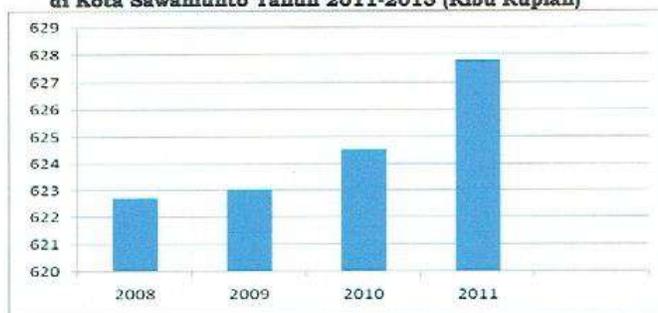
Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan pengaruh bagi peningkatan daya saing daerah.

Kondisi Kota Sawahlunto terkait dengan kemampuan ekonomi daerah salah satunya dapat dilihat dari : pengeluaran perkapita atau angka konsumsi rata-rata perkapita (pangan dan non pangan), dan produktivitas total daerah.

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Pada tahun 2011 pengeluaran konsumsi rata-rata rumah tangga perkapita di Kota Sawahlunto mencapai Rp. 627.790,-. Angka ini lebih besar bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Angka pengeluaran konsumsi rata-rata rumah tangga perkapita selalu meningkat dari tahun ketahun. Semakin naik angka konsumsi rumah tangga, itu menunjukkan semakin besar pengaruhnya terhadap peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.20 Angka Konsumsi Rata-rata Rumah Tangga Perkapita di Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015 (Ribu Rupiah)



Sumber : BPS Kota Sawahlunto

2. Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah dapat menggambarkan seberapa besar tingkat produktivitas tiap sektor dalam rangka mendorong perekonomian suatu daerah. Hal ini tergambar melalui PDRB atas dasar harga berlaku. Dari ke- 17 sektor/ lapangan usaha tersebut, yang berkontribusi terbesar terhadap PDRB Kota Sawahlunto adalah sektor/ lapangan usaha perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor dan yang kontribusinya paling kecil sektor Jasa Perusahaan.

Berikut secara lengkap disajikan data mengenai produktivitas total daerah persektor/lapangan usaha (ADH Berlaku) di Kota Sawahlunto selama kurun waktu tahun 2011-2015

**Tabel 2.69 Produktivitas Total Daerah per Sektor (ADHB)
di Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015 (Jutaan Rupiah)**

No	Sektor Lapangan Usaha	2011		2012		2013		2014		2015	
		Rp	%								
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	162.044,00	9,56	181.629,25	9,57	200.729,45	9,55	224.358,31	9,68	248.696,08	9,55
2	Pertambangan dan Penggalian	197.581,85	11,65	203.487,56	10,72	201.155,42	9,57	202.052,84	8,72	205.793,20	7,9
3	Industri Pengolahan	205.478,02	12,12	238.106,71	12,55	262.483,84	12,48	288.525,20	12,45	313.075,23	12,02
4	Pengadaan Listrik dan Gas	29.329,24	1,73	28.566,21	1,51	27.582,99	1,31	25.324,69	1,09	32.865,84	1,26
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.588,26	0,33	5.902,31	0,31	6.520,08	0,31	7.327,98	0,32	7.857,43	0,3
6	Konstruksi	155.657,06	9,18	175.510,64	9,25	206.780,19	9,83	240.260,02	10,37	285.081,41	10,94
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	251.433,76	14,83	285.259,66	15,03	312.837,76	14,88	345.832,65	14,92	387.290,51	14,87
8	Transportasi dan Pergudangan	135.810,55	8,01	147.889,10	7,79	162.999,06	7,75	177.588,11	7,66	206.898,41	7,94
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan	26.914,92	1,59	31.250,22	1,65	34.782,22	1,65	38.964,76	1,68	44.566,05	1,71
10	Informasi dan Komunikasi	107.914,70	6,36	121.710,02	6,41	140.023,17	6,66	146.633,10	6,33	166.672,86	6,4
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	55.520,52	3,27	62.290,72	3,28	71.658,61	3,41	78.771,49	3,4	89.723,18	3,44
12	Real Estate	30.055,75	1,77	32.968,18	1,74	35.568,69	1,69	39.942,00	1,72	45.270,77	1,74
13	Jasa Perusahaan	2.208,44	0,13	2.422,23	0,13	2.676,26	0,13	3.014,76	0,13	3.380,23	0,13
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	214.650,41	12,66	245.309,52	12,92	280.761,37	13,35	311.652,32	13,45	348.500,80	13,38
15	Jasa Pendidikan	37.998,59	2,24	44.459,80	2,34	52.510,58	2,5	63.521,36	2,74	75.301,40	2,89
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	15.634,52	0,92	18.286,93	0,96	21.094,14	1,00	24.596,65	1,06	27.855,53	1,07
17	Jasa Lainnya	61.644,85	3,64	72.956,00	3,84	82.508,46	3,92	99.360,56	4,29	116.388,14	4,47
		1.695.465,4 ₄		1.898.005,0 ₆		2.102.672,2 ₉		2.317.727,0 ₀		2.605.217,9 ₇	

Sumber : PDRB Kota Sawahlunto Tahun 2014

Pada tahun 2011 secara nominal kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan sektor ekonomi yang paling nilai tambahnya dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya, yang mencapai Rp. 387.290,51,- (14,87%). Bila dibandingkan dengan kurun waktu 2011-2015 mengalami kenaikan rata-rata 1% dari PDRB tahun bersangkutan. Posisi berikutnya di tempati oleh sektor/ lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan nilai sebesar Rp. 348.500,80,- meningkat dibanding tahun 2013 yang jumlahnya sebesar Rp. 311.652,32,-. Sektor/lapangan usaha industri

pengolahan menduduki urutan ketiga dalam kontribusinya terhadap Kota Sawahlunto, yakni dari Rp. 288.525,20,- pada tahun 2013 menjadi Rp. 313.075,23- pada tahun 2014.

2.4.2 IKLIM BERINVESTASI

1. Angka Kriminalitas

Iklim berinvestasi sangat ditentukan oleh faktor keamanan dan ketertiban. Pembangunan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat harus difokuskan pada terwujudnya kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan masyarakat lingkungan masing-masing serta peran aktif masyarakat dalam memberantas kejahatan yang terjadi. Jenis kriminal/Tindak kejahatan dari Tahun 2011 sampai Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.70 Banyaknya Kriminal Menurut Jenis Kriminal Tindak Kejahatan di Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015

Jenis Kriminal	2011	2012	2013	2014	2015
Curat(pencurian dengan pemberatan)	21	43	24	24	29
Penggelapan	3	3	13	6	15
KDRT	2	5	8	3	10
Penipuan	5	10	14	20	7
Pengrusakan	6	7	4	6	2
Curanmor	8	17	15	11	10
Pembakaran	2	1	2	0	1
Anirat(penganiayaan dengan pemberatan)	0	10	6	12	1
Curas(pencurian dengan pemerasan)	0	3	1	0	1
Perkosaan/cabul	4	8	7	9	5
Pembunuhan	0	0	0	0	0
Total jumlah kriminal*	51	107	94	91	85
Jumlah Penduduk**	57.567	58.068	58.972	59.608	60.186
Angka Kriminalitas (%)/(**) per 1000 jumlah penduduk	0,89	1,84	1,59	1,53	1,41

Sumber: Sawahlunto Dalam Angka 2015

Secara umum kondisi keamanan dan ketertiban dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 relatif kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat maupun kegiatan investasi. Angka kriminalitas di Kota Sawahlunto dari tahun 2011 sampai 2014 secara umum mengalami penurunan. Menurunnya jumlah kriminalitas ini ditandai dengan menurunnya jumlah kriminal yang terjadi di Kota sawahlunto. Program yang telah dilaksanakan dalam menekan angka kriminalitas seperti program pembinaan Agama dan adat di bagian kesra setdako, selain itu program unggulan magrib mengaji dari Pemerintah Kota Sawahlunto yang mengajak masyarakat untuk meningkatkan keimanannya sehingga berpengaruh terhadap jumlah kriminal yang terjadi di Kota Sawahlunto. Penurunan jumlah kriminal tersebut merupakan indikasi keberhasilan masyarakat untuk bangkit dan bersama-sama dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di Kota Sawahlunto.

Dilihat dari data yang ada peningkatan angka kriminalitas yang signifikan terjadi sejak tahun 2011 sampai tahun 2015 terjadi pada jenis kriminal penipuan, Anirat (penganiayaan dengan pemberatan) dan perkosaan/cabul. Dari ketiga jenis kriminal ini sangat perlu pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah Kota Sawahlunto yang bekerjasama dengan kepolisian dalam meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap tindakan kriminalitas yang terjadi di Kota Sawahlunto serta bahaya dan hukuman yang akan diterima apabila melakukan tindak kriminal tersebut.

2. Lama Proses Perizinan

Proses Perizinan dalam berinvestasi dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (KPTSP). Penyelesaian izin usaha bagi investor dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan publik. Investasi asing yang akan masuk ke suatu wilayah/daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh wilayah/daerah yang bersangkutan. Pembentukan daya saing investasi berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya kemudahan perizinan. Kemudahan perizinan suatu wilayah/daerah sangat menunjang dalam pembuatan proses administrasi suatu investasi. Lamanya penyelesaian izin dilaksanakan berdasarkan Perwako No 16 Tahun 2014 tanggal 01 April 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal. Realisasi perizinan dari tahun 2014 sampai 2015 seperti tabel dibawah ini:

**Tabel 2.71 Realisasi Perizinan
Kota Sawahlunto Tahun 2014-2015**

No	Jenis Izin	2014	2015
1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	14	62
2	Izin Gangguan (HO)	166	204
3	Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK)	33	65
4	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	96	111
5	Tanda Daftar Industri (TDI)	2	6
6	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	115	160
7	Tanda Daftar Gudang (TDG)	0	1
8	Izin Badan Hukum Koperasi	0	0
9	Izin Mendirikan Rumah Sakit	0	0
10	Izin Apotek	1	0
11	Izin Toko Obat	2	0
12	Izin Optik	0	1
13	Izin Pengobatan Tradisional	0	0
14	Izin Praktek Dokter	19	26
15	Izin Apoteker	1	0
16	Izin Praktek Perawat	3	24
17	Izin Praktek Bidan	2	3
18	Izin Pendirian Menara Tower	3	0
19	Izin Usaha Angkutan	0	4
20	Izin Trayek	0	0
21	Izin Pendirian Warnet	0	5

No	Jenis Izin	2014	2015
22	Izin Prinsip Penanaman Modal	0	1
23	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	0	0
24	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	0	0
25	Pendaftaran Penanaman Modal	0	0
26	Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal	0	0
27	Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal	0	0
28	Izin Lingkungan	2	4
29	Izin Pembuangan Limbah Cair	2	0
30	Izin Penyimpanan Sementara Limbah B.3	0	0
31	Izin Pengumpulan Limbah B.3 Skala Kota	0	0
	Jumlah	461	677

Sumber : Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Tahun 2015

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat di tahun 2015 terjadi peningkatan realisasi perizinan dari 466 tahun 2014 sedangkan tahun 2015 sebesar 677 perizinan. Kemudahan perizinan yang sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh Perwako merupakan salah satu indikator dalam peningkatan realisasi perizinan di Kota Sawahlunto.

3. Jumlah dan Macam Pajak serta Retribusi Daerah

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan perusahaan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan/perusahaan.

Berikut secara lengkap disajikan data mengenai jumlah realisasi serta macam pajak dan retribusi di Kota Sawahlunto selama kurun waktu 2011 - 2015 :

Tabel 2.72 Jumlah Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Sawahlunto Tahun 2011-2015 (Rupiah)

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Pajak Daerah	2.320.146.288,-	2.969.920.454,-	3.185.508.186	4.190.396.080	4.101.043.541
	Pajak Hotel	27.700.167,-	89.961.390,-	174.944.052	132.853.612	135.881.333
	Pajak Restoran	565.254.594,-	580.219.684,-	704.656.895	622.651.181	524.826.887
	Pajak Hiburan	249.466.600,-	484.108.100,-	504.947.700	474.215.800	422.777.300
	Pajak Reklame	40.284.352,-	41.303.357,-	51.732.687	37.109.493	46.769.998
	Pajak Penerangan Jalan	1.371.716.755,-	1.475.439.589,-	1.653.631.722	1.965.380.131	2.016.665.979
	Pajak Parkir	1.661.400,-	2.610.160,-	6.732.900	190.000	-
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	42.810.120,-	8.084.734,-	-	1.000.000	-
	Pajak BPHTB	21.252.300,-	288.193.440,-	88.862.230	137.434.940	165.276.535

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
2	Jumlah Retribusi Daerah	3.822.298.255,-	2.295.581.904,-	3.044.138.867	2.885.169.543	2.540.177.543
	Retribusi Jasa Umum	1.099.628.057,-	1.432.525.135,-	1.969.115.075	1.704.971.484	1.560.399.578
	Retribusi Jasa Usaha	3.065.846.487,-	2.789.965.224,-	958.611.542	1.055.552.559	878.523.315
	Retribusi Perizinan Tertentu	734.799.600,-	678.184.100,-	116.412.250	124.645.500	101.254.460
3	Dana Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak (PBB, PPh ps1 21, PPh 25/29, HPH, Eksplorasi dan Eksploitasi dll)	15.213.304.412	15.213.304.412	18.777.454.723	21.563.293.390	15.476.081.447

Sumber : DPPKAD Kota Sawahlunto

Dari tabel diatas dapat terlihat rata-rata pertumbuhan pajak daerah dari kurun waktu 2011 - 2015 sebesar 17.67 %, dimana tahun 2011 pajak daerah Kota Sawahlunto sebesar Rp. 2.320.146.288,- menjadi Rp. 4.101.043.541,- pada tahun 2015, hal disebabkan oleh kenaikan pajak penerangan jalan, pajak hotel, pajak hiburan.

Penerimaan retribusi daerah selama kurun waktu 2011 - 2015 sangat menurun dari tahun 2011 sebesar Rp. 3.822.298.255,- berkurang menjadi Rp. 2.540.177.543,- tahun 2015 atau tumbuh minus 66.45%. Penurunan yang signifikan terjadi pada retribusi jasa umum dimana RSUD Kota Sawahlunto menjadi BLUD sehingga pencatatan retribusi pelayanan kesehatan dari RSUD dicatat sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sedangkan dana bagi hasil pajak/bukan pajak untuk tahun 2011 sebesar Rp. 15.213.304.412,- meningkat menjadi Rp. 15.476.081.447,- pada tahun 2015, atau sebesar 10.12%, yang disebabkan meningkatnya bagi hasil pajak penghasilan, bagi hasil iuran eksplorasi dan eksploitasi (royalty).

4. Persentase Desa yang Berstatus Swasembada

Berdasarkan statusnya desa diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yakni Swadaya (tradisional), Swakarya (transisional) dan desa Swasembada (berkembang). Desa swadaya adalah desa yang memiliki potensi tertentu tetapi dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan ciri : daerahnya terisolir dengan daerah lainnya, penduduknya jarang, mata pencaharian homogen yang bersifat agraris, bersifat tertutup, masyarakat memegang teguh adat, teknologi masih rendah, sarana dan prasarana sangat kurang, hubungan antarmanusia sangat erat dan pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga.

Desa swakarya adalah peralihan atau transisi dari desa swadaya menuju desa swasembada. Ciri-ciri desa swakarya adalah : kebiasaan atau adat istiadat sudah tidak mengikat penuh, sudah mulai mempergunakan alat-alat dan teknologi, desa swakarya sudah tidak terisolasi lagi walau letaknya jauh dari pusat perekonomian, telah memiliki tingkat perekonomian, pendidikan, jalur lalu lintas dan prasarana lain, alur lalu lintas antara desa dan kota sudah agak lancar.

Desa swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional. Ciri-ciri desa swasembada : kebanyakan berlokasi di ibukota kecamatan, penduduknya padat-padat,

tidak terikat dengan adat istiadat, telah memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai dan lebih maju dari desa lain dan partisipasi masyarakatnya sudah lebih efektif.

Berikut disajikan data mengenai jumlah desa swadaya, swakarya dan swasembada di Kota Sawahlunto tahun 2011 - 2015.

Tabel 2.73 Persentase Desa Berstatus Swasembada terhadap Total Desa di Kota Sawahlunto

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Desa Swadaya	-	-	-	-	-
2	Jumlah Desa Swakarya	27	27	27	27	27
3	Jumlah Desa Swasembada	-	-	-	-	-
4	Jumlah Desa (1+2+3)	27	27	27	27	27
5	Persentase Desa Berstatus Swasembada Dibagi Jumlah Desa(3 / 4)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Sumber : Kantor PMPKE

Dari uraian dan tabel diatas terlihat bahwa dari kurun waktu 2008 - 2012 desa yang ada di Kota Sawahlunto tidak memiliki desa yang berstatus desa swadaya hanya ada desa swakarya yang dalam proses menuju desa swasembada.

2.4.3 FASILITAS WILAYAH/INFRASTRUKTUR

1. Luas Wilayah Produktif

Berdasarkan data berikut terlihat bahwa sejak 2011 luas wilayah produktif di kota Sawahlunto tidaklah mengalami banyak perubahan sampai tahun 2015 pada kisaran 15.330 Ha.

Tabel 2.74 Luas Wilayah Produktif Tahun 2011-2015

TAHUN	LUAS WILAYAH PRODUKTIF (HA)
2011	15.330
2012	15.330
2013	15.330
2014	15.330
2015	15.330

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka 2015

2. Luas Wilayah Industri

Berdasarkan data dibawah ini terlihat bahwa sejak 2008 luas wilayah industri di kota Sawahlunto tidaklah mengalami banyak perubahan sampai tahun 2012 pada kisaran 70 Ha.

Tabel 2.75 Luas Wilayah Industri Tahun 2011-2015

Tahun	Luas Wilayah Industri (ha)
2011	70
2012	70
2013	70
2014	70
2015	70

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka 2015

3. Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang

Lembaga perbankan mempunyai peranan yang amat strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu daerah. Berdasarkan usahanya lembaga bank yang ada di Kota Sawahlunto terdiri dari bank konvensional dan bank syariah. Perkembangan lembaga perbankan di Kota Sawahlunto dari tahun 2009 sampai tahun 2014 sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.76 Perkembangan Perbankan dari Tahun 2011-2015

No	Tahun	Jumlah bank
1.	2011	5
2.	2012	5
3.	2013	5
4.	2014	8
5.	2015	8

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka 2015

Dilihat dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa lembaga perbankan yang ada di Kota Sawahlunto mulai mengalami peningkatan pada tahun 2014, karena bertambahnya bank syariah disamping bank konvensional yang ada. Keberadaan lembaga perbankan di Kota Sawahlunto sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya terutama untuk pinjaman usaha.

4. Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran

Sebagai sebuah kota yang bervisikan pariwisata, maka yang tak kalah pentingnya adalah untuk melihat struktur pendukung industry pariwisata di Sawahlunto. Salah satu struktur pendukung tersebut adalah industry kuliner. Ketersediaan pilihan kuliner di Sawahlunto cukup beragam yang buka dari pagi hingga tengah malam. Lokasi-lokasi menarik untuk berburu kuliner di sore hingga malam hari tersebar dari pinggir jalan lintas sumatera di kawasan Muaro Kalaban, Silungkang, Lapangan Segitiga didepan kantor PTBA pusat Kota hingga ke arah paling utara Kec. Talawi. Belum ada tempat makan sekelas Restoran di kota Sawahlunto, akan tetapi jumlah Rumah Makan cukup banyak sebagaimana terlihat pada table berikut:

Tabel 2.77 Perkembangan Rumah Makan dari Tahun 2011-2015

Rumah Makan	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Usaha	40	40	41	41	41
Jumlah Kursi	1279	1279	1286	1286	1286

Sumber: Data Profil

Akan tetapi jumlah sebagaimana table diatas hanyalah untuk rumah makan dengan definisi memiliki bangunan permanen atau semi permanen. Sedangkan untuk tempat makan jenis kaki lima jumlahnya diperkirakan mencapai 200 an.

5. Ketaatan Terhadap RTRW

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sawahlunto 2012-2032 yang mana Pola Ruang terdiri dari Kawasan Lindung Dan Kawasan Budidaya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.78 Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya Kota Sawahlunto Tahun 2015

NO	POLA RUANG	LUAS (HA)
I	Kawasan Lindung	209.86
1	Daerah Hijau	936.66
2	Danau	28.98
3	Hutan Lindung	72.71
4	Taman	14.49
6	RTH taman	37.06
7	Hutan Kota Kolok	70.00
8	Hutan Kota	1,074.79
II	Kawasan Budidaya	25,110.32
1	Sawah	1.772
2	Tambang	2,024.08
3	Hutan Produksi	6,802.48
4	Hutan Produksi Konversi	4,113.18
5	Pemukiman	3,461.90
6	Pendidikan Tinggi	19.14
7	Perkantoran	127.48
8	Pertanian Lahan Kering	6,039.36
9	Wisata Kandih	400.00
10	TPA	25.54
	Total	27,345.00

Sumber: RTRW Kota Sawahlunto

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis ditetapkan kawasan strategis di Kota Sawahlunto, meliputi :

- a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;

Desa Muara Kalaban, Kecamatan Silungkang ditetapkan sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala regional didukung oleh pengembangan terminal Tipe B dan terminal bongkar muat barang
- b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
 - Kawasan Kota Lama, Kecamatan Lembah Segar sebagai kawasan pelestarian budaya atau cagar budaya;
 - Kawasan rencana pusat pemerintahan di Kawasan Kolok dan Sijantang, guna peningkatan pelayanan pemerintahan kota dan identitas kota
- c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- d. Kawasan Kandih, Kecamatan Barangin untuk pengembangan wisata

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab/Kota bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah harus dilakukan peninjauan kembali terutama dalam proses persetujuan substansi materi teknis oleh BKPRN.

Sustansi materi teknis dimaksud menyangkut Peta Dasar yang digunakan sehingga luas wilayah administrasi Kab/Kota harus tepat dan pasti. Pada tahun 2016 ini sedang disusun pembuatan peta dasar RTRW dan pada tahun 2017 akan dilakukan peninjauan kembali RTRW 2012-2032.

6. Luas Wilayah Kekeringan

Wilayah kekeringan umumnya terdapat di daerah perbukitan Kecamatan Silungkang Oso dan Silungkang Duo dan Kecamatan Barangin sebagian Talago Gunung dan Balai Batu Sandaran serta di daerah yang tidak memiliki sumber air permukaan Kecamatan Talawi seperti di Bukit Gadang, Batu Tanjung, Tumpuk Tengah, Datar Mansiang, Kumbayau, Sikalang, Salak dan Sijantang Koto. Luas wilayah kekeringan ini ±76,18 Ha dengan wilayah kekeringan terluas terdapat di Kecamatan Talawi seluas ±55,65 Ha sebagai dampak dari kegiatan tambang.

7. Luas Wilayah Kebanjiran

Topografi wilayah kota yang ada dengan tingkat kemiringan rata-rata diatas 15 %, tidak memungkinkan terjadi banjir di suatu kawasan karena kecepatan aliran air sangat tinggi. Hanya saja terdapat beberapa kawasan yang tergenang disebabkan luapan sungai yang ada disekitar kawasan antara lain seperti sepanjang aliran sungai Batang Lasi di Silungkang Duo dan Silungkang Tigo, sepanjang aliran batang Ombilin di Talawi Hilir dan Sijantang. Luas wilayah tergenang luapan sungai ini ±11,50 Ha yang berlangsung selama 2-3 jam dan terjadi 1x setahun.

8. Luas Wilayah Perkotaan

Wilayah perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan social, dan kegiatan ekonomi. Untuk lebih jelasnya luas wilayah perkotaan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.79 Luas Wilayah Perkotaan Tahun 2015

NO	NAMA WILAYAH PERKOTAAN	LUAS (Km ²)	JUMLAH PENDUDUK (jiwa) 2015	JUMLAH PENDUDUK (jiwa) 2015
I	KECAMATAN LEMBAH SEGAR		7.310	6.861
1	Pasar	0,50	1.560	1.498
2	Kubang Sirakuk Utara	0,28	1.012	971
3	Kubang Sirakuk Selatan	0,27	1.150	1.121
4	Aur Mulyo	0,20	1.160	1.090
5	Tanah Lapang	0,16	1.373	1.218
6	Air Dingin	0,14	1.055	963
II	KECAMATAN BARANGIN		8.215	7.272
1	Saringan	0,81	1.932	1.779
2	Lubang Panjang	1,00	1.436	1.243
3	Durian I	1,17	2.648	2.144
4	Durian II	1,25	2.199	2.106
	TOTAL	5.78	15.525	14.133

Sumber : Dinas Dukcapil 2015

Luas wilayah perkotaan hanya 5,78% atau 2,11% dari luas wilayah dengan jumlah penduduk sebanyak 14.133 orang. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan utama masyarakat kota Sawahlunto masih bertumpu pada sektor pertanian yang berada di wilayah pedesaan yang mencakup 97,89% dari luas wilayah kota. Namun apabila melihat tingkat perkembangan kegiatan pembangunan sepuluh tahun belakangan ini menunjukkan bahwa kegiatan perdagangan dan jasa sudah sangat meningkat di wilayah pinggiran perkotaan seperti Muaro Kalaban, Santur, Talawi Hilir, Sijantang. Disamping itu penduduk pinggiran perkotaan tersebut juga sangat heterogen sebagai

dampak keberadaan berbagai sektor tambang, energi skala nasional dan pertumbuhan ekonomi lainnya.

9. Persentase RT yang Menggunakan Air Bersih

Sistem penyediaan air minum yang digunakan rumah tangga dapat dibedakan menjadi sistem perpipaan (unit air baku, unit produksi, transmisi, dan distribusi) dan sistem non-perpipaan (sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air). Dalam memenuhi kebutuhan akan air bersih, masyarakat memiliki keragaman akses terhadap sumber air sesuai dengan kemampuan aksesibilitasnya dan ketersediaan sarana dan prasarannya. Selengkapya cakupan rumah tangga yang memiliki akses air minum baik dengan sistem perpipaan maupun non perpipaan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.80 Persentase Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Tahun 2011-2015

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Rumah Tangga	14.374	13.891	14.509	14.841	14.452
2	Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih	7.994	9.156	12.763	13.385	13.650
3	Persentase	55,61	65,91	88,96	90,19	94,45

Sumber : Bappeda 2014

Proporsi rumah tangga dengan akses air bersih dengan adanya berbagai program yang telah digulirkan oleh Pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terus mengalami peningkatan yaitu 71,08 % tahun 2010, menjadi 90,19% pada tahun 2014. Capaian ini sudah melewati target MDGs tahun 2015 yaitu sebesar 68,5%, namun dari segi kualitas, kuantitas dan kontinuitas masih perlu ditingkatkan agar mencapai pelayanan 100% di bidang air minum.

10. Persentase RT dengan Sarana Sanitasi Layak

Kepemilikan sarana sanitasi dasar yang dimiliki oleh keluarga di Kota Sawahlunto meliputi jamban keluarga, tempat sampah dan pengelolaan air limbah dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.81 Persentase RT dengan Sanitasi Layak Tahun 2011-2015

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Rumah Tangga	14.051	14.209	14.359	14.509	14.841
2	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi	9.372	9.601	9.736	9.861	11.083
3	Persentase	66,70	67,57	67,80	67,96	74,68

Sumber: SIPD Kota Sawahlunto 2015

Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi dasar dengan adanya berbagai program yang telah digulirkan oleh Pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terus mengalami peningkatan yaitu 66,70 % di tahun 2010, meningkat menjadi 74,68% di tahun 2015. Dengan meningkatnya jumlah keluarga yang telah akses terhadap sanitasi dasar (jamban keluarga) berdampak terhadap meningkatnya jumlah Desa / Kelurahan yang telah dinyatakan sebagai Desa/Kelurahan ODF (Open Defecation Free) / SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan) yang semula 3 buah di tahun 2010, menjadi 19 buah di tahun 2014 buah Desa/Kelurahan.

11. Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Ketersediaan daya listrik di Kota Sawahlunto hingga saat ini disediakan oleh PT.PLN dalam suatu jaringan terkoneksi pada sistem kelistrikan Sumatera dimana termasuk didalamnya PLTU Ombilin yang berkapasitas terpasang 2 x 100 mw.

12. Persentase RT yang Menggunakan Listrik

Pada saat ini listrik merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting bagi rumah tangga. Hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya pemakaian listrik setiap tahunnya seperti tabel berikut:

Tabel 2.82 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Tahun 2011-2015

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Rumah Tangga (RT)	14.244	14.352	14.578	14.729	14.452
2	Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan listrik (RT)	11.997	12.375	13.340	13.294	13.500
3	Persentase Rumah tangga yang menggunakan listrik (%)	84.22	86.22	91.51	90.25	93.41

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2015

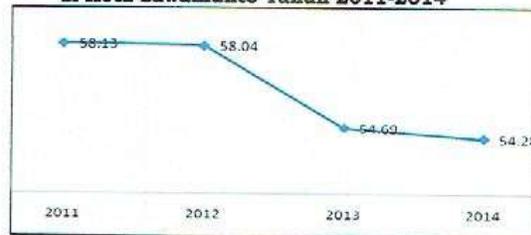
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik meningkat dari 84.22 pada tahun 2011 menjadi 93.41% pada tahun 2015, hal ini menggambarkan bahwa masih terdapat sekitar 9.75% rumah tangga yang belum teraliri aliran listrik.

2.4.4 FOKUS SUMBER DAYA MANUSIA

1. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan penduduk tidak produktif lagi disamping membiayai dirinya sendiri. Berikut ini perkembangan rasio ketergantungan penduduk 2011-2015.

Grafik 2.21 Rasio Ketergantungan di Kota Sawahlunto Tahun 2011-2014



Sumber : Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2015

Rasio ketergantungan Kota Sawahlunto tahun 2012 mengalami sedikit penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2011. Jika tahun 2011 rasio ketergantungan hanya sebesar 58,13%, maka tahun 2012 meningkat menjadi 58,04%. Sampai dengan tahun 2014, rasio ketergantungan ini cenderung mengalami penurunan, menjadi 54,28%. Dengan kata lain, setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) di Kota Sawahlunto mempunyai tanggungan sebanyak 54 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

BAB III
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
SERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah menyebutkan bahwa pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah Kota Sawahlunto terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari pemerintah provinsi atau pemerintah daerah lainnya, dana penguatan dan percepatan pembangunan serta pendapatan lainnya.

Pendapatan daerah Kota Sawahlunto antara tahun 2011 – 2015 mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 0,09%. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh pertumbuhan sumber pendapatan yang berasal dari semua komponen pendapatan kecuali Retribusi Daerah dan Dana bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Pendapatan Hibah sebesar 52,39 %. Tahun anggaran 2011 realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto sebesar Rp. 36.382.150.723,32 dan meningkat menjadi Rp. 52.268.500.528,19 pada tahun anggaran 2015. Berarti dalam kurun waktu 5 tahun tersebut terjadi pertumbuhan rata-rata sebesar 0,10 %. Sedangkan pendapatan daerah yang berasal dari Dana Perimbangan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,15 %, yaitu meningkat dari Rp.273.921.926.757,00 pada tahun anggaran 2011 menjadi Rp.471.923.233.686,00 pada tahun anggaran 2015, hal ini disebabkan adanya Dana Alokasi Desa sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 dan peningkatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

Sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah juga memberikan dampak yang signifikan terhadap pendapatan daerah Kota Sawahlunto dimana pertumbuhan rata-ratanya sebesar 0,44 %, dimana kontribusi pertumbuhan rata-rata terbesar dari Pendapatan Hibah dan Pendapatan Lainnya.

Melihat komposisi pendapatan daerah Kota Sawahlunto dana perimbangan menjadi penyumbang terbesar bagi pendapatan daerah sehingga untuk kelancaran pembangunan kota sangat tergantung dari bantuan keuangan dari pusat. Untuk itu, pada masa yang akan datang harus diupayakan bagaimana meningkatkan sumber pendapatan yang berasal dari potensi yang dimiliki daerah sendiri sehingga proporsi pendapatan asli daerah terhadap keseluruhan pendapatan daerah akan meningkat.

Perkembangan realisasi pendapatan daerah dan pertumbuhan rata-rata per tahun dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Jumlah dan Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Kota Sawahlunto, tahun 2011-2015

No	Uraian	TA 2011	TA 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%)
	PENDAPATAN	390.092.080.172,32	388.411.434.769,46	428.681.501.793,92	488.505.317.004,27	537.483.628.214,19	0,09
A	Pendapatan Asli Daerah	36.382.150.723,32	34.887.767.757,46	37.104.573.790,92	48.680.391.650,27	52.268.500.528,19	0,10
1	Pajak Daerah	2.320.146.288,00	2.969.920.454,00	3.185.508.186,00	4.190.396.080,04	4.101.043.541,00	0,16
2	Retribusi Daerah	3.822.298.285,00	2.295.581.904,00	3.044.138.867,00	2.885.464.543,00	2.540.177.543,00	(0,06)
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	6.633.070.554,00	6.763.117.937,00	8.342.355.040,00	9.151.546.652,00	8.280.727.904,00	0,06
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	23.696.635.626,32	22.859.147.462,46	22.532.571.697,92	32.452.984.375,23	37.346.851.540,19	0,14
B	Dana Perimbangan	273.921.926.757,00	317.637.773.012,00	358.979.022.723,00	436.449.625.354,00	471.923.233.686,00	0,15
1	Dana bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bulanan Pajak	22.708.276.757,00	28.439.344.012,00	18.777.454.723,00	21.563.293.390,00	15.476.081.447,00	(0,06)
2	Dana Alokasi Umum	225.119.750.000,00	268.961.519.000,00	296.397.490.000,00	332.780.291.937,00	344.941.712.000,00	0,34
3	Dana Alokasi Khusus	26.093.900.000,00	20.236.910.000,00	30.307.130.000,00	31.072.890.000,00	49.424.430.000,00	0,23
4	Dana Alokasi Desa	-	-	-	-	8.191.432.000,00	-
6	Dana Penyesuaian	-	-	31.421.831.000,00	34.786.227.000,00	34.203.008.000,00	-
6	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	12.075.117.000,00	16.246.923.027,00	19.686.570.239,00	-
C	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	79.788.002.692,00	35.885.894.000,00	2.597.905.280,00	3.375.300.000,00	13.291.804.000,00	0,44
1	Hibah	9.000.000,00	10.020.000,00	2.075.800.000,00	1.470.300.000,00	6.708.204.000,00	52,39
2	Dana darurat	-	-	-	-	-	-
3	Dana bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	11.914.840.092,00	11.289.150.000,00	-	-	-	-
4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	50.810.615.600,00	24.086.724.000,00	-	-	-	-
5	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau pemerintah daerah lainnya	-	-	-	-	-	-
6	Dana Pengisian dan Percepatan Pembangunan	17.053.547.000,00	-	-	-	-	-
7	Pendapatan Lainnya	-	500.000.000,00	522.105.280,00	1.905.000.000,00	6.583.600.000,00	-

Sumber Data : DPPKAD Kota Sawahlunto

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca menggambarkan tentang aset, kewajiban/utang dan ekuitas yang dimiliki oleh suatu organisasi, termasuk organisasi Pemerintah Daerah. Secara umum, transaksi yang akan mempengaruhi neraca daerah adalah transaksi yang berasal dari belanja modal dan pembiayaan. Jika ada belanja modal akan terjadi peningkatan aset tetap daerah. Sedangkan jika ada pengeluaran pembiayaan maka akan terjadi peningkatan investasi jangka panjang, dana cadangan dan atau penurunan kewajiban. Jika ada penerimaan pembiayaan, maka akan terjadi penurunan investasi jangka panjang, pengurangan dana cadangan, atau kenaikan kewajiban.

Berdasarkan Neraca Kota Sawahlunto tahun anggaran 2011 terlihat bahwa Aset sebesar Rp. 755.939.005.575,77. Komposisi Aset Tetap jauh lebih besar dibandingkan dengan Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang dan Aset Lainnya, yaitu dengan perbandingan 81,26 % aset tetap, 10,00 % aset lancar dan 8,74 % investasi jangka panjang. Aset Lancar mengalami penurunan pertumbuhan rata-rata sebesar (0,03) % dari tahun 2011 s.d 2015. Pertumbuhan rata-rata Investasi

Jangka Panjang sebesar 0,07 % dimana nilai investasi jangka panjang tahun 2011 sebesar Rp. 66.010.492.289,00 menjadi Rp. 82.453.262.493,06 pada tahun 2015. Sedangkan kenaikan pertumbuhan rata-rata Aset Tetap sebesar 0,08 % dari tahun 2011 s.d 2015.

Aset yang dimiliki Kota Sawahlunto menunjukkan peningkatan, yaitu dari Rp. 755.939.005.575,77 tahun anggaran 2011 menjadi Rp. 986.789.179.861,32 pada tahun anggaran 2015, yang berarti terjadi pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 0,07 %. Peningkatan ini dihasilkan antara lain melalui belanja modal setiap tahunnya, peningkatan aset lancar dan peningkatan investasi jangka panjang. Namun sampai saat ini Kota Sawahlunto tidak memiliki dana cadangan karena belum dilakukan penyisihan anggaran untuk pembangunan kedepan. Sedangkan aset lainnya diakui tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 16.274.728.998 karena adanya tuntutan ganti kerugian daerah Rp. 47.187.500 aset tidak berwujud Rp. 73.728.000 serta aset lain-lain Rp. 16.153.813.498.

Sesuai dengan konsep keseimbangan, pertumbuhan aset tersebut juga diikuti dengan pertumbuhan jumlah kewajiban dan ekuitas dana. Pertumbuhan rata-rata ekuitas dana per tahun sebesar 0,07 %. Sedangkan untuk kewajiban terjadi pertumbuhan yang sangat besar yaitu dengan rata-rata per tahun sebesar 6,60 % hal ini disebabkan utang pemerintah Kota Sawahlunto kepada pemerintah pusat. Tabel 3.2 berikut menyajikan jumlah dan pertumbuhan rata-rata aset, kewajiban dan ekuitas dana.

Tabel 3.2
Jumlah dan Pertumbuhan Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana
Kota Sawahlunto, tahun 2011 - 2015

Uraian	TA 2011	TA 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%)
ASET						
Aset Lancar	75.553.350.362,09	55.415.806.834,49	64.704.478.745,10	87.015.215.431,99	57.795.634.083,79	(0,03)
Investasi Jangka Panjang	66.010.492.289,00	84.542.149.522,44	76.743.617.578,29	71.600.563.329,06	82.453.262.493,06	0,07
Aset Tetap	614.375.153.924,58	669.091.214.196,66	741.416.230.813,46	816.339.147.689,38	816.910.908.780,03	0,08
Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
Aset Lainnya	-	16.274.728.998,00	37.372.202.058,10	26.201.389.584,14	29.629.374.504,44	0,38
JUMLAH ASET	755.939.005.575,77	825.323.898.551,59	920.236.528.894,95	1.001.156.316.004,57	986.789.179.861,32	0,07
KEWAJIBAN DAN EKUITAS						
KEWAJIBAN						
Kewajiban Jangka Pendek	254.732.350,00	862.830.466,36	3.287.443.422,40	5.784.585.679,56	5.152.944.326,00	1,46
Kewajiban Jangka Panjang	-	5.516.979.776,00	17.499.999.776,00	17.499.999.776,00	17.589.534.479,00	0,73
JUMLAH KEWAJIBAN	254.732.350,00	6.379.810.242,36	20.787.443.198,40	23.284.585.455,56	22.742.478.805,00	6,60
EKUITAS DANA						
Ekuitas Dana Lancar	75.298.626.812,09	84.552.975.368,13	61.417.035.322,70	81.230.629.752,43	52.642.689.757,79	(0,05)
Ekuitas Dana Investasi	680.385.646.213,68	764.391.112.941,10	838.032.080.373,85	896.641.100.756,58	911.404.011.298,53	0,05
Ekuitas Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
JUMLAH EKUITAS DANA	755.684.273.025,77	818.944.088.309,23	899.449.085.696,55	977.871.730.509,01	964.046.701.056,32	0,07
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	755.939.005.575,77	825.323.898.551,59	920.236.528.894,95	1.001.156.316.004,57	986.789.179.861,32	0,04

Sumber Data : DPPKAD Kota Sawahlunto

Untuk memahami kemampuan keuangan Kota Sawahlunto dapat dilakukan analisis rasio keuangan, meliputi rasio lancar, kas rasio, rasio total utang terhadap total aset dan rasio utang terhadap modal. Rasio lancar dan kas rasio keduanya dimaksudkan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah

dalam membayar hutang lancarnya pada saat jatuh tempo, tetapi kas rasio lebih menunjukkan kemampuan riil berdasarkan kas yang dimiliki. Sedangkan rasio total hutang terhadap total aset dan rasio total utang terhadap ekuitas dana, sama-sama menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi seluruh kewajibannya seandainya aset atau aset bersih digunakan.

Berdasarkan analisis rasio lancar (current ratio), untuk tahun 2011 rasio lancar sebesar 296,60 artinya pemerintah Kota Sawahlunto mampu melunasi hutang jangka pendeknya sebanyak 296 kali pada saat jatuh tempo, 64 kali pada tahun 2012, 19 kali pada tahun 2013, 15 kali pada tahun 2015 dan 11 kali pada tahun tahun 2015. Untuk quick ratio, setelah aset lancar dikurangi dengan persediaan maka kemampuan pemerintah Kota Sawahlunto dalam melunasi hutang jangka pendek pada saat jatuh tempo 277 kali pada tahun 2011, 56 kali pada tahun 2012, 17 kali pada tahun 2013, 13 kali pada tahun 2014 dan 11 kali pada tahun 2015.

Sedangkan rasio total utang terhadap total aset dan rasio total utang terhadap total ekuitas tidak sampai 1 %, artinya kewajiban pemerintah Kota Sawahlunto tidak sampai 1 % dibandingkan dengan total aset dan total ekuitas dana, dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3
Analisis Rasio Keuangan Kota Sawahlunto
Tahun 2011 - 2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rasio lancar (current ratio)	296,60	64,23	19,68	15,04	11,22
2	Rasio quick (quick ratio)	277,92	58,63	17,47	13,75	10,18
3	Rasio total hutang terhadap total aset	0,0004	0,0078	0,0226	0,0233	0,0231
4	Rasio hutang terhadap modal	0,0004	0,0078	0,0232	0,0239	0,0236

Sumber Data : DPPKAD Kota Sawahlunto

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Pengklasifikasi belanja berdasarkan belanja langsung dan belanja tidak langsung terkait metode penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja. Pengertian anggaran berbasis kinerja adalah penggunaan anggaran berdasarkan out put yang dihasilkan. Menurut keputusan Menteri dalam negeri nomor 29 tahun 2002 yang sekarang berubah menjadi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dalam era otonomi daerah disusun dengan pendekatan kinerja, artinya sistim anggaran yang mengutamakan pencapaian hasil kinerja atau keluaran (output) dari perencanaan alokasi biaya yang telah ditetapkan. Dengan demikian diharapkan penyusunan dan pengalokasian anggaran dapat lebih disesuaikan dengan skala prioritas dan preferensi daerah yang bersangkutan. Dalam anggaran berbasis kinerja, setiap penggunaan sumber daya yang direncanakan dalam APBD harus dapat dikaitkan dengan produk berupa barang atau jasa yang akan dihasilkan, kecuali untuk belanja tidak langsung yang memang tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan barang atau jasa yang dihasilkan.

Belanja Pemerintah Kota Sawahlunto dalam kurun waktu tahun anggaran 2011 s.d tahun anggaran 2015 mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 0,11 %. Pada tahun anggaran 2011 realisasi jumlah belanja Rp.

358.121.822.422,00 dan pada akhir tahun anggaran 2015 menjadi Rp. 549.999.794.211,56.

Pada tahun anggaran 2011 s.d 2013, realisasi Belanja Langsung lebih besar dari belanja tidak langsung. Sedangkan tahun anggaran 2014 - 2015 realisasi belanja langsung lebih besar daripada belanja tidak langsung dikarenakan kenaikan Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal.

Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung rata-rata per tahun adalah 0,06 %, yaitu dari Rp. 193.261.663.399,00 pada tahun anggaran 2011 menjadi Rp. 243.626.476.842,56 pada tahun anggaran 2015. Analisis elemen pembentuk belanja tidak langsung seperti belanja pegawai untuk belanja tidak langsung lebih besar daripada belanja langsung hal ini disebabkan bertambahnya jumlah pegawai dan adanya kenaikan gaji pokok pegawai. Belanja bunga penyumbang besarnya belanja tidak langsung disamping belanja bantuan sosial. Pertumbuhan rata-rata belanja bunga dari tahun 2012 s.d 2015 sebesar 4,61 % dimana tahun 2012 sebesar Rp. 69.420.236,48 menjadi Rp. 1.419.502.759,60 tahun 2015 disebabkan pembayaran bunga hutang.

Sedangkan pertumbuhan rata-rata untuk Belanja Langsung dari tahun 2011 s.d 2015 sebesar 0,17 %. Dari tiga komponen Belanja Langsung yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal, pertumbuhan rata-rata tertinggi terjadi pada belanja barang dan jasa, dimana tahun 2011 realisasi sebesar Rp. 73.175.977.163,00 menjadi Rp. 169.985.487.989,00 pada tahun 2015. Sehingga pertumbuhan rata-ratanya sebesar 0,25 %. 0,20 % untuk belanja modal dan 0,16 % untuk belanja pegawai.

Dari penjelasan diatas terlihat pemerintah memprioritaskan terlebih dahulu anggaran untuk belanja pegawai yang meliputi gaji pegawai, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, serta gaji dan tunjangan Kepala Daerah, serta memperhitungkan kewajiban daerah dalam belanja tidak langsung lainnya seperti belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan sebagainya. Selain itu juga harus memperhitungkan kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menunjang tupoksinya masing-masing seperti biaya alat tulis kantor, listrik, air, telepon, biaya rapat, koordinasi, honorarium non PNS, pemeliharaan peralatan, pemeliharaan kendaraan dinas dan lain-lain sejenisnya yang dalam penganggarannya harus mempertimbangkan tingkat efisiensi, seperti terlihat pada tabel 3.4 dibawah ini.

Tabel 3.4
Jumlah dan Pertumbuhan Realisasi Belanja
Kota Sawahlunto, tahun 2011 - 2015

No	Uraian	TA 2011	TA 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%)
A	Belanja Tidak Langsung	193.261.663.399,00	212.682.269.452,48	221.659.710.363,79	234.176.192.656,27	243.626.476.842,56	0,06
1	Belanja Pegawai	168.804.889.474,00	187.742.271.859,00	192.263.580.319,00	204.008.877.809,00	216.149.195.393,00	0,06
2	Belanja Bunga	-	69.420.236,48	1.001.057.845,79	1.446.059.009,27	1.419.502.759,60	4,61
3	Belanja Subsidi	1.448.730.594,00	32.874.963,00	-	-	-	-
4	Belanja Hibah	1.822.991.500,00	8.063.648.725,00	10.078.163.154,00	5.985.241.827,00	2.060.000.000,00	0,05
5	Belanja Bantuan Sosial	10.593.450.191,00	30.000.000,00	247.308.400,00	840.358.500,00	-	3,18
6	Belanja Bagi Hasil	3.935.302.500,00	11.539.258.935,00	10.386.855.907,00	15.028.794.645,00	2.731.344.000,00	0,12
7	Belanja Bantuan Keuangan	3.171.631.500,00	3.453.345.744,00	3.605.885.338,00	4.237.492.866,00	21.266.434.689,96	1,09
8	Belanja Tidak Terduga	1.484.667.640,00	1.751.749.000,00	4.076.859.400,00	2.629.368.000,00	-	0,38
B	Belanja Langsung	164.860.159.023,00	172.102.698.333,00	194.311.907.977,00	238.216.771.154,47	306.373.317.369,00	0,17
1	Belanja Pegawai	21.012.837.214,00	25.039.609.475,00	33.553.649.786,35	41.075.714.313,37	944.150.500,00	0,16
2	Belanja Barang	73.175.977.163,00	79.306.326.411,00	92.065.340.163,00	109.056.142.774,00	169.985.487.989,00	0,25

No	Uraian	TA 2011	TA 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%)
	dan Jasa						
3	Belanja Modal	70.671.344.646,00	67.756.762.447,00	68.692.918.027,75	88.084.914.067,00	135.443.678.880,00	0,20
	Total Belanja	358.121.822.422,00	394.784.967.785,48	415.971.618.340,89	472.392.963.810,74	549.999.794.211,56	0,11
C	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					14.081.000.000	
	Penyerahan Modal	-	-	-	-	14.081.000.000	

Sumber Data : DPPKAD Kota Sawahlunto

Pengeluaran belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dimaksudkan untuk mengetahui jumlah belanja untuk aparatur, baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung, termasuk belanja untuk anggota DPRD dan Kepala Daerah serta belanja modal yang diperuntukkan bagi aparatur. Semakin tinggi alokasi belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur berarti semakin terbatas dana yang dapat digunakan untuk melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Sejalan dengan kebijakan belanja yang dibuat oleh Pemerintah Kota Sawahlunto dalam kurun waktu 2011 - 2015, kebijakan belanja aparatur menunjukkan kebijakan yang relatif baik. Hal ini dapat dilihat pada realisasi belanja untuk aparatur sebesar Rp. 205.380.012.888,00 pada tahun 2011 menjadi Rp. 274.017.281.231,00 pada tahun 2015 atau terjadi pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 0,16 %.

Peningkatan terbesar untuk belanja aparatur ini terutama pada belanja gaji dan tunjangan belanja tidak langsung, hal ini sebagaimana diterangkan diatas terjadi karena adanya kenaikan gaji pokok pegawai serta penerimaan pegawai baru. Sedangkan pada belanja langsung peningkatan terbesar terjadi pada belanja pegawai, belanja perjalanan dinas dan belanja modal.

Tabel 3.5
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Sawahlunto
Tahun 2011 - 2015

No	Uraian	TA 2011	TA 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%)
A	Belanja Tidak Langsung	168.804.889.474,00	187.742.271.859,00	-	204.008.877.809,00	216.149.195.393,00	0,09
1	Belanja gaji dan tunjangan	121.129.921.392,00	131.070.524.504,00	-	141.218.638.492,00	150.904.581.255,00	0,08
2	Belanja tambahan penghaaian	46.518.762.211,00	55.044.694.183,00	-	61.091.135.663,00	63.477.336.907,00	0,12
3	Belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH	814.500.000,00	1.313.748.600,00	-	1.352.740.000,00	1.408.000.000,00	0,33
4	Belanja pemungutan pajak daerah	341.705.871,00	107.017.345,00	-	75.921.928,00	92.228.800,00	(0,48)
5	Insentif pemungutan pajak daerah	-	206.287.227,00	-	270.441.726,00	168.672.956,00	-
6	Insentif pemungutan retribusi daerah	-	-	-	-	98.375.475,00	-
B	Belanja Langsung	36.575.123.414,00	42.007.062.818,00	-	57.890.871.542,00	57.868.085.838,00	0,07
1	Belanja honorarium pegawai	8.787.680.735,00	10.419.778.000,00	-	13.600.898.700,00	13.055.288.600,00	0,08
2	Uang lembur pegawai	729.882.000,00	663.237.500,00	-	778.447.500,00	944.150.500,00	0,06
3	Belanja beasiswa pendidikan PNS	141.125.000,00	240.925.000,00	-	147.398.500,00	95.000.000,00	0,18
4	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	2.529.578.989,00	4.902.067.900,00	-	6.035.002.975,00	4.833.300.835,00	0,37
5	Belanja premi asuransi kesehatan	820.449.645,00	325.000.000,00	-	340.800.000,00	1.825.487.160,00	1,88
6	Belanja makanan dan minuman pegawai	5.984.005.628,00	4.485.681.685,00	-	6.506.499.797,00	8.064.172.622,00	(0,01)

No	Uraian	TA 2011	TA 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%)
7	Belanja pakaian dinas dan atributnya	1.293.049.683,00	189.076.000,00	-	177.798.770,00	291.325.500,00	(0,11)
8	Belanja pakaian kerja khusus dan hari-hari tertentu	89.869.100,00	909.052.250,00	-	1.444.118.495,00	338.159.950,00	4,18
9	Belanja perjalanan dinas	10.962.173.687,00	13.839.824.125,00	-	17.967.111.975,00	12.877.498.124,00	(0,01)
10	Belanja perjalanan dinas tugas	-	-	-	-	-	-
11	Belanja pemulangan pegawai	34.950.000,00	419.045.000,00	-	255.000.000,00	192.500.000,00	5,38
12	Belanja modal (Kantor, mobil dinas, meubelair, peralutan dan perlengkapan dll)	5.202.358.977,00	5.613.375.358,00	-	10.617.794.830,00	15.351.202.547,00	0,26
	Total	205.380.012.888,00	229.749.354.677,00	-	229.749.354.677,00	274.017.281.231,00	0,16

Sumber Data : DPPKAD Kota Sawahlunto

Berdasarkan hasil pengolahan data perbandingan antara belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dengan total belanja terjadi tren penurunan proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dari kurun waktu 2011 - 2015. Pada tahun 2011 proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur adalah 57,35 % turun menjadi 49,83 % pada tahun 2015.

Dari analisis tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah dana yang dapat digunakan untuk menggerakkan pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terbatas. Dengan terbatasnya kemampuan pendanaan daerah, perlu diupayakan terjadinya pemerataan antar sektor, efisiensi penggunaan sumber daya, penyusunan standar biaya dan satuan harga, rasionalisasi berbagai program dan kegiatan yang lebih difokuskan tercapainya sasaran-sasaran prioritas.

Tabel 3.6
Proporsi Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kota Sawahlunto Tahun 2011 - 2015

No	Uraian	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total Belanja	Persentase
1	Tahun anggaran 2011	205.380.012.888,00	358.121.822.422,00	57,35
2	Tahun anggaran 2012	229.749.354.677,00	384.784.967.785,48	59,71
3	Tahun anggaran 2013	-	415.971.618.340,89	-
4	Tahun anggaran 2014	229.749.354.677,00	472.392.963.810,74	48,64
5	Tahun anggaran 2015	274.017.281.231,00	549.999.794.211,56	49,83

Sumber Data : DPPKAD Kota Sawahlunto

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan dapat dibedakan atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pasal 5 ayat 3 undang-undang no. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah menyebutkan bahwa pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sumber pembiayaan dibutuhkan untuk menutupi defisit yang terjadi, sedangkan jika terjadi surplus maka kelebihan tersebut dapat digunakan pembiayaan kebutuhan dana pada masa datang.

Analisis terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan Kota Sawahlunto tahun 2011 - 2015 menunjukkan bahwa lebih besar pendapatan daripada belanja kecuali tahun anggaran 2015 sehingga mengakibatkan Silpa yang cukup besar.

Tabel 3.7
Surplus (Defisit) Riil Anggaran Kota Sawahlunto
Tahun 2011 - 2015

No	Uraian	TA 2011	TA 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015
1	Realisasi Pendapatan Daerah	390.092.080.172,32	388.411.434.769,46	428.661.501.793,92	488.403.317.004,27	537.483.538.214,19
	Dilurangi realisasi :					
2	Belanja Daerah	358.121.822.422,00	384.784.967.785,46	415.971.618.340,80	472.392.563.810,74	549.999.794.211,56
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	3.304.000.000,00	19.611.000.000,00	9.931.000.000,00	9.593.000.000,00	13.898.000.000,00
A	Surplus (Defisit) Riil	28.666.257.750	(15.994.533.016)	2.778.883.453.03	6.419.353.193,53	(26.414.255.997,37)
	Ditutup oleh realisasi penerimaan pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya	33.160.893.632,77	62.031.987.236,09	45.850.594.997,07	53.625.100.393,10	73.307.146.454,63
5	Pengaliran Dumi Cadangan	-	-	-	-	-
6	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
7	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
8	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	4.995.621.943,00	13.262.692.868,00	-
9	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	447.828.924,00
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	33.160.893.632,77	62.031.987.236,09	50.846.216.940,07	66.887.793.261,10	73.754.975.378,63
B + A	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan	61.827.151.383,09	46.047.454.220,07	53.625.100.393,10	73.307.146.454,63	47.340.719.381,26

Sumber Data : DPPKAD Kota Sawahlunto

3.3. KERANGKA PENDANAAN

3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan harus dibayar setiap tahun oleh pemerintah daerah seperti belanja gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan dan belanja sejenis lainnya. Pengeluaran mengikat berarti pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Sedangkan belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh pemerintah daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas pemerintah daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya.

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama dimaksudkan untuk menganalisis jumlah kebutuhan dana yang tidak bias tidak harus dikeluarkan karena kewajiban pemerintah baik karena peraturan maupun karena ada perjanjian. Semakin tinggi jumlah pengeluaran wajib dan mengikat prioritas utama berarti semakin terbatas dana yang dapat digunakan untuk tujuan lainnya yang tidak terikat.

Karena selama ini Kota Sawahlunto tidak memiliki pinjaman, tidak ada dana cadangan, dan tidak memiliki kontrak sewa menyewa jangka panjang, maka

pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama terbatas pada belanja tidak langsung; gaji dan tunjangan, belanja dewan dan kepala daerah, belanja bunga, bagi hasil serta belanja langsung; belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis, belanja beasiswa pendidikan PNS dan belanja jasa kantor.

Hasil perhitungan pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama menunjukkan jumlah yang besar, yaitu Rp. 139.343.854.861,00 pada tahun 2011 dan meningkat menjadi Rp. 171.153.401.139,00 pada tahun 2015. Hal ini berarti dalam kurun waktu tersebut terjadi pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 0,05 %, sebagaimana terlihat pada tabel 3.8 dibawah ini.

Tabel 3.8
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kota Sawahlunto, tahun 2011 - 2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-Rata (%)
A	Belanja Tidak Langsung	127.879.723.892,00	143.923.532.039,00	-	157.600.173.137,00	156.463.428.014,00	0,06
1	Belanja gaji dan tunjangan	121.129.921.392,00	131.070.524.504,00	-	141.218.638.492,00	150.904.581.255,00	0,08
2	Belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH	814.500.000,00	1.313.748.600,00	-	1.352.740.000,00	1.408.000.000,00	0,33
3	Belanja bunga	-	-	-	-	1.419.502.759,00	-
4	Belanja bagi hasil	5.935.302.500,00	11.539.258.935,00	-	15.028.794.645,00	2.731.344.000,00	0,06
B	Belanja Langsung	11.464.130.969,00	10.741.261.741,00	-	14.469.440.708,00	14.689.973.125,00	(0,02)
1	Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis	-	-	-	-	-	-
2	Belanja beasiswa pendidikan PNS	141.125.000,00	240.925.000,00	-	147.398.500,00	95.000.000,00	0,18
3	Belanja jasa kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, telepon, air dan sejenisnya)	11.323.005.969,00	10.500.336.741,00	-	14.322.042.208,00	14.594.973.125,00	(0,03)
4	Belanja sewa gedung kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	-	-	-	-	-	-
C	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-	-
1	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-	-	-
2	Pembayaran pokok hutang	-	-	-	-	-	-
	A + B + C	139.343.854.861,00	154.664.793.780,00	-	172.069.613.845,00	171.153.401.139,00	0,05

Sumber Data : DPPKAD Kota Sawahlunto

3.3.2 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Proyeksi meningkatnya pengeluaran wajib dan mengikat ini tentunya harus diseimbangkan dengan peningkatan pendapatan daerah. Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut bersifat tertutup, artinya pemerintah daerah tidak dibenarkan membuat kebijakan untuk menciptakan jenis pajak dan retribusi daerah selain dari apa yang telah digariskan oleh undang-undang tersebut. Dengan undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah yang baru ada objek pendapatan asli daerah yang baru dan ada juga yang dihapus. Namun bagi Kota Sawahlunto dengan berlakukannya undang-undang tersebut dapat menaikkan jumlah PAD, namun mengakibatkan pengurangan pendapatan secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena ada sumber pendapatan daerah yang pada awalnya merupakan pajak pemerintah pusat yang dibagihasilkan kepada pemerintah daerah melalui Dana Bagi Hasil yang jumlahnya cukup besar menjadi pajak daerah yang potensi didaerah sangat kecil seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Tabel 3.9 Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 - 2018

No	Uraian	Proyeksi		
		TA 2016	TA 2017	TA 2018
A	Pendapatan Asli Daerah	59,146,174,458.00	65,060,791,904	71,566,871,094
1	Pajak Daerah	4,816,500,000.00	5,298,150,000	5,827,965,000.00
2	Retribusi Daerah	3,322,068,800	3,654,275,680	4,019,703,248
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	10,158,356,258	11,174,191,884	12,291,611,072
4	lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	40,849,249,400	44,934,174,340	49,427,591,774
B	Dana Perimbangan	554,831,682,241	610,314,850,465	671,346,335,512
1	Dana bagi Hasil Pajak	37,476,322,818	41,223,955,100	45,346,350,610
2	Dana Alokasi Umum	382,250,476,103	420,475,523,713	462,523,076,085
3	Dana Alokasi Khusus	116,708,572,320	128,379,429,552	141,217,372,507
4	Dana Alokasi Desa	18,396,311,000	20,235,942,100	22,259,536,310
C	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	26,391,085,580	29,030,194,138	31,933,213,552
1	Hibah	3,000,000,000	3,300,000,000	3,630,000,000
2	Dana Darurat	-	-	-
3	Dana bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	20,801,837,580	22,882,021,338	25170223472
4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	-
5	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau pemerintah daerah lainnya	2,555,248,000	2810772800	3091850080
6	Pendapatan Lainnya	34,000,000.00	37400000	41140000

No	Uraian	Proyeksi		
		TA 2016	TA 2017	TA 2018
	JUMLAH	640,368,942,279.00	704,405,836,506.90	774,846,420,157.59

Sumber : Data Olahan DPPKAD Kota Sawahlunto

Dari segi pajak daerah, selama periode tahun 2011 – 2014, pajak daerah mengalami peningkatan rata-rata per tahun sebesar 18,28 %. Walaupun pada tahun 2015 mengalami penurunan relative sedikit dan diperkirakan akan meningkat cukup signifikan pada tahun 2016 karena Pajak Bumi dan Bangunan mulai tahun 2014 akan dialihkan menjadi pajak daerah, disamping akan meningkatnya pajak hotel dan restoran serta pajak hiburan karena semakin meningkatnya kunjungan wisata ke Sawahlunto.

Penerimaan retribusi daerah, selama periode 2011 – 2015 meskipun secara pencatatan mengalami pertumbuhan yang negatif, namun sebetulnya tetap mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan semenjak tahun 2011 pendapatan dari RSUD yang dicatat sebagai retribusi daerah dipindahkan menjadi penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, karena adanya perubahan status RSUD menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kedepan retribusi daerah ini tetap akan mengalami peningkatan terutama yang akan mengalami peningkatan yang cukup besar adalah Retribusi Pelayanan Pasar khususnya pasar Sawahlunto yaitu mulai dioperasionalkannya pasar Sawahlunto tahun 2014.

Untuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan selama periode 2011–2015 mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu sebesar 29.82 %. Peningkatan ini disebabkan karena semakin besarnya deviden Bank Nagari serta bagian laba dari PT WWS yang diterima. Kedepan penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tersebut akan mengalami peningkatan dengan ditambahnya penyertaan modal pemerintah Kota Sawahlunto ke Bank Nagari serta semakin besarnya keuntungan PT WWS dan diperkirakan kedepan Hotel Parai yang merupakan aset daerah juga akan memperoleh keuntungan sehingga akan ada bagian laba yang akan diperoleh pemerintah daerah.

Sedangkan untuk lain-lain PAD yang Sah selama periode 2011 – 2015 mengalami peningkatan dan kedepan akan tetap meningkat. Kecuali untuk insentif PBB tidak lagi kita terima mulai tahun 2014 yang tentunya akan mengurangi Lain-Lain PAD yang Sah pada tahun 2014 tersebut dan setelah itu akan tetap mengalami peningkatan terutama untuk penerimaan bunga dan BLUD RSUD Sawahlunto.

Selanjutnya terhadap Dana Perimbangan, untuk Dana Bagi Hasil Pajak selama periode 2011 – 2015 hanya meningkat rata-rata sebesar 0,60 %. Rendahnya peningkatan ini disebabkan karena tidak adanya lagi dana bagi hasil BPHTB sejak berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2009. Sedangkan untuk dana Bagi Hasil Bukan Pajak mengalami rata-rata peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan terutama karena adanya peningkatan penerimaan royalty batubara. Untuk kedepan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak ini tetap meningkat, namun peningkatan ini relatif kecil karena semakin berkurangnya produksi batubara di Sawahlunto.

Pertumbuhan Dana Alokasi Umum (DAU) selama periode 2011 – 2015 mengalami peningkatan sebesar 10.36 % per tahun sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami peningkatan sebesar (7,82)%. Untuk kedepan pertumbuhan DAU dan DAK diperkirakan sama dengan tahun-tahun sebelumnya sepanjang tidak ada perubahan kebijakan oleh Pemerintah Pusat.

Tabel 3.10
Proyeksi Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016-2018

No	Uraian	2016	2017	2018
A	Belanja Tidak Langsung	306,510,096,041.34	314,172,848,442.37	322,027,169,653.43
1	Belanja Pegawai	236,309,038,801.34	242,216,764,771.37	248,272,183,890.66
2	Belanja Bunga	1,500,000.000	1,537,500,000.00	1,575,937,500.00
3	Belanja Subsidi	0	0	0
4	Belanja Hibah	7,432,772,500	7,618,591,812.50	7,809,056,607.81
5	Belanja Bantuan Sosial	100,000,000	102,500,000.00	105,062,500.00
6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	953,480,180	977,317,184.50	1,001,750,114.11
7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	59,464,804,560	60,951,424,674.00	62,475,210,290.85
8	Belanja Tidak Terduga	750,000,000	768,750,000.00	787,968,750.00
B	Belanja Langsung	401,076,719,815	411,103,637,810.38	421,381,228,755.63
	Total Belanja	707,586,815,856.34	725,276,486,252.75	743,408,398,409.07
C	Pengeluaran Pembiayaan	19.286.000.000	10.000.000.000	15.000.000.000
	Penyertaan Modal	19.286.000.000	10.000.000.000	15.000.000.000
	TOTAL	726.972.000.000	735.275.000.000	758.408.000.000

Sumber : Data Olahan DPPKAD Kota Sawahlunto

Tabel 3.11 memperlihatkan proyeksi belanja daerah selama periode 2016-2018. Sesuai dengan asumsi proyeksi pendapatan, maka proyeksi belanja tentu akan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan untuk membiayai belanja tersebut. Pertumbuhan rata-rata pertahun sekitar 7% sampai dengan 8%. Asumsi selanjutnya dan berdasarkan pengalaman selama periode 2011-2015, terdapat keseimbangan pertumbuhan belanja tidak langsung dengan belanja langsung, sehingga belanja modal terutama untuk membangun infrastruktur pelayanan dasar yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat akan tetap bisa meningkat.

Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah (Penerimaan dan Pengeluaran)

Arah kebijakan pengelolaan penerimaan pembiayaan daerah adalah tertutupnya defisit belanja daerah agar cukup tersedia dana untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan. Berbagai upaya menutupi defisit belanja adalah memanfaatkan sisa lebih anggaran tahun sebelumnya, kalau perlu dilakukan penjualan aset daerah dan menerima pinjaman daerah maupun menarik kembali dana pinjaman dan piutang daerah yang beredar dimasyarakat maupun dunia usaha lainnya serta penerimaan kembali penyertaan modal investasi daerah.

Sedangkan arah kebijakan pengelolaan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan pada penyertaan modal daerah pada berbagai Badan Usaha melalui kajian yang berorientasi pada keuntungan dengan memisahkan pengelolaan keuangan daerah. Hasil yang diharapkan adalah kerja dan kegiatan usaha masyarakat baik di hulu maupun di hilir disamping keuntungan daerah berupa deviden apabila telah melampaui masa break event point.

Tabel 3.11 Proyeksi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2016-2018

NO	URAIAN	2016	2017	2018
	Penerimaan Pembiayaan			
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)	82.533.292.699,00	84.908.418.164,66	87.288.581.302,66
	Pencairan Dana Cadangan / Deposito	-	-	-
	Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-
	Penerimaan Kembali pemberian Pinjaman	13.850.000.000,00	13.850.000.000,00	13.850.000.000,00
	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-
	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	96.383.292.699,00	98.758.418.164,66	101.138.581.302,66
	Pengeluaran Pembiayaan			
	Pembentukan dana cadangan / Deposito	-	-	-
	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	19.286.000.000,00	19.768.815.000,00	20.262.353.000,00
	Pembayaran Pokok Hutang	1.166.666.666,66	1.166.666.666,66	1.166.666.666,66
	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
	Pembayaran Bunga Pinjaman	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	20.452.666.666,66	20.935.481.666,66	21.429.019.666,66
	Pembiayaan netto	75.930.626.032,34	77.822.936.498,00	79.709.561.636,00
	SILPA	-	-	-

Sumber : Data Olahan DPPKAD Kota Sawahlunto

3.3.3 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 3 (tiga) tahun kedepan. Perhitungan kerangka pendanaan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat pertumbuhan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dicapai Kota Sawahlunto dalam periode 2011 - 2015 serta perubahan peraturan yang berlaku khususnya dengan keluarnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan realisasi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama tahun sebelumnya, serta dengan memperhitungkan dampak pembangunan secara nasional dan regional Sumatera Barat, diproyeksikan pengeluaran daerah Kota Sawahlunto tetap akan mengalami kenaikan dalam Tiga tahun kedepan. Berdasarkan hasil analisa, pengeluaran wajib dan mengikat tersebut dapat diproyeksikan sebagai berikut :

Tabel 3.12 Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Sawahlunto Tahun 2016-2018

NO	URAIAN	2016	2017	2018
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	162,529,519,470	166,592,757,457	170,757,576,393
1	Belanja Gaji dan Tunjangan, tamb. Penghasilan	154,677,195,786	158,544,125,681	162,507,728,823
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH	1,443,200,000	1,479,280,000	1,516,262,000
3	Belanja Bunga	1,454,990,328	1,491,365,086	1,528,649,213
4	Belanja Bagi Hasil	4,954,133,356	5,077,986,690	5,204,936,357
B	BELANJA LANGSUNG	15,057,222,453.13	15,433,653,014.45	15,819,494,339.81
1	Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis	-	-	-
2	Belanja beasiswa pendidikan PNS	97,375,000.00	99,809,375.00	102,304,609.38
3	Belanja jasa kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, telepon, air dan sejenisnya)	14,959,847,453.13	15,333,843,639.45	15,717,189,730.44
4	Belanja Sewa Gedung (yang Telah ada kontrak jangka panjangnya)	-	-	-
C	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
1	Pembentukan dana cadangan	-	-	-
2	Pembayaran pokok hutang	-	-	-
	JUMLAH	177,586,741,923.35	182,026,410,471.43	186,577,070,733.22

Sumber : Data Olahan DPPKAD Kota Sawahlunto

Berdasarkan hasil analisis pengeluaran wajib dan mengikat lima tahun kedepan terlihat pengeluaran yang terbesar masih didominasi oleh belanja tidak langsung. Akan tetapi, melihat perkembangan jumlah pegawai yang sudah relatif tetap, angka ini diproyeksikan meningkat hanya mengikuti kebijakan pemerintah pusat dalam menaikkan gaji PNS. Untuk belanja anggota DPRD dan kepala daerah peningkatan belanja ini disebabkan meningkatnya semua harga kebutuhan pokok kepala daerah dan anggota DPRD di daerah. Selain itu belanja bunga dan belanja bagi hasil juga akan mengalami peningkatan setiap tahunnya.

js

BAB IV
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

4.1.1. Pengamalan Nilai-nilai Agama dan Adat

Kesiapan akhlak, mental dan keagamaan masyarakat perlu diberikan perhatian lebih untuk mengantisipasi dampak negatif dari teknologi informasi dan aktivitas pariwisata. Terjadinya degradasi moral ditengah masyarakat akan menjadi hambatan utama dalam membangun daerah. Kasus-kasus yang meningkat signifikan adalah penipuan, curanmor, perkosaan/ pencabulan dan anirak. Karakter dari kasus tersebut, berimplikasi langsung dengan sikap moral dan akhlak masyarakat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, dilakukan upaya mengintegrasikan nilai-nilai agama, akhlak mulia dan adat istiadat kedalam proses pembelajaran formal dan informal, baik di rumah tangga maupun di sekolah. Integrasi muatan pembelajaran agama dan budaya sudah sangat mendesak. Selain itu, dimintakan peran serta keluarga dan masyarakat dalam penerapan dan aplikasi nilai agama, akhlak mulia dan adat dalam kehidupan.

4.1.2 Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB per kapita

Perekonomian Kota Sawahlunto menunjukkan pertumbuhan yang cukup positif jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2015 yaitu sebesar 5,41%, sedangkan pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto sebesar 6,00%. Potensi pada masing-masing sektor bila dikembangkan secara optimal dan terkoordinasi jelas akan mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus akan membuka lapangan kerja.

PDRB Perkapita Kota Sawahlunto Tahun 2015 adalah sebesar Rp.45.270.000,-. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan dengan PDRB per kapita Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 34.410.000,- pada tahun 2015. Angka ini menjadi indikator bahwa penduduk Kota Sawahlunto secara rata-rata relatif lebih baik tingkat kehidupannya dibandingkan dengan rata-rata masyarakat Sumatera Barat.

4.1.3 Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran

Kemiskinan dan pengangguran merupakan persoalan ekonomi makro yang berpengaruh terhadap mutu manusia baik dari sisi kesehatan maupun pendidikan persoalan ini mempengaruhi kehidupan ekonomi berupa menurunnya daya beli masyarakat dan semakin sulitnya alokasi rumah tangga. Kondisi ini telah berakibat terhadap anggaran pembangunan yang tersedia agar mengarah kepada pembenahan persoalan kemiskinan dan pengangguran.

Penanggulangan kemiskinan tetap dijadikan isu strategis dalam pembangunan kota Sawahlunto. Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional pada kisaran 10-11%, maka tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto sangat rendah dengan kisaran 2-3%. Pada tahun 2014 tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto sebesar 2,25%, yang merupakan tingkat kemiskinan terendah dibandingkan dengan kab./kota lain di Sumatera Barat dan dengan tingkat kemiskinan Propinsi Sumatera Barat. Peningkatan kesejahteraan tidak hanya mengangkat perekonomian penduduk miskin juga meningkatkan pendapatan seluruh masyarakat sehingga potensi kemiskinan masa depan dapat dikurangi. Upayanya dilakukan melalui pengutamaan penanganan penduduk miskin dalam pembangunan sosial dan ekonomi seperti penyediaan beasiswa untuk kelompok keluarga miskin, menjamin keluarga miskin tetap bersekolah dan terampil,



pelayanan kesehatan dan peningkatan pendapatan penduduk miskin by name by address. Selain menjamin pelayanan, keluarga miskin juga diupayakan untuk memiliki tambahan curahan waktu dan berusaha lebih, saat bersamaan pada keluarga ini untuk merencanakan keluarga secara jelas.

Masih rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Sawahlunto yaitu sebesar 65,50%, meskipun lebih tinggi dibanding TPAK Sumatera Barat yaitu 66,19% merupakan persoalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Sawahlunto untuk meningkatkannya ke depan. Pengangguran yang tinggi akan berakibat terhadap resiko ketergantungan semakin tinggi. Disamping itu pengangguran yang tinggi juga akan memberatkan langkah investasi. Hal ini perlu diantisipasi dengan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi yang nantinya akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

4.1.4 Pendidikan Karakter, Keterampilan dan Berwawasan Global

Pembangunan manusia harus seimbang antara intelektual (kognisi), keterampilan, dan karakter. Untuk menyeimbangkan pembangunan pendidikan di Kota Sawahlunto, harus diintegrasikan agama, nilai-nilai moral, akhlak mulia, budi pekerti ke dalam setiap proses pembelajaran yang mendukung. Perspektif pendidikan karakter adalah melahirkan karakter peserta didik yang berbudi pekerti, kritis dan percaya diri. Pendidikan karakter adalah upaya penyiapan kekayaan batin peserta didik yang berdimensi agama, sosial, budaya, yang mampu diwujudkan dalam bentuk budi pekerti, baik dalam perbuatan, perkataan, pikiran, sikap, perasaan, maupun kepribadian. Pendidikan karakter yang juga melahirkan rasa bernegara yang tinggi yang digali dari budaya Alam Minangkabau dan Agama. Wawasan global menjadi tuntutan agar peserta didik memiliki percaya diri yang tinggi, dan memiliki kemampuan dan inovasi dalam kehidupan global. Dalam pembangunan jangka menengah ini, pendidikan berkarakter dijadikan salah satu isu strategis yang perlu diperhatikan.

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ada pergeseran urusan pemerintahan, dimana urusan pendidikan mejadi urusan pemerintahan konkrue yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Urusan Pendidikan Menengah yang selama ini menjadi kewenangan Pemerintah Kota dengan dikluarkannya Undang-undang ini beralih menjadi kewenangan Provinsi, sehingga seluruh pembiayaan, personil dan sarana prasarana menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, hal ni tentu akan berdampak juga terhadap pengalokasian dana pendidikan pada Pemerintah Kota Sawahlunto.

Melahirkan tenaga terampil menjadikan masa depan anak muda lebih terarah, sekaligus dapat mengurangi pengangguran. Upaya untuk membangun pusat inovasi menjadi suatu keperluan yang mendesak, selain menghasilkan tenaga terampil, namun juga menghasilkan produk-produk daerah yang berkualitas.

4.1.5 Kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih, sehat dan berolahraga

Keberadaan masyarakat Kota Sawahlunto yang sebagian besar masih tinggal di Kawasan Pedesaan perlu mendapatkan perhatian terhadap pengelolaan kebersihannya. Kebersihan akan lahir dari pembiasaan hidup secara teratur, penggunaan toilet, air bersih, serta kesadaran lingkungan yang terbangun. Penyediaan sarana fisik hidup bersih yang diiringi dengan perbaikan tingkah laku hidup bersih adalah sangat menentukan sekali. Selain itu, kebiasaan untuk berolah raga juga akan dijadikan isu strategis dalam pembangunan jangka menengah ini. Jiwa dan pikiran yang sehat akan mempengaruhi produktivitas

masyarakat dalam bekerja. Diharapkan dengan adanya budaya olah raga yang kuat ditengah masyarakat, rasa kebersamaan dan sportivitas akan menjadi salah satu karakter masyarakat Kota Sawahlunto.

4.1.6 Pelayanan Kesehatan yang bermutu dan terjangkau

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia Kota Sawahlunto, kualitas kesehatan tidak dapat dikesampingkan. Angka harapan hidup masyarakat Kota Sawahlunto yang tertinggi di Sumatera Barat harus selalu dipertahankan dan lebih ditingkatkan. Pelayanan kesehatan akan diprioritaskan pada peningkatan kualitas pelayanan mulai dari perencanaan keluarga "pre natal care", melahirkan dan paska melahirkan. Pelayanan kesehatan dasar memegang prinsip pelayanan kuratif, preventif dan promotif. Dengan meningkatnya pelayanan kesehatan berdampak pada berkurangnya angka kematian bayi dan angka kematian ibu. Pelayanan rumah sakit juga menjamin kenyamanan, kecepatan, dan keramahan yang menyebabkan terasanya pelayanan kepada pasien dengan sempurna. Upaya peningkatan pelayanan ini dimulai dari penyiapan tenaga kesehatan, sarana kesehatan dan jaminan pemeliharaan kesehatan yang dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

4.1.7 Pelestarian Seni dan Budaya Daerah

Upaya pelestarian kesenian dan budaya daerah akan mendapatkan perhatian khusus dalam pembangunan jangka panjang Kota Sawahlunto. Pelestarian mulai dengan identifikasi sejarah, pengumpulan bukti-bukti, pengembangan naskah akademik, dan menjadikan semua itu berharga untuk dikembangkan ke dalam sistem kemuseuman yang paling lengkap. Karena hal ini akan berimplikasi langsung dengan pencapaian target visi kota menjadi kota wisata tambang yang berbudaya. Keberadaan budaya asli Minangkabau akan tetap dilestarikan dengan memberikan ruang khusus dalam pengembangan budaya lain. Perlombaan kuliner, pidato adat, pidato pasambahan, randai, dan paket manikah akan digiatkan untuk merangsang pelestarian adat dan budaya daerah. Selain itu, kesenian wayang golek, wayang orang, Reok dan kuda Lumping juga akan diperhatikan untuk menampilkan keberagaman etnis yang hidup harmonis di Kota Sawahlunto.

4.1.8 Peran serta Pemuda dalam pembangunan

Salah satu faktor yang mempengaruhi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan adalah kesiapan generasi muda untuk menerima tongkat estafet pembangunan. Keberadaan pemuda yang kreatif dan inovatif akan mempermudah pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa dan Kelurahan. Pembinaan kelompok pemuda yang diarahkan menjadi lebih produktif dan proaktif dalam pembangunan. Pemerintah perlu mengarahkan semangat dan pikiran inovatif dari generasi muda dalam membangun daerahnya. Dapat berupa perintisan pusat inovasi daerah. Selain dari itu juga diupayakan meminimumkan peredaran narkoba, mengurangi efek negatif pembangunan berupa kejahatan dengan berbagai dimensi. Diharapkan, dengan adanya generasi muda yang baik, keberlanjutan pembangunan di Kota Sawahlunto tidak akan terputus antar periodenya.

4.1.9 Penyediaan infrastruktur dasar yang bermutu dan berwawasan lingkungan

Dalam mewujudkan visi Kota menjadi Kota Wisata pada tahun 2020, infrastruktur menjadi modal utama pencapaiannya. Infrastruktur yang berkualitas akan menjadi jaminan kenyamanan beraktivitas masyarakat utamanya

pengunjung Kota Sawahlunto. Peningkatan kualitas jalan dan jembatan, drainase dan pelayanan air bersih akan diupayakan pada standar Kota Pariwisata Nasional. Penyediaan fasilitas yang menjadikan kota Wisata Sejarah serta pendukungnya menjadi sangat berarti untuk mewujudkan visi kota, termasuk penyediaan bangunan untuk museum sejarah, pengisian dokumen sejarah, eksepsi, fasilitas parkir, toilet dan pusat perbelanjaan yang baik. Selain itu, pembukaan akses baru ke daerah tetangga juga akan dijadikan isu strategis yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah selain infrastruktur dasar yang merupakan kewajiban utama pemerintah daerah.

4.1.10 Kualitas Lingkungan Hidup

Peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat tidak hanya meliputi aspek pendapatan, pendidikan dan kesehatan saja, tetapi juga termasuk mempertahankan kualitas lingkungan hidup. Tanpa penjagaan kualitas lingkungan hidup yang baik, kemajuan ekonomi dan sosial menjadi kurang berarti bagi kesejahteraan masyarakat. Karena peningkatan kualitas lingkungan hidup merupakan isu strategis yang juga sangat penting dalam proses pembangunan Kota Sawahlunto. Termasuk dalam pengawasan eksploitasi sumberdaya alam, pengawasan pencemaran udara, sungai dan lainnya.

4.1.11 Pembangunan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan sumber daya manusia tidak terlepas dari isi kesetaraan gender, pembangunan perempuan dan perlindungan anak. Dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak masih ditemukannya kesenjangan terhadap akses, partisipasi, kontrol serta manfaat dalam bidang pembangunan. Upaya perlindungan bagi perempuan dan anak dari berbagai tindakan eksploitasi, diskriminasi dan kekerasan masih belum optimal, untuk itu penguatan kelembagaan P2TP2A sangat penting dalam rangka promotif (sosialisasi, kampanye, penyuluhan) preventif (pencegahan), kuratif (penanganan), rehabilitatif (pemulihan/pemberdayaan bagi perempuan dan anak korban kekerasan).

4.1.12 Iklim Investasi yang Kondusif

Dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah, salah satu usaha Pemerintah Kota Sawahlunto dengan meningkatkan pengembangan dan membangun potensi ekonomi di bidang investasi atau penanaman modal yang dikelola oleh beberapa Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah menurut aspek permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Hal ini dibutuhkan kebersamaan dari pihak swasta untuk pengembangan usaha dan perekonomian di Kota Sawahlunto, kerjasama tidak terbatas dalam skala besar akan tetapi pemberdayaan jiwa entrepreneur masyarakat untuk berusaha akan selalu diupayakan untuk mewujudkan hal ini kemudahan perizinan dan fasilitasi investor dalam berusaha akan terus diutamakan. Iklim usaha yang kondusif menjadi strategi untuk menarik perhatian investor di Kota Sawahlunto, selain mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pemerintah juga melakukan penyertaan modal pada beberapa lembaga keuangan daerah lainnya.

4.1.13 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Isu strategis lainnya yang juga menentukan keberlanjutan pembangunan di Kota Sawahlunto adalah penatalaksanaan pemerintahan yang baik. Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah harus disikapi dengan memberikan pelayanan yang optimal, pengelolaan pemerintah yang bersih, inovatif

dan profesional. Karena itu, konsep *Good Governance and Clean Government* dan penerapannya harus dijadikan prioritas dalam melaksanakan birokrasi pemerintahan ini.

Penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk mendukung administrasi pemerintahan juga harus dilaksanakan untuk memberikan pelayanan yang lebih efisien, efektif, transparan dan memuaskan kepada masyarakat. Teknologi informasi dapat dipahami sebagai teknologi yang berhubungan dengan pengumpulan, penyimpanan, pengolahan dan penyebaran informasi. Teknologi informasi terdiri dari hardware dan software. Hardware dapat berupa komputer, laptop/notebook dilengkapi dengan perangkat pendukungnya seperti printer, jaringan, infokus, modem, LAN dan lain-lain. Sementara software adalah aplikasi-aplikasi dan sistem yang digunakan.

Sesuai Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan mengenai Elektronik Government (E-Government) merupakan proses transformasi dimana pemerintah mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat birokrasi organisasi serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses dan transparansi ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah. Untuk itu, kesiapan beberapa faktor pendukung penerapan teknologi informasi berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana teknologi informasi serta persiapan stakeholder lainnya.

Selain merealisasikan pelayanan publik yang terintegrasi, Pemerintah Kota Sawahlunto juga perlu memperhatikan mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas seperti yang diamanatkan Prepres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2013-2014, sehingga dapat memberikan pelayanan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, optimalisasi penyelenggaraan pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabilitas, keterbukaan informasi kepada publik dan menjaga strategi pelaksanaan pembangunan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

4.1.14 Kearsipan dan Perpustakaan

Pusat dan kearsipan yang berbasis web menjadi isu strategis yang penting dalam lima tahun kedepan. Keberadaan arsip yang menumpuk akan mengganggu aktifitas pegawai dalam bekerja. Perkembangan Teknologi informasi yang demikian cepat juga akan mempengaruhi minat pengunjung ke pustaka, sehingga menjamin tersedianya bahan bacaan pada perpustakaan adalah salah satu aspek yang membuat kemajuan kognitif dan masyarakat Untuk mengatasi permasalahan tersebut, akan diprioritaskan pembangunan Pustaka dan Arsip daerah yang berbasis internet dan Web. Diharapkan kebutuhan masyarakat akan buku dan budaya membaca akan tetap terjaga karena dengan budaya ditengah masyarakat akan melahirkan generasi muda yang berintelektualitas tinggi.

4.1.15 Perencanaan Kepariwisata yang Terintegrasi dengan Perencanaan Kota

Sektor kepariwisataan akan tetap dijadikan isu strategis dalam pembangunan jangka menengah daerah. Ditengah persaingan dunia pariwisata dengan daerah lain di Sumatera Barat dan Nasional dibutuhkan konsep dan perencanaan yang matang dalam pembangunan sektor pariwisata Kota Sawahlunto. Pariwisata harus dijadikan prioritas dalam setiap perencanaan pembangunan di Kota Sawahlunto secara fisik dan non fisik. Keunggulan pariwisata

dengan konsep budaya tambang batubara yang identik pada Kota Sawahlunto harus dimaksimalkan dengan kombinasi objek wisata rekreasi.

4.1.16 Produk industri kecil dan menengah yang bermutu dan berdaya saing

Dalam membangun ekonomi kerakyatan yang tangguh, peran industri kecil dan menengah harus diutamakan. Pada daerah berkembang Kota Sawahlunto, sektor industri yang berkembang didominasi oleh industri kecil dan menengah yang berbasis rumah tangga. Keberadaan Songket Silungkang, Kerupuk Kubang dan Minyak Sereh wangi perlu mendapat perhatian lebih mengingat keterpaduannya dengan sektor pariwisata dan dapat menyentuh langsung ekonomi masyarakat Kota Sawahlunto. Produk kerajinan rumah tangga perlu diidentifikasi lagi, dikembangkan inovasinya, dan dapat menjadi salah satu sumber pembaharuan dari produk UMKM lokal yang ada.

4.1.17 Pengalihan Kewenangan Urusan

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terjadi beberapa perubahan mendasar terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, terdapat beberapa urusan yang dialihkan kewenangnya dari kewenangan daerah menjadi kewenangan Provinsi/Pusat (urusan konkruen). Adapun urusan pemerintah konkruen tersebut meliputi penyelenggaraan sub urusan:

- a. Pengelolaan pendidikan menengah;
- b. Pengelolaan terminal penumpang tipe A dan tipe B;
- c. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara;
- d. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi;
- e. Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
- f. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan Provinsi;
- g. Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan;
- h. Pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB);
- i. Pengelolaan tenaga pengawas ketenagakerjaan;
- j. Penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional; dan
- k. Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan.

Pengalihan urusan dimaksud berimplikasi pada pengalihan personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D). Untuk menghindari stagnasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang berakibat terhentinya pelayanan kepada masyarakat, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan konkruen yang berifat pelayanan kepada masyarakat luas dan masif, yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan tidak dapat dilaksanakan tanpa dukungan P3D, tetap dilaksanakan oleh tingkat/susunan pemerintahan yang saat ini menyelenggarakan urusan pemerintahan konkruen tersebut sampai dengan serahkannya P3D.

4.2. ISU STRATEGIS

4.2.1 Urusan Wajib Pendidikan

Permasalahan pembangunan pada urusan pendidikan adalah masih tingginya angka tidak melanjutkan hingga jenjang SMA dan perguruan tinggi, sehingga upaya untuk menjangkau kelompok anak miskin terlayani dalam pendidikan menjadi keharusan. Selain dari itu kualitas pendidikan mesti terwujud pada seluruh sekolah dan jenjang pendidikan. Kurangnya mutu guru perlu dilakukan dengan pembinaan guru yang komprehensif, peningkatan keilmuan dan pedagogi, pembinaan manajemen sekolah, pemenuhan alat dan media pembelajaran di sekolah (prasarana sekolah belum memenuhi SPM) juga menjadi

permasalahan di bidang pendidikan ini. Dari segi kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan Pra-PAUD dan PAUD belum memenuhi standar SI yang ditetapkan pemerintah. Hal ini berimbas kepada rendahnya kesejahteraan pendidik dan pengelola Pra-PAUD dan PAUD. Untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah, persentase guru yang telah mempunyai sertifikat pendidik juga masih rendah. Keberadaan sekolah Unggulan Inti mesti diwujudkan per kecamatan untuk seluruh jenjang pendidikan.. Berbagai permasalahan tersebut, jika tidak ditangani secara serius, akan menyebabkan penurunan kualitas pendidikan.

4.2.2 Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Pelindung Anak

Rendahnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia aparatur pengelola pemberdayaan masyarakat menjadi kendala yang berarti dalam pemberdayaan masyarakat di Kota Sawahlunto. Kapasitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan pemberdayaan perempuan belum optimal, juga menjadi kendala dalam pemberdayaan perempuan. Maka untuk menjamin pemenuhan hak anak pemerintah daerah mendukung kebijakan nasional, dalam penyelenggaraan kebijakan tersebut dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun Kota Layak Anak yang ditujukan untuk menjamin pemenuhan hak anak.

4.2.3 Urusan Wajib Kesehatan

Permasalahan kesehatan dan sosial di kota Sawahlunto terlihat pada pelayanan prima belum dapat dilaksanakan dengan baik karena letak geografis kurang mendukung. Selain itu, permasalahan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat relatif rendah. Hal ini terlihat dari masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penyakit menular, Masih banyaknya SPAL masyarakat yang belum memenuhi syarat dan kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang gizi seimbang, higienis dan sanitasi. Untuk masalah tenaga kesehatan jumlah Dokter Spesialis masih belum lengkap dan adanya kualitas kesenjangan SDM. Masalah sarana kesehatan terlihat dari Sistem/Instalasi pengelolaan limbah dan air belum memadai, sirkulasi air bersih kurang lancar, dan terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan.

Selain ketersediaan tenaga membangun sistem yang mudah untuk bidang kesehatan dan sosial menjadikan kedua sektor ini dapat dengan mudah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukannya. Penyelenggaraan upaya kesehatan dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan, melalui upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan penyuluhan kesehatan serta upaya khusus melalui pelayanan kemanusiaan dan darurat. Selanjutnya, pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan perlu terus menerus diupayakan.

4.2.4 Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pada urusan pekerjaan umum, belum semua ruas jalan dalam kondisi mantap dan belum memiliki masterplan pembangunan infrastruktur secara komprehensif yang diperlukan oleh masyarakat serta kurangnya partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur. Instalasi Pengolahan Limbah Tinja juga belum optimal secara komunal. Sistem pengolahan sampah di TPA cenderung open dumping dengan sarana prasarana kurang memadai menyebabkan Pelayanan persampahan belum menjangkau pada semua masyarakat. Pemetaan keperluan pelayanan PU untuk daerah tujuan wisata serta fasilitas pendukungnya merupakan hal yang penting, dan hal ini disinergikan dengan penyiapan masyarakat sadar wisatanya.

Pengelolaan Sumber daya Air juga masih mengalami permasalahan. Standar pelayanan air minum belum memenuhi syarat kesehatan ditambah lagi dengan masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM pengelola Air Minum serta Keterbatasan ketersediaan air di musim kemarau dan keterbatasan sumber air baku. Pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang belum optimal. Hal ini terlihat dari masih banyak pembangunan perumahan dan tempat usaha yang tidak memenuhi syarat teknis tata bangunan dan lingkungan.

Dari segi perencanaan, dokumen penataan ruang masih ada yang belum menjadi produk hukum. SDM penataan ruang masih kurang, baik secara kuantitas maupun kualitas. Partisipasi masyarakat dalam penataan ruang masih rendah karena rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya penataan ruang. Kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan sebelum melakukan pembangunan masih rendah. Semua hal ini menjadi hambatan yang dalam pengelolaan ruang di Kota Sawahlunto.

Pemenuhan kebutuhan infrastruktur permukiman terkait pembangunan bidang air minum dan sanitasi, sebagaimana amanat RPJMN 2015-2019. Pembangunan bidang air minum dan sanitasi harus mencapai akses 100% capaian air minum, 0% kawasan kumuh dan capaian akses sanitasi 100%, dalam rangka pencapaian universal access pada tahun 2019.

4.2.5 Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman padat dan tidak teratur pada pusat kota dan sub pusat kota menjadi permasalahan utama dalam pembangunan perumahan di Kota Sawahlunto. Pola permukiman masih belum sesuai dengan peruntukkan penggunaan lahan disebabkan belum ada regulasi penetapan kawasan perumahan. Saat ini masih terdapat backlog perumahan yang tidak layak huni. Selain itu, sulitnya memperoleh tanah untuk perumahan karena tanah banyak dikuasai oleh kuasa penambangan PT.BA dan PT.KAI. Selain itu, penguasaan tanah adalah tanah ulayat yang menyulitkan pihak swasta berinvestasi di sektor perumahan.

4.2.6 Urusan Wajib Perhubungan

Untuk urusan perhubungan permasalahan yang dihadapi oleh Kota Sawahlunto adalah aksesibilitas transportasi yang belum merata, dimana masih banyak bagian wilayah yang belum terjangkau oleh pelayanan transportasi. Tempat parkir sangat terbatas dibanding dengan kebutuhan masyarakat. Masih kurangnya sarana dan prasarana lalu lintas seperti belum adanya terminal Tipe A di Kota Sawahlunto. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola perhubungan Kota juga menjadi permasalahan dalam pembangunan Kota. Dari segi masyarakat terlihat dari masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memelihara sarana dan prasarana lalu lintas. Topografi wilayah rawan patahan juga menjadi permasalahan dalam mengembangkan sektor perhubungan di Kota Sawahlunto.

4.2.7 Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Permasalahan pembangunan di sektor lingkungan hidup terlihat dari penurunan kualitas air sungai, pencemaran lingkungan akibat aktifitas industri dan pertambangan serta dampak pemanasan global semakin meningkat. Kurangnya SDM pengelola lingkungan hidup ditambah lagi dengan kurangnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup juga menjadi permasalahan dalam pembangunan lingkungan hidup di Kota Sawahlunto. Peta pengembangan daerah kawasan hijau dan proses penanaman kembali daerah kritis menjadi sangat strategis untuk masa depan kota Sawahlunto

4.2.8 Urusan Wajib Pertanahan

Untuk urusan pertanahan, sulitnya pembebasan tanah masyarakat menjadi permasalahan utama dalam pembangunan. Kepemilikan tanah ulayat yang tidak jelas, rentan terjadinya konflik tanah ulayat. Permasalahan tapal batas dengan daerah tetangga juga menjadi permasalahan rutin yang mestinya dapat diselesaikan secara tepat. Upaya mengurangi permasalahan tanah, dan memulai penyelesaiannya akan berdampak kepada penataan kepemilikan tanah di kemudian hari.

4.2.9 Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Permasalahan pembangunan pendudukan terlihat dari Kualitas SDM Aparatur pengelola SIAK masih rendah. Partisipasi masyarakat dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang rendah, menyebabkan belum lengkapnya penerapan SIAK online di Kota Sawahlunto. Pengembangan sistem layanan dan penegakan sanksi menjadi perlu dalam mengatasi masalah ini.

4.2.10 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Keberadaan masyarakat multi etnis yang hidup berdampingan dan masih menjaga khasanah budaya gotong royong akan dijadikan kekuatan dalam pembangunan Kota Sawahlunto. Membangun sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat akan tetap diprioritaskan. Keberadaan LPM, kelompok Masyarakat, Karang Taruna dan tokoh masyarakat akan dimanfaatkan untuk mempermudah pembangunan di tingkat desa dan kelurahan.

4.2.11 Urusan Wajib Tenaga Kerja

Masalah ketenaga kerjaan masih menjadi permasalahan pembangunan di Kota Sawahlunto. Walaupun tidak signifikan, permasalahan tenaga fungsional ketenagakerjaan juga menjadi hambatan dalam pelayanan ketenagakerjaan. Kualitas pencari kerja yang terampil belum memadai dan terbatasnya jumlah permintaan tenaga kerja dari dunia usaha menyebabkan kesempatan kerja di Kota Sawahlunto relatif rendah.

Sawahlunto dapat mengatasi masalah kekurangan tenaga terampil dengan memilih dan mengembangkan berbagai jenis keterampilan bersertifikasi. Melalui pemantapan sekolah kejuruan, sekolah komunitas, Dinas Tenaga Kerja dapat membangun sistem yang mempertemukan dunia pemakai, dengan pencari kerja. Dari segi pelayanan, Sistem informasi dan data ketenagakerjaan belum optimal serta rendahnya transparansi penerimaan tenaga kerja juga beberapa hal yang perlu dibenahi.

4.2.12 Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

Sistem komunikasi dan informatika Kota Sawahlunto masih terkendala sarana dan prasarana teknologi informasi yang belum memadai. Sistem informasi manajemen yang tersedia pun belum dimanfaatkan secara optimal. Ditingkat desa, masih adanya jaringan internet yang belum terjangkau ke desa. Pengembangan Komunikasi dan Informatika di web dan dengan metoda lainnya di luar untuk memarketingkan Sawahlunto perlu dibenahi, selain juga sistem pelayanan untuk para pendatang. Permasalahannya antara lain:

- Koordiansi antar instansi pemerintah dalam memanfaatkan teknologi informasi masih lemah, hal ini dapat dilihat dengan adanya koneksi internet

yang dilakukan oleh masing-masing instansi padahal beberapa instansi mempunyai data yang sama;

- Aplikasi yang sama atau saling keterkaitan dikembangkan oleh masing-masing instansi seperti kepegawaian, keuangan, kesehatan dan pendidikan. Hal ini membuktikan bahwa integrasi infrastruktur, aplikasi dan data belum terbentuk.
- Penyebarluasan dan pemanfaatan hasil riset/penelitian sebagai dasar perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pembangunan daerah;
- Pemanfaatan Iptek dan TI di masyarakat masih kurang;
- Pemanfaatan teknologi dan informasi oleh birokrasi terutama untuk peningkatan pelayanan publik belum optimal.

4.2.13 Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan pembangunan di sektor Koperasi dan UMKM Masih rendahnya kualitas SDM pelaku UMKM dalam berinovasi dan pemanfaatan teknologi informasi menyebabkan kualitas produk UMKM yang dihasilkan belum memenuhi standar nasional. Selain itu, Tingkat ketergantungan sektor ini terhadap pemerintah yang tinggi. Kemampuan pengelola koperasi dan partisipasi aktif anggota koperasi dan UMKM juga belum profesional.

4.2.14 Urusan Wajib Penanaman Modal

Permasalahan pembangunan untuk penanaman modal utamanya adalah Belum adanya kebijakan insentif mengenai penanaman modal yang menjadi daya tarik investor, terbatasnya potensi daerah untuk menarik investor, kesiapan kecakapan aparatur untuk mengelola investasi yang kompeten termasuk penataan organisasi dan manajemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), kebijakan yang mengatur pengembangan BUMD dan belum optimalnya kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah.

4.2.15 Urusan Wajib Kebudayaan

Dalam upaya pelestarian nilai budaya daerah, budaya luar yang memberikan pengaruh negatif terhadap budaya daerah memberikan kendala yang berarti bagi Kota Sawahlunto. Hal ini ikut mempengaruhi apresiasi masyarakat terhadap budaya dan seni daerah. Dari segi akhlak mulia, pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai agama dan adat mulai berkurang sehinggalah perlu penerapan pendidikan berkarakter yang tepat

4.2.16 Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga

Belum terbangunnya sistem keolahragaan di sekolah-sekolah merupakan akar masalah rendahnya minat berolah raga. Selain juga terbatasnya sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan olahraga menjadi permasalahan utama dalam pengembangan keolahragaan di Kota Sawahlunto. Selain itu, belum optimalnya pembinaan dan pengelolaan kelembagaan pemuda dan olahraga juga menghambat perkembangan keolahragaan di Kota Sawahlunto. Dampak negatif dari adanya media sosial dan IT terhadap generasi muda semakin terasa, dengan berkurangnya nilai kekeluargaan dan semangat gotong royong.

4.2.17 Urusan Wajib Pangan

Jika dilihat dari ketersediaan pangan, ketersediaan pangan lokal Kota Sawahlunto melebihi dari konsumsi per kapita per tahun untuk ketersediaan beras, daging sapi dan ayam ras pedaging. Sedangkan untuk ketersediaan pangan utama telur ayam dan ikan darat belum mencukupi sehingga Kota Sawahlunto menjadi ketergantungan pasokan pangan dari daerah tetangga. Selain itu, Harga komoditas pangan fluktuatif dan belum berkembangnya industri pangan berbasis

bahan pangan lokal untuk mendukung penganekaragaman konsumsi pangan juga merupakan permasalahan yang harus dibenahi dalam membangun ketahanan pangan Kota Sawahlunto.

4.2.18 Urusan Wajib Statistik

Sistem pengelolaan data yang masih manual menjadi tantangan utama dalam urusan statistik ini. Akibatnya, belum ada dokumen data yang berseries dan dapat diakses semua orang dalam waktu cepat. Dari segi penyediaan data, ketergantungan terhadap pihak BPS tidak dapat dihindari. Akan tetapi masalah lain yang muncul adalah adanya perbedaan metode penghitungan data antara BPS dan pemerintah daerah.

4.2.19 Urusan Wajib Perpustakaan

Dalam pengembangan kearsipan dan perpustakaan dibutuhkan solusi untuk menangani rendahnya sistem dan fasilitas dalam mengelola kearsipan dan perpustakaan. Kurangnya kualitas pegawai yang mempunyai kompetensi di bidang kearsipan dan perpustakaan ditambah lagi Koleksi buku belum sebanding dengan kebutuhan pengguna menyebabkan kurangnya minat pengunjung ke pustaka. Untuk arsip pemerintah daerah, kurangnya kesadaran/tertib SKPD terhadap pentingnya pengelolaan arsip/dokumen menyebabkan penanganan arsip daerah menjadi terkendala.

4.2.20 Fungsi Penunjang

- **Perencanaan Pembangunan**
Permasalahan dalam perencanaan pembangunan secara garis besar adalah pada tiga hal. Pertama, kebijakan pemerintah pusat yang tidak konsisten serta tidak sinkron antar lembaga pemerintah pusat. Hal ini menyulitkan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan yang konsisten dan sinkron antar SKPD. Kedua, masih rendahnya pemahaman antar SKPD dalam menyusun perencanaan yang konsisten dan sinkron dengan SKPD lainnya. Ketiga adalah rendahnya jumlah dan kuantitas SDM perencana. Persoalan ini menyebabkan proses perencanaan dari awal sampai evaluasi perencanaan tidak berjalan dengan baik.
- **Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah**
Ancaman melemahnya paham kebangsaan dikalangan masyarakat menjadi permasalahan utama dalam pengembangan wawasan kebangsaan saat ini. Akibatnya terjadi kerentanan terhadap potensi konflik sosial. Di bidang politik, rendahnya pemahaman peraturan di bidang politik di tengah masyarakat juga masih merupakan permasalahan yang harus diatasi. Sedangkan dalam masalah penanganan bencana, sistem koordinasi penanganan bencana masih rendah dan belum memiliki dokumen kontigensi. Faktor penting lainnya adalah belum tersedianya sistem dan teknologi informasi dalam mendukung penanganan bencana. Sinergitas aparat sipil dan militer dalam program pembangunan masih perlu ditingkatkan.
- **Otonomi Daerah**
Dalam pelaksanaan otonomi daerah, rendahnya Pendapatan Asli Daerah terhadap keuangan daerah menjadi tantangan utama yang harus diatasi. Akibatnya ketergantungan keuangan daerah terhadap bantuan pemerintah tinggi. Dari segi kompetensi pegawai, mutu dan profesionalisme aparatur masih perlu ditingkatkan.
- **Dari strategi pembangunan nasional yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita khususnya Cita ke-2, yaitu mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Nawa Cita**

tersebut merupakan rangkuman program-program yang tertuang dalam Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden yang dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019, terdiri dari empat bagian utama yaitu: 1) norma pembangunan, 2) tiga dimensi pembangunan; 3) kondisi yang diperlukan agar pembangunan dapat berlangsung; serta 4) program-program quick wins. Dapat dilihat permasalahan dalam penerapan reformasi birokrasi untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, demokratis dan terpercaya dalam rangka mendukung pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, diantaranya:

- a. Pengembangan dan peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah berbasis elektronik dan internet belum optimal;
- b. Koordinasi, sinergitas, sinkronisasi dan harmonisasi dalam kerjasama antara pemerintahan dirasa belum optimal. Kerjasama yang dilakukan masih terbatas terutama dengan kabupaten/kota yang berbatasan;
- c. Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi, yaitu semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, perangkat daerah dan anggota masyarakat. Inovasi ini masih sedikit dan belum optimal;
- d. Pemerintah daerah wajib menyediakan informasi Pemerintah Daerah yang terdiri atas informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah. Informasi pembangunan daerah dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah yang wajib diumumkan kepada masyarakat. Informasi Pemerintah Daerah ini belum maksimal.

4.2.21 Urusan Pilihan Pertanian

Untuk meningkatkan kualitas produksi pertanian jangka panjang, masalah alih fungsi lahan pertanian menjadi hambatan yang berarti. Dari potensi daerah yang belum tergarap, masih ada lahan pertanian yang belum tergarap. Dari segi petani, rendahnya kemauan dan keterampilan petani untuk meningkatkan produktifitas pertanian juga mengakibatkan sulitnya meningkatkan kualitas pertanian di Kota Sawahlunto. Pola pikir masyarakat terutama generasi muda yang mengatakan petani merupakan pekerjaan kurang berkelas juga menjadi tantangan di masa depan. Dari segi pengelolaan pasca panen, Industri pengolahan hasil pertanian di Kota Sawahlunto relatif minim.

4.2.22 Urusan Pilihan Pariwisata

Permasalahan pariwisata Kota Sawahlunto lebih mengarah pada pengelolaan yang sudah ada. Saat ini, belum ada skenario besar pengembangan kepariwisataan sehingga daya tarik wisata belum terintegrasi. Hal lain yang juga sangat berpengaruh adalah belum ada penjabaran rinci dan teknis dari kebijakan pariwisata yang ada. Dari segi sarana penunjang, Keterbatasan sarana transportasi umum menjadi permasalahan bagi pengunjung. Dari segi pengelolaan potensi pariwisata yang ada, kualitas SDM rendah dan arahan tepat guna bagi pemanfaatan lahan belum terbangun menyebabkan investor pariwisata belum melirik Kota Sawahlunto.

4.2.23 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

Perikanan mungkin bukanlah prioritas di Kota Sawahlunto. Akan tetapi, jika dikelola dengan baik, dapat dijadikan salah satu alternatif pendapatan masyarakat. Permasalahan yang ada saat ini adalah produksi benih ikan masih rendah dan Volume air tidak mencukupi untuk budidaya perikanan darat. Dari segi pelayanannya, Kuantitas SDM yang masih kurang mejadi hambatan dalam

pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Saat ini, Harga pakan ikan di Kota Sawahlunto juga relatif mahal.

4.2.24 Urusan Pilihan Perdagangan

Masalah dalam pengembangan perdagangan di Kota Sawahlunto adalah ketersediaan jenis barang kurang beragam dan harga relatif tinggi. Pencantuman harga komoditas, dan akreditasi perdagangan menjadi kata kunci ke depan. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal salah satunya keberadaan pedagang grosir belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Keberadaan mobil dan motor ngempas sampai ke rumah penduduk juga menjadi ancaman dalam pengembangan perdagangan di Pasar Sawahlunto. Hal ini berimplikasi pada perubahan perilaku masyarakat dalam berbelanja. Dari segi sarana dan prasarana, bangunan pasar baru sudah mencukupi untuk pasar kebutuhan pedagang, akan tetapi perlu diperhatikan juga sarana penunjang pasar tersebut.

4.2.25 Urusan Pilihan Perindustrian

Permasalahan yang dihadapi dalam membangun sektor industri di Kota Sawahlunto adalah keterampilan teknis, kemampuan pengembangan desain, serta kemampuan manajemen perajin dan pelaku IKM masih rendah. Selain itu, dari segi sarana dan prasarana Rendahnya kualitas teknologi dan peralatan pendukung proses produksi yang dimiliki pengrajin dan pelaku IKM. Pemanfaatan bahan baku lokal yang belum maksimal juga akan menyebabkan pendeknya mata rantai ekonomi untuk sektor industri di Kota Sawahlunto. Belum adanya pusat inovasi bagi industri dan belum adanya regulasi dan kebijakan dukungan kepada perajin dan pelaku IKM terutama dalam hal permodalan dapat menyebabkan berkurangnya minat masyarakat untuk mengembangkan industri.

4.3 KETERKAITAN DENGAN DOKUMEN LAINNYA

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan lainnya, maka arah kebijakan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018 disusun dengan berpedoman dan memperhatikan beberapa dokumen perencanaan sebagai berikut:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto

I. Struktur Ruang

A. Rencana Sistem Pelayanan Kota

Unsur-unsur utama yang dijadikan dasar penentuan pusat struktur pelayanan kota, meliputi: pusat pelayanan kota, subpusat pelayanan kota, dan pusat lingkungan.

1. Pusat Pelayanan Kota (PPK) terdiri atas:
 - a. Kawasan pariwisata diutamakan di Kandih dan Kota Lama;
 - b. Kawasan perdagangan dan jasa regional di Muara Kalaban; dan
 - c. Kawasan Pusat Pemerintahan dikembangkan di Kolok dan Sijantang.
2. Subpusat Pelayanan Kota (SPK)
Sub Pusat Pelayanan Kota ditetapkan di setiap ibukota kecamatan mempunyai fungsi sebagai pelayanan pendidikan, kesehatan, perkantoran, perdagangan, pasar, tempat ibadah skala kecamatan, pengembangan sub-terminal, pusat kegiatan dan pengembangan agrobisnis, wisata dan pelayanan penunjang lainnya yang mempunyai skala pelayanan tingkat kota dan tingkat kecamatan.
3. Pusat Lingkungan (PL).

Sistem pusat lingkungan yang ditetapkan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan lingkungan, meliputi pusat pemerintahan kelurahan dan desa.

B. Sistem Jaringan

1. Sistem Jaringan Prasarana Utama Kota

Rencana Sistem Jaringan Jalan

Sistem jaringan jalan terdiri atas jaringan jalan arteri primer, arteri sekunder, kolektor primer, kolektor sekunder dan lokal;

- a. Jaringan jalan arteri primer menghubungkan: Padang-Solok-Silungkang- Muaro Kalaban (Sawahlunto) – Kota Muaro Bungo (Provinsi Jambi).
- b. Jaringan jalan kolektor primer, menghubungkan Kota Sawahlunto dengan kabupaten/kota sekitar;
- c. Jaringan jalan kolektor sekunder menghubungkan antara kecamatan di dalam wilayah Kota Sawahlunto;
- d. Jaringan jalan lokal menghubungkan sub pusat pelayanan dengan seluruh desa/kelurahan di dalam kota;

Jaringan Prasarana Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Rencana tipe terminal di Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut;

- a. Terminal penumpang tipe B ditetapkan di Muara Kalaban, Kecamatan Silungkang
- b. Terminal penumpang tipe C, ditetapkan di Talawi Hilir Kecamatan Talawi.
- c. Pengembangan Terminal barang ditetapkan di Desa Sijantang Koto Kecamatan Talawi dan Desa Muara Kalaban, Kecamatan Silungkang.

2. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Sistem prasarana lainnya meliputi:

- a. *Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan*; Sistem jaringan energi merupakan sistem jaringan kelistrikan jaringan tenaga listrik yang meliputi pembangkit listrik dan jaringan transmisi listrik. Pembangkit tenaga listrik meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Sijantang Kecamatan Talawi yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan listrik Sumatera Barat. Dengan gardu induk di Sijantang Kecamatan Talawi
- b. *Sistem Jaringan Telekomunikasi*; Jaringan telekomunikasi di Kota Sawahlunto semakin pesat berkembang, terutama jasa telekomunikasi dari telepon selular. Untuk beberapa daerah masih membutuhkan untuk jasa telekomunikasi jaringan Telkom, karena permasalahan sinyal yang lemah di pemukiman di pedesaan. Penggunaan telepon seluler yang semakin tinggi mengakibatkan meningkatnya jumlah menara telekomunikasi. Dalam pembangunan menara telekomunikasi dibagi berdasarkan dalam zona-zona dan harus memperhatikan potensi ruang kota yang tersedia. Penambahan dan pembangunan sentral telepon baru dan membangun *Base Transmitter System (BTS)* atau menara bersama ditetapkan di Kecamatan Lembah Segar, Kecamatan Barangin dan Kecamatan Talawi
- c. *Sistem Jaringan Sumber Daya Air*; Pengembangan sumber daya air dilakukan untuk: Memenuhi penyediaan kebutuhan sumber air baku untuk penyediaan air bersih, pengairan pertanian serta kegiatan budidaya lainnya dan Pemeliharaan sumber-sumber air dan kelestarian lingkungan. Untuk meningkatkan produktivitas sistem yang potensial, maka perlu direncanakan peningkatan kapasitas penyediaan air baku untuk beberapa Instalasi Pengolahan

Air (IPA) yang ada dan penambahan beberapa IPA, dengan berbagai metoda yang sesuai dengan potensi dan kondisi setempat antara lain adalah :

- Peningkatan kapasitas IPA Talawi
- Menjaga kualitas dan kuantitas sumber air baku yang sudah ada
- Mencari sumber air baku pada daerah yang sulit dijangkau oleh sistem jaringan distribusi yang ada.
- Membangun embung yang berfungsi untuk menampung air.

3. *Sistem Infrastruktur Perkotaan;*

Sistem jaringan infrastruktur perkotaan meliputi:

a. Sistem Penyediaan Air Minum; Sistem penyediaan air minum meliputi jaringan perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan, ditetapkan di empat Kecamatan, yaitu Kecamatan Silungkang, Kecamatan Talawi, Kecamatan Barangin dan Kecamatan Lembah Segar

b. Sistem Pengelolaan Air Limbah;

- Air Limbah Domestik; sistem pengelolaan air limbah setempat dilakukan secara individual (*septic tank*) pada kawasan-kawasan yang belum memiliki sistem terpusat. Sistem pengelolaan air limbah terpusat dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat untuk rencana kawasan pusat pemerintahan di Kolok, kawasan pariwisata Kandih, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perumahan dan kawasan permukiman padat. Sedangkan IPAL terpusat diarahkan lokasinya di Kecamatan Barangin
- Air Limbah Industri; Sistem pengelolaan limbah industri dilakukan dengan sistem pengolahan air limbah setempat
- Air Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3); Sistem pengolahan air limbah B3 dilakukan secara tersendiri oleh pihak penghasil limbah B3 dan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

c. Sistem Persampahan; Pengelolaan sistem persampahan bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Rencana pengembangan sistem persampahan untuk kota Sawahlunto adalah sebagai berikut:

- Sistem persampahan terdiri dari Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- Tempat Penampungan Sementara (TPS) berupa tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu, dengan lokasi pada setiap unit lingkungan permukiman dan pusat-pusat kegiatan. Ditetapkan di setiap desa/kelurahan.
- Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) berupa tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, ditetapkan di setiap pusat lingkungan/ atau Kdi setiap kecamatan atau kawasan seluas 500-1.000 m².
- Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) berupa tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan, ditetapkan di Kayu Gadang Kecamatan Barangin
- METODA pengolahan sampah di TPA dengan menggunakan metode controlled landfill pada tahap 5 tahun pertama dan dilanjutkan dengan metoda sanitary landfill.

- d. Sistem Drainase; Dengan keadaan topografi Kota yang bergelombang dan berbukit, proses aliran air hujan cenderung cepat. Jika kondisi ini dibiarkan maka dikhawatirkan akan menimbulkan banjir yang menggenangi kawasan pusat kota yang cukup ramai dan merupakan pusat aktivitas perekonomian dan jasa. Jaringan primer merupakan bagian dari sistem pengendalian banjir di Wilayah Sungai Indragiri. Jaringan drainase primer dan sekunder ditetapkan dengan menggunakan pendekatan Sub-DAS pada masing-masing kecamatan
- e. Penyediaan Dan Pemanfaatan Prasarana Dan Sarana Jaringan Jalan Pejalan Kaki; Sistem sirkulasi pejalan kaki merupakan sistem yang harus diperhatikan, menyangkut keberhasilan pembentukan kawasan yang hidup dan berkarakter. Sistem sirkulasi pejalan kaki dibentuk sepanjang koridor, bersisian dengan jalan arteri. Dimensi yang direncanakan untuk kawasan ini adalah lebar 2 - 4 m. Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki ditetapkan disepanjang jalan arteri primer, kolektor primer dan di area kota lama, pusat pemerintahan, kawasan wisata Kandih, rencana pengembangan perdagangan regional Muara Kalaban dan di sentra industri kecil di Kecamatan Silungkang. Khusus untuk kawasan kota Lama lebar ruang pejalan kaki minimal 1 - 1,2 m. Diharapkan dengan lebar ini, tidak saja hanya pejalan kaki, namun juga bagi yang akan bersepeda. Lokasi khusus pejalan kaki berada di jalan-jalan di Kota Lama.
- f. Jalur Evakuasi Bencana; Jalur evakuasi bencana bertujuan sebagai penyediaan ruang yang dapat digunakan sebagai tempat keselamatan dan ruang untuk berlindung jika terjadi bencana. Jalur evakuasi bencana meliputi *escape way/jalur keluar dan melting point/ tempat berkumpul* baik dalam skala kota, kawasan, maupun lingkungan. Jalur keluar ditetapkan di jalan-jalan arteri primer, jalan kolektor primer dan jalan kolektor sekunder.
- g. Sistem Proteksi Kebakaran; Sistem proteksi kebakaran kota perlu dilakukan studi lebih lanjut dalam dalam Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

II. POLA RUANG

Pola ruang wilayah Kota Sawahlunto terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya.

1. Rencana Kawasan lindung

- a. Hutan Lindung;
Hutan lindung terdapat di Kecamatan Lembah Segar dan Kecamatan Silungkang dengan luas kurang lebih 88,31 (delapan puluh delapan koma tiga satu) hektar.
- b. Kawasan Perlindungan Setempat;
Kawasan perlindungan setempat di kota Sawahlunto meliputi sempadan sungai, perlindungan terhadap kawasan sekitar mata air
- c. Ruang Terbuka Hijau;
Kebutuhan luas Ruang Terbuka Hijau (Kawasan Lindung) Kota Sawahlunto sesuai standar UU No. 26 Tahun 2007: 30% dari 27.345.Ha = 8.203.5 Ha. Kebutuhan luas Ruang Terbuka Hijau (Kawasan Publik) Kota Sawahlunto sesuai standar UU No. 26 Tahun 2007: 20% dari 27.345 Ha = 5.469 Ha.
- d. Kawasan Cagar budaya;
Kawasan Cagar budaya di Kota Sawahlunto dapat dibagi dengan beberapa kategori:

- Kawasan Kota Lama, pada kawasan ini terdapat beberapa zonasi kawasan yang memiliki karakter yang berbeda dari segi fungsi ruang dan letak kawasan
 - Situs/Insitu Heritage, situs/Insitu yang terpisah dari kawasan kota lama dimana keberadaan lokasi tersebut memiliki nilai-nilai sejarah dan pengembangan ilmu pengetahuan. Beberapa tersebar di seluruh pelosok Kota Sawahlunto
- e. Kawasan rawan bencana alam yang meliputi kawasan rawan tanah longsor.
Kawasan rawan bencana alam di Kota Sawahlunto meliputi kawasan rawan sesar ditetapkan di kawasan Santur, sebagian Kawasan Kolok, Sikalang, Durian I, Durian II dan Kelurahan Lubang Panjang, tanah longsor dan erosi ditetapkan di Tarantak Bancah, Kelurahan Durian I, Durian II, di sekitar Batang Ombilin, Lumindai, Lunto Barat, Lunto Timur dan Kubang Tengah.
2. Rencana Kawasan Budidaya
Kawasan budidaya yang terdapat di Kota Sawahlunto terdiri atas:
- a. Kawasan peruntukan perumahan, meliputi perumahan dengan kepadatan tinggi, perumahan dengan kepadatan sedang dan perumahan dengan kepadatan rendah;
 - b. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa, terdiri atas pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern;
 - c. kawasan peruntukan perkantoran, terdiri atas perkantoran pemerintahan dan perkantoran swasta;
 - d. kawasan peruntukan industri, meliputi industri rumah tangga/ kecil dan industri menengah dan industri berbasis sumberdaya alam;
 - e. kawasan peruntukan pariwisata untuk menampung kegiatan pariwisata alam, pariwisata budaya, dan pariwisata buatan;
 - f. kawasan ruang terbuka non hijau terdiri dari pemakaman umum, plaza, dan tempat parkir;
 - g. kawasan ruang evakuasi bencana;
 - h. kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal;
 - i. kawasan peruntukan lainnya yang meliputi kawasan pertanian; kawasan pertambangan dan kawasan hutan produksi.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025
- a. Visi RPJPD Kota Sawahlunto 2005-2025
Visi Kota Sawahlunto mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Visi dan Misi Kota yaitu "Sawahlunto Tahun 2020 menjadi Kota Wisata Tambang yang Berbudaya". Visi pembangunan jangka panjang pada dasarnya merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Suatu keadaan dimana pada tahun 2020 Kota Sawahlunto adalah Kota Wisata Tambang yang Berbudaya dimana kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat Kota Sawahlunto dipengaruhi oleh aktivitas pariwisata dengan karakteristik tambang, wisata rekreasi dan wisata lainnya.
- b. Misi RPJPD Kota Sawahlunto 2005-2025
Misi merupakan upaya umum yang ditetapkan untuk mewujudkan visi Kota Sawahlunto tersebut yang akan dilaksanakan dalam periode 20 (dua puluh) tahun mendatang. Misi tersebut adalah sebagai berikut:
- Misi 1: memelihara dan mengembangkan nilai-nilai dasar agama dan adat di tengah-tengah masyarakat
Mewujudkan tata kehidupan bermasyarakat yang baik tidak terlepas dari tuntunan dan panduan dari agama dan kepercayaan masing-masing. Kehidupan masyarakat yang menerapkan nilai-nilai beragama

akan menciptakan sikap toleransi yang tinggi antar sesama. Hal ini sejalan dengan falsafah minangkabau yang menjadi landasan kehidupan bermasyarakat yaitu "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah".

- Misi 2: meningkatkan fasilitas dan pelayanan umum
Tujuan utama dari pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia serta dibutuhkan fasilitas, sarana dan prasarana untuk mempermudah akses masyarakat dalam mengembangkan berbagai macam usahanya. Semua itu harus didukung oleh pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance) yang merupakan persyaratan penting untuk dapat mewujudkan upaya pembangunan daerah yang terarah, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
 - Misi 3: Mengembangkan objek wisata tambang
Kota Sawahlunto memiliki keindahan alam, nilai historis dan budaya yang spesifik sehingga mempunyai daya tarik tersendiri yang tercermin dalam setiap objek wisata yang memiliki nilai historis serta tetap tumbuh dan berkembang budaya multi etnis yang ada. Daya tarik daerah yang emikian harus dapat dimanfaatkan oleh Kota Sawahlunto untuk menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Sumatera Barat dengan wisata tambang dan budaya dengan segala ciri khasnya.
 - Misi 4: Mengembangkan seluruh potensi kota yang dapat mendorong berkembangnya pariwisata
Pembangunan kepariwisataan Kota Sawahlunto didukung oleh berbagai sektor baik pendidikan, pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa, hiburan, olahraga, kuliner maupun serta lainnya.
3. Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019
Prioritas pembangunan nasional yang dirumuskan ke dalam 3 Dimensi Pembangunan yaitu sebagai berikut:
- a. Dimensi Pembangunan Manusia, terdiri dari:
 - 1) Pendidikan
 - 2) Kesehatan
 - 3) Perumahan
 - 4) Mental/Karakter
 - b. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan terdiri dari:
 - 1) Kedaulatan Pangan
 - 2) Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan
 - 3) Kemaritiman dan Kelautan
 - 4) Pariwisata dan Industri
 - c. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, terdiri dari :
 - 1) Antas Kelompok Pendapatan
 - 2) Antar Wilayah, Desa, Pembangunan Luar Jawa dan Kawasan Timur.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat 2016-2021
- a. Visi RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021
Visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah: Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera. Sumatera Barat Madani adalah suatu masyarakat yang berperadaban tinggi dan maju yang berbasis pada nilai-nilai, norma hukum, moral yang ditopang oleh keimanan. Sumatera Barat sejahtera merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, berpartisipasi

dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi serta hiburan; terciptanya hubungan antar masyarakat yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian serta tersedianya prasarana dan sarana publik terkait dengan infrastruktur pelayanan publik, transparansi dan teknologi yang mencukupi, nyaman dan terpeliharaan dengan baik.

b. Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021

Misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradab dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"
- 2) Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional
- 3) Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkeadilan dan berkualitas tinggi
- 4) Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah.

5. RPJMD Kabupaten/Kota Tetangga

a. RPJMD Kabupaten Solok

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016-2021, dengan Visi pembangunan Kabupaten Solok untuk lima tahun kedepan yaitu: "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Solok yang Maju dan Mandiri Menuju Kehidupan Masyarakat yang Madani dalam Nuansa Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah". Untuk mewujudkan visi tersebut maka perumusan misi yang dibuat untuk dipedomani dalam mewujudkan misi tersebut sebagai berikut:

- Misi 1 : Mensukseskan program Wajib Belajar 12 Tahun
- Misi 2 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pemberdayaan hidup bersih dan lingkungan sehat
- Misi 3 : Meningkatkan peluang dan akses ekonomi masyarakat yang lebih luas, didukung oleh sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai
- Misi 4 : Membangun karakter masyarakat yang sesuai filosofi ABS-SBK
- Misi 5 : Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

b. RPJMD Kabupaten Sijunjung

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021, dengan Visi pembangunan Kabupaten Sijunjung untuk lima tahun kedepan yaitu: "Terwujudnya Nagari Madani yang Maju, Jaya, Adil dan Sejahtera". Untuk mewujudkan visi tersebut maka perumusan misi yang dibuat untuk dipedomani dalam mewujudkan misi tersebut sebagai berikut:

- Misi 1 : Mewujudkan perekonomian masyarakat yang kuat, berdaya saing tinggi dan sejahtera

- Misi 2 : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, kuat, cerdas dan berkhilak mulia
- Misi 3 : Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan merata
- Misi 4 : Mewujudkan pemerintahan yang bekerja dan melayani
- Misi 5 : Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam yang berawawasan lingkungan
- Misi 6 : Melakukan revitalisasi adat dan budaya berdasarkan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah.

c. RPJMD Kabupaten Tanah Datar

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021, dengan Visi pembangunan Kabupaten Tanah Datar untuk lima tahun kedepan yaitu : "Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar yang Madani, Berbudaya dan Sejahtera dalam Nilai-nilai Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah". Untuk mewujudkan visi tersebut maka perumusan misi yang dibuat untuk dipedomani dalam mewujudkan misi tersebut sebagai berikut:

- Misi 1 : Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama, adat dan budaya
- Misi 2 : Meningkatkan kualitas SDM yang beriman, sehat, cerdas, berkarakter dan sejahtera berdasarkan falsafah ABS-SBK
- Misi 3 : Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional
- Misi 4 : Meningkatkan pembangaunan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan dna berawawasan lingkungan
- Misi 5 : Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan dan menguraikan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih sebagai landasan perumusan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, yang tertuju pada arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah pada periode berkenaan yang ditetapkan dalam RPJPD. Mengingat visi, misi dan program kepala daerah merupakan hasil proses politik terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih secara langsung oleh masyarakat, maka visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, dijadikan sebagai substansi dan rujukan utama penyusunan RPJMD. Namun demikian, demi mendapatkan dokumen perencanaan yang baik, manageable dan selaras dengan manajemen pemerintahan daerah, maka visi dan misi tersebut perlu dikembangkan dan dijabarkan sesuai prinsip perencanaan pembangunan daerah, agar tujuan dan sasaran pembangunan selama 5 (lima) tahun dapat dijabarkan secara efektif dalam mencapai tujuan utama pembangunan daerah.

5.1. VISI

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018, adalah rencana pelaksanaan tahap ketiga (2013-2018) dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025, dimana visi pembangunan jangka panjang daerah Kota Sawahlunto adalah **"Sawahlunto Tahun 2020 Menjadi Kota Wisata Tambang Yang Berbudaya"**. Untuk dapat mewujudkan visi tersebut, RPJPD Kota Sawahlunto telah menetapkan 4 misi utama pembangunan daerah jangka Panjang, meliputi : **1)Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai dasar agama dan adat di tengah-tengah masyarakat; 2)Meningkatkan fasilitas dan pelayanan umum; 3)Mengembangkan objek wisata tambang; 4) Mengembangkan seluruh potensi kota yang dapat mendorong berkembangnya pariwisata.**

Mengacu kepada pentahapan pembangunan daerah pada RPJPD Kota Sawahlunto pada Tahap ke-3 tahun 2013-2018, penekanan pembangunan lebih diarahkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia meliputi peningkatan mutu pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek).

Arah pembangunan ini mencakup beberapa bidang pembangunan yaitu :

1. Bidang Agama dan budaya dengan fokus pada pendalaman pemahaman keagamaan untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang berbudi luhur berakhlak mulia.
2. Bidang pembangunan hukum dan pemerintahan dengan fokus pada terwujudnya Menciptakan Tata Kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan melayani, dan Pemantapan sistem birokrasi yang berkeadilan dan membuka peran serta masyarakat dalam merumuskan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan,
3. Bidang ekonomi dengan fokus pada Penggunaan Kearifan Lokal untuk memantapkan berbagai pola kehidupan perekonomian yang berbasis pada pengembangan ekonomi kreatif, mandiri dan berdaya saing
4. Bidang sarana dan prasarana perkotaan dengan fokus Pembangunan Jaringan Infrastruktur secara terintegrasi satu sama lain diarahkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan

5. Pembangunan lingkungan hidup dengan fokus Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan.

Pada RPJPD Kota Sawahlunto Tahap ke-3 tahun 2013-2018, penekanan pembangunan diarahkan pada melanjutkan kebijakan yang telah ditempuh pada tahap kedua dengan fokus pada peningkatan capaian sasaran masing-masing bidang.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terpadu dan bersinergi antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah, diperlukan sinkronisasi prioritas nasional dan daerah. Sehubungan dengan itu perlu digambarkan terlebih dahulu visi dan misi serta prioritas pembangunan yang terdapat dalam **RPJMN Tahun 2015-2019**, yang selanjutnya akan dijadikan acuan dalam penentuan prioritas pembangunan daerah. Berikut ini adalah gambaran ringkas visi, misi, dan prioritas pembangunan nasional.

Visi Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 adalah **"Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**. Upaya untuk mewujudkan visi ini melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan Negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa dan berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Adapun Strategi Pembangunan Nasional yang digariskan dalam RPJMD 2015-2019 sebagai berikut:

1. Norma pembangunan yang diterapkan dalam RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut:
 - a. Membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat;
 - b. Setiap upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan.
 - c. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem.
2. Tiga Dimensi Pembangunan
 - a. Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat
Meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan dan mental/karakter.
 - b. Dimensi pembangunan sector unggulan dengan prioritas
Meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energy dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan dan pariwisata dan industry.
 - c. Dimensi pemerataan dan kewilayahan
Meliputi antar kelompok pendatapan dan antar wilayah dalam hal desa, pinggirahn, luar jawa dan kawasan timur.
3. Kondisi Sosial, Politik, Hukum dan Keamanan yang stabil diperlukan sebagai prasyarat pembangunan yang berkualitas. Antara lain kepastian dan penegakkan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi dan tata kelila dan reformasi birokrasi

4. Quickwins (hasil pembangunan yang dapat segera dilihat hasilnya).

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan Sembilan Agenda Prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut **NAWACITA**, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelolapemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi system dan penegakkan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat retorasi sosial Indonesia.

Visi Gubernur Sumatera Barat merupakan gambaran kondisi di masa depan yang dicita-citakan dan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu 2016-2021. Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera, dengan 4 misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamis, beradab dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif dan berdaya saing regional dan global dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan dan memperhatikan prioritas nasional tersebut diatas, serta mengakomodir visi, misi, kepala daerah terpilih, maka visi pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018 adalah : "**Terwujudnya Masyarakat Kota Sawahlunto yang Produktif, Mandiri, Religius, Sejahtera dan Pemerintahan yang Melayani**"

Untuk lebih jelasnya makna atas kata-kata pilihan dalam visi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. **Produktif**, berarti suatu kondisi dimana masyarakat mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menghasilkan sesuatu barang atau jasa yang mempunyai nilai jual sebagai penunjang ekonomi keluarga.
2. **Mandiri**, berarti berada pada kondisi dimana masyarakat dan daerah memiliki kehidupan yang sejajar dengan masyarakat dan daerah lainnya dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri melalui pemanfaatan sumber daya yang ada dan mewujudkan nilai kebersamaan.

3. **Religius**, berarti perilaku masyarakat yang mengarah pada kehidupan yang agamis dengan meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.
4. **Sejahtera**, berarti suatu kondisi dimana terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan daya saing dengan ditandai membaiknya indikator pembangunan sumber daya manusia antara lain pendapatan perkapita, menurunnya angka kemiskinan dan berkurangnya tingkat pengangguran sejalan dengan peningkatan pertumbuhan dan perbaikan ekonomi yang berkualitas serta meningkatnya derajat pendidikan dan kualitas kesejahteraan masyarakat.
5. **Pemerintahan yang melayani**, Pemerintahan daerah dengan peran barunya harus diarahkan sebagai fasilitator dan pengendali pelaksana langsung suatu urusan dan layanan.

5.2 MISI

Sebagai langkah nyata dari visi Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto tersebut di atas, maka misi Pemerintah Kota Sawahlunto tahun 2013-2018 dalam upaya mengembangkan dan memajukan pembangunan dalam semua bidang melalui perencanaan yang berkesinambungan, terarah dan terukur. **Berkesinambungan** artinya melanjutkan program kerja yang sudah disusun dan ditetapkan dalam APBD tahun 2013 dan tahun sebelumnya bersinergi dengan program kerja yang sudah ada. **Terarah** artinya bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan diarahkan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap dan tetap berkesinambungan sesuai terwujudnya visi kota tahun 2020. Sedangkan **terukur** artinya pelaksanaan program kerja dari tahun ke tahun harus mengalami peningkatan dengan tingkat prosentase pencapaian yang jelas dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, ataupun sumber pendanaan lainnya yang sah untuk pembangunan daerah.

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut di atas diperlukan **Misi** Pembangunan Daerah yang telah kami susun untuk periode 2013 - 2018 adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan usaha ekonomi produktif dan menciptakan peluang usaha melalui keunggulan pariwisata dan produk lokal;
2. Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah;
3. Memupuk kehidupan sosial yang agamis dan berakhlak mulia serta mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan berkarakter;
4. Menumbuhkan masyarakat yang berintelektualitas, sehat dan sejahtera yang menguasai berbagai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya;
5. Menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih, melayani, kreatif, inovatif dan efisien;
6. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi daerah.
7. Memperluas jaringan sosial, ekonomi secara nasional dan internasional.

Visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto tersebut sepenuhnya mendukung tercapainya target Visi dan Misi Pemerintah Provinsi dan Nasional. Secara lebih terfokus, berikut disajikan tabel hubungan visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto dengan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.

Revisi RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018

Tabel 5.1 Sinkronisasi Visi dan Misi RPJMD Kota Sawahlunto dengan Visi dan Misi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional

No.	RPJMN 2015-2019	No.	RPJMD 2016-2021 PROVINSI SUMATERA BARAT	No.	RPJMD 2013-2018 KOTA SAWAHLUNTO
	VISI		VISI		VISI
	TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG		TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI DAN SEJAHTERA		TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA SAWAHLUNTO YANG PRODUKTIF, MANDIRI, RELIGIUS, SEJAHTERA DAN PEMERINTAHAN YANG MELAYANI
	MISI		MISI		MISI
1	Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan.	1	Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamis, beradab dan berbudaya berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.	1	Mengembangkan usaha ekonomi produktif dan menciptakan peluang usaha melalui keunggulan pariwisata dan produk lokal.
2	Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan Negara hukum.	2	Meningkatkan tata pemerintahan yang baik dan bersih dan profesional.	2	Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah.
3	Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim.	3	Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkeadilan dan berkualitas tinggi.	3	Memupuk kehidupan sosial yang agamis dan berakhlak mulia serta mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan berkeadilan.
4	Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera	4	Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif dan berdaya saing regional dan global, menjadikan Sumbar sebagai destinasi pariwisata unggulan serta meningkatkan pemanfaatan SDA dan potensi daerah untuk kesejahteraan rakyat.	4	Menumbuhkan masyarakat yang berintelektualitas, sehat dan sejahtera yang menguasai berbagai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.
5	Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.	5	Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.	5	Menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih, melayani, kreatif, inovatif dan efisien.
6	Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.			6	Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi daerah.
7	Mewujudkan masyarakat yang berkeprabadian dalam kebudayaan.			7	Memperluas jaringan sosial, ekonomi secara nasional dan internasional.

5.3 TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mencapai misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018 maka dirumuskan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi sebagai berikut :

5.3.1 Mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif Dan Menciptakan Peluang Usaha Melalui Keunggulan Pariwisata Dan Produk Lokal

Tujuan yang akan dicapai dari misi ini adalah :

1. Mengembangkan perekonomian masyarakat yang berbasis potensi industri Rumah Tangga. Dengan sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :
 - a. Berkembangnya kegiatan industri dan ekonomi kreatif
2. Meningkatkan ketahanan pangan. Dengan sasaran yang akan dicapai :
 - a. Terjaganya ketersediaan pangan

5.3.2 Mewujudkan Kemandirian Dan Daya Saing Daerah

Tujuan yang akan dicapai dari misi ini adalah :

1. Meningkatkan produktivitas dan kesempatan kerja bagi Tenaga Kerja dan calon tenaga kerja. Dengan sasaran yang akan dicapai :
 - a. Meningkatnya kesempatan kerja
2. Menyediakan infrastruktur kota yang berkualitas. Dengan sasaran yang akan dicapai :
 - a. Meningkatnya kualitas infrastruktur.
3. Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup perkotaan yang baik. Dengan sasaran yang akan dicapai :
 - a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
 - b. Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan terhadap bencana.

5.3.3 Memupuk Kehidupan Sosial yang Agamais dan Berakhlak Mulia serta Mengoptimalkan Pelaksanaan Pendidikan Karakter

Tujuan yang akan dicapai dari misi ini adalah :

1. Membentuk akhlak dan kepribadian generasi muda sesuai syariat dan ajaran agama. Dengan sasaran yang akan dicapai :
 - a. Meningkatnya pengamalan ajaran agama pada generasi muda.
2. Mewujudkan kehidupan yang harmonis dan agamais ditengah masyarakat. Dengan sasaran yang akan dicapai :
 - a. Meningkatnya kehidupan harmonis intern dan antar umat beragama.
3. Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan serta mengoptimalkan pendidikan karakter. Dengan sasaran yang akan dicapai :
 - a. Meningkatnya kualitas pendidikan.

5.3.4 Menumbuhkan Masyarakat yang berintelektualitas, sehat dan sejahtera yang menguasai berbagai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.

Tujuan yang akan dicapai dari misi ini adalah :

1. Menumbuhkan jiwa dan sikap intekektualitas pada masyarakat. Sasaran yang akan dicapai :
 - a. Terwujudnya Kedewasaan Berpolitik ditengah masyarakat
2. Mewujudkan perlindungan ketidakpastian hukum terhadap masyarakat. Sasaran yang akan dicapai :
 - a. Menurunnya tindak kekerasan di masyarakat.
3. Mengembangkan penggunaan teknologi dalam kehidupan masyarakat dan tata pemerintahan. Sasaran yang akan dicapai :
 - a. Terwujudnya Kota Sawahlunto menjadi Smart City.
4. Meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat. Sasaran yang akan dicapai :
 - a. Tersedianya pelayanan kesehatan dan sosial yang berkualitas.
 - b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
5. Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Masyarakat. Sasaran yang akan dicapai :
 - a. Menurunnya tingkat kemiskinan
6. Mengoptimalkan peran masyarakat dan kegiatan kepemudaan dalam pembangunan. Sasaran yang akan dicapai :
 - a. Meningkatnya peran pemuda dan masyarakat dalam pembangunan.
 - b. Terwujudnya pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan hak anak (PUHA).
 - c. Terciptanya budaya berolahraga ditengah masyarakat

5.3.5 Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, bersih, melayani, kreatif, inovatif dan efisien

Tujuan yang akan dicapai dari misi ini adalah :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efisien. Sasaran yang akan dicapai :
 - a. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dan akuntabilitas kinerja.
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dengan sasaran yang akan dicapai :
 - a. Meningkatnya besaran Pendapatan Asli daerah termasuk pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (BUMD)
3. Mewujudkan Pelayanan Publik yang prima kepada masyarakat. Sasaran yang akan dicapai :
 - a. Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) ditiap OPD
 - b. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan.

5.3.6 Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Daerah

Tujuan yang akan dicapai dari misi ini adalah :

1. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah melalui pengelolaan yang berwawasan lingkungan. Sasaran yang akan dicapai:

a. Berkembangnya kepariwisataan di Kota Sawahlunto

5.3.7 Memperluas Jaringan Sosial dan Ekonomi secara Nasional dan Internasional

Tujuan yang akan dicapai dari misi ini adalah :

1. Meningkatkan kerjasama, promosi dan aksesibilitas daerah dalam rangka pengembangan ekonomi dan sosial. Sasaran yang akan dicapai adalah :
 - a. Terwujudnya kerjasama pembangunan ekonomi dan peningkatan penyertaan modal.
 - b. Meningkatnya aksesibilitas dalam daerah dan dengan daerah tetangga.

Secara keseluruhan, hubungan hirarki antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan Kota Sawahlunto dalam periode 2013 -2018 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 5.2
Keterkaitan Antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kota Sawahlunto yang Produktif, Mandiri, Religius, Sejahtera dan Pemerintahan Yang Melayani		
MISI	TUJUAN PEMBANGUNAN	SASARAN
1	2	3
1 Mengembangkan usaha ekonomi produktif dan menciptakan peluang usaha melalui keunggulan pariwisata dan produk lokal	1 Mengembangkan perekonomian masyarakat yang berbasis potensi industri Rumah Tangga	1 Berkembangnya kegiatan industri dan ekonomi kreatif
	2 Meningkatnya ketahanan pangan	1 Terjaganya ketersediaan pangan
2 Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah	1 Meningkatkan produktivitas dan kesempatan kerja bagi tenaga kerja dan calon tenaga kerja	1 Meningkatnya kesempatan kerja
	2 Menyediakan infrastruktur kota yang berkualitas	1 Meningkatnya kualitas infrastruktur
	3 Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup perkotaan yang baik	1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 2 Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan terhadap bencana
3 Memupuk Kehidupan Sosial yang Agamais dan Berakhlak Mulia serta Mengoptimalkan Pelaksanaan Pendidikan Berkarakter	1 Membentuk akhlak dan kepribadian generasi muda sesuai syariat dan ajaran agama	1 Meningkatnya pengamalan ajaran agama pada generasi muda
	2 Mewujudkan kehidupan yang harmonis dan agamais ditengah masyarakat	1 Meningkatnya kehidupan harmonis intern dan antar umat beragama

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kota Sawahlunto yang Produktif, Mandiri, Religius, Sejahtera dan Pemerintahan Yang Melayani			
MISI	TUJUAN PEMBANGUNAN	SASARAN	
1	2	3	
	3 Meningkatkan kualitas dan Pelayanan Pendidikan serta mengoptimalkan pendidikan karakter	1 Meningkatnya kualitas pendidikan	
4 Menumbuhkan Masyarakat yang berintelektualitas, sehat dan sejahtera yang menguasai berbagai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya	1 Menumbuhkan jiwa dan sikap intekektualitas pada masyarakat	1 Terwujudnya Kedewasaan Berpolitik ditengah masyarakat.	
	2 Mewujudkan perlindungan, ketidakpastian hukum terhadap masyarakat	1 Menurunnya tindak kekerasan di masyarakat	
	3 Mengembangkan penggunaan teknologi dalam kehidupan masyarakat dan tata pemerintahan	1 Terwujudnya Kota Sawahlunto menjadi Smart City	
	4 Meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat		1 Tersedianya Pelayanan Kesehatan dan Sosial yang berkualitas
			2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
	5 Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Masyarakat	1 Menurunnya Tingkat Kemiskinan	
6 Mengoptimalkan peran Masyarakat dan kegiatan kepemudaan dalam pembangunan		1 Meningkatnya peran pemuda dan masyarakat dalam pembangunan	
		2 Terwujudnya pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan hak anak (PUHA)	
		3 Terciptanya budaya berolahraga di tengah masyarakat	
5 Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, bersih, melayani, kreatif, inovatif dan efisien	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efisien	1 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dan akuntabilitas kinerja	
	2 Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah termasuk pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (BUMD)	
	3 Mewujudkan Pelayanan Publik yang prima kepada masyarakat		1 Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di tiap OPD
2 Terwujudnya pengelolaan arsip dan perpustakaan daerah yang berkualitas			
3 Terwujudnya tertib administrasi kependudukan			

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kota Sawahlunto yang Produktif, Mandiri, Religius, Sejahtera dan Pemerintahan Yang Melayani		
MISI	TUJUAN PEMBANGUNAN	SASARAN
1	2	3
6 Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Daerah	1 Mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah melalui pengelolaan yang berwawasan lingkungan	4 Berkembangnya kepariwisataan di Kota Sawahlunto
7 Memperluas Jaringan Sosial dan Ekonomi secara Nasional dan Internasional	1 Meningkatkan Kerjasama, Promosi dan Aksesibilitas Daerah dalam Rangka Pengembangan Ekonomi dan Sosial	5 Terwujudnya kerjasama pembangunan ekonomi dan penyertaan modal
		6 Meningkatnya Aksesibilitas dalam daerah dan dengan Daerah Tetangga

Selanjutnya Indikator dan target kinerja RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018 untuk setiap misi dan sasaran yang ingin dicapai dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 5.3 Target dan Indikator Kinerja RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	REALISASI			TARGET			KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD	OPD PENANGGUNG JAWAB								
					2014	2015	2016	2017	2018											
Misi 1 : Mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif dan Menciptakan Peluang Usaha melalui Keuangan Periwisata dan Produk Lokal	Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berbasis potensi industri Rumah Tangga	Perkembangan kegiatan industri dan ekonomi kreatif	Jumlah setara industri kreatif dan rumah tangga	Jumlah setara	7	8	10	11	11	12	12	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan								
					298.342,20	312.905,23	338.444,30	353.285,86	370.530,16	385.704,02	385.704,02									
					RPJRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan (IKU)	Rupiah														
					Daya Beli Masyarakat (IKU)	Rupiah	630.200	635.145	643.235	645.000	647.000		650.000	650.000						
					Jumlah produksi per hektar	Ton/ha	4,98	4,98	4,99	5,00	5,00		5,10	5,10	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan					
					PRRB Lapangan Usaha Perikanan, Kehutanan dan Perikanan (IKU)	Rupiah	224.358,31	248.696,9	268.628,7	303.941,1	334.567,4		367.198,85	367.198,85						
					Nilai / score pola pangan harapan (IKU)	Persenta se (%)	84,1	83,45	83,67	85	87		88	88						
					Misi 2 : Mewujudkan Kemendirian dan Daya Saling Daerah	Meningkatkan produktivitas dan kesempatan kerja bagi tenaga kerja dan calon tenaga kerja	Meningkatnya kesempatan kerja	Pendapatan perkapita (IKU)	Juta	39,30	42,66		45,27	42,06	44,08	60,65	60,65	Dinas Perencanaan, PTSP dan Tenaga Kerja		
										Tingkat Pengangguran (IKU)	Persenta se %		6,16	6,38	7,18	7,03	7,03		6,98	6,88
										Jumlah lapangan usaha baru	Usaha		30	30	30	40	40		50	50

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	REALISASI			TARGET		KONDISI AKHIR RPJMD	OPD PENANGGUNG JAWAB
					2014	2015	2016	2017	2018		
Meyorikan infrastruktur kota yang berkualitas	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Persentase infrastruktur perkotaan yang ditingkatkan (IKU)	Peningkatan persentase (%)	86	88	88	89	90	90	Dinas Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang	
			Persentase jalan dalam kondisi baik	69,52	63,78	71,32	74	75	80		80
			Luas Cakupan Layanan	44.909	48.000	48.000	65.000	70.000	75.000		75.000
			Dramase Perantara perantara untuk pemertah dalam kondisi layak (IKU)	80	80	85	90	95	100		100
			Persentase rumah tangga menggunakan air bersih	52,64	86,48	85,56	86,92	87,00	88,00		89,00
			Luas sewah yang teran Higasi teknis	1750	1750	1750	1750	1750	1750		1750
			Persentase tingkat kesesuaian penataan ruang dengan rencana tata ruang (IKU)	85	86	88	88	89	90		90
			Persentase ruang terbuka hijau (IKU)	12,80	12,80	15,83	17	18	19		19
			Jumlah sarana prasarana permukiman dan permukiman yang ditingkatkan (IKU)	25	29	25	63	45	50		50
			Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup perkotaan yang baik	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup							

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA RPJMD	REALISASI				TARGET			KONDISI AKHIR KINERJA RPJMD	OPD PEMANGGUNG JAWAB	
					2014	2015	2016	2017	2018	2018				
		Jumlah kegiatan usaha yang memiliki dokumen dan/atau laporan	Kegiatan usaha	17	25	38	40	42	45	45				
		Persentase cakupan pelayanan pengeloajaan	%	60	68	68	70	75	80	80				
		Jumlah desa/kecamatan yang memiliki persontil siaga bencana	Desa/kec	N/A	37	37	37	37	37	37				
		Jumlah relawan keselamatan bencana (IKU)	Jumlah relawan bencana	31	40	284	344	404	434	434			Badan Kesbangpol dan PEBD	
Misi 3: Memupuk Kehidupan Sosial yang Agamis dan Berakhlak Mulia serta Mengoptimalkan Pelaksanaan Pendidikan Karakter														
Membentuk akhlak dan kepribadian generasi muda sesuai syarat dan ajaran agama	Meningkatnya penguasaan ajaran agama pada generasi muda	Persentase siswa tamat SD yang bisa baca Al Quran	%	100	80	85	100	200	100	100				
		Jumlah kasus kenakalan remaja, amoral dan asusila pada generasi muda (IKU)	Jml kasus	N/A	0	0	0	0	0	0	0			
Mewujudkan kehidupan yang harmonis dan agamis di tengah	Meningkatnya kehidupan harmonis inter dan antar umat beragama	Jumlah peruntukan konflik SARA bermuatan agama (IKU)	Jumlah konflik	N/A	0	0	0	0	0	0				
		Jumlah TPA/TPSA yang aktif	TPA/TPSA	180	180	180	181	181	181	181				

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI	REALISASI				TARGET	KONDISI	OPD PEMANGGUNG JAWAB
				KINERJA AWAL RPJMD	2014	2015	2016	2017	2018	KINERJA AKHIR RPJMD	
Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan, serta mengoptimalkan pendidikan karakter masyarakat	Meningkatnya kualitas pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,52	12,68	12,69	12,71	12,75	12,80	12,80	Dinas Pendidikan
		Angka Melek Haruf (AMH)	AMH %	99,05	99,5	99,9	99,25	99,30	99,35	99,35	
		Nilai APM SD	%	95,69	95,69	93,22	96,70	97,03	98	98	
		Nilai APM SMP	%	65,80	77,84	55,92	66,75	69,45	75	75	
		Angka Rate-rata Lama Sekolah (IKU)	RLS tahun	9,25	9,42	9,42	9,8	9,92	10,2	10,2	
		Persentase sekolah yang menggalakan kurikulum pendidikan karakter	%	0	50	60	80	90	100	100	
Misi 4 : Menumbuhkan Masyarakat yang Berintelektualitas, Sehat dan Sejahtera yang Menguasai berbagai Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni dan Budaya											
Memunahkan jiwa dan sikap intelektualitas pada masyarakat	Terwujudnya kedewasaan berpikir di tengah masyarakat	Persentase tingkat partisipasi penuh (IKU)	% persentase	75,38	66,98	53,31	0	0	80	80	Badan Kesbangpol & PBD
				Kasus	100	100	100	100	100	100	
Mewujudkan perlindungan, keadilan dan kepastian hukum terhadap masyarakat	Menurutmnya ketertarikan masyarakat di	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani secara terpadu (IKU)	% persentase	80	100	100	100	100	100	100	Satgop Pp dan Peradain Kebakaran
				Persentase penggalakan perda	100	100	100	100	100	100	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	REALISASI				TARGET			KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD	OPD PEMANGGUNG JAWAB
					2014	2015	2016	2017	2018	2018			
Mengembangkan dan penguatan teknologi dalam kehidupan masyarakat dan tata pemerintahan	Terwujudnya Kota Sawahunto menjadi Smart City	Persentase layanan jalinan internet (IKU) Jumlah desa/kel yang terfasilitasi internet	% Desa/kel uraian	N/A	94	94	97	97	100	100	37	Dinas perhubungan, Sevelako, semua OPD	
Memingkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat	Tersedianya pelayanan kesehatan dan sosial yang berkualitas	Jumlah sarana pelayanan kesehatan yang terakreditasi (IKU) Persetujuan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di rumah sakit dan tingkat dasar Persentase kepemilikan jamanan Kesehatan (IKU) Persentase pelayanan kesehatan sesuai standar Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Unit layanan Puas/Tidak Puas % % % % % gizi kurang	0 N/A	1 Puas	2 Puas	6 Puas	6 Puas	6 Puas	6 Puas	6 Puas	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB dan RSUD	
		Jumlah sarana kesehatan ibu melahirkan (IKU)	Orang/kelahiran	28,9/1000 OKH	15,4/1000 KH	11,5/1000 KH	24/1000 KH	23/1000 KH	22/1000 KH	22/1000 KH	22/1000 KH	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	
		Persentase meningkatnya umur harapan hidup	Persentase/tahun	69,14	69,17	69,27	69,43	69,63	69,81	69,81	69,81		
		Persentase Pevakensi	% gizi kurang	12,8	11,5	10,7	11,1	11	10,9	10,9	10,9		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	REALISASI			TARGET		KONDISI AKHIR RPJMD	OPD PENANGGUNG JAWAB
					2014	2015	2016	2017	2018		
Meningkatnya kesejahteraan hidup masyarakat	Menurunnya tingkat kemiskinan	kekurangan gizi pada balita (IKU)	dan gizi buruk	14	16	12	6	5	5	5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, Sedulako dan Barentihbangda
		Menurunnya jumlah kematian bayi	Orang/tahun	41,2	33,04	52,02	55	60	65	65	
		Persentase rumah tangga ber PHBS (IKU)	%	19	20	22	24	26	28	28	
		Jumlah desa/kel STBM (Santitas Total Bernests Masyarakat)	Desa/Kel	19	20	22	24	26	28	28	
		Jumlah PUS (Pesaung Usia Sabur) berKB (IKU)	Jumlah KK	7164	7311	8495	7413	7500	7550	7600	
		Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan social (IKU)	%	41,36	47,89	57,36	58	58,50	59	59	
		Persentase penduduk miskin (IKU)	%	2,17	2,25	2,22	2	1,9	1,75	1,75	
Menggoptimalkan peran pemuda, perempuan dan masyarakat dalam pembangunan	Memungkanya peran pemuda dan masyarakat dalam pembangunan	Jumlah kelompok pemanfaatan teknologi tepat guna yang dimanfaatkan masyarakat pedesaan	kelompok	19	19	21	24	27	30	30	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, Sedulako dan Barentihbangda
		Jumlah desa/kel yang mempunyai kelompok masyarakat, perempuan,	Desa/Kel	N/A	37	37	37	37	37	37	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	REALISASI					KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD	OPD PENANGGUNG JAWAB
					2014	2015	2016	2017	2018		
		ormas dan Karang taruna yang aktif (IKU)	Nilai Status	Paratama	Paratama	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	
		pengembangan Kota layak anak (IKU)	Status	25	25	25	25	28	30	30	
		Jumlah Organisasi Wanita yang Aktif (IKU)	Jumlah	4	6	6	8	9	10	10	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		Jumlah cabang olahraga massal yang berkembang di masyarakat (IKU)	Cabang	4	6	6	8	9	10	10	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		Peringkat Perda Sumatera Barat	Peringkat	8	9	9	8	8	7	7	
Misi 5: Menefektikan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Melayani, Kreatif, Inovatif dan Efisien											
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efisien	Memungkanya kinerja perencanaan pembangunan dan akuntabilitas	Opini BPK terhadap laporan keruangan (IKU)	dokumen	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	Inspektorat, Badan Pengendalian Keuangan dan Aset Daerah, Serdako dan serua OPD serta OPD Barentihangda dan OPD
				N/A	C	C	B	B	BB	BB	
		Hasil evaluasi LAKIP Kota (IKU)	Nilai	80	80	90	100	100	100	100	
		Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan aturan pemerintahan (IKU)	% persentase	80	80	90	100	100	100	100	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	REALISASI				TARGET			KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD	OPD PEKANGGUNG JAWAB	
					2014	2015	2016	2017	2018	2019				
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan (BUMD)	Jumlah PAD (IKU)	Milyar Rupiah	38.595	45.580	52.268	53.681	59.586	66.14	66.14	66.14	66.14	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Kecamatan	
Mewujudkan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat	Terwujudnya SPM dan SOP dihap OPD	Jumlah OPD yang memenuhi SPM dan SOP (IKU)	Organisasi Perangkat Daerah	15	15	15	20	20	21	21	21	21	Setdako, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM dan semua OPD	
	Terwujudnya pengelolaan arsip dan perpustakaan daerah yang berkualitas	Jumlah system pengelolaan arsip dan perpustakaan secara elektronik (IKU)	Jumlah aplikasi	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	Dimas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Kecamatan	
	Terwujudnya terhib administrasi kependudukan	Persentase warga KTP yang memiliki KTP elektronik (IKU)	% persenta	90,95	95,48	84,67	98	98	98	98	98	98	Dimas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Kecamatan	
		Penduduk usia 0-18 th yang memiliki akta kelahiran	% persenta	70,42	80	80	86	85	95	95	95	95		
Misi 6 : Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Daerah														
Mengoptimalkan pemanfaatan dan potensi daerah melalui pengelolaan	Ercembangy a keparwisataa di Kota Sawahlunto	Jumlah pendapatan asli daerah sektor pariwisata (IKU)	Rupiah	1.484.335.722	1.468.809.170	1.372.461.022	1.675.000.000	1.797.050.000	1.850.000.000	1.850.000.000	1.850.000.000	1.850.000.000	1.200.000.000	Dimas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		Jumlah kunjungan wisatawan (IKU)	Orang	750.385	760.243	810.340	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL RUMAH		REALISASI					KONDISI AKHIR RUMAH		OPD PENANGGUNG JAWAB
				2014	2015	2016	2017	2018	2018	2018			
Berwawasan lingkungan		Jumlah objek wisata baru	Objek	N/A	5	7	9	9	10	10	Dinas Kebudayaan, Penginggalan Bersejarah dan Permusucunan		
				Per malam	1	1	1	2	2	2			
		Rata-rata lama tinggal wisatawan	Jenis	25	30	33	40	41	44	44	Dinas Kebudayaan, Penginggalan Bersejarah dan Permusucunan		
				Pengunjung	11.008	16.420	11.213	16.734	19.244	22.121		22.121	
Misi 7 : Memperluas Jaringan Sosial dan Ekonomi secara Nasional dan Internasional													
Meningkatkan kerjasama, promosi dan aksesibilitas daerah dalam rangka pengembangan ekonomi dan sosial	Terwujudnya kerjasama pembangunan ekonomi dan penyertaan modal	Jumlah nota kerjasama dengan kab/kota dan atau lembaga penelitian (IKU)	Nota kerjasama	18	14	21	8	5	5	39	Dinas Pariwisata, Pemuda & Olahraga, Berekhbangla dan Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja		
				Rupiah	N/A	PMDN : 309,2 juta PMA: 3.300	PMDN : 504,8 juta PMA: 3.300	35 M	36 M	37 M		37 M	
	Meningkatnya aksesibilitas dalam daerah dan dengan daerah tetangga	Pangung jalan yang memiliki sarana prasarana sesuai dengan standar (IKU)	Km	110	115	118	121	124	127	127	Dinas Perhubungan		
				Jml ruas jalan yang menghubungkan kota tetangga berstatus mantap	4	4	5	6	7	8		8	

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pembangunan daerah harus didasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai untuk kebijakan yang dibuat dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah harus memiliki arah yang jelas. Arah kebijakan pembangunan disusun berdasarkan analisis kebutuhan pembangunan daerah dengan memprtimbang aspirasi masyarakat, kondisi dan kemampuan daerah, termasuk kinerja pelayanan pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya. Arah kebijakan pembangunan ini selanjutnya menjadi pedoman perencanaan bagi stakeholder pembangunan di daerah. Oleh karenanya, penting bagi Pemerintah Daerah menyusun Arah Kebijakan Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat pernyataan-pernyataan Kebijakan selama lima tahun.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategic tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan tetapi juga semua program yang mendukung dan menciptakan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, system manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi:

6.1. MISI 1 : MENGEMBANGKAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF DAN MENCIPTAKAN PELUANG USAHA MELALUI KEUNGGULAN PARIWISATA DAN PRODUK LOKAL

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan keadaan perekonomian yang membuka pasar dengan menggarungi batasan-batasan impor dan peningkatan kualitas produk yang dijarapkan menuju persaingan yang sehat bagi pelaku usaha Negara-negara ASEAN. Oleh karena itu perwujudan ekonomi masyarakat yang produktif, tanggu dan berbasis kepada keunggulan produk lokal yang berdaya saing merupakan unsur penting untuk mendorong kemajuan ekonomi dan kemakmuran masyarakat serta menjawab tantang Pasar ASEAN. Kota Sawahlunto sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berperan dalam pembangunan ekonomi dan mempersiapkan strategi dan arah kebijakan yang mendukung kesiapan Kota Sawahlunto untuk menghadapi pasa ASEAN ini (Masyarakat Ekonomi ASEAN).

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam misi adalah 1).Mengembangkan perekonomian masyarakat yang berbasis potensi industri Industri Rumah Tangga dan 2).Meningkatkan ketahanan pangan. Sedangkan sasaran yang hendak dicapai dalam misi ini adalah 1).Berkembangnya kegiatan dan ekonomi kreatif dan 2).Terjaganya ketersediaan pangan.

6.1.1. STRATEGI UNTUK MISI I

Untuk mencapai sasaran yang dinyatakan pada Misi 1, ditempuh strategi :

1. Peningkatan kuantitas, kualitas sentra industri dan ekonomi kreatif;
2. Penyediaan sarana dan prasarana pemasaran hasil industri kreatif dan industri rumah tangga berbahan baku lokal di kawasan wisata;
3. Peningkatan kemitraan dan bisnia bagi pelaku usaha baru dengan sumber pendanaan dalam permodalan;

4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Pengelola Pertanian.

6.1.2. ARAH KEBIJAKAN UNTUK MISI 1

Sedangkan arah kebijakan untuk melaksanakan strategi tersebut adalah:

1. Mengembangkan kawasan strategis menjadi kawasan jasa dan perdagangan, UMKM dan koperasi;
2. Meningkatkan keterampilan dan SDM tenaga kerja sektor industri rumah tangga;
3. Meningkatkan kearifan lokal untuk pengembangan ekonomi kreatif yang mandiri dan berdaya saing;
4. Meningkatkan pengelolaan dan penataan pasar tradisional/kawasan wisata;
5. Meningkatkan infrastruktur perdagangan dan fasilitas pendukung jasa lainnya;
6. Meningkatkan sistem distribusi perdagangan;
7. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan manajemen pengelolaan koperasi dan UMKM serta kerjasama dengan lembaga keuangan lainnya;
8. Meningkatkan pengembangan industri berbasis kluster;
9. Meningkatkan kerjasama perdagangan antar daerah;
10. Meningkatkan sumber daya petani;
11. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian;
12. Memperkokoh kelembagaan kelompok tani;
13. Mewujudkan intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi pertanian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil.

Tabel 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kota Sawahlunto pada Misi 1

VISI		: Terwujudnya Masyarakat Kota Sawahlunto yang Produktif, Mandiri, Religius, Sejahtera dan Pemerintahan Yang Melayani		
MISI 1		: Mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif dan Menciptakan Peluang Usaha melalui Keunggulan Pariwisata dan Produk Lokal		
TUJUAN PEMBANGUNAN		SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1		2	3	4
1	Mengembangkan perekonomian masyarakat yang berbasis potensi industri Rumah Tangga	1 Berkembangnya kegiatan industri dan ekonomi kreatif	Peningkatan kuantitas, kualitas sentra industri dan ekonomi kreatif	1 Mengembangkan kawasan strategis menjadi kawasan jasa perdagangan, UMKM dan koperasi
				2 Meningkatkan keterampilan dan SDM tenaga kerja sektor industri rumah tangga
				3 Meningkatkan kearifan lokal untuk pengembangan ekonomi kreatif yang mandiri dan berdaya saing
			1 Meningkatkan pengelolaan dan penataan pasar tradisional/kawasan wisata	
			2 Meningkatkan infrastruktur perdagangan dan fasilitas pendukung jasa lainnya	

VISI	: Terwujudnya Masyarakat Kota Sawahlunto yang Produktif, Mandiri, Religius, Sejahtera dan Pemerintahan Yang Melayani		
MISI 1	: Mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif dan Menciptakan Peluang Usaha melalui Keunggulan Pariwisata dan Produk Lokal		
TUJUAN PEMBANGUNAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
			3 Meningkatkan sistem distribusi perdagangan
		Peningkatan kemitraan dan bisnis bagi pelaku usaha baru dengan sumber pendanaan dalam permodalan	1 Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan manajemen pengelolaan koperasi dan UMKM serta kerjasama dengan lembaga keuangan lainnya 2 Meningkatkan pengembangan industri berbasis kluster 3 Meningkatkan kerjasama perdagangan antar daerah
2 Meningkatkan ketahanan pangan	1 Terjaganya ketersediaan pangan	Peningkatan kualitas Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Pengelola Pertanian	1 Meningkatkan sumber daya petani 2 Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian 3 Memperkokoh kelembagaan kelompok tani 4 Mewujudkan intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi pertanian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil

6.2. MISI 2 : MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DAN DAYA SAING DAERAH.

Kemampuan daerah untuk berdaya saing tinggi adalah kunci bagi tercapainya kemajuan dan kemakmuran daerah. Daya saing yang tinggi, akan menjadikan Kota Sawahlunto siap menghadapi tantangan-tantangan globalisasi dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Dalam mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah, Kota Sawahlunto diarahkan dengan memperkuat perekonomian berbasis keunggulan masing-masing kawasan menuju keunggulan kompetitif serta mengedepankan pembangunan SDM yang produktivitas dan berkualitas.

Disamping itu, Pemerintah Kota Sawahlunto dalam mengoptimalkan pembangunan infrastruktur tetap mengacu pada prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, kualitas dan kuantitas lingkungan hidup yang bersih, serta menyenangkan akan dapat diwujudkan melalui pencegahan, pencemaran air, polusi udara, penataan pembangunan yang merata sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Tujuan dari misi 2 ini adalah :

1. Meningkatkan produktivitas dan kesempatan kerja bagi tenaga kerja dan calon tenaga kerja;
2. Menyediakan infratsruktur Kota yang berkualitas,;
3. Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup perkotaan yang baik;

Sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi ini adalah :

1. Meningkatnya kesempatan kerja;
2. Meningkatnya kualitas infrastruktur;
3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup; dan
4. Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan terhadap bencana.

6.2.1. STRATEGI UNTUK MISI 2

Untuk mencapai sasaran yang hendak diwujudkan pada misi 2 diperlukan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan keterampilan, kompetensi dan SDM tenaga kerja, fresh graduate dan pengangguran sesuai potensinya;
2. Peningkatan kualitas dan pemeliharaan infrastruktur kota;
3. Pemanfaatan kawasan yang berwawasan lingkungan dan penegakkan aturan hukum lingkungan;
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanganan dan pengelolaan limbah;
5. Peningkatan sinergitas dan peran masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana

6.2.2. ARAH KEBIJAKAN UNTUK MISI 2

Arah kebijakan untuk melaksanakan strategi tersebut adalah:

1. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan, kompetensi dan keahlian pengangguran;
2. Meningkatkan program kerjasama dengan lembaga dan instansi swasta lainnya dalam penyerapan tenaga kerja;
3. Mengupayakan penciptaan jiwa enterprenuer bagi masyarakat;
4. Membangun jaringan infrastuktur secara terintegrasi satu sama lain;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan;
6. Meningkatkan system jaringan drainase;
7. Meningkatkan pelayanan infrastuktur transportasi dan pembangunan jalan ke pusat pertumbuhan Pariwisata;
8. Meningkatkan kerjasama pembangunan sarana dan prasarana di daerah kawasan perbatasan kota;
9. Menyediakan alat berat dan alat labor;
10. Meningkatkan kualitas bangunan pemerintah;
11. Meningkatkan jaringan irigasi;
12. Meningkatkan cakupan pelayanan air bersih dari aspek kualitas, kuantitas dan kontinuitas;
13. Mempercepat pertumbuhan pembangunan perumahan, perkantoran, perdagangan dan kawasan industri sesuai dengan rencana tata ruang;
14. Mengelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan;
15. Meningkatkan pengelolaan SDA dan Lingkungan yang berbasis manfaat untuk kepentingan daerah dan masyarakat;
16. Melakukan pengawasan di bidang lingkungan hidup;
17. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan;
18. Memelihara dan meningkatkan ruang terbuka hijau serta taman-taman kota;
19. Meningkatkan kualitas dan pemanfaatan ruang disesuaikan dengan potensi dan karakteristik wilayahnya;
20. Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian ruang secara terpadu dan konsisten;
21. Menumbuhkan kesadaran masyarakat, pengendalian dan pengawasan serta penegakkan hukum terhadap pengelolaan sampah;
22. Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;

23. Meningkatkan penanganan lahan kritis di beberapa wilayah yang mengalami kondisi rawan bencana secara terencana, sinergi dan berkesinambungan antar pemangku kepentingan dan lintas sektor;
24. Mengelola sumber daya alam dan lingkungan yang serasi, seimbang menuju pembangunan berkelanjutan dan mitigasi bencana;
25. Meningkatkan bangunan turap/tahud/bronjong pada daerah rawan longsor dan bencana;
26. Meningkatkan pelaksanaan mitigasi bencana;
27. Meningkatkan sosialisasi kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
28. Membentuk Tim Mitigasi Bencana tingkat masyarakat desa/kelurahan yang mempunyai potensi bencana tinggi;

**Tabel 6.2 Strategi dan Arah Kebijakan
Kota Sawahlunto Pada Misi 2**

VISI		: Terwujudnya Masyarakat Kota Sawahlunto yang Produktif, Mandiri, Religius, Sejahtera dan Pemerintahan Yang Melayani			
MISI 2		: Mewujudkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah			
TUJUAN		SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
1		2	3	4	
1	Meningkatkan Produktivitas dan Kesempatan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Calon Tenaga Kerja	1 Meningkatkan kesempatan kerja	Peningkatan keterampilan, kompetensi dan SDM tenaga kerja, fresh graduated dan pengangguran sesuai potensinya	1	Meningkatkan dan Mengembangkan Kemampuan, Kompetensi dan Keahlian Pengangguran
				2.	Meningkatkan Program Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Swasta Lainnya dalam Penyerapan Tenaga Kerja
				3.	Mengupayakan Penciptaan Jiwa Entrepreneur bagi Masyarakat
2	Menyediakan Infrastruktur Kota yang Berkualitas	1 Meningkatkan kualitas infrastruktur	Peningkatan Kualitas dan Pemeliharaan Infrastruktur Kota	1.	Membangun Jaringan Infrastruktur secara Terintegrasi Satu Sama Lain
				2.	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Jalan dan Jembatan
				3.	Meningkatkan Sistem Jaringan Drainase
				4.	Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Transportasi dan Pembangunan Jalan ke Pusat Pertumbuhan Pariwisata
				5.	Meningkatkan kerjasama pembangunan sarana dan prasarana di daerah kawasan perbatasan kota
				6.	Menyediakan alat berat dan alat berat
				7.	Meningkatkan kualitas bangunan pemerintah
				8.	Meningkatkan jaringan irigasi

VISI	: Terwujudnya Masyarakat Kota Sawahlunto yang Produktif, Mandiri, Religius, Sejahtera dan Pemerintahan Yang Melayani				
MISI 2	: Mewujudkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah				
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
1	2	3	4		
			9. Meningkatkan cakupan pelayanan air bersih dari aspek kualitas, kuantitas dan kontinuitas		
			10. Mmpercepat pertumbuhan pembangunan perumahan, perkantoran, prdagangan dan kawasan industri sesuai rencana tata ruang		
3	Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perkotaan yang Baik	1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	<p>Pemanfaatan Kawasan yang Berwawasan Lingkungan dan Pengakkan Aturan Hukum Lingkungan</p> <p>Optimalisasi Partisipasi Masyarakat dalam Penanganan dan Pengelolaan Limbah</p>	<p>1. Mengelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan</p> <p>2. Meningkatkan Pengelolaan SDA dan Lingkungan yang Berbasis Manfaat untuk Kepentingan Daerah dan Masyarakat</p> <p>3. Melakukan pengawasan di bidang lingkungan hidup</p> <p>4. Mengendalikan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dengan Menerapkan Teknologi Ramah Lingkungan</p> <p>5. Memelihara dan Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau serta Taman-Taman Kota</p> <p>6. Meningkatkan Kualitas dan Pemanfaatan Ruang Disesuaikan dengan Potensi dan Karakteristik Wilayahnya</p> <p>7. Meningkatkan Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang secara Terpadu dan Konsisten</p>
		2	Meningkatnya kesiapsiagaan dan Penanganan terhadap Bencana	<p>Peningkatan sinergitas dan peran masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana</p> <p>1. Menumbuhkan kesadaran masyarakat, pengendalian dan pengawasan serta pengakkan hukum terhadap pengelolaan sampah</p> <p>1. Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana</p> <p>2. Meningkatnya penanganan lahan kritis di beberapa wilayah yang mengalami kondisi rawan bencana secara terencana, sinergi dan berkesinambungan antar</p>	

VISI	: Terwujudnya Masyarakat Kota Sawahlunto yang Produktif, Mandiri, Religius, Sejahtera dan Pemerintahan Yang Melayani			
MISI 2	: Mewujudkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3	4	
			pemangku kepentingan dan lintas sector	
			3. Mengelola Sumber Daya Alam dan lingkungan yang serasi, seimbang menuju pembangunan berkelanjutan dan mitigasi bencana	
			4. Meningkatkan bangunan turap/talud/bronjong pada daerah rawan longsor dan becaua	
			5. Meningkatkan pelaksanaan mitigasi bencana	
			6. Meningkatkan sosialisasi kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana	
			7. Membentuk Tim Mitigasi Bencana tingkat masyarakat desa/keurahan yang mempunyai potensi bencana tinggi	

6.3. MISI 3 : MEMUPUK KEHIDUPAN SOSIAL YANG AGAMIS DAN BERAKHLAK MULIA SERTA MENGOPTIMALKAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN BERKARAKTER.

Tujuan yang hendak dicapai dalam misi 3 ini adalah a). Untuk membentuk akhlak dan kepribadian generasi muda sesuai syariat dan ajaran agama, b) Untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis dan agamais ditengah masyarakat dan c) Untuk meningkatkan kualitas dan Pelayanan Pendidikan serta mengoptimalkan pendidikan berkarakter.

Sasaran yang hendak dicapai adalah a).Meningkatnya pengamalan ajaran agama pada generasi muda, b).Meningkatnya kehidupan harmonis intern dan antar umat beragama dan c).Meningkatnya kualitas pendidikan.

6.3.1. STRATEGI UNTUK MISI 3

Untuk mencapai sasaran yang dinyatakan pada Misi 3, ditempuh strategi :

1. Peningkatan nilai agama da adat pada masyarakat;
2. Peningkatan toleransi antar umat beragama;
3. Peningkatan kompetensi dan profesionaitas pendidik dan tenaga kependidikan;
4. Terintegrasi ilmu nilai-nilai keagamaan dan akhlak mulia dalam setiap mata pelajaran;
5. Pemerataan akses dan pelayanan pendidikan.

6.3.2. Arah Kebijakan untuk Misi 3

Sedangkan arah kebijakan untuk melaksanakan strategi tersebut adalah:

1. Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan ketaqwaan kepada Tuhan YME;
2. Melestarikan nilai adat dan Budaya setiap suku sebagai ragam nilai budaya daerah;
3. Meningkatkan toleransi antar umat beragama dalam beribadah;
4. Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
5. Meningkatkan kualitas pada setiap jenjang pendidikan;
6. Meningkatkan harkat, martabat dan insan berkarakter, berilmu pengetahuan dan menguasai sains, teknologi, seni dan budaya;
7. Mewujudkan pelaksanaan pendidikan Wajib Belajar 12 tahun yang berkualitas;
8. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dengan penyediaan sarana pendukung pembelajaran yang memadai;
9. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan terjangkau untuk semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan;
10. Membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin;
11. Menyediakan pendidikan inklusi untuk anak berkebutuhan khusus;
12. Memfasilitasi pengembangan perguruan tinggi.
13. Menjadikan masyarakat sebagai mitra dalam peningkatan minat baca.

Tabel 6.3 Strategi dan Arah Kebijakan Kota Sawahlunto pada Misi 3

VISI	: Terwujudnya Masyarakat Kota Sawahlunto yang Produktif, Mandiri, Religius, Sejahtera dan Pemerintahan Yang Melayani			
MISI 3	: Mumpuk Kehidupan Sosial yang Agamis dan Berakhlak Mulia serta Mengoptimalkan Pelaksanaan Pendidikan Berkarakter			
TUJUAN PEMBANGUNAN		SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1		2	3	4
1	Membentuk akhlak dan kepribadian generasi muda sesuai syariat dan ajaran agama	1 Meningkatkan pengamalan ajaran agama pada generasi muda	Peningkatan nilai agama dan adat pada masyarakat	1 Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan ketaqwaan kepada Tuhan YME 2 Melestarikan nilai adat dan budaya setiap ragam nilai budaya daerah
2	Mewujudkan kehidupan yang harmonis dan agamis ditengah masyarakat	1 Meningkatkan kehidupan harmonis intern dan antar umat beragama	Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama	1 Meningkatkan toleransi antar umat beragama dalam beribadah
3	Meningkatkan kualitas dan Pelayanan Pendidikan serta mengoptimalkan pendidikan karakter	1 Meningkatkan kualitas pendidikan	Peningkatan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan Terintegrasi ilmu nilai-nilai keagamaan dan akhlak mulia dalam setiap mata pelajaran	1 Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 2 Meningkatkan kualitas pada setiap jenjang pendidikan 3 Meningkatkan harkat, martabat dan insan berkarakter, berilmu pengetahuan dan menguasai sains, teknologi, seni dan budaya

VISI	: Terwujudnya Masyarakat Kota Sawahlunto yang Produktif, Mandiri, Religius, Sejahtera dan Pemerintahan Yang Melayani		
MISI 3	: Memupuk Kehidupan Sosial yang Agamais dan Berakhlak Mulia serta Mengoptimalkan Pelaksanaan Pendidikan Berkarakter		
TUJUAN PEMBANGUNAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBLIJAKAN
		Pemerataan akses dan pelayanan pendidikan	1 Mewujudkan pelaksanaan Wajar 12 Tahun yang berkualitas 2 Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dengan penyediaan sarana pendukung pembelajaran yang memadai 3 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan terjangkau untuk semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan 4 Membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin 5 Menyediakan pendidikan inklusi untuk anak berkebutuhan khusus 6 Memfasilitasi pengembangan perguruan tinggi 7. Menjadikan masyarakat sebagian mitra dalam peningkatan minat baca

6.4. MISI 4 : MENUMBUHKAN MASYARAKAT YANG BERINTELEKTUALITAS, SEHAT DAN SEJAHTERA YANG MENGUASAI BERBAGAI ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, SENI DAN BUDAYA.

Tujuan yang hendak dicapai dalam misi 4 ini adalah a). Menumbuhkan jiwa dan sikap intelektualitas pada masyarakat, b).Mewujudkan perlindungan, keadilan dan kepastian hukum terhadap masyarakat, c).Mengembangkan penggunaan teknologi dalam kehidupan masyarakat dan tata pemerintahan, d). Meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat, e).Meningkatnya kesejahteraan hidup masyarakat dan f).Mengoptimalkan peran pemuda, perempuan dan masyarakat dalam pembangunan.

Sasaran yang hendak dicapai adalah:

1. Terwujudnya kedewasaan berpolitik di tengah masyarakat;
2. Menurunnya tindak kekerasan di masyarakat;
3. Terwujudnya Kota Sawahlunto menjadi Smart City;
4. Tersedianya pelayanan kesehatan dan sosial yang berkualitas;
5. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
6. Menurunnya tingkat kemiskinan;
7. Meningkatnya peran pemuda dan masyarakat dalam pembangunan;
8. Terwujudnya pengarusutamaan gender (PUG dan pengarusutamaan hak anak (PUHA)
9. Terciptanya budaya berolahraga di tengah masyarakat.

6.4.1. Strategi Untuk Misi 4

Strategi yang ditempuh untuk mencapai Misi 4 adalah a). Sosialisasi dan Pembinaan kepada masyarakat tentang wawasan kebangsaan dan demokrasi; b). Penyelesaian kasus secara preventif, represif dan persuasif; c). Peningkatan teknologi informasi dan komunikasi; d). Penyediaan Sarana dan Prasarana kesehatan yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat; e). Peningkatan kualitas SDM bidang kesehatan dan sosial; f). Peningkatan pengelolaan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial; g). Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan sosial; h). Peningkatan Pelayanan KB; i). Peningkatan efektivitas Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Sawahlunto; j). Peningkatan kualitas SDM dan kapasitas lembaga/kelompok masyarakat serta penyetaraan gender; k). Peningkatan budaya berolahraga dan l). Peningkatan kualitas organisasi kepemudaan.

6.4.2. Arah Kebijakan untuk Misi 4

Dalam mengimplementasikan strategi yang telah disebutkan diatas, diperlukan arah kebijakan yang bermuara kepada program dan kegiatan yang tepat untuk dilaksanakan oleh lembaga yang menjalankan urusan tersebut. Arah kebijakan untuk melaksanakan strategi pada Misi 4 adalah :

1. Pencerdasan kehidupan berpolitik bagi masyarakat;
2. Membangun Sistem Politik yang demokratis dengan memberi peran kepada semua parpol secara kualitatif dan proporsional;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pemilu;
4. Memantapkan pelaksanaan kerjasama dengan aparat keamanan lain dalam upaya penciptaan situasi kamtibmas yang lebih baik dan kondusif;
5. Meningkatkan fasilitas pengawasan pembuatan maksiat;
6. Mewujudkan penguatan Kelembagaan Linmas yang Lebih Profesional terutama dalam pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas;
7. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak, kesetaraan gender, penurunan tingkat kekerasan dalam keluarga;
8. Mensosialisasikan aturan hukum mengenai KDRT dan perlindungan anak;
9. Meningkatkan sarana prasarana teknologi informasi komunikasi setiap wilayah;
10. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan;
11. Menyediakan fasilitas pembiayaan, obat dan perbekalan kesehatan;
12. Meningkatkan pembinaan Sumber Daya Manusia di bidang kesehatan;
13. Meningkatkan akses masyarakat kota terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas;
14. Meningkatkan Cakupan Jaminan Kesehatan;
15. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan manajemen kesehatan;
16. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam peningkatan derajat kesehatan;
17. Mengoptimalkan sosialisasi penggunaan KB terhadap Wanita Usia Subur (WUS) dan Pasangan Usia Subur (PUS);
18. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam mensukseskan program KB;
19. Meningkatkan pemberdayaan dan SDM penduduk miskin serta meningkatkan kompetensi tenaga kerja yang menganggur;
20. Menggunakan satu data tunggal kemiskinan Kota Sawahlunto;
21. Mengoptimalkan pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan (PPK) dalam proses perencanaan;
22. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan;
23. Menumbuhkan rasa kesetiakawanan sosial, gotong royong dan kepedulian dalam kehidupan bermasyarakat;

24. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan serta kesetaraan gender dalam pembangunan;
25. Penguatan kelembagaan dan dukungan program dan kegiatan perempuan;
26. Mendukung pemantapan program KONI serta kelompok olahraga desa dan kelurahan;
27. Meningkatkan organisasi kepemudaan dengan dukungan program dan kegiatan kepemudaan;
28. Meningkatkan organisasi kepemudaan dengan dukungan program dan kegiatan kepemudaan.

Tabel 6.4 Strategi dan Arah Kebijakan Kota Sawahlunto pada Misi 4

VISI		Terwujudnya Masyarakat Kota Sawahlunto yang Produktif, Mandiri, Religius, Sejahtera dan Pemerintahan Yang Melayani		
MISI 4		Menumbuhkan Masyarakat yang berintelektualitas, sehat dan sejahtera yang menguasai berbagai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya		
TUJUAN PEMBANGUNAN		SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1		2	3	4
1	Menumbuhkan jiwa dan sikap intelektualitas pada masyarakat	1. Terwujudnya kedewasaan berpolitik di tangan masyarakat	Sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat tentang wawasan kebangsaan dan demokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencerdasan kehidupan berpolitik bagi masyarakat 2. Membangun system politik yang dekomratris dengan memberi peran kepada semua parpol secara kualitatif dan proporsional 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pemilu 4. Memantapkan pelaksanaan kerjasama dengan aparat keamanan lain dalam upaya penciptaan situasi kamtibmas yang lebih baik dan kondusif 5. Meningkatkan fasilitas pengawasan perbuatan maksiat 6. Mewujudkan penguatan kelembagaan Linmas yang lebih professional terutama dalam pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas
2	Mewujudkan perlindungan, keadilan dan kepastian hukum terhadap masyarakat	1. Menurunnya tindak kekerasan di masyarakat	Penyelesaian kasus secara preventif, represif dan persuasive	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak, kesetaraan gender, penurunan tingkat kekerasan dalam keluarga 2. Mensosialisasikan aturan hukum mengenai KDRT dan perlindungan anak
3	Mengembangkan penggunaan teknologi dalam kehidupan masyarakat dan tata pemerintahan	1. Terwujudnya Kota Sawahlunto menjadi Smart City	Peningkatan teknologi informasi dan komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi setiap wilayah

VISI		Terwujudnya Masyarakat Kota Sawahlunto yang Produktif, Mandiri, Religius, Sejahtera dan Pemerintahan Yang Melayani			
MISI 4		Menumbuhkan Masyarakat yang berintelektualitas, sehat dan sejahtera yang menguasai berbagai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya			
TUJUAN PEMBANGUNAN		SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
1		2	3	4	
4	Meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan social masyarakat	1. Tersedianya pelayanan kesehatan dan sosial yang berkualitas	Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat	1. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan	2. Menyediakan fasilitas pembiayaan, obat dan perbekalan kesehatan
			Peningkatan kualitas SDM bidang kesehatan dan sosial	1. Meningkatkan pembinaan Sumber Daya Manusia di bidang	
			Peningkatan pengelolaan pelayanan kesehatan dan sosial	1. Meningkatkan akses masyarakat kota terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas	2. Meningkatkan cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan melalui penyelenggaraan asuransi kesehatan untuk masyarakat
				2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan manajemen kesehatan
5	Meningkatnya kesejahteraan hidup masyarakat	1. Menurunnya tingkat kemiskinan	Peningkatan koordinasi dalam penanggulangan kemiskinan Kota Sawahlunto	1. Meningkatkan pemberdayaan dan SDM penduduk miskin serta meningkatkan kompetensi tenaga kerja yang menganggur	2. Menggunakan satu data tunggal kemiskinan Kota Sawahlunto
			Peningkatan Pelayanan KB	1. Mengoptimalkan sosialisasi penggunaan KB terhadap Wanita Usia Subur (WUS) dan Pasangan Usia Subur (PUS)	3. Mengoptimalkan Pengarusutamaan Penanggulangan Kemiskinan (PPK) dalam proses pembangunan
6	Mengoptimalkan peran pemuda, perempuan dan masyarakat dalam pembangunan	1. Meningkatnya peran pemuda dan masyarakat dalam pembangunan	Peningkatan kualitas SDM dan kapasitas lembaga/keompok masyarakat serta penyeteraan gender	1. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan	

VISI	Terwujudnya Masyarakat Kota Sawahlunto yang Produktif, Mandiri, Religius, Sejahtera dan Pemerintahan Yang Melayani		
MISI 4	Menumbuhkan Masyarakat yang berintelektualitas, sehat dan sejahtera yang menguasai berbagai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya		
TUJUAN PEMBANGUNAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
	2.		2. Menumbuhkan rasa kesetiakawanan social, gotong royong dan kepedulian dalam kehidupan bermasyarakat
	2.		1. Meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesetaraan gender dalam pembangunan
	2.		2. Penguatan kelembagaan dan dukungan program dan kegiatan perempuan
	3.	Meningkatkan budaya berolahraga	1. Mendukung pemantapan program KONI serta kelompok olahraga desa dan kelurahan
			2. Meningkatkan organisasi kepemudaan dengan dukungan program dan kegiatan kepemudaan
		Peningkatan kualitas organisasi kepemudaan	1. Meningkatkan organisasi kepemudaan dengan dukungan program dan kegiatan kepemudaan

6.5. MISI 5 : MENCIPTAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG BAIK, BERSIH, MELAYANI, KREATIF, INOVATIF DAN EFISIEN.

Tujuan yang hendak dicapai dalam misi 5 ini adalah a).Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efisien, b).Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan c). Mewujudkan Pelayanan Publik yang prima kepada masyarakat. Sasaran yang dicapai adalah a).Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dan akuntabilitas kinerja, b).Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan (BUMD), c). Terpuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di tiap OPD dan d).Terwujudnya pengelolaan arsip dan perpustakaan daerah yang berkualitas dan e).Terwujudnya administrasi kependudukan yang baik.

6.5.1. STRATEGI UNTUK MISI 5

Strategi yang ditempuh untuk mencapai Misi 5 adalah a).Pemantapan system birokrasi yang berkeadilan, dan membuka peran serta masyarakat dalam merumuskan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan serta pemanfaatan teknologi informasi, b).Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah, c).Perluasan potensi dan memaksimalkan penerimaan pajak dan distribusi daerah, d).Pemantapan pengelolaan kearsipan pemerintah daerah, e).Peningkatan pencapaian SPM dan SOP beserta pelaporannya dan f).Optimalisasi SIAK online.

6.5.2. ARAH KEBIJAKAN UNTUK MISI 5

Dalam mengimplementasikan strategi yang telah disebutkan di atas sebagai berikut:

1. Memantapkan system birokrasi yang berkeadilan dan membuka peran serta masyarakat dalam merumuskan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan;
2. Menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan melayani;
3. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan;
4. Meningkatkan SDM bagi aparatur pemerintah daerah;
5. Meningkatkan kualitas sistem informasi pemerintah yang tepat waktu, akurat dan mudah diakses;
6. Meningkatkan pengelolaan, pengendalian dan pembinaan keuangan daerah;
7. Memperluas basis data objek pajak dan retribusi daerah;
8. Meningkatkan sistem pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
9. Mendorong terbentuknya tenaga fungsional kearsipan;
10. Menguatkan Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) dan kualitas pengelolaan kearsipan;
11. Mendorong pencapaian SPM dan pembinaan penyusunan SOP serta pengawasannya;
12. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan sampai tingkat pemerintah terdepan;
13. Menyempurnakan data administrasi kependudukan;

Tabel 6.5 Strategi dan Arah Kebijakan Kota Sawahlunto pada Misi 5

VISI	: Terwujudnya Masyarakat Kota Sawahlunto yang Produktif, Mandiri, Religius, Sejahtera dan Pemerintahan Yang Melayani		
MISI 5	: Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, bersih, melayani, kreatif, inovatif dan efisien		
TUJUAN PEMBANGUNAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efisien	1 Meningkatnya kualitas perencanaan dan akuntabilitas kinerja	Pemantapan system birokrasi yang berkeadilan, dan membuka peran serta masyarakat dalam merumuskan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan	1 Memantapkan sistem birokrasi yang berkeadilan dan membuka peran serta masyarakat dalam merumuskan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan 2 Menciptakan Tata Kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan melayani 3 Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan 4 Meningkatkan SDM bagi aparatur pemerintah daerah 5 Meningkatkan kualitas sistem informasi pemerintah daerah yang tepat waktu, akurat dan mudah diakses

VISI	: Terwujudnya Masyarakat Kota Sawahlunto yang Produktif, Mandiri, Religius, Sejahtera dan Pemerintahan Yang Melayani		
MISI 5	: Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, bersih, melayani, kreatif, inovatif dan efisien		
TUJUAN PEMBANGUNAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
		Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah	1 Meningkatkan pengelolaan, pengendalian dan pembinaan keuangan daerah
	2 Meningkatkan pendapatan asli daerah dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang ipisahkan (BUMD)	Perluasan potensi dan memaksimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah	1 Memperluas basis dan memaksimalkan penerimaan pajak dan distribusi daerah 2 Meningkatkan sistem pengelolaan pajak dan retribusi daerah
2 Mewujudkan Pelayanan Publik yang prima kepada masyarakat	1 Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di tiap OPD	Peningkatan pencapaian SPM dan SOP beserta pelaporannya	1 Mendorong pencapaian SPM dan pembinaan penyusunan SOP serta pengawasannya
	2 Terwujudnya pengelolaan arsip dan perpustakaan daerah yang berkualitas	Pemantapan pengelolaan kearsipan pemerintah daerah melalui peningkatan kualitas SDM dan sarana	1 Mendorong terbentuknya tenaga fungsional 2 Menguatkan Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) dan kualitas pengelolaan kearsipan
	3 Terwujudnya tertib administrasi kependudukan	Optimalisasi SIAK Online	1 Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan sampai tingkat pemerintah dasar 2 Menyempurnakan data administrasi kependudukan

6.6. MISI 6 : MENGOPTIMALKAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN POTENSI DAERAH.

Tujuan yang hendak dicapai dalam misi 6 ini adalah Untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah melalui pengelolaan yang berwawasan lingkungan. Sasaran yang dicapai Berkembangnya kepariwisataan di Kota Sawahlunto,

6.6.1. STRATEGI UNTUK MISI 6

Strategi yang ditempuh untuk mencapai Misi 6 adalah a). Peningkatan pengelolaan potensi wisata dan b).Peningkatan kelestarian kesenian dan kebudayaan daerah.

6.6.2. ARAH KEBIJAKAN UNTUK MISI 6

Dalam mengimplementasikan strategi yang telah disebutkan diatas, diperlukan arah kebijakan yang bermuara kepada program dan kegiatan yang tepat untuk dilaksanakan oleh lembaga yang menjalankan urusan tersebut. Arah kebijakan untuk melaksanakan strategi pada Misi 6 adalah :

1. Meningkatkan sarana prasarana dan promosi wisata;
2. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam industri wisata;

3. Melakukan pembinaan nilai-nilai seni dan budaya daerah;
4. Memperkuat komitmen daerah menjadi kota pusaka dan warisan dunia.

**Tabel 6.6 Strategi dan Arah Kebijakan
Kota Sawahlunto pada Misi 6**

VISI	: Terwujudnya Masyarakat Kota Sawahlunto yang Produktif, Mandiri, Religius, Sejahtera dan Pemerintahan Yang Melayani		
MISI 6	: Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Daerah		
TUJUAN PEMBANGUNAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
1	1	Peningkatan pengelolaan potensi wisata	1 Meningkatkan sarana dan prasarana dan promosi wisata
Untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah melalui pengelolaan yang berwawasan lingkungan	Berkembangnya kepariwisataan di Kota Sawahlunto	Peningkatan kelestarian kesenian dan kebudayaan daerah	2 Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam industri wisata
			1 Melakukan pembinaan nilai-nilai seni budaya daerah
			2 Memperkuat komitmen daerah menjadi kota pusaka dan warisan dunia

6.7. MISI 7 : MEMPERLUAS JARINGAN SOCIAL, EKONOMI SECARA NASIONAL DAN INTERNASIONAL.

Sebagai bagian terintegrasi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia Kota Sawahlunto akan menjadi bagian yang berperan dalam pembangunan jaringan social dan ekonomi. Perwujudan ekonomi masyarakat yang tangguh, produktif dan berdaya saing merupakan unsur paling penting untuk mendorong kemajuan ekonomi dan kemakmuran masyarakat serta menjawab Pasar ASEAN (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan keadaan perekonomian yang membuka pasar

Tujuan yang hendak dicapai dalam misi 7 ini adalah Untuk Meningkatkan Kerjasama, Promosi dan Aksesibilitas Daerah dalam Rangka Pengembangan Ekonomi dan Sosial. Sasaran yang dicapai adalah a).Terwujudnya kerjasama pembangunan ekonomi dan peningkatan penyertaan modal dan b).Meningkatnya aksesibilitas dalam daerah dan dengan daerah tetangga.

6.7.1. STRATEGI UNTUK MISI 7

Strategi yang ditempuh untuk mencapai Misi 7 adalah a).Meningkatkan kerjasama antar daerah dan investor serta mengoptimalkan BUMD yang berdaya saing dan b).Peningkatan pengaturan dan pengendalian Jalur alternatif Baru ke dalam kota Sawahlunto dari daerah tetangga.

6.7.2. ARAH KEBIJAKAN UNTUK MISI 7

Dalam mengimplementasikan strategi yang telah disebutkan diatas, diperlukan arah kebijakan yang bermuara kepada program dan kegiatan yang tepat untuk dilaksanakan oleh lembaga yang menjalankan urusan tersebut. Arah kebijakan untuk melaksanakan strategi pada Misi 7 adalah :

1. Meningkatkan promosi sektor-sektor potensial daerah;
2. Meningkatkan iklim berinvestasi yang kondusif bagi investor;
3. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan perusahaan daerah, BUMD dan Lembaga Keuangan;
4. Meningkatkan manajemen transportasi perkotaan sehingga transportasi dapat terintegrasi antara pariwisata dan umum;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan fasilitas perhubungan;
6. Mendorong terwujudnya kerjasama pemerintah dan swasta dalam pembangunan infrastruktur.

**Tabel 6.7 Strategi dan Arah Kebijakan
Kota Sawahlunto pada Misi 7**

VISI	: Terwujudnya Masyarakat Kota Sawahlunto yang Produktif, Mandiri, Religius, Sejahtera dan Pemerintahan Yang Melayani		
MISI 7	: Memperluas Jaringan Sosial dan Ekonomi secara Nasional dan Internasional		
TUJUAN PEMBANGUNAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Untuk Meningkatkan Kerjasama, Promosi dan Aksesibilitas Daerah dalam Rangka Pengembangan Ekonomi dan Sosial	1	Meningkatkan kerjasama antar daerah dan investor serta mengoptimalkan BUMD yang berdaya saing	1
			2
			3
	2	Peningkatan pengaturan dan pengendalian jalur alternatif baru ke dalam kota Sawahlunto dari daerah tetangga	1
			2
			3

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

7.1. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH.

Setelah dijabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada Bab V, serta strategi dan arah kebijakan pada Bab VI, pada Bab VII ini diuraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja. Bab ini bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam periode 5 tahun mendatang. Perlu disajikan penjelasan tentang hubungan antara program pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang dipilih. Program – program tersebut merupakan langkah nyata yang akan dilakukan Pemerintah Kota Sawahlunto pada periode 2013-2018.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka dalam implementasinya secara operasional, program-program yang telah dirumuskan harus dijabarkan kedalam urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sekaligus ditentukan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang menjadi penanggung jawab dari setiap program tersebut, sehingga dapat dilihat dengan jelas pembagian tugas SOPD dalam melaksanakan rencana pembangunan yang telah disusun dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota.

Rumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah disusun dengan tujuan untuk menggambarkan keterkaitan bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan atau diperolehnya berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan umum agar dapat merangkai program-program prioritas yang *inherent*. Agar kebijakan umum dapat dijadikan pedoman dalam menentukan program prioritas yang tepat, kebijakan umum dibuat dalam empat perspektif sesuai strateginya, sebagai berikut :

1. Kebijakan pada **perspektif masyarakat/layanan** adalah kebijakan yang dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan.
2. Kebijakan pada **perspektif proses internal** adalah kebijakan bagi operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa publik, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai.
3. Kebijakan pada **perspektif kelembagaan** yaitu kebijakan yang mendorong upaya-upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa investasi pada perbaikan SDM, sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintahan daerah.
4. Kebijakan pada **perspektif keuangan** yaitu kebijakan yang memberi jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah.

Setelah kebijakan umum dibuat, langkah selanjutnya adalah merumuskan program pembangunan daerah. Tahap ini sangat penting dalam perumusan RPJMD karena hasil dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang kongkrit dalam bentuk program prioritas. Urgensi lain adalah juga karena perumusan program pembangunan daerah adalah inti dari perencanaan strategis itu sendiri yang mendefinisikan tujuan strategis dalam 5 (lima) tahun. Program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Program pembangunan daerah dapat berupa pernyataan yang disamakan atau sekurang-kurangnya mengandung program kepala daerah terpilih yang didalamnya berisi program prioritas yang bersifat strategis.

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

PRIORITAS 1: PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERBASIS PADA PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF, MANDIRI DAN DAYA SAING

Prioritas pengembangan Ekonomi Kerakyatan Yang Berbasis Pada Pengembangan Ekonomi Kreatif, Mandiri dan Daya Saing diarahkan pada (a) Pembangunan sector industri kecil dan kerajinan, dengan titik berat pada pengembangan produk unggulan, (b) Pembangunan sector perdagangan dengan meningkatkan peran perdagangan produk-produk local (c) Peningkatan peran wilayah pedesaan sebagai aktor penggerak ekonomi daerah (d) Pembangunan Sektor Pertanian dengan melalui pencapaian keseimbangan antara *on-farm* dan *off-farm*.

PRIORITAS 2: PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SECARA ADIL DAN MERATA

Prioritas Pengembangan Infrastruktur secara adil dan merata diarahkan pada (a) Pembangunan dan perbaikan infrastruktur perhubungan (b) Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Publik (c) Pengembangan energy alternative berbasis pemanfaatan limbah, baik limbah ternak maupun manusia untuk keperluan rakyat miskin (d) Pembangunan Infrastruktur Olahraga, (e) Menyediakan Lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU), (f) Mendukung pembangunan sarana transportasi yang tertuang dalam rencana pengembangan kereta api,

PRIORITAS 3: PENINGKATAN KUALITAS KESALEHAN SOCIAL MELALUI PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN NILAI-NILAI AGAMA, ADAT DAN BUDI PEKERTI

Pembangunan kesalehan social diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama dan adat sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai Kota Sawahlunto yang religious, beradat dan berakhlak. Selama ini telah tumbuh kesadaran yang kuat di kalangan para pemuka agama dan adat di Kota Sawahlunto untuk membangun harmoni social, hubungan internal, antar umat beragama dan antar suku yang aman, damai, dan saling menghargai. Dimensi kerukunan ini sangat penting dalam upaya membangun masyarakat Kota Sawahlunto yang memiliki kesadaran mengenai realitas multikulturalisme dan memahami makna kemajemukan social, sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa dan harmonis. Pembangunan sumber daya manusia dengan pemahaman dan kualitas kesalehan sosial yang semakin meningkat dapat dilakukan dalam beberapa cara dan pendekatan yaitu peningkatan pendidikan kualitas pendidikan agama dan pendidikan adat pada

semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Selain itu melalui peningkatan kualitas penataan dan pengelolaan sarana dan prasarana, serta kepentingan seluruh lapisan umat beragama dengan akses yang sama bagi setiap pemeluk agama. Upaya meningkatkan kualitas dan kapasitas lembaga social keagamaan dan lembaga adat juga harus dilakukan.

PRIORITAS 4: MENJALIN KEHIDUPAN SOCIAL YANG HARMONIS DALAM KOMPOSISI MASYARAKAT YANG HETEROGEN DAN BERBEDA AGAMA

untuk mendorong terwujudnya kehidupan social yang harmonis dalam komposisi masyarakat yang heterogen dan beda agama akan diarahkan programnya pada : (a) Meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam memperoleh hak-hak dasar memeluk agama dan beribadat sesuai dengan kepercayaan masing-masing. (b) Mendorong aktifitas lembaga pendidikan untuk turut serta menumbuhkan rasa kebanggaan dan kebangsaan serta penanaman nilai akhlaq mulia dalam upaya memupuk peserta didik dalam berinteraksi secara positif di lingkungan masyarakat yang beragam.

PRIORITAS 5: PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN UNTUK MEWUJUDKAN PENDIDIKAN YANG BERKARAKTER

Pendidikan tidak hanya sekedar penanaman nilai intelektualitas semata, tetapi juga penanaman nilai karakter. Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata karma, budaya dan adat istiadat. Pendidikan berkarakter dapat dipahami sebagai sifat dasar, kepribadian, perilaku/tingkah laku, dan kebiasaan yang berpola. Pendidikan karakter adalah upaya penyiapan kekayaan batin peserta didik yang berdimensi agama, social, budaya, yang mampu diwujudkan dalam bentuk budi pekerti, baik dalam perbuatan, perkataan, pikiran, sikap, perasaan, maupun kepribadian. Langkah-langkah aplikatif yang dapat dilakukan antara lain : (a) Mendorong kebiasaan dan perilaku yang terpuji sejalan dengan nilai-nilai universal, tradisi budaya, kesepakatan sosial dan religious. (b) Menanamkan jiwa kepemimpinan yang bertanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa. (c) Memupuk kepekaan mental peserta didik terhadap situasi sekitarnya, sehingga tidak terjerumus ke dalam perilaku yang menyimpang, baik secara individu maupun social. (d) Meningkatkan kemampuan untuk menghindari sifat tercela yang dapat merusak diri sendiri, orang lain dan lingkungan. (e) Agar peserta didik memahami dan menghayati nilai-nilai yang relevan bagi pertumbuhan dan penghargaan harkat dan martabat manusia. Strategi yang akan diterapkan dalam pengembangan pendidikan berkarakter yaitu dengan menggunakan strategi terintegrasi dalam mata pelajaran lainnya. Nilai-nilai karakter dapat disampaikan melalui mata pelajaran Agama, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Pendidikan Jasmani dan Olahraga, IPS, Bahasa Indonesia dan Pengembangan Diri

PRIORITAS 6: PENINGKATAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN, SUPREMASI HOKUM DAN HAM

Dalam rangka untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban, maka cara-cara yang dapat ditempuh melalui : (a) Revitalisasi system keamanan berbasis komunitas untuk mewujudkan keamanan lingkungan, termasuk mencegah permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan dan penyebaran narkoba; (b) Meningkatkan kemampuan mencegah, menangkal dan menindak kejahatan,

terutama melalui deteksi dini dengan melibatkan para tokoh masyarakat; (c) Meningkatkan kerja sama dengan institusi penanggung jawab keamanan dalam upaya menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat; (d) Pemberian teladan praktik penegakan hukum non-diskriminatif yang dapat mendorong kepercayaan masyarakat untuk mematuhi hukum, dan membangun *community policing* (pemolisian masyarakat) untuk menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungannya.

PRIORITAS 7: PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PERLUNYA MENJAGA KESEHATAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN

Prioritas Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap perlunya menjaga kesehatan dan peningkatan kualitas layanan kesehatan akan ditempuh dengan cara (a) Memberi bantuan subsidi biaya kesehatan bagi masyarakat terutama untuk keluarga miskin, misalnya dengan pemberian *voucher* untuk berbagai jenis layanan kesehatan yang berlaku sebagai "alat pembayaran" di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang ada, baik rumah sakit umum, puskesmas maupun pos-pos kesehatan. (b) Pengembangan prasarana dan sarana kesehatan pada wilayah-wilayah yang memang belum tersedia atau minim. (c) Melakukan perbaikan-perbaikan kesehatan lingkungan, seperti sanitasi, MCK, perbaikan lingkungan perumahan bagi keluarga miskin, system pembuangan air kotor, dan nutrisi akan dilakukan sejalan dengan kebutuhan. (d) mengutamakan kualitas pelayanan yang ditandai dengan keramahan, kepatutan dan tanpa membedakan layanan status social.

PRIORITAS 8: LANJUTAN SAPU BERSIH KEMISKINAN

Secara spesifik kebijakan penanganan kemiskinan diarahkan pada: (a).Penyempurnaan berbagai kebijakan yang merintang aksesibilitas dan lebih berpihak kepada rakyat miskin serta konsisten dalam pelaksanaannya; (b).Mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha melalui kebijakan yang mampu mengentaskan kemiskinan; (c).Penajaman program pembangunan lintas sector dan lintas pelaku yang diarahkan pada desa-desa dan kantong-kantong komunitas miskin; (d).Peningkatan pemenuhan dan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap ketersediaan pangan yang memadai dan bermutu; (e).Peningkatan aksesibilitas dan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin secara gratis melalui program jaminan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin, dan program-program lain yang berkelanjutan; (f).Peningkatan aksesibilitas dan layanan pendidikan dasar secara gratis dan bermutu; (g).Peningkatan ketersediaan dan akses masyarakat miskin terhadap rumah murah, sanitasi dan lingkungan yang sehat serta kecukupan fasilitas air bersih; (h).Peningkatan akses dan layanan permodalan dan pengembangan usaha bagi masyarakat miskin dengan memberikan skim khusus (bunga rendah) tetapi tetap memperhatikan mekanisme pasar yang ada; (i).Pemeliharaan dan pengembangan kesempatan kerja yang didukung oleh tenaga kerja yang terampil dalam suasana hubungan kerja yang harmonis antar pelaku produksi, adanya perlindungan kesehatan dan keamanan kerja serta peningkatan upah buruh berdasarkan standar kebutuhan hidup minimal; (j).Pengembangan potensi wilayah dan cluster ekonomi pedesaan baik pada sekitar hutan, persawahan, dan pertambakan dengan mengembangkan produk unggulan yang spesifik dan kompetitif; (k).Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar dan sarana ekonomi sesuai dengan karakteristik kebutuhan; (l).Pengintegrasian semua program sektoral yang diikat oleh orientasi utama pengentasan kemiskinan;(m).pengembangan sinergi dengan kalangan LSM dan perguruan tinggi dalam rangka fasilitasi atas pemberdayaan masyarakat miskin dan evaluasi program; (n).Peningkatan keterlibatan masyarakat miskin dalam

pengambilan keputusan pembangunan terutama yang secara langsung menyangkut kepentingan dan eksistensinya melalui forum dialog yang kondusif.

Program yang khusus ditujukan untuk mengatasi masalah kemiskinan diorientasikan pada upaya peningkatan pendapatan dan pengurangan beban masyarakat miskin melalui pendekatan pemberdayaan usaha, pemberdayaan manusia dan pemberdayaan lingkungan. Implementasi pendekatan program disesuaikan dengan potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang dihadapi oleh masyarakat miskin setempat. Sasaran lanjutan program sapu bersih kemiskinan ini adalah (a) Menurunnya presentasi penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan; (b) Terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau; (c) Terpenuhinya pelayanan dan jaminan pelayanan kesehatan keluarga miskin secara gratis dan bermutu; (d) Terpenuhinya pelayanan pendidikan dasar secara gratis, bermutu dan merata; (e) Terpenuhinya kebutuhan perumahan dan sanitasi yang layak dan sehat, serta kebutuhan air bersih bagi masyarakat miskin; (f) Terbukannya kesempatan kerja dan berusaha; (g) Terbukanya akses permodalan dalam menciptakan dan mengembangkan usaha; (h) Terbangunnya pusat pengembangan cluster ekonomi kawasan pedesaan dan pembelajaran masyarakat miskin dalam pengembangan potensi ekonomi pedesaan; (i) Peningkatan kapasitas kelembagaan desa dan kapasitas kelompok masyarakat (pokmas) dalam mengelola usaha baik secara mandiri maupun kolektif; (j) Terbukanya akses masyarakat miskin dalam pemanfaatan SDA dan terjaga kualitas lingkungan hidup; (k) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan; (l) Terjaminnya integrasi program sektoral yang secara tegas berorientasi pada penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

PRIORITAS 9: PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN DAN PERAN PEREMPUAN DI SEMUA BIDANG DAN TERJAMINNYA KESETARAAN GENDER

Untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta kesetaraan gender dilaksanakan melalui : (a) Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan public, (b) Meningkatkan taraf kehidupan, dan layanan kesehatan, serta bidang pembangunan lainnya, untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya kaum perempuan, (c) Penguatan kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di segala bidang, termasuk penyediaan data dan statistic gender, serta peningkatan partisipasi masyarakat.

PRIORITAS 10: PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA DAN PEMBINAAN KEPEMUDAAN

Salah satu faktor yang mempengaruhi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan adalah kesiapan generasi muda untuk menerima tongkat estafet pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pembangunan pendidikan dan kesehatan menjadi factor utama. Namun demikian, selain kedua factor tersebut, factor lain yang juga cukup berpengaruh adalah pembinaan kepemudaan dan keolahragaan. Dalam konteks yang seperti ini, pembinaan olahraga sepak bola di Kota Sawahlunto menjadi prioritas pembinaannya, karena olah raga sepak bola saat ini, kenyataannya sudah menjadi alat marketing komunikasi yang efektif untuk membangun citra Kota Sawahlunto di mata komunitas nasional. Di samping sepak bola, cabang-cabang olah raga yang lain perlu mendapat perhatian serius karena juga memberi kontribusi yang besar kepada dunia olahraga di Sumatera Barat. Untuk mencapai tujuan-tujuan ini maka revitalisasi fungsi Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Sawahlunto menjadi strategis dan harus

dilakukan. Disamping itu, akan dilaksanakan program Kewirausahaan Pemuda melalui Lembaga Kepemudaan (LK), sebagai salah satu solusi mengatasi masalah pengangguran, kemiskinan, dan masalah social lainnya dalam pemberdayaan, pengembangan, dan perlindungan pemuda.

PRIORITAS 11: PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG BAIK, BERSIH DAN MELAYANI.

Prioritas Perbaikan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan melayani. Diarahkan pada (a) Meningkatkan fungsi dan peran kelembagaan daerah serta tata organisasi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan secara mandiri. (b) Mewujudkan kemitraan pembangunan, dengan merajut jalinan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota dalam Provinsi dan dengan Provinsi lainnya; antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat, swasta / pengusaha/pebisnis, dan LSM dalam lingkup wilayah Kota Sawahlunto secara luas dalam upaya menumbuhkan perekonomian, pemerataan kutub-kutub ekonomi wilayah dan pertumbuhan wilayah secara umum. (c) Meningkatkan kemandirian keuangan dan pembiayaan pembangunan daerah khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). (d) Mewujudkan pemerintah yang bersih dan baik, sehingga kepercayaan masyarakat akan semakin meningkat pula. (e) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan, pelayanan kesehatan kepada masyarakat. (f) Mewujudkan stabilitas kehidupan social politik dan social budaya yang dinamis dalam mendorong partisipasi aktif/peran serta masyarakat kedalam kehidupan demokrasi. (g) Merealisasikan fungsi komunikasi yang cepat dan optimal dalam pembangunan sebagai akses responsive terhadap masyarakat melalui penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai. (h) melakukan reformasi birokrasi, memantapkan paradigma aparatur sebagai pelayanan masyarakat bukan dilayani, terutama pada pusat pelayan umum, (i) Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, antara lain pemantapan system informasi keuangan daerah, pengembangan *one stop service*, pengembangan bursa tenaga kerja *on line*, penerapan *mekanisme complain*. (j) Penggunaan *e-government*, *e-Procurement*, *e-devolepment*. (k) Pemberian *Reward dan Punishment* bagi aparatur.

PRIORITAS 12: PENGEMBANGAN SEKTOR KEPARIWISATAAN

Dalam upaya memaksimalkan pengelolaan objek wisata yang telah ada maka Pemerintah Kota Sawahlunto telah mendirikan Perusahaan Daerah yaitu PT. WWS (Wahana Wisata Sawahlunto) yang membanru pemerintah daerah dalam pengelolaan potensi pariwisata Kota Sawahlunto yaitu Waterboowm, Bioskop 4D dan Wisata Kandih. Disamping mengelola dan mengembangkan objek wisata yang sudah ada Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto perlu merencanakan terobosan baru dan inovasi objek wisata yang lebih diminati oleh wisatawan. Dalam upaya menarik minat wisatawan, pengembangan tempat-tempat tujuan wisata akan dilakukan melalui penataan ruang dan penyediaan fasilitas umum yang memadai dengan penekanan pada lingkungan disekitar tempat-tempat tujuan wisata tersebut, sehingga dapat menjadi pusat promosi dan penjualan produk-produk unggulan Kota Sawahlunto.

PRIORITAS 13: PENINGKATAN KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA DALAM MENGELOLA DAN MEMANFAATKAN POTENSI DAERAH

Prioritas Peningkatan kerja sama dengan pihak ketiga dalam mengelola dan memanfaatkan potensi daerah diarahkan pada (a) Melakukan perbaikan-perbaikan

dengan memberikan kemudahan prosedur dan mekanisme perijinan, perpajakan, keamanan, pelayanan birokrasi dan penyediaan infrastruktur yang memungkinkan. (b) Memberikan perlindungan hukum atas usaha yang dilaksanakan oleh investor sehingga mereka dapat menjalankan usaha dengan tenang, aman dan nyaman serta menghindari terjadinya konflik antara pengusaha dan masyarakat sekitar. (c) Menciptakan daya saing masyarakat /investor local agar tidak termarginalkan oleh investor dari luar daerah. (d) Memberikan kemudahan investasi bagi sektor riil dan pertambangan melalui kebijakan usaha dan perbaikan infrastruktur guna mendorong kesinambungan dan keseimbangan pertumbuhan ekonomi antara sector pertanian, agribisnis, wisata dan sector pertambangan. (e) Mendorong Terwujudnya Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dalam pembangunan infrastruktur, (f) Mengarahkan kebijakan investasi pada pengembangan agribisnis dengan prioritas pengembangan sector pertanian dan perikanan. (g) Meningkatkan eksplorasi dan eksploitasi Sumber Daya Mineral dan Sumber Daya Energi dan bahan galian lainnya. (h) Meningkatkan pemantauan/pengendalian pengelolaan lingkungan hidup.

PRIORITAS 14: PERLUASAN JARINGAN SOSIAL, EKONOMI SECARA NASIONAL DAN INTERNASIONAL.

Prioritas Perluasan jaringan social, ekonomi secara nasional dan internasional akan diarahkan pada (a) Mengembangkan kerja sama tripartit (pemerintah daerah, pengusaha dan pkerja) (b) Meningkatkan promosi dan laju investasi dengan mengutamakan keunggulan komparatif dan kompetitif daerah, (c) meningkatkan keaktifan daerah dalam kegiatan regional, nasional dan internasional dan d) meningkatkan produktivitas BUMD dan lembaga keuangan lainnya.

Selanjutnya untuk melihat keterkaitan antara misi dengan prioritas pembangunan, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan dapat di lihat pada Tabel 7.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018.

TABEL 7.1
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBAUNGAN DASAR
KOTA SAWAHUNTO TAHUN 2013-2018

NO.	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	OPD Penanggung Jawab	
	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		AWAL	AKHIR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Misi 1 : Mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif dan Meningkatkan Pemasaran Usaha melalui Kemampuan Personal Industri Rumah Tangga Tujuan : 1. Mengembangkan Perekonomian Masyarakat yang Berbasis Industri Rumah Tangga 2. Meningkatkan Kualitas Pasaran								
	Prioritas 1 : Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis pada Pengembangan Ekonomi Kreatif, Mandiri dan Daya Saing								
1	Berkembangnya kegiatan industri dan ekonomi kreatif	Pengembangan kualitas, kuantitas serta nilai dari dan ekonomi kreatif	1. Mengembangkan kawasan strategis melalui kawasan jasa perdagangan, UKM dan koperasi 2. Meningkatkan keterampilan dan SDM tenaga kerja sektor industri rumah tangga 3. Mengembangkan keahlian lokal untuk pengembangan ekonomi kreatif yang mandiri dan berdaya saing	1. Jumlah sektor industri kreatif dan rumah tangga (jumlah sektor) 2. PDRI Lapangan Usaha Industri Pengolahan Kuda (Rupiah) (IKU) 3. Daya Beli Masyarakat (Rupiah) (DKU)	7	12	1. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM 2. Pengembangan industri kecil dan menengah 3. Pengembangan sektor-sektor industri potensial 4. Pengembangan ekonomi kreatif	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Perindustrian	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
		1. Penyediaan sarana dan prasarana pemasaran hasil industri kreatif 2. Meningkatkan jumlah tenaga profesional baik lokal di kawasan wisata	1. Meningkatkan pengembangan dan prestasi pasar tradisional/kawasan wisata 2. Meningkatkan infrastruktur perdagangan dan fasilitas pendukung jasa lainnya 3. Meningkatkan sistem distribusi perdagangan				1. Peningkatan kualitas kedentungan koperasi 2. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah 3. Pengembangan industri agri	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Perindustrian	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dan Sekolah
2	Terlindung ketersediaan pangan	Pertijauan kualitas Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Penghasil	1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan manajemen pengabdian koperasi dan UKM serta keajaiban erogan keluarga kecamatan lainnya 2. Meningkatkan pengembangan industri berbasis Kluster 3. Meningkatkan kerjasama perdagangan antar daerah	1. Jumlah produksi/padi (ton/ha tkg)	4,98	5,1	1. Peningkatan produksi pertanian/perikanan	Pertanian	Dinas Kewahsan Pangan, Pertanian dan Perikanan

NO.	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN				INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	KONDISI		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	OPD Penanggung Jawab
		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				AWAL	AKHIR			
1											
2		Perikanan	2 Meningkatkan sarana dan prasarana perikanan	4	2 PDRB Lapangan, Kesehatan dan Perikanan (Lula Rupa) (KCU)	224.358.31	367.198.85	2 Pengembangan budaya perikanan	Ketahanan dan Perikanan	10	
			3 Memperkokoh ketahanan kelompok tani		3 Nilai score Total Papan Harapan (Persepsi) (KCU)	84,1	88	3 penguatan dan pengembangan umaman perikanan	Perikanan		
			4 Meningkatkan inovasi, efektivitas dan diversifikasi pertanian untuk meningkatkan kualitas dan manfaat hasil					4 Penguatan keajaiban petani	Perikanan		
								5 Penguatan perikanan perikanan/perikanan lapangan	Perikanan		
								6 Penguatan pemasaran hasil produk perikanan/perikanan	Perikanan		
								7 Penguatan pemasaran hasil produk perikanan	Perikanan		
								8 Penguatan produktivitas perikanan	Perikanan		
								9 Penguatan dan peningkatan perikanan	Perikanan		
								10 Penguatan ketahanan perikanan	Ketahanan Pangan	2 Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Perikanan dan Dinas Perikanan, Perikanan, Perikanan dan Kelautan Hidup	
								11 Rehabilitasi hutan dan lahan perikanan/perikanan	Perikanan	3 Dinas Kelautan Pangan, Perikanan dan Perikanan dan Dinas Perikanan, Perikanan, Perikanan dan Kelautan Hidup	
<p>Misi 2 : Meningkatkan Keamanan dan Daya Saing Daerah</p> <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan Produktivitas dan Kompetensi Kerja bagi Tenaga Kerja dan Calon Tenaga Kerja Menyediakan Infrastruktur Kota yang Berkelas Mengembangkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perikanan yang Baik 											
<p>Prioritas 2 : Pengembangan Infrastruktur secaa Adil dan Keadilan</p>											
3	Meningkatkan kemampuan kerja	Peningkatan kecakapan, kompetensi dan SDM tenaga kerja, fresh graduate dan peningkatan sesuai persyaratan	1 Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan, kompetensi dan keahlian perikanan	1 Pendapatan perkapita Rp. (KCU)	39.30	60.65	1 Peningkatan kemampuan kerja	Tenaga kerja	1	Dinas Keamanan Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
			2 Mengembangkan program kerjasama dengan lembaga dan instansi swasta lainnya dalam penerapan tenaga kerja	2 Tingkat pengangguran (%) (KCU)	6,61	6,88	2 Peningkatan dan pengembangan kemampuan kerja	Tenaga kerja			

Revisi RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018

BAB VII 5

NO.	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEGIATAN		INDIKATOR KEMERJA (OUTPUT)	KONDISI		PROGRAM PEMBANGUNAN DASAR	BIDANG URUSAN	OPD Penanggung Jawab
		STRATEGI	ARAH KEGIATAN		AWAL	AKHIR			
1									
2									
3	Memperbaiki kualitas infrastruktur	1. Meningkatkan kualitas dan pemeliharaan infrastruktur kota	1. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi	1. Persentase infrastruktur perkotaan yang dilindungi (% IKU)	86	90	1. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	2. Persentase jalan dalam kondisi baik (%)	69,52	80	2. Pembangunan jalan dan jembatan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
5		3. Meningkatkan sistem jaringan drainage	3. Meningkatkan sistem jaringan drainage	3. Luas cakupan layanan drainage (m2)	44.909	75.000	3. Pembangunan saluran drainage dan gotong-gotong	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
6		4. Meningkatkan pelayanan infrastruktur transportasi dan pembangunan jalan ke pasar-pertanian	4. Meningkatkan pelayanan infrastruktur transportasi dan pembangunan jalan ke pasar-pertanian	4. Persentase pemukiman untuk pemertintah dalam kondisi baik (%) (KKU)	80	100	4. Pengadaan pernakal dan balok cacing	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
7		5. Meningkatkan keefisienan pembangunan sarana dan prasarana di daerah kawasan perkotaan kota	5. Meningkatkan keefisienan pembangunan sarana dan prasarana di daerah kawasan perkotaan kota	5. Persentase rumah tangga menggunakan air bersih (%)	52,64	89	5. Pembangunan sarana dan prasarana pemertintah sosial	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
8		6. Menyediakan alat berat dan sakti labor	6. Menyediakan alat berat dan sakti labor	6. Pengembangan Kinerja pengkalsan air minum dan air limbah			6. Pengembangan Kinerja pengkalsan air minum dan air limbah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
9		7. Meningkatkan kualitas bangunan pemertintah	7. Meningkatkan kualitas bangunan pemertintah	7. Pengembangan Kinerja pengkalsan air minum dan air limbah			7. Pengembangan Kinerja pengkalsan air minum dan air limbah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
10		8. Meningkatkan jaringan listrik	8. Meningkatkan jaringan listrik	8. Pengembangan dan pengkalsan jaringan listrik, rawa dan jaringan pengkalsan lainnya	1750	1730	8. Pengembangan dan pengkalsan jaringan listrik, rawa dan jaringan pengkalsan lainnya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
11		9. Meningkatkan cakupan pelayanan air bersih di setiap rumah, kantoran dan komunitas	9. Meningkatkan cakupan pelayanan air bersih di setiap rumah, kantoran dan komunitas	9. Pemasangan tangkai pemertintah dengan rencana dan ruang (%)	85	90	9. Pembangunan Sistem Informasi/ Data base urban dan pertanian	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
12		10. Mempercepat pertumbuhan pembangunan pemertintah, pemertintah, pemertintah dan kawasan industri sesuai dengan rencana tata ruang	10. Mempercepat pertumbuhan pembangunan pemertintah, pemertintah, pemertintah dan kawasan industri sesuai dengan rencana tata ruang	10. Pemertintah rumah sipat meliputi kegiatan pemertintah bagian kesana, berda, bersana dan tanah bersana			10. Pemertintah rumah sipat meliputi kegiatan pemertintah bagian kesana, berda, bersana dan tanah bersana	Pemerintahan sipat dan pemertintah	2. Dinas Pemertintah, Kawasan Pemertintah, Pemertintah dan Lingkungan Hidup dan Dinas PU & Penataan Ruang

NO.	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN			INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	KONDISI		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	OPD Penanggung Jawab	
		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN			AWAL	AKHIR				
1											
5	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Pemantapan kawasan yang berbatasan lingkungan dan perogakan aturan hukum lingkungan	1. Krangka Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan 2. Meningkatkan pengelolaan SDA dan lingkungan yang berbasis nilai, untuk kepentingan diri, dan masyarakat 3. Ketahanan peggasaan di bidang lingkungan hidup 4. Mengembangkan perencanaan dan kerjasan lingkungan dengan menerapkan ekologi rumah lingkungan 5. Memberikan dan meningkatkan ruang terbuka hijau serta taman-taman kota 6. Meningkatkan kualitas dan pemantapan ruang di kawasan dengan potensi dan karakteristik wilayahnya	1. Persentase ruang terbuka hijau (%) 2. Jumlah sarana dan prasarana pertanian dan perikanan yang diunggulkan (unit) 3. Jumlah kegiatan usaha yang memiliki kontribusi kegiatan usaha)	12,80	19	17	45	1. Pengembangan dan perbaikan kegiatan rumah yang berorientasi menuju lingkungan 2. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 3. Pengembangan perikanan dan pemantapan lingkungan hidup 4. Pemantapan lingkungan hidup 5. Pemantapan lingkungan hidup	Lingkungan hidup Lingkungan hidup Lingkungan hidup Lingkungan hidup	1. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Perumahan dan lingkungan hidup 4. Kecamatan

Revisi RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018

BAB VII-11

NO.	BARAKAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		INDIKATOR BERKUALITAS (OUTPUT)	KONDISI		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG UTARA	OPD Pemangku Jawab
		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		AWAL	AHIR			
1			7. Meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan ruang secara terpadu dan komprehensif				6. Pengembangan pelaksanaan kegiatan perikanan 7. Program Pemetaan penguasaan dan pemanfaatan tanah 8. Program Penyediaan konflik konflik 9. Perencanaan pengembangan wilayah 10. Pengendalian pemanfaatan ruang 11. Perencanaan tata ruang	9. Pertumbuhan 10. Pertumbuhan 11. Pertumbuhan	2. Dinas Perikanan, Kewasana Perikanan, Perikanan dan Kelautan, Kecamatan dan semua OPD
6	Meningkatkan kesetaraan dan terdapat bencana	1. Peringkasan struktur dan peran masyarakat dalam pengurangan dan pengurangan bencana 2. Meningkatkan peran masyarakat dalam pengurangan dan pengurangan bencana 3. Mengelola Sumber Daya Alam dan lingkungan sosial, serah terima penanaman, berkeadilan dan manfaat bencana 4. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana	1. Meningkatkan kesadaran masyarakat, pengetahuan dan keterampilan serta pengurangan risiko terhadap perubahan iklim 2. Meningkatkan peran masyarakat dalam pengurangan dan pengurangan bencana 3. Mengelola Sumber Daya Alam dan lingkungan sosial, serah terima penanaman, berkeadilan dan manfaat bencana 4. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana	1. Jumlah desa/kecamatan yang memiliki rencana (desa/kec) pengurangan risiko bencana (leluasa) (KLU)	37	47	1. Tanggapan darurat jalan dan perumahan 2. Perencanaan diri dan perencanaan bencana alam 3. Perencanaan dan pengembangan rencana bencana 4. Rehabilitasi dan rekonstruksi bencana	1. Pekerjaan umum dan perumahan ruang 2. Ketertarikan, ketertarikan kemas dan perlindungan masyarakat 3. Ketertarikan, ketertarikan kemas dan perlindungan masyarakat	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Ruang 2. Badan Kepegawaian dan PTD dan Sispol P.P & Tindakan Kebencanaan

Revisi RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018

BAB VII.12

NO.	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KERJA		INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	KONDISI		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	OPD Penanggung Jawab
		STRATEGI	ARAH KERJA		AWAL	AKHIR			
1					5	7			10
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
<p>MKA 3 :</p> <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk Akhlak dan Kepribadian Generasi Muda sesuai Spirit dan Ajaran Agama 2. Menyediakan Keluhan yang Harmonisasi dan Agama di Tengah Masyarakat 3. Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan serta Mengoptimalkan Pelaksanaan Pendidikan Karakter <p>Prioritas 3 :</p> <p>Peningkatan Kualitas Pendidikan melalui Peningkatan Pemahaman dan Penguasaan Nilai-nilai Agama, Adat dan Budi Pekerti</p>									
7	Meningkatnya penguasaan ajaran agama dan adat pada generasi muda	Peningkatan nilai agama dan adat pada masyarakat	1. Meningkatkan penguasaan ajaran agama dan kewawasan kepada Tuhan YME 2. Mendorong nilai adat dan budaya selanjutnya nilai budaya daerah	1. Persentase siswa (anak SD yang bisa baca Al Quran (%) 2. Jumlah kasus kenakalan remaja, amoral dan rasial pada generasi muda berkisar (gn. kasus/IKU)	100	100	1. Perbaikan agama dan adat 2. Pengembangan nilai budaya	Ketidayaan Kebudayaan	1. SETDIKHO 2. Kecamatan
<p>Prioritas 4 :</p> <p>Menghidupkan Kembali Sosial yang Harmonis dalam Komposit Masyarakat yang Heterogen dan Berbeda Agama</p>									
8	Meningkatnya kehidupan harmonis antara umat beragama	Peningkatan toleransi antar umat beragama	1. Meningkatkan toleransi antar umat beragama dalam beribadah	1. Jumlah pemukiman kerukunan saraq kerukunan saraq (IKU)	0	0	1. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kerukunan dan ketertarikan serta perlindungan masyarakat	1. Badan Kelembagaan & PBD dan Seroj Per dan Pemandaan Kebaruan 2. Kecamatan
<p>Prioritas 5 :</p> <p>Peningkatan Kualitas Pendidikan untuk Mewujudkan Pendidikan yang Berkarakter</p>									

NO.	SABARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN			INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	KONDISI		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	MIDANG URUSAN	OPD Pemasang Jamb
		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN			AWAL	AKHIR			
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	
<p>5. Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Masyarakat</p> <p>6. Mengoptimalkan Potensi Pemuda, Perempuan dan Masyarakat dalam Pembangunan</p>										
10	Peranbidaya kedewasaan berpolitik di tingkat masyarakat	Sosialisai pembinaan kewang masyarakat dan organisasi dan demografi	1. Perencanaan kebijakan kepolitik bagi masyarakat	1. Persentase tingkat partisipasi politik (%) (IKU)	75,83	80	1. Pendidikan politik masyarakat	Keteraturan, ketahanan dan perlindungan masyarakat	1. Badan Kelemb & PPD	
11	Mencurunya tindak kekerasan di masyarakat	Perubahan gangguan keamanan, keretakan dan perlindungan masyarakat	1. Menempatkan pelaksanaan kerjasama dengan aparat keamanan lain dalam upaya pencegahan situasi keributuan yang lebih baik dan kondusif	1. Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani secara terpadu (%) (IKU)	100	100	1. Peningkatan pemberantasan perwujud masyarakat (PEKAM)	Keteraturan, ketahanan dan perlindungan masyarakat	4. Satpol PP & Pemadam Kebakaran dan Badan Kelembang & FRD	
12	Terwujudnya Kota Sawahlunto menjadi Smart City	Peningkatan teknologi informasi dan komunikasi	1. Meningkatkan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi setiap wilayah	1. Persentase layanan jangran internet (%) (IKU)	N/A	100	1. Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Komunikasi dan informasi	1. Dinas Pertumbuhan, Sredako dan semua OPD	
			2. Mengembangkan fasilitas pengembangan pelayanan malsial	2. Persentase peningkatan perda (%)	N/A	100	2. Pemeliharaan ketertarikan dan pencegahan tindak kriminal	Keteraturan, ketahanan dan perlindungan masyarakat		
			3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih profesional terutama dalam pencegahan terjadinya gangguan	2. Jumlah desa/kel yang terfasilias internet (des/kel)	N/A	37	3. Kerjasama informasi dan media massa	Komunikasi dan informasi		
				3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang lebih			4. Pengembangan sarana dan prasarana komunikasi informasi dan media massa	Komunikasi dan informasi		

NO.	STRATEGI DAN ARAH KEMAJUAN				INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI		PROGRAM PEMANBUHAN DAERAH	BIDANG URUSAN	OPD Penanggung Jawab
	SABARAN	STRATEGI	ARAH KEMAJUAN			AWAL	AHIR			
1								5	9	10
Prioritas 7 - Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap Pentingnya Menjaga Kesehatan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan										
1,2	Tersebutnya pelayanan kesehatan dan sosial yang berkualitas	Pengediaan sarana dan prasarana kesehatan yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat	1. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan 2. Meningkatkan fasilitas pembiayaan, obat dan pelayanan kesehatan	1. Jumlah sarana pelayanan kesehatan yang terakreditasi (JnH) (IKG) 2. Persesi keputusannya mengenai perubahan pelayanan di rumah sakit dan tingkat dasar (Pus/ Tidalik Pus)	0	6	1. Standarisasi pelayanan kesehatan 2. Pelaksanaan Kegiatan Operasional Rutin Puskesmas 3. Pengadaan, pengembangan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit paru-jiwa/ rumah sakit paru-jiwa/ rumah sakit mata 4. Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit paru-jiwa/ rumah sakit mata 5. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana pemeriksaan, pelayanan perawatan dan farmakovigilans 6. Obat dan pebekahan kesehatan	Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan	1	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan Keluarga, Pendidikan dan RSUD
	Peningkatan kualitas SPM Ditang Kesehatan dan sosial	Meningkatkan pembinaan Sumber Daya Manusia di bidang Kesehatan dan sosial		1. Persentase pelayanan kesehatan sesuai standar (S)	N/A	IGI	1. Pembinaan mutu pelayanan rawat dan rawat gawat darurat 2. Pembinaan eksistensi pelayanan periyaki sosial 3. Pembinaan mutu asuhan/pari jamo 4. Pembinaan arak terkatur Sosial 5. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Sosial Sosial Sosial Sosial Kesehatan	1	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
										2
										Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan Keluarga Berencana, Dinas Pendidikan

NO.	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	KONDISI		PROGRAM PEMANGGUNG DAERAH	BIDANG URUSAN	OPD Pemanggung Jawab
		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		AWAL	AKHIR			
13	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Meningkatkan peran masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial	1. Meningkatkan peran masyarakat dan manajemen kesehatan 2. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam peningkatan derajat kesehatan	1. Jumlah kematian ibu melahirkan (orang/IKU) 2. Persentase meningkatnya umur harapan hidup (%/thn) 3. Persentase Prevalensi kekurangan gdl pada balita (%) 4. Morbinitas jumlah kematian bayi (org/bnrl) 5. Persentase rumah tangga ber-PHBS (%/IKU) 6. Jumlah Desa/Kel yang STERIL (Standarisasi Total Berbasis Masyarakat (Desa/Kel)	28,9/1000 KI 69,14 12,8 14 41,2 19	22/1000 KI 69,81 10,9 5 65 28	1. Peningkatan penyakit tidak menular 2. Peningkatan dan pengendalian kesehatan maternal 3. Perubahan gdl masyarakat 4. Peningkatan dan pemanfaatan penyakit menular 5. Peningkatan kecemasan ibu melahirkan dan orang 6. Peningkatan pelayanan kesehatan anak 7. Peningkatan pelayanan kesehatan keluarga 8. Peningkatan kualitas air 9. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil	Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan	1. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan Keluarga, Berencana dan Keluarga Berencana

NO.	SASARAN	STRATEGI DAN RAHU KEBULIAKAN		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI		PROGRAM PEMBAKORUKAN DAERAH	SUDANG URSBAN	OPD Penanggung Jawab
		STRATEGI	ASAH KEBULIAKAN		AWAL	AKHIR			
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14	Memumaya tingkat kerestikan	Peringkatan ekelifikan Tuan Kowadua Perumagidangan Kerastikan Kota Sawahluno	1 Menggugukan penaberdayaan dan Sidi pendudik midan serta merangkaikan komperera temaga kerja yang meragugga 2 Menggugukan satu dan tunggal kerastikan Kota Sawahluno	1 Persentase PMSS yang meragugga pedaban sosial (% IKU) 2 Persentase pendudik midan (% IKU)	41,36 2,17	59 1,75	1 Pemberdayaan fakir midan, Komunitas Midan Teragud IKAT dan Permandag Masalah Kerastikan Sosial (PKKS) lainnya 2 Pelayanan dan reabahlitai kerastikan sosial	Sosial	1 Dinas Sosial, Perberdayaan Mawadua, Desa, Perberdayaan Perumagan dan Perberdayaan Anak

Rewis RPJMD Kota Sawahluno Tahun 2013-2018

BAE VI-13

NO.	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBERLANJUTAN				INDIKATOR KEMERJA (OUTCOME)	KONDISI		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	OPD Pemangku Jawab
		STRATEGI	ARAH KEBERLANJUTAN				AWAL	AKHIR			
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15	Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan	Peningkatan kualitas SDM dan kapasitas lembaga/bentuk masyarakat	1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan	1. Jumlah desa/kelurahan yang mendapat teknologi tepat guna yang dimanfaatkan masyarakat pedesaan (kelompok)	19	30	1. Peningkatan sosial dan budaya	Fungsi Pemangku Perencanaan	1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		
16	Terwujudnya pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan anak (PUNA)	1. Menetapkan kasus secara periodik, repressif dan preventif	1. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak, keselamatan berkendara, penanganan tingkat kekerasan dalam keluarga	1. Nilai atau pengurangan skor level anak (rang) (KKU)	25	30	1. Peningkatan ketahanan keluarga dan anak	Fungsi Pemangku Perencanaan dan Anak	1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Setlako		
17	Terwujudnya budaya berkeadilan di tengah masyarakat	Peningkatan Peran dan Pembinaan Kepedulian	1. Mendukung pemuliharaan program KONI serta kelompok olahraga desa dan berlainan	1. Jumlah cabang olahraga nasional yang berkembang di masyarakat (cabang IKU)	4	10	1. Peningkatan keaktifan dan prestasi olahraga dan masyarakat	Fungsi Pemangku Perencanaan dan Olahraga	1. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Setlako		

Handwritten signature/initials

NO.	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBERKAAAN				INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	KONDISI		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	OPD Penanggung Jawab
		STRATEGI	3	4	5		AWAL	AKHIR			
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan ekuitabilitas harga	1. Meningkatkan sistem birokrasi yang berkeadilan dan membuat peran serta masyarakat dalam merumuskan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan 2. Memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan mandiri 3. Meningkatkan pengabdian, penanaman dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan 4. Meningkatkan SDM bagi aparatur pemerintahan daerah 5. Meningkatkan kualitas sistem informasi pemerintah daerah yang tepat waktu, akurat dan mudah diakses	1. Memantapkan sistem birokrasi yang berkeadilan dan membuat peran serta masyarakat dalam merumuskan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan 2. Memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan mandiri 3. Meningkatkan pengabdian, penanaman dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan 4. Meningkatkan SDM bagi aparatur pemerintahan daerah 5. Meningkatkan kualitas sistem informasi pemerintah daerah yang tepat waktu, akurat dan mudah diakses	1. Hasil evaluasi LAKIP Kota (tblh) (KKU) 2. Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan aturan perencanaan (%) (KKU)	N/A 80 100	1. Perluasan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan kepala daerah 2. Perluasan profesionalisme tenaga teknis dan aparatur pemerintah 3. Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 4. Peningkatan Disiplin Aparatur 5. Perencanaan pembangunan daerah 6. Peningkatan kapasitas pemerintahan terdesentralisasi 7. Peningkatan SDM pelayanan Administrasi (PATAS) 8. Peningkatan SDM aparatur terdesentralisasi 9. Peningkatan administrasi pemerintahan	1. Inspektori, SETDAKO dan Kecamatan 2. Inspektori, Setdikab dan semua OPD 3. Semua OPD 4. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, SETDAKO, ISSUD dan semua OPD 5. Setdikab 6. Setdikab, Kecamatan dan Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja 7. Setdikab				

Revisi RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018

BA8 VII-20

NO.	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBERJAKRAN			INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/COME)	KONDISI		PROGRAM PEKERJAAN DAERAH	JIDANG URSUAN	OPP Pemangku Jawab
		STRATEGI	ARAH KEBERJAKRAN	AWAL		AKHIR				
1										
19	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan hasil pengelolaan keuangan yang dipisahkan (PADMD)	Pertumbuhan potensi dan memaksimalkan pencapaian pajak dan distribusi daerah	1. Memperluas basis data objek pajak dan retribusi daerah 2. Meningkatkan sistem pengelolaan pajak dan retribusi daerah	1. Jumlah PAD (Rp. Milyar) 38,99	66,14	1. Peningkatan pendapatan asli daerah 2. Pengelolaan pajak bumi dan bangunan	1. Peningkatan pendapatan dan organisasi daerah 2. Peningkatan pendapatan perundang-undangan	1. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Daerah 2. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Daerah	1. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Daerah	1. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Daerah
20	Terperluasnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional SOP di setiap SKPD	Peningkatan pemantauan SPM dan penerapannya	1. Mendukung penerapannya SPM dan penerapannya SOP serta penerapannya	1. Jumlah OPD yang mencapai SPM dan SOP (OPD) (KKU) 15	21	1. Peningkatan pelayanan publik 2. Peningkatan pelayanan publik	1. Peningkatan pelayanan publik 2. Peningkatan pelayanan publik	1. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Daerah	1. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Daerah	1. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Daerah

Revisi RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018

BAB VII-21

NO.	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	KONDISI		PROGRAM PEMBAKORUTAN DAERAH	SUDANG UPRISAN	OPD Pemasngung Jumbuh
		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		AWAL	AKHIR			
21	Terwujudnya pengelolaan arsip dan perpustakaan daerah yang berkualitas	Perumusan kebijakan kearsifan dan perpustakaan daerah melalui pengabdian kearifan SDM dan sarana	<ol style="list-style-type: none"> Mendorong terbentuknya tenaga fungsional kearsifan dan perpustakaan Mengajukan Lembaga Kearsifan Daerah (LKD) dan kualitas pengelolaan kearsifan Mengajukan anggaran sebagai mitra dalam peningkatan kinerja 	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah sistem pengelolaan arsip dan perpustakaan secara elektronik (EKSU) 	M/A	1	<ol style="list-style-type: none"> Perbaikan sistem dan infrastruktur kearsifan Penyediaan dan pelaksanaan arsip daerah Peningkatan kualitas pelayanan informasi Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan 	<ol style="list-style-type: none"> Kearsifan Kearsipan Kearsipan Perpustakaan 	<ol style="list-style-type: none"> Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
22	Terwujudnya kerja administrasi kependudukan	Optimalisasi SIAR online	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan sampai tingkat kecamatan/kecamatan Mengembangkan data administrasi kependudukan 	<ol style="list-style-type: none"> Persentase penduduk dengan KTP elektronik (%) (IKU) Penduduk usia 0-18 th yang memiliki data kebanthan (%) 	90,95	98	<ol style="list-style-type: none"> Pemetaan administrasi kependudukan Standardisasi pelayanan umum Pelayanan pemetaan sipil Pengukuran keefektifan pemetaan sipil 	<ol style="list-style-type: none"> Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 	<ol style="list-style-type: none"> Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Kecamatan

Kisi 6: Keagregasian Pengelolaan dan Pemantauan Petasi Daerah
Tujuan : Keagregasian Pemantauan Petasi Daerah Melalui Pengelolaan yang Berwawasan Lingkungan
Prioritas 12 : Pengembangan Sektor Kependudukan

Revisi RPPMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018

NO.	RASBAAK	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN				INDIKATOR KEMERJA (OUTPUT)	KONDISI		PROGRAM PEMANGGUKAN DAERAH	JUDANG URUSAN	OPD Pemangku Jember
		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				AWAL	AKHIR			
23	Berkembangnya kepribadian di Kota Sawahlunto	Peningkatan pengabdian potensi wisata	1. Meningkatkan sarana prasarana dan promosi wisata 2. Mengembangkan peran aktif masyarakat dalam industri wisata 3. Peningkatan nilai seni dan budaya daerah 4. Memperkuat komitmen daerah menjadi kota wisata dan warisan dunia	1. Jumlah partisipasi daerah sektor pariwisata (Rp) (IKU) 2. Jumlah kunjungan wisatawan (orang) (IKU) 3. Jumlah objek wisata, baru, objek-objek 4. Rata-rata lama tinggal wisatawan di Kota Sawahlunto (permalan)	1,4 M	1,8 M	1. Pengembangan pemasaran pariwisata 2. Pengembangan destinasi wisata	Pariwisata Pariwisata	1. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga		
		Peningkatan ketekunan kesenian dan kebudayaan daerah	1. Peningkatan nilai-nilai seni dan budaya daerah 2. Mempertahankan komitmen daerah menjadi kota wisata dan warisan dunia	1. Jumlah jenis kesenian dan kebudayaan 2. Jumlah kunjungan (orang/bulan) (IKU)	25	44	1. Pengembangan nilai budaya 2. Peningkatan keragaman budaya 3. Pengalokasian kebijakan budaya	Kebudayaan Kebudayaan	1. Dinas Kebudayaan, Pertinggalan, Bersejarah dan Permusyawaratan		
<p>Misi 7: Mempertahankan Jaringan Sosial dan Ekonomi secara Nasional dan Internasional</p> <p>Tujuan: Mengembangkan Kerjasama, Promosi dan Asetabilitas Daerah dalam Rangka Pengembangan Ekonomi dan Sosial</p> <p>Proritas 13: Peningkatan Kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam Mengelola dan Memanfaatkan Potensi Daerah</p>											
24	Terwujudnya kerjasama, peningkatan ekonomi dan peningkatan peran serta pemerintah dalam pengembangan modal UKM dan lembaga keuangan lainnya	Meningkatkan kerjasama antar daerah dan investor serta mengembangkan RUMD yang terencana matang	1. Meningkatkan promosi daerah sektor potensial daerah 2. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif bagi investor 3. Peningkatan pengendalian dan pengawasan pertumbuhan daerah, RUMD dan Lembaga Keuangan	1. Jumlah rata-rata kerjasama dengan lembaga pemerintah (IKU) 2. Jumlah nilai PMDN (Rp) dan nilai PMA (Rp) (IKU)	18	5	1. Peningkatan kontribusi parwisata 2. Kerjasama pembangunan 3. Pembinaan dan pelayanan perizinan 4. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi 5. Peningkatan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah	Pariwisata Perencanaan Perencanaan Perencanaan Perencanaan	1. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 2. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 3. Dinas Perencanaan Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 4. Sekolah dan Kecamatan		

NO.	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KERJA		INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	KONDISI		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SISWANG URUSAN	OPD Penanggung Jawab
		STRATEGI	ARAH KERJA		AWAL	AKHIR			
1									
25	<p>Merangkainya secara sistematis dalam daerah dan dengan daerah tetangga</p> <p>Prioritas 14 : Mempertahankan Jaringan Sosial, Ekonomi secara Nasional dan Internasional</p>	<p>Pertumbuhan dan peningkatan dan alternatif baru berdimensi dan wawasan dari</p> <p>1 Meningkatkan manajemen transportasi perkotaan sehingga transportasi dapat tertinggal antara pariwisata dan umum</p> <p>2 Meningkatkan kualitas dan kuantitas pasuruan dan fasilitas perhubungan</p> <p>3 Mendukung terwujudnya kerjasama pemoda dan swasta dalam pembangunan infrastruktur</p>	<p>1 Panjang jalan yang memiliki standar perantara sesuai dengan standar (km) (KKU)</p> <p>2 Rasio jalan yang terdistribusi dengan rata-rata kecamatan berdasarkan map (rata jalan)</p>	110	127	<p>1 Pertumbuhan pelayanan angkutan</p> <p>2 Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan</p> <p>3 Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan fasilitas LLAJ</p> <p>4 Pengembangan dan peningkatan Lini Lintas</p> <p>5 Peningkatan kelengkapan pengoperasian sarana perhubungan</p> <p>6 Pengelolaan perencanaan jalan umum</p>	<p>Perhubungan</p> <p>Perhubungan</p> <p>Perhubungan</p> <p>Perhubungan</p> <p>Perhubungan</p> <p>Perhubungan</p> <p>Perhubungan</p>	1	Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

38

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Pada bab-bab terdahulu, telah dijabarkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota secara hirarkhis memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, sehingga menghasilkan rumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah. Program-program tersebut dikelompokkan ke dalam 14 prioritas pembangunan, program-program tersebut adalah upaya-upaya yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota. Dalam implementasinya secara operasional, program-program tersebut harus dijabarkan kedalam urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pada bab ini program-program tersebut selanjutnya dikelompokkan ke dalam urusan pemerintah dengan OPD terkait sehingga dapat dilihat dengan jelas pembagian tugas OPD dalam melaksanakan rencana pembangunan yang telah disusun, yang menjadi tanggung jawab OPD langsung dalam pencapaian Visi, Misi Walikota dan Wakil Walikota.

Program dan indikator kinerja tersebut dikelompokkan ke dalam 23 urusan wajib dan 7 urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Urusan : Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Pemberdayaan Masyarakat, Ketahanan Pangan, Kearsipan, Komunikasi dan Informatika, dan Urusan Perpustakaan. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan yaitu Urusan : Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya Mineral, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Perdagangan, dan Perindustrian.

Untuk dapat merumuskan program secara terukur dan memudahkan pelaksanaan evaluasi, maka masing-masing program diikuti dengan indikator dan target kinerja yang akan dicapai pada setiap tahunnya. Indikator dan target kinerja ini ditetapkan dengan memperhatikan kondisi awal dan disusun bersama OPD dan kemudian disepakati dengan DPRD Provinsi. Pada target kinerja diperkirakan output dan outcome yang akan dihasilkan dari masing-masing program. Penulisan output selain outcome pada indikator kinerja dimaksudkan untuk memberikan arahan kepada OPD dalam merumuskan kegiatan-kegiatan pada setiap program prioritas pada penyusunan Rencana Strategis (Renstra) OPD. Sedangkan pada kerangka pendanaan diperkirakan besarnya dana APBD dan sumber dana lainnya yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian target tersebut serta OPD penanggungjawab. Namun demikian pendanaan program dan kegiatan setiap tahunnya mengacu kepada pagu indikatif yang ditetapkan pada tahun berjalan. Rincian program berdasarkan urusan dengan indikator dan target kinerja secara rinci dapat dilihat pada Tabel 8.1.



TABEL 8.1
INDIKASI PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
PENYELENGGARAAN URUSAN KOTA SAWAHILUMTO
TAHUN 2013-2018

Kode	Bidang Urusan Penerimaan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD Tahun 2013	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	OPD Pemangku Urusan		
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Target Sebaran m	Target Sebaran n			Target Sebaran Rp (juta)	
				Realisasi I	Realisasi II	Realisasi I	Realisasi II	Target Sebaran m	Target Sebaran n	Target Sebaran Rp (juta)	Target Sebaran m	Target Sebaran n	Target Sebaran Rp (juta)						Target Sebaran m
A	BELAKA-TIDAK LANGSUNG		231.689	234.176	243.626	306.41	314.172	322.027	322.027	349.272	392.027	1.515	1.515	248.272	1.515	322.027	248.272	1.515	21
			109.564	204.008	246.449	306.409	242.216	1.527	1.527	242.216	1.527	1.527	7.402	1.05	1.001	62.475	747		
			1.841	1.452	1.416	13	13	7.432	102	977	60.951	708	411.108	421.381	491.381	491.381			
			13.013	5.435	2.08	7.432	102	102	102	102	977	60.951	708	747	747	747			
			917	840	13.013	102	102	102	102	102	977	60.951	708	747	747	747			
			141.349	13.023	2.331	983	983	983	983	983	977	60.951	708	747	747	747			
			1.465	4.247	21.365	59.464	59.464	59.464	59.464	59.464	977	60.951	708	747	747	747			
			4.276	2.824	-	700	700	700	700	700	977	60.951	708	747	747	747			
B	BELAKA LANGSUNG		194.311	238.316	300.373	409.076	411.108	421.381	421.381	491.381	491.381	491.381	491.381	491.381	491.381	491.381	491.381		
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																			
PENDIDIKAN																			
Program Pengembangan Anak Usia Dini	APR. PAUD (%)	Jumlah peserta didik yang melaksanakan pendidikan	74,08	82	576	96,52	792	83	83	810	88	88	820	90	50	830	90	50	3828
			30	238	50	645	20	20	700	20	20	720	140	140	3053				
			15		133		80	80	60	60	40	40	328	328					
Pendidikan Non Formal	Paket A (orang)	Paket B (orang)	Paket C (orang)	80	35	173	80	80	60	60	40	40	388	388					
				90	67	6	67	115	109	100	100	135	100	100	133	100	100	526	
Pendidikan Luar Biasa	Persentase Anak cacat atau difabel (%)	Gara-bins ubi	44,73	3.045	74,43	1.296	48	48	1.234	60	60	1.674	78	78	1.708	78	78	7337	
			24,94	44,73	3.045	74,43	1.296	48	48	1.234	60	60	1.674	78	78	1.708	78	78	7337

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Persepsi)	Kendali Kinerja (RPJMD 2013)	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kendali Kinerja pada akhir periode RPJMD		Dinas Peningkatan dan Pengembangan			
				Realisasi	Rp (juta)	Realisasi	Rp (juta)	Target Sebelum	Target Selesai	Rp (juta)	Target Sebelum	Target Selesai	Rp (juta)	Target Sebelum	Target Selesai		Target Sebelum	Target Selesai	
								mem	h		mem	h		mem	h		mem	h	
2	Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Kemampuan Guru dan Tenaga Kependidikan (TKD)	878	1200	1414	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	21
	Pengembangan dan Budayanya	Jumlah siswa yang mengikuti pendidikan	800	945	980	102	102	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	21
	Manajemen Peningkatan Pendidikan	Nilai rata-rata ujian nasional (SNP/UN/SMK/SLN/SLB)	794	80,17	80,54	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	21
	Peningkatan Mutu Pendidikan	Nilai rata-rata ujian nasional (SNP/UN/SMK/SLN/SLB)	723	6,53	65,4	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	21

Revisi RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD Tahun 2013	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	OPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Target Satuan	Target Satuan			Target Satuan	Target Satuan
				Realisasi	Rp (Milyar)	Realisasi	Rp (Milyar)	Target Satuan	Rp (Milyar)	Target Satuan	Rp (Milyar)	Target Satuan	Rp (Milyar)						
2	Penyusunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah	Jumlah sekolah menengah pertama swasta standar (Unit)	3	18.040,10	2	11.283	4	9.769	3	10.54	4	108	4	11.02	4	53.412	20	21	
	Penyusunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar	Jumlah sekolah dasar swasta standar (Unit)	28	3.951	35	7.048	30	30	30	5.27	30	30	5.4	32	5.51	32	20879		
	Peringkasan Sarana dan Prasarana Pendidikan Luar Sekolah	Jumlah SMP non-merchandise swasta standar (Unit)	1	0	1	83	2	2	2	103	2	2	105	3	3	316			
	Pendidikan Berkarakter	Jumlah sekolah yang melaksanakan pendidikan karakter (Sekolah)	2	0	2	18.649	3	3	3	100	3	3	140	3	3	19099			
	Persiapan Pradiklat/Pradiklat/Pradiklat	Asisten/Pegawai Tingkat I (Unit)	1	0	1	189	1	1	1	211	1	1	216	1	1	647			
	KESERHATAN																		
	Perencanaan dan Pelaksanaan	Sarana dibina/monorail (Unit)	90	60	90	41	90	90	91	43	92	92	44	92	92	206			
	Perencanaan dan Pelaksanaan	Persentase Ombudsman di Puskesmas (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Perencanaan dan Pelaksanaan	Persentase Ombudsman di Puskesmas (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Handwritten mark

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD Tahun 2013	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendukung				Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendukung										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	OPD Penanggung Jawab	
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Rp (Milyar)				
				Realisasi	Rp (Milyar)	Realisasi	Rp (Milyar)	Target Selesai	Target Senda	Target Selesai	Target Senda	Target Selesai	Target Senda	Target Selesai	Target Senda					
2		Pengaman D/3 Pengamanan Kendaraan Terdapat pada yang Ancam Peg Jumlah Desa dengan Garita berwujud Berk	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Rumah tangga terang selama santai (3)	9354	-	79,05	-	76	76	76	76	78	78	80	80	80	80	80	80	80	
		Persentase Perumahan Kondusif Prasikeras yang rehabilitasi pragoblar lindak standar santai standar dewan desa/berbuka n yang socialsasaran SITSM (Desa)	-	-	0	-	-	5	5	308	-	6	6	6	6	6	6	6	6	1213
		Persentase TPT yang menenuhi syarat keselamatan (%)	-	-	-	-	-	53	53	-	-	55	55	58	58	58	58	58	58	
			-	-	-	-	-	32	32	-	-	33	33	35	35	35	35	35	35	

Kode	Bidang Urutan Peningkatan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal (RPJMD Tahun 2013)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Ketunggalan Pendanaan				Target Capaian Kinerja Program dan Ketunggalan Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	OPD Penanggung Jawab							
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017				Tahun 2018						
				Realisasi	Rp (juta)	Realisasi	Rp (juta)	Target Selesai	Target Selesai	Target Selesai	Target Selesai			Target Selesai	Target Selesai	Target Selesai	Rp (juta)			
2	Peningkatan dan Program Pembangunan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Perencanaan anggaran dengan anggaran (sumber daya)	-	-	-	-	-	-	92	-	-	93	-	94	-	-	94	-	94	-
		Kapasitas perwujudan (bentuk) menurut 10.000 (pendukung)	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
		Perentase pencapaian 10 (Success rate)	-	-	-	-	-	85	85	-	-	85	-	85	-	-	85	-	85	-
		Terdapat Peningkatan yang dilaksanakan	-	-	-	-	0	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-
		Persentase desa/kecamatan yang melaksanakan PMMCT	-	195	-	232	-	316	-	324	-	324	-	324	-	331	-	331	-	1393
		Peningkatan dan Program Pembangunan	-	-	-	-	-	-	50	-	75	-	100	-	100	-	100	-	100	-
		Perencanaan anggaran dengan anggaran (sumber daya)	-	-	-	-	-	-	81	-	87	-	94	-	94	-	94	-	94	-
		Kapasitas perwujudan (bentuk) menurut 10.000 (pendukung)	-	-	-	-	-	-	81	-	87	-	94	-	94	-	94	-	94	-
		Perentase pencapaian 10 (Success rate)	-	-	-	-	-	-	81	-	87	-	94	-	94	-	94	-	94	-
		Terdapat Peningkatan yang dilaksanakan	-	-	-	-	0	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-
		Persentase desa/kecamatan yang melaksanakan PMMCT	-	195	-	232	-	316	-	324	-	324	-	324	-	331	-	331	-	1393
		Peningkatan dan Program Pembangunan	-	-	-	-	-	-	81	-	87	-	94	-	94	-	94	-	94	-
		Perencanaan anggaran dengan anggaran (sumber daya)	-	-	-	-	-	-	81	-	87	-	94	-	94	-	94	-	94	-
		Kapasitas perwujudan (bentuk) menurut 10.000 (pendukung)	-	-	-	-	-	-	81	-	87	-	94	-	94	-	94	-	94	-
		Perentase pencapaian 10 (Success rate)	-	-	-	-	-	-	81	-	87	-	94	-	94	-	94	-	94	-
		Terdapat Peningkatan yang dilaksanakan	-	-	-	-	0	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-
		Persentase desa/kecamatan yang melaksanakan PMMCT	-	195	-	232	-	316	-	324	-	324	-	324	-	331	-	331	-	1393
		Peningkatan dan Program Pembangunan	-	-	-	-	-	-	81	-	87	-	94	-	94	-	94	-	94	-
		Perencanaan anggaran dengan anggaran (sumber daya)	-	-	-	-	-	-	81	-	87	-	94	-	94	-	94	-	94	-
		Kapasitas perwujudan (bentuk) menurut 10.000 (pendukung)	-	-	-	-	-	-	81	-	87	-	94	-	94	-	94	-	94	-
		Perentase pencapaian 10 (Success rate)	-	-	-	-	-	-	81	-	87	-	94	-	94	-	94	-	94	-
		Terdapat Peningkatan yang dilaksanakan	-	-	-	-	0	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-
		Persentase desa/kecamatan yang melaksanakan PMMCT	-	195	-	232	-	316	-	324	-	324	-	324	-	331	-	331	-	1393

Revisi RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018

(Handwritten mark)

Kode	Bidang Urusan Pencapaian Materi dan Kategori Pembangunan	Indikator Kinerja Program (terencana)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		OPD Pencapaian Urusan				
				Realisasi	Rp (juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Target Sesuai m	Target Sesuai h	Rp (Juta)	Target Sesuai m	Target Sesuai h	Rp (Juta)	Target Sesuai m	Target Sesuai h		Rp (Juta)	Target Sesuai m	Target Sesuai h	
2	Pengadaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumahnya Sesuai/Rumahnya Sesuai/Rumahnya Sesuai/Pembi- ayaan/Rumahnya Sesuai/Mata	Ketersediaan sarana prasarana seseorang standar SPW RSK/Standar Pelolygon SPW	22	22	5.182	22	489	22	22	8.438	22	22	8.657	22	22	8.847	22	22	3.664	RSMD
	Pembangunan Operasional Dusresnusa	Jml. Operasional Ritum Keberang (Pakdesnusa)	6	6	669	6	650	6	6	700	6	6	830	6	6	900	6	6	900	Dinkes, Pergerakan Perkotaan dan SD
	Kerangka Pembangunan Kesehatan	Perentase pasien yang diikuti (%)	100	100	29	100	110	100	100	32	100	100	33	100	100	34	100	100	238	RSUD, Dinkes, Pergerakan Perkotaan dan SD
	Berikutnya Materi dan Kategori Pembangunan -RUM	Cakupan keperawatan keperawatan Nasional (%) Pelayanan Pelayanan Jumlah kegiatan Nasional yang diikuti (%) Pelayanan keperawatan yang diikuti						75		110		89	120		100	130		100	360	Dinkes, Pergerakan Perkotaan dan SD
									70						72					

Kode Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kendali Kinerja RPJMD (Tahun 2013)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kendali Kinerja pada akhir periode RPJMD	OPD Penanggung Jawab					
			Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018				Kendali Kinerja pada akhir periode RPJMD				
			Realisasi I	Rp (Juta)	Realisasi I	Rp (Juta)	Target Semula			Target Semula	Target Semula	Target Semula	Rp (Juta)						
2	Jaminan Kesehatan	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	tingkat keputus-putus D/S	93	74	115	75	280	-	-	290	-	-	295	-	-	300	-	-	1280	
	Terdapat Posyandu	98	99	100	100	102	102	102	105	106	106	107	107	107	107	107	107	107	
	Cakupan Posyandu	-	-	-	-	-	-	75	1.000	-	78	1.010	-	80	-	-	80	-	
	Cakupan Posyandu aktif	-	-	850	-	902	-	70	-	-	75	-	-	80	1.020	-	-	4782	
	Peringkat pelayanan kesehatan anak	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100	-	-	100	-	-	100	-	
	Persentase dokter kecil dan KSK	-	-	-	-	-	-	10	-	-	10	-	-	10	-	-	10	-	
	Cakupan imunisasi anak sekolah	-	-	-	-	-	-	90	-	-	90	-	-	90	-	-	90	-	
	Jumlah Posyandu	45	47	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	
	Cakupan layanan swag	-	-	58	-	92	-	30	115	-	37	130	-	45	150	-	45	545	
	Peringkat pelayanan kesehatan anak	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	1	-	-	1	-	
	Peringkat pelayanan kesehatan anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal (RPJMD Tahun 2013)	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab		
				Realisasi	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Target Selesai	Target Selesai	Rp (Juta)	Target Selesai	Rp (Juta)	Target Selesai	Target Selesai	Target Selesai		Rp (Juta)	Target Selesai
				1	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18
2	Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Masyarakat	Kasus kriminal perampokan (Echelon) menurut penduduk per 100.000 penduduk	<10	0	<10	0	0	<10	0	<10	0	<10	0	<10	0	21	Dinkes, Pengendalian Penyakit dan KB	
	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Jumlah desa/celurahan yang melaksanakan kegiatan 10s Terpadu (10s PTM)	-	0	-	38	-	10	45	-	25	55	-	37	203	Dinkes, Pengendalian Penyakit dan KB		
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Persentase perempuan usia 30 - 50 tahun yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan diri secara berkala dan teratur	-	-	-	-	-	10	-	25	-	-	-	50	-	Dinkes, Pengendalian Penyakit dan KB		
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Persentase perempuan hamil (ASBI)	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	Dinkes, Pengendalian Penyakit dan KB		
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Jumlah desa dengan program	30	31	32	33	34	34	35	36	36	37	37	37	37	3467	Dinkes, Pengendalian Penyakit dan KB	

Kode	Bidang Penyelenggaraan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kendali Awal RPJMD (Tahun 2013)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kendali Kinerja pada akhir periode RPJMD	OPD Penyelenggara			
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019						
				Realisasi	Rp (Milyar)	Realisasi	Rp (Milyar)	Realisasi	Rp (Milyar)	Realisasi	Rp (Milyar)	Realisasi	Rp (Milyar)	Realisasi	Rp (Milyar)					
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Partisipasi yang aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan (Rumad Tanggung)	2382	1.829	149	3.013	167	2.802	2.802	738	2.022	2.922	757	3.042	3.042	774	3.042	3.042	2576	
	Pencapaian dan penguasaan yang berorientasi kekegiatan	kebakaran yang terintegrasi (%)	100	100	85	100	1.560,30	100	100	1.622	100	100	699,4	100	100	690,8	100	100	4.516,70	
	Peningkatan Sesi dan kemampuan keaktifan keorganisasional dan jembahannya keorganisasional, kemandirian, kemandirian dan kemandirian	Tingkat keaktifan keorganisasional (%)	99	99	91	95	42	80	80	200	90	90	205	100	100	210	100	100	748	
	Perencanaan Tema Ruang	Jumlah dokumen perencanaan ruang, DED	5	3	698	14	3.292	16	16	3,4	18	18	3,45	20	20	3,5	20	30	14427	
	Pengabdian masyarakat ke masyarakat	Perencanaan ruang dengan rencana tata ruang (%)	85	86	119	100	164	100	100	232	100	100	238	100	100	243	100	100	696	
	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan	Perencanaan kegiatan (%)	0,45	33,55		33,79		80	80		83	83	2569		85	85			7725	
	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan	Perencanaan kegiatan (%)																		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (tahun 2013)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	OPD Penanggung Jawab	
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016				Tahun 2017				Tahun 2018						
				Realisasi	Rp (juta)	Realisasi	Rp (juta)	Target Selesai	Target Selesai	Rp (juta)	Target Selesai	Target Selesai	Rp (juta)	Target Selesai	Target Selesai	Rp (juta)	Target Selesai	Target Selesai	Rp (juta)			Target Selesai
2		1. tani/mg/Pak - Jumlah - Jumlah yang dibagikan (unit) - luas panen yang dikalikan (m ²) - Panah yang dibagikan (kg) - Panjang yang dibagikan (km) - Jumlah PUI dalam rumah yang dipajang (lalu)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
									1			1			1			1				
									2500			6000			5250			5250				
									0			0			3,85			3,85				
									0,3			0,3			0,3			0,3				
									0			50			50			50				
									0			6			2,4			2,4				
									1	8000		1	9000		1	10000		1	10000			
	Pendanaan Lingkungan Hidup	Jumlah perubahan kawasan lingkungan	-	-	-	-	-	-	1	8000	-	1	9000	-	1	10000	-	1	10000			
	KETERANGAN, PERLEMBAGAN DAN MASYARAKAT																					

Handwritten signature

Kode	Bidang Utama Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pemenuhan				Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pemenuhan										OPD Penanggung Jawab			
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir							
				Realisasi I	Rp (juta)	Realisasi I	Rp (juta)	Target Selesai m	Target Selesai n	Rp (juta)	Target Selesai m	Target Selesai n	Rp (juta)	Target Selesai m	Target Selesai n	Rp (juta)	Target Selesai m		Target Selesai n	Rp (juta)	
2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Pengembangan dan pemenuhan kemampuan dan kompetensi lingkungan	Capaian: secara umum dan sektoral yang dirangsang oleh kegiatan keorganisasian dan peningkatan terdapat serta (Kawal) pengorganisasian keorganisasian lingkungan terdampak (Kawal) terdampak (Kawal)	100	100	422	100	323	100	100	100	709	100	100	710	100	100	715	100	100	2.879	Badan Kesbang Pol (KABPOL)
	Peningkatan kemampuan dan kompetensi lingkungan	Capaian: secara umum dan sektoral yang dirangsang oleh kegiatan keorganisasian dan peningkatan terdapat serta (Kawal) pengorganisasian keorganisasian lingkungan terdampak (Kawal) terdampak (Kawal)	0	0		0		0	0	0		0	0		0	0		0	0		BKPPD
	Peningkatan kemampuan dan kompetensi lingkungan	Capaian: secara umum dan sektoral yang dirangsang oleh kegiatan keorganisasian dan peningkatan terdapat serta (Kawal) pengorganisasian keorganisasian lingkungan terdampak (Kawal) terdampak (Kawal)	100	100	335	100	276	100	100	100	276	100	100	276	100	100	275	100	100	1438	Sampol PP dan Pemenuhan Kelembagaan
	Peningkatan kemampuan dan kompetensi lingkungan	Capaian: secara umum dan sektoral yang dirangsang oleh kegiatan keorganisasian dan peningkatan terdapat serta (Kawal) pengorganisasian keorganisasian lingkungan terdampak (Kawal) terdampak (Kawal)	75	370	168	370	119	370	370	102	370	370	102	370	370	102	370	370	370	393	Sampol PP dan Pemenuhan Kelembagaan
	Peningkatan kemampuan dan kompetensi lingkungan	Capaian: secara umum dan sektoral yang dirangsang oleh kegiatan keorganisasian dan peningkatan terdapat serta (Kawal) pengorganisasian keorganisasian lingkungan terdampak (Kawal) terdampak (Kawal)	0	0		0		0	0		0	0	0		0	0		0	0		Sampol PP dan Pemenuhan Kelembagaan
	Peningkatan kemampuan dan kompetensi lingkungan	Capaian: secara umum dan sektoral yang dirangsang oleh kegiatan keorganisasian dan peningkatan terdapat serta (Kawal) pengorganisasian keorganisasian lingkungan terdampak (Kawal) terdampak (Kawal)	100	100		100		100	100		100	100	100		100	100		100	100		Sampol PP dan Pemenuhan Kelembagaan
	Peningkatan kemampuan dan kompetensi lingkungan	Capaian: secara umum dan sektoral yang dirangsang oleh kegiatan keorganisasian dan peningkatan terdapat serta (Kawal) pengorganisasian keorganisasian lingkungan terdampak (Kawal) terdampak (Kawal)	0	300	162	459	286	430	430	286	450	459	286	450	430	286	450	2.3	2.3	1306	Badan Kesbangpol dan PPD
	Peningkatan kemampuan dan kompetensi lingkungan	Capaian: secara umum dan sektoral yang dirangsang oleh kegiatan keorganisasian dan peningkatan terdapat serta (Kawal) pengorganisasian keorganisasian lingkungan terdampak (Kawal) terdampak (Kawal)	100	100		100		100	100		100	100	100		100	100		100	100		Sampol PP dan Pemenuhan Kelembagaan
	Peningkatan kemampuan dan kompetensi lingkungan	Capaian: secara umum dan sektoral yang dirangsang oleh kegiatan keorganisasian dan peningkatan terdapat serta (Kawal) pengorganisasian keorganisasian lingkungan terdampak (Kawal) terdampak (Kawal)	20	20	50,7	40	85	60	60	88,7	80	80	88,6	100	100	100	93	109	100	415,3	Kecamatan Sembako

Handwritten signature

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD Tahun 2013	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kinerja Pelaksanaan						Target Capaian Kinerja Program dan Kinerja Pelaksanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	RPJMD
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020					
				Realisasi	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Tidak terdapat kegiatan yang terdapat NMR dan SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bulan ke-10 RPJMD	
	Pendidikan dan Kebudayaan	Partisipasi penduduk usia 15 tahun ke atas dalam mengikuti pendidikan dasar	75,88	66,59	14	0	0	0	0	0	70	70	32,65	75	75	34,28	75	75	80,93	Bulan ke-10 RPJMD	
		jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang mengikuti pendidikan dasar	79	2	6	6	829	56	56	828	59	59	535	45	45	525	189	189	3273		
		jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang mengikuti pendidikan dasar	37	37	874	37	829	37	37	67,5	37	37	180	37	37	189	37	37	436,5	Bulan ke-10 RPJMD	
		jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang mengikuti pendidikan dasar	35	45	49,7	60	90	75	75	60	80	80	150	90	90	157	90	90	536,7		
		jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang mengikuti pendidikan dasar	50	60	36	60	31	75	75	34	85	85	45	90	90	47	90	90	103		
	Rehabilitasi dan Pemertajasan Berencana	jumlah persentase sarana yang dibangun	105	40	142	11	219	75	75	6790	67	67	1050	60	60	1402,5	60	60	8945,4	Bulan ke-10 RPJMD	
		jumlah persentase sarana yang dibangun	0	0	138	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	559	Bulan ke-10 RPJMD	
	Peningkatan dan Pemertajasan	Persentase pelaksanaan yang tercapai (%)	134	100	85	109	156	109	100	1622	100	100	699,4	100	100	639,8	100	109	4316,4	Bulan ke-10 RPJMD	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab										
				Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Target Eslabm		Target Esasda									
				Rp (Juta)	Rp (Juta)	Rp (Juta)	Rp (Juta)	Rp (Juta)	Rp (Juta)	Rp (Juta)										
2	Bahaya Kesehatan	Perentase Perbaikan Peningkatan dan SOP yang terwujud (%)	33	50	99,5	75	515	75	75	85	85	450	100	100	475	100	100	1590,5		
		Perentase Peningkatan Mutu Pelayanan Masyarakat dalam Percepatan Pertumbuhan Ekonomi (%)	20	40	1	60	1	80	80	2	85	85	2	90	90	2,5	90	90	8,75	Badan Keslinggoh DPRD
		Perentase Peningkatan Mutu Pelayanan Masyarakat dalam Percepatan Pertumbuhan Ekonomi (%)	45	60	95	70	31	80	80	34	83	85	45	90	90	47	90	90	252	
		Perentase Peningkatan Mutu Pelayanan Masyarakat dalam Percepatan Pertumbuhan Ekonomi (%)	25	37,5	25	50	84,5	85	85	67,5	90	90	355	100	100	372,7	100	100	904,7	
		Perentase Peningkatan Mutu Pelayanan Masyarakat dalam Percepatan Pertumbuhan Ekonomi (%)	25	53	544,6	65	435,6	75	75	557,3	80	80	673	85	85	643,5	85	85	2606	Badan Keslinggoh DPRD
		Perentase Peningkatan Mutu Pelayanan Masyarakat dalam Percepatan Pertumbuhan Ekonomi (%)	23	50	60	90	33	70	70	292,5	75	75	290	80	80	304,5	80	80	1040	
		Perentase Peningkatan Mutu Pelayanan Masyarakat dalam Percepatan Pertumbuhan Ekonomi (%)	60	65	108	75	220,5	90	90	487	95	95	485	100	100	509,3	100	100	522,4	Badan Keslinggoh DPRD
		Perentase Peningkatan Mutu Pelayanan Masyarakat dalam Percepatan Pertumbuhan Ekonomi (%)	60	-	-	70	-	80	80	-	85	85	-	90	90	-	90	90	-	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD Tahun 2013	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendukung								Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendukung								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Rp (juta)	OPD Penanggung Jawab					
				Tahun 2014				Tahun 2015				Tahun 2016				Tahun 2017							Tahun 2018				
				Realisasi (%)	Rp (Milya)	Target Selesai (%)	Rp (Milya)	Realisasi (%)	Rp (Milya)	Target Selesai (%)	Rp (Milya)	Realisasi (%)	Rp (Milya)	Target Selesai (%)	Rp (Milya)	Realisasi (%)	Rp (Milya)	Target Selesai (%)	Rp (Milya)				Realisasi (%)	Rp (Milya)	Target Selesai (%)	Rp (Milya)	
2		Perkembangan (%)	65	75	75	104,9	75	2,9	85	85	51	90	50	50	100,0	85	85	100	100	100	100	100	100	100	209,8	Badan Keselamatan APEED	
		Perubahan Daerah Jasa Berencana	75	-	-	-	-	-	75	75	652,4	80	80	85	85	1050	85	85	100	100	100	100	100	100	857,4		
		SOSIAL																									
		Perencanaan M. P. dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang	50	-	0	80	77,5		85	85	623	90	90	639	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2090	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pertanahan, Perikanan dan

Kode	Bidang Urutan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Output)	Kondisi Awal (Rendahnya 2013)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019						Tahun 2020	
				Realisasi	Rp (juta)	Realisasi	Rp (juta)	Target Selesai	Target Selesai	Rp (juta)	Target Selesai	Target Selesai	Rp (juta)	Target Selesai	Target Selesai					Rp (juta)	Target Selesai
2	Masalah Kesehatan Masyarakat (PMKS) Lainnya	Presensi PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemeliharaan bantuan dasar	-	-	-	-	51	-	25	-	24	-	24	-	24	-	24	21	Pertindungan Anak		
3	Presensi PMKS yang memperoleh bantuan yang mendokumentasikan	-	-	-	-	9	-	10	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	Pertindungan Anak		
4	Presensi PMKS yang menerima Program Pambudayaan Sosial melalui Kampung Sosial	-	-	-	-	9	-	10	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	Pertindungan Anak		
5	Presensi PMKS yang menerima Program Pambudayaan Sosial melalui Kampung Sosial	-	-	-	-	9	-	10	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	Pertindungan Anak		
6	Presensi PMKS yang menerima bantuan sosial sebagai penerima manfaat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Pertindungan Anak		
7	Presensi PMKS yang menerima bantuan sosial sebagai penerima manfaat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Pertindungan Anak		
8	Presensi PMKS yang menerima bantuan sosial sebagai penerima manfaat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Pertindungan Anak		
9	Presensi PMKS yang menerima bantuan sosial sebagai penerima manfaat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Pertindungan Anak		
10	Presensi PMKS yang menerima bantuan sosial sebagai penerima manfaat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Pertindungan Anak		
11	Presensi PMKS yang menerima bantuan sosial sebagai penerima manfaat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Pertindungan Anak		
12	Presensi PMKS yang menerima bantuan sosial sebagai penerima manfaat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Pertindungan Anak		
13	Presensi PMKS yang menerima bantuan sosial sebagai penerima manfaat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Pertindungan Anak		
14	Presensi PMKS yang menerima bantuan sosial sebagai penerima manfaat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Pertindungan Anak		
15	Presensi PMKS yang menerima bantuan sosial sebagai penerima manfaat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Pertindungan Anak		
16	Presensi PMKS yang menerima bantuan sosial sebagai penerima manfaat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Pertindungan Anak		
17	Presensi PMKS yang menerima bantuan sosial sebagai penerima manfaat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Pertindungan Anak		
18	Presensi PMKS yang menerima bantuan sosial sebagai penerima manfaat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Pertindungan Anak		
19	Presensi PMKS yang menerima bantuan sosial sebagai penerima manfaat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Pertindungan Anak		
20	Presensi PMKS yang menerima bantuan sosial sebagai penerima manfaat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Pertindungan Anak		
21	Presensi PMKS yang menerima bantuan sosial sebagai penerima manfaat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Pertindungan Anak		

Kode	Bidang Urutan dan Penertiban Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal (Dahun 2013)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	OPD Pemangku Jawab	
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020				
				Realisasi	Rp (juta)	Realisasi	Rp (juta)	Target Selesai	Target Selesai	Target Selesai	Target Selesai	Target Selesai	Target Selesai	Target Selesai	Target Selesai	Target Selesai	Target Selesai			Rp (juta)
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Personase meningkatkan Sifat Pesisir dalam pelaksanaan kepelabuhanan sosial anak	-	-	-	-	-	-	15	-	-	15	-	-	15	-	-	15	-	Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Personase meningkatkan lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dalam pertolongan Sosial Anak	-	-	-	-	-	-	40	-	50	-	-	50	-	-	50	-	30	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Personase peningkatan cacat dan trauma yang ditimbulkan	80	-	85	67	87	87	90	90	90	90	92	92	92	92	92	92	277	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Personase peningkatan yang ditangani secara fisik	-	-	-	-	-	-	10	-	15	-	-	25	-	-	25	-	25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Personase peningkatan standar operasional pelayanan kesehatan	2	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Personase peningkatan standar operasional pelayanan kesehatan	-	-	0	-	90	90	90	25	90	90	25	90	50	25	90	90	75	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

RP

Kode	Bidang Perencanaan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kendali Kinerja RPJMD (Tahun 2013)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										OPD Penanggung jawab			
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kendali Kinerja pada akhir periode RPJMD							
				Realisasi Rp (juta)	Realisasi Rp (juta)	Target Ganda m	Target Ganda h	Target Ganda m	Target Ganda h	Target Ganda m	Target Ganda h	Target Ganda m	Target Ganda h	Target Ganda m	Target Ganda h						
2		Presentase penerimaan SK terhadap dan Tenyachikung dan UCH dan Presentase Qiroos / Yewanan/LSM yang menyediakan sarana pemasaran pelayanan kepada klien socio liter Panti	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
			-	-	-	-	-	-	-	-	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
			-	-	-	-	-	-	-	-	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
			-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
			-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	
			-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
			-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
			-	-	-	-	-	-	-	-	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
			-	-	-	-	-	-	-	-	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
			-	-	-	-	-	-	-	-	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
			-	-	-	-	-	-	-	-	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
			-	-	-	-	-	-	-	-	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	
			-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	

Kode	Bidang Utama dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab								
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			Target	Target						
				Realisasi I	Rp (juta)	Realisasi I	Rp (juta)	Target Sebelum	Target Setelah	Rp (juta)	Target Sebelum	Target Setelah	Rp (juta)		Target Sebelum	Target Setelah	Rp (juta)	Rp (juta)				
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		Presentase tingkat ketercapaian indikator kinerja pembangunan						100	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100			
LINGKUNGAN HIDUP																						
		Capaian rencana target	65	60	68	72	72	74	74	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	
		bagian dari kerangka Perencanaan	3	7	8	11	11	13	13	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	
		Perencanaan dan pelaksanaan anggaran																			Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	
		Target persentase di bawah ambang batas	50	65	75	80	80	90	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	
		- Atas (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	
		- Di bawah (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	
		- Tanah (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	
		Target persentase di bawah ambang batas	50	65	75	80	80	90	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	
		- Atas (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	
		- Di bawah (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	
		- Tanah (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	
		Jumlah rumah kaca (koloni)	64	75	90	96	96	100	100	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	
		Luas KHH Kota (%)	9,54	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	
		Perbaikan kualitas lingkungan yang terdampak pembangunan Sekolah Adiwiyata				104				120				119						122		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
		Perbaikan kualitas lingkungan yang terdampak pembangunan Sekolah Adiwiyata																			581	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan Penerimaan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Koordinasi RPJMD Tahun 2013	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Dinas Penyelenggara					
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Koordinasi Kinerja pada akhir periode RPJMD							
				Realisasi	Rp (Milyar)	Realisasi	Rp (Milyar)	Target Selesai	Target Selesai	Rp (Milyar)	Target Selesai	Target Selesai	Rp (Milyar)	Target Selesai	Target Selesai		Rp (Milyar)				
2	Reproduksi	ditaporkan	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pemertanian KIS/KS	Jumlah IKR dan SKL yang dihasilkan	9	9	180	9	235	9	9	211	9	9	215	9	9	220	9	9	1082		
	Peningkatan dan Informasi tentang Fungsionalitas dan kemampuan tumbuh kembang Anak	Perentase anak yang tercapai perkembangan nya (%)	100	100		100	191	100	100	261	100	100	270	100	100	276	100	100	1601	Dinas Kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan	
	Peningkatan Pelayanan Keluarga	Perentase pelayanan KB (%)	100	100	100	100	100	100	100	110	100	100	120	100	100	140	100	100	140	Dinas Kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan	
	Peningkatan dan Strategi Keluarga Sejahtera	Perentase perubahan keluarga sejahtera	100	100	10	100	12	100	100	14	100	100	16	100	100	18	100	100	18	Dinas Kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan	
	PERHUBUNGAN																				
	Rehabilitasi dan Peningkatan Prasarana dan Fasilitas LAM dan Fasilitas LAM	Prasarana dan fasilitas LAM yang terpelihara (%)	80	85	31	90	33	85	85	54	85	85	56	100	100	58	100	100	237	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	Peningkatan Pelaksanaan Anggaran	Target dan/atau realisasi anggaran (Milyar Rupiah)	27	27	5	27	7	27	27	15	27	27	15	27	27	20	27	27	62	Dinas Perhubungan	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD (2013)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	OPD Penanggung Jawab				
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Target Sasaran	Target Sasaran			Target Sasaran			
				Realisasi	Rp (juta)	Realisasi	Rp (juta)	Realisasi	Rp (juta)	Realisasi	Rp (juta)	Realisasi	Rp (juta)								
2	Peningkatan skor kualitas layanan SRPD serta anner alBayah	Jumlah SRPD terakreditasi jaringan Indonesia (SNI-V)	27	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
					0	27	150	27	27	150	27	27	150	27	27	150	27	27	690		
KOPERASI DAN USAHA KECELU MEREKOH																					
	Pengembangan dan peningkatan kemampuan keorganisasian dan kompetensi UKM	Jumlah koperasi/berbadan hukum (yang di nilai UGRI)	1	33	30	35	33	33	33	53	33	33	54	33	33	55	33	33	192	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
	Program Pengembangan dan peningkatan kemampuan keorganisasian koperasi	Jumlah koperasi/berbadan hukum (yang di nilai UGRI)	0	6	47	12	84	18	18	105	24	24	108	30	30	111	30	30	455	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
	Program Pengembangan dan peningkatan kemampuan keorganisasian koperasi	Jumlah aset usaha simpang pinjam	0	5	123	5	150	5	5	307	5	5	326	5	5	346	5	5	1252	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dan Seblaho	
	Program Pengembangan dan peningkatan kemampuan keorganisasian koperasi	Jumlah kelompok yang mengaktifkan (keorganisasian)	27	1	53	3	84	3	3	27	3	3	32	3	3	39	13	13	235	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dan Seblaho	
	Program Pengembangan dan peningkatan kemampuan keorganisasian koperasi	Jumlah UMKI yang difasilitasi (Orang)	-	255	-	281	-	250	250	253	250	250	260	250	250	265	1205	1205	778		

Handwritten signature/initials

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja RPJMD (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (tahun 2013)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Rincian RPJMD				
				Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024							
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target				
				(Rp. Miliar)	(Rp. Miliar)	(Rp. Miliar)	(Rp. Miliar)	(Rp. Miliar)	(Rp. Miliar)	(Rp. Miliar)	(Rp. Miliar)	(Rp. Miliar)	(Rp. Miliar)	(Rp. Miliar)	(Rp. Miliar)	(Rp. Miliar)	(Rp. Miliar)				
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Jumlah penerima manfaat yang menandatangani suratnya (Orang)	-	70	-	75	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	295	295	815		
PEKERJAAN MODAL																					
		Jumlah proyek yang berinvestasi (Perusahaan)	14	-	0	18	-	20	20	205	22	22	272	24	24	278	84	84	815	Dinas Perencanaan Pembangunan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
		Jumlah BUMN dan lembaga keuangan lainnya	400.000.000.000	4.000.000.000.000		4.000.000.000.000		4.000.000.000.000	4.000.000.000.000		4.000.000.000.000		4.000.000.000.000	4.000.000.000.000	4.000.000.000.000	4.000.000.000.000		4.000.000.000.000	4.000.000.000.000	815	Dinas Perencanaan Pembangunan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
		Jumlah Perumahan yang dibangun	159	-	0	350	-	400	400	190	420	420	195	480	480	199	1690	1660	584	Dinas Perumahan, Kependudukan dan Keluarga Berencana	
KEPENDIDIKAN DAN OLAH RAGA																					
		Jumlah orang yang mengikuti kegiatan olahraga	14	10	901	9	1.133	9	9	1.159	9	9	1.188	9	9	1.212	9	9	563	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	

Handwritten signature

Kode	Bidang Utama dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD Tahun 2013	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	OPD Penanggung Jawab			
				Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024						
2	Pengembangan dan Kebutuhan Masyarakat Kabupaten	Jumlah cabang atau kegiatan yang dilaksanakan di kabupaten	121	6	4.403	8	2.096	10	10	5,27	12	12	5,4	14	14	5,51	14	14	22390	Dinas Perencanaan, Pemuda dan Olahraga - Seclab
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	jumlah sarana prasarana olahraga lainnya yang tersedia	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	50	2	2	50	2	2	50	Dinas Perencanaan Pemuda dan Olahraga
	STATISTIK																			
		kecerdasan dan (%)	80	82	213	84	70	86	86	237	88	88	243	90	90	248	90	90	1011	Barekrifbang dan Seclab
		kecerdasan dan bidang, kesehatan (%)	100	109	51	100	75	100	100	77	100	100	79	100	100	89	100	100	362	Dinas Kesehatan, Pemuda dan KB
		kecerdasan dan bidang kesehatan dan PRSD (%)	85	92	7	100	6,5	100	100	8,9	109	100	9	100	100	9,8	100	100	41,9	Badan Kepegawaian
	Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah	kelembagaan data komoditi kecerdasan (%)	100	100	49	100	53	100	100	79	100	100	81	100	100	83	100	100	345	Dinas Kelembagaan dan Periklanan
		kelembagaan kepegawaian dan kebutuhan (%)	100	100		100		100	100		100	100		100	100		100	100	0	Dinas Kelembagaan dan Periklanan
		kelembagaan kepegawaian dan kebutuhan (%)	1	1	20	1	36	1	1	37	1	1	38	1	1	39	1	1	170	Dinas Kelembagaan dan Periklanan

Kode	Bidang Dinas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD Tahun 2013	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		GDP Pembangunan Awal
				Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Target periode RPJMD	Target periode RPJMD					
				Realisasi 1	Rp (Juta)	Rp (Juta)	Realisasi 1	Rp (Juta)	Rp (Juta)	Target Semula m	Target Semula h	Rp (Juta)	Rp (Juta)	Target Semula m	Target Semula h	Rp (Juta)	Rp (Juta)	Target Semula m	Target Semula h	Rp (Juta)		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
PERBANDIANG																						
	Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	Jumlah Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	59	-	1	30			
	Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	Jumlah Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83		-	83				
KEBUDAYAAN																						
	Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	Jumlah grup sasaran yang mengikuti	36	27	170	39	164	41	41	2.162	43	43	2.218	45	45	2.207	45	45	6981			
	Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	Jumlah kelompok sasaran yang mengikuti	25	30	33	41	41	41	41		43	43		44	44		44	44	0			
	Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	Jumlah kelompok sasaran yang mengikuti	16	16	17	17	17	17	17		18	18		19	19		19	19	0			
	Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	Jumlah dokumenasi				825				3.006			3.084			3.182			3.152			
	Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	Jumlah dokumenasi		10				12	12		13	13		14	14		14	14				
	Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	Jumlah dokumenasi	3					6	6		7	7		8	8		8	8				

Handwritten signature

Kode	Bidang Utama dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Koordinasi Awal RPJMD Tahun 2013	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Koordinasi Kinerja pada akhir periode RPJMD		DPP Pemanfaatan Jangka Panjang			
				Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Target	Rip (Rata-rata)	
				Realisasi	Rp (Rata-rata)	Realisasi	Rp (Rata-rata)	Realisasi	Rp (Rata-rata)	Realisasi	Rp (Rata-rata)	Realisasi	Rp (Rata-rata)	Realisasi	Rp (Rata-rata)	Realisasi	Rp (Rata-rata)		Realisasi	Rp (Rata-rata)	Realisasi
2	dan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	jumlah kunjungan ke perpustakaan umum (orang)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Perpustakaan dan Kearsifan
KERANGBAM																					
	Perbaikan sistem kemahasiswaan	ketersediaan asup berbasis IT (berbasis)	0	0	50	1500	51	1500	1500	63	2000	2000	65	2300	2300	66	7500	7500	205	Dinas Perpustakaan Kearsifan	
	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan	jumlah asup berasi yang terakumulasi (kembali)	50	700	100	700	137	1300	1300	127	1300	1500	130	1500	1300	133	5990	5960	627	Dinas Perpustakaan Kearsifan	
	Peningkatan kualitas pelayanan informasi	ketersediaan kegiatan kearsifan yang terakumulasi (orang)	0	80	41	165	275	180	180	63	180	180	65	180	180	66	785	785	451	Dinas Perpustakaan Kearsifan	
URUSAN PILIHAN																					
RELATIF DAN PERIKAMAN																					
	Pengembangan dan bimbingan pelaksanaan	Produksi Item (Ton)	10016	134,22	-	164,83	2.575	170	170	2.637	175	175	2.705	180	180	2.765	824,05	824,05	10562	Dinas Kesehatan, Pertanian dan Perikanan	
PASIBWAKA																					
	Pengembangan dan bimbingan pelaksanaan	Angka rangkai (rangkai)	746.141	760.243	1.218	810.34	1.749	1.000.000	1.000.000	1.256	1.100.000	1.100.000	1.299	1.200.000	1.200.000	1.327	4.970,583	4.970,583	6830	Dinas Perumahan, Permukiman dan Cipta Karya	

Kode	Bidang Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kontrol Kinerja RPJMD (tahun 2013)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												DPP Pencapaian Jumlah	
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kontrol Kinerja pada akhir periode RPJMD		Rp (juta)					
				Realisasi 1	Rp (juta)	Realisasi 1	Rp (juta)	Target Benda 2	Target Benda 3	Rp (juta)	Target Benda 4	Target Benda 5	Rp (juta)	Target Benda 6	Target Benda 7		Target Benda 8	Target Benda 9	Target Benda 10		
2	Pengembangan dan Destinasi Wisata	Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan (budi)	10	112	2	831	7	7	11	875	8	8	693	6	6	918	23	23	3334	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
	Pengembangan dan Destinasi Wisata	Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan (budi)	10	1121	22	37	49	49	84	84	51	51	87	55	55	86	55	55	1417	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
	Pengembangan dan Destinasi Wisata	Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan (budi)	42	50	59		51	51			52	52	53	53	53		54	54		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
	Pengembangan dan Destinasi Wisata	Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan (budi)	-		29		20	20			20	20	20	20	20		20	20	20		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	Pengembangan dan Destinasi Wisata	Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan (budi)	18	7	13		21	21			8	8		21	21		79	79		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
	Pengembangan dan Destinasi Wisata	Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan (budi)					12	12			14	14		16	16		16	16			
	Pengembangan dan Destinasi Wisata	Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan (budi)	50	169	284	150	295	200	200	316	206	209	325	206	200	332	850	850	1582		Sedikit, Dinas Kesehatan dan Perencanaan dan Pertanahan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (tahun 2013)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendukung				Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendukung										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019						
				Realisasi (Rp)	Realisasi (Juta)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Juta)	Target Selesai (Rp)	Target Selesai (Juta)	Target Selesai (Rp)	Target Selesai (Juta)	Target Selesai (Rp)	Target Selesai (Juta)	Target Selesai (Rp)	Target Selesai (Juta)	Target Selesai (Rp)	Target Selesai (Juta)			
2		data profil Kesbang Pol	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Kerjasama Pembangunan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan (Juta)	2	0	0	3	48	4	4	670	5	5	663	5	5	650	5	5	2031	
		Persentase ketercapaian indikator pembangunan daerah di sektor pertanian dan lain-lain (Berkuraj)	7	0	198	5	370	5	5	683	5	5	694	7	7	1.05	7	7	3165	
	Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Dokumen yang dihasilkan)		0		4		4	4		4	4	4	4	4	4	4	4	4	
		Persentase Capaian Perencanaan (Rp)		0				190	190		100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Ketersediaan ekuitas pembekuan (Dakunren)	2	-	0	2	9	2	2	150	2	2	200	2	2	250	2	2	589	
	Perencanaan Sosial dan Budaya	Ketersediaan indikator pemb. sosial (Berkuraj)	0	-	0	-	0	2	2	50	3	3	60	4	4	70	4	4	180	
		Master Plan	0	-	-	-	-	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	

Handwritten signature

Kode	Bidang Urutan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD Tahun 2013	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendukung		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendukung										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	RPJMD (data)	OPD Penyelenggara			
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Target Selesai	Target Selesai				RPJMD (data)		
				Realisasi	Rp (Milyar)	Realisasi	Rp (Milyar)	Target Selesai													
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Program Perencanaan Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Keberhasilan pelaksanaan pembangunan (Rakernas)	0	-	1	10	1	1	20	1	1	30	1	1	40	1	1	109		21	
	Program Perencanaan Pembangunan dan Wilayah (Bakamwil)	jumlah dukumen perencanaan pembangunan wilayah (Bakamwil)	8	-	8	13	8	3	100	3	8	100	8	9	100	8	8	313			
KEURAGAN																					
	Pergerakan Lapangan Kerja Persewaan Rakyat Daerah	jumlah tenaga kerja informal (Perda)	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Pergerakan Lapangan Kerja Persewaan Rakyat Daerah	jumlah tenaga kerja informal (Perda)	9	6	3,5	13	3.753	9	9	6.732	9	9	6.732	9	9	6.732	46	46	27489		
	Pergerakan Lapangan Kerja Persewaan Rakyat Daerah	kebiasaan penerimaan daerah (%)	97	94,86	2.222	96,3	1.641	100	100	2.601	100	100	2.601	100	100	2.601	100	100	11666		
	Pergerakan Lapangan Kerja Persewaan Rakyat Daerah	kebiasaan belanja daerah (%)	89	87,47		76,37		92	92		93	93		94	94		94	94			
	Pergerakan Lapangan Kerja Persewaan Rakyat Daerah	kebiasaan PADI (%)	97	100		100		100	100		100	100		100	100		100	100			
	Pergerakan Lapangan Kerja Persewaan Rakyat Daerah	jumlah SMD dengan pekerjaan tetap (%)	70	25,22				85	85		90	90		95	95		95	95			

22

Kode	Bidang Urusan Penerimaan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Koordinasi Areal RPJMD (Pekerjaan 2013)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Koordinasi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Penanggung Jawab			
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Target Selesai	Target Selesai				Rp (Milyar)		
				Realisasi	Rp (Milyar)	Realisasi	Rp (Milyar)	Target Selesai	Target Selesai	Rp (Milyar)	Target Selesai	Target Selesai	Rp (Milyar)								
2		Jumlah SKPD yang memantapkan APBD Online (SKPD)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai aturan (%)	100	87,47		76,27	2.298	100	100	2.412	100	100	2.533	100	100	2.66	100	100	9903		
		Pertumbuhan dan realisasi target pendapatan Kabupaten/ Kota Kabupaten/ Kota	100	100	449	100	485	100	100	424	100	100	437	100	100	450	100	100	2225		
PENGAWASAN																					
		Peningkatan Sistem Pengawasan Keuangan Kabupaten/ Kota	0	109	798	183	265	80	80	775	75	75	775	70	70	775	407	407	3379		Inspesdorit
		Peningkatan Sistem Pengawasan Keuangan Kabupaten/ Kota	109	798,62		27		100	100	103	100	100	103	100	100	103	100	100			Inspesdorit
		Peningkatan profesionalisme tenaga teknis dan aparat pendukung	14	16	16	16	16	18	18	103	18	18	103	20	20	103	20	20	341		
		Peningkatan dan pengembangan	100	300	30	100	30	100	100	31	100	100	32	100	100	32	100	100	32		Inspesdorit

Kode	Bidang Pemasaran dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	OPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019				Tahun 2020	
				Realisasi	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)			Realisasi	Rp (Juta)
2	dan SEM dan Jumlah Laporan/Perse nase SAJIP SISP yang telah diselesaikan dan Laporan Keuangan kota yang direvisi (Laporan)	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		26	30	25	30	25	27	31	26	27	32	25	27	32	25	27	33	Inspektoran	
		1	30	1	35	1	1	35	1	1	30	1	1	35	1	1	35	Inspektoran	
SEKRESIARIAT																			
	Draft Produk hukum yang dihasilkan perundang-undangan sebagai turunan Perda yang dicabut dan Perwason	14	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
	Pembinaan Peraturan Perundang-Undangan	25	470	33	1.05	33	33	685	33	33	702	33	33	716	33	33	3523	Setelako	
	Pembinaan dan Pengembangan SDM	312	350	350	62	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	
	Pembinaan dan Pengembangan SDM	100	100	100	721	100	100	738	100	100	63	100	100	66	100	100	255	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
	Pembinaan dan Pengembangan SDM	100	25	100	721	100	100	738	100	100	63	100	100	66	100	100	3011	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
	Pembinaan dan Pengembangan SDM	1.4	1.4	1.4	1.651	1.4	1.4	3.057	1.4	1.4	3.132	1.4	1.4	3.196	1.4	1.4	12036	Badan Kepegawaian	

RL

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2013)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung Jawab				
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Realisasi	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Target Selesai	Target Selesai	Rp (Juta)	Target Selesai	Target Selesai	Rp (Juta)	Target Selesai	Target Selesai		Rp (Juta)	Target Selesai	Target Selesai	Rp (Juta)
2	Sumber Daya Aparatur	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		diakibatkan																		
		Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat PIM (orang)		72		39		42	42		42	42	42	42	42		237	237		
		Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat Prajabatan (Orang)						93	93		93	93	93	93	93		183	183		
		Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat Peningkatan Kompetensi (Orang)						0	0		60	60	60	60	60		120	120		
		Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat Fungsional (Orang)						0	0		30	30	30	30	30		60	60		
	Peringatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai (%)	97	98	500	57	600	57	57	700	97	97	800	97	97	900	97	97	960	Sesuai OPD
		Ketersediaan PNS sesuai kebutuhan (orang)		0				475	475		540	540					1735	1735		
	Perencanaan dan Perambangan aparatur	Jumlah PNS yang terdapat di dinas (Orang)			1.323	26	998	25	25	1.476	35	35	1.512	35	35	3.543	154	154	6852	Bukan Kepegawaian dan Penanggung dan SIM
		Perhitungan pejabat yang dilaksanakan (musa dan posisi)						4	4		4	4		4	4		12	12		
		Jumlah data Pegawai yang						2696	2696		2345	2345		2285	2285		7326	7326		

RP

Kode	Bidang Usaha, Peningkatan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	OPD Penanggung Jawab
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Realisasi	Rp (juta)	Realisasi	Rp (juta)	Target Selesai	Rp (juta)	Target Selesai	Rp (juta)	Target Selesai	Rp (juta)	Target Selesai	Rp (juta)	Target Selesai	Rp (juta)	Target Selesai	Rp (juta)		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Jumlah organisasi lembaga adat yang aktif di Kabupaten	12	12				12	12			12	12	12	12		12	12			SEDIKAKO
		Perolehan Akarun aktif (Bukah)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Lembah Sejar
		Pengobatan masyarakat yang ditandatangani (%)	10	15	20	20	114											20	20	164	1323
		Jumlah Perumahan Masyarakat Masyarakat																			2473
		Jumlah media massa yang bekerjasama (Media)	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	1365
		Indeks Kepuasan Masyarakat pemerintah terdapat (%)	50	90	90	90	581														1280
		Perentase pengabdian yang telah LSPB (%)	100	100	100	100	949														154
		Realisasi fiskal Regional Kabupaten (%)	90	99,25				92	92												1323
		Nilai rata-rata skor SPK (%)	70	120	126	229	163	132	132	132	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	164

Kode	Bidang Pembangunan dan Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendasanan				Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendasanan												OPD Pencapaian Jawab
				Tahun 2014		Tahun 2018		Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Realisasi %	Rp (Juta)	Realisasi %	Rp (Juta)	Target Sebelum m	Target Setelah m	Rp (Juta)	Target Sebelum h	Target Setelah h	Rp (Juta)	Target Sebelum m	Target Setelah m	Rp (Juta)	Target Sebelum h	Target Setelah h	Rp (Juta)	
2	Organisasi Daerah	Jumlah SKPD yang melakukan pengaturan RP (SRPD)	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	SETDAKO
		Jumlah SKPD yang mempunyai dan menerapkan SOP (SRPD)	10		10		5	5		5	5		5	5		5	5		SETDAKO	
	Pembinaan dan Pelatihan Perencanaan	Jenis pelatihan yang diberikan sesuai SOP	31	88	45	50	45	45	119	45	45	124	45	45	129	45	45	5/0	Dinas Perencanaan Modal Pelaksanaan Tercapai Saat Pinau dan Terjadi Secara	
	Program peringkatan SDM operator terampil	Indeks kepuasan layanan (p)	100	353	100	464	100	100	474	100	100	486	100	100	496	100	100	2313	SETDAKO	
	Perencanaan sarana prasarana aparatur	Ketersediaan fasilitas kendaraan dinas operasional (%) Ketersediaan fasilitas jumlah dinas dinas	80	3.826	90	-	90	90	5,27	90	90	5,4	90	90	5,51	90	90	20000	Bidang Perencanaan Keuangan dan Aset Darah, BKPSDM dan semasa OPD	
	Penyediaan dan pemeliharaan peralatan	Evaluasi LSPD (%)	100	-	100	362	100	100	274	100	100	281	100	100	287	100	100	1144	SETDAKO	
	Penyediaan dan pemeliharaan peralatan	Ketersediaan peralatan LSPD (%)	100	-	100	-	100	100	-	100	100	-	100	100	-	100	100		SETDAKO	
	Penyediaan dan pemeliharaan peralatan Kelembagaan	Jumlah SKPD yang dinas	27	-	-	-	27	27	22	27	27	25	27	27	30	27	27	77	Setelako	

Kode	Bidang Urusan Penerimaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (2013)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung Jawab					
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD							
				Realisasi	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Target Selesai	Rp (Juta)	Target Selesai	Rp (Juta)	Target Selesai	Rp (Juta)	Target Selesai	Target Selesai		Rp (Juta)				
2	Berlingkungan Pemerintahan Kabupaten Kediri	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Jumlah pelayanan	1	1	80	1	80	1	1	85	1	1	93	1	1	95	1	1	95		Socilako
		Jumlah anggaran yang dibelanjakan (dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	200	1	1	150	1	1	300		Bukan Perencanaan, Pencatatan dan Penganggaran dan Daerah
	KEWILAYAHAN																				
	Peningkatan SDM Pelajaran Administrasi (S) Terpadu (PNS)	persentase penyelesaian dokumen administrasi (S) (persentase)	50	100	17	100	200	100	100	4	100	100	4	100	100	5	100	100	250		SEIDAMO,
		persentase penyelesaian anggaran (S) (persentase)	90	100		100		100	100		100	100		100	100		100	100			Kecamatan dan Kecamatan Penanang Modal, PRSP dan Tenaga Kerja
		Realisasi: PBB (%)	75	75	923	80	2,084	100	100	12	100	100	13	100	100	15	100	100	3047		Lembah Segur
		Target: Kelembutan (%)	95	100		100		100	100	8	100	100	8	100	100	8	100	100	21		Burangin
		Jumlah penerima fasilitas modal yang mampu membiayai pelayanannya	2,3	2		2		2	2	29	2	2	22	129	1	21	1	1	368		Taliari
			50	55		60		65	65	255	70	70	285	75	78	235	75	75	265		Sarangani
			50	55		60		65	65	383	70	70	383	75	75	353	75	75	1.149		Sarangani
			50	55		60		65	65	320	70	70	320	75	75	326	75	75	978		Taliari
			50	55		60		65	65	204	70	70	204	75	75	204	75	75	612		Sarangani

sh

**BAB IX
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH**

9.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengukuran keberhasilan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2013-2018 tercermin dari capaian Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan capaian program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih Indikator Kinerja Utama dengan kondisi awal 2013 dan target akhir 2018 RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018 menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi yang disajikan dalam Tabel 9.1 berikut:

**Tabel 9.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018**

NO.	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2013	REALISASI CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA		TARGET AKHIR RPJMD
			2014	2015	2016	2017	2018		
1.	PDRI Lapangan Usaha Industri (Rp/bh)	288.842,2	312.905,23	338.444,30	353.285,86	370.530,16	385.704,02	385.704,02	
2.	Daya Beli Masyarakat (Rp/bh)	630.200	635.145	643.235	645.000	647.000	650.000	650.000	
3.	PDRI Lapangan Usaha Perikanan dan Perikanan (Rp/bh)	224.358,3	248.696,98	268.628,71	303.941,12	334.567,45	367.198,85	367.198,85	
4.	Milai/ score Pola Pangan Harapan (%)	84,1	83,45	83,67	85	87	88	88	
Misi 1: Mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif dan Meningkatkan Peluang Usaha melalui Keunggulan Partisipasi dan Produk Lokal									
1.	Pendapatan perkapita (Rp)	39,02	42,66	45,27	42,06	44,08	46,09	46,09	
2.	Tingkat pertumbuhan (%)	6,16	6,38	7,18	7,03	7,03	6,88	6,88	
3.	Perawatan infrastruktur	86	86	88	88	89	90	90	
4.	Perawatan ruang perkotaan yang ditungkal (%)	85	86	88	88	89	90	90	
5.	Perawatan ruang terbuka hijau (%)	12,80	12,80	15,83	17	18	19	19	
6.	jumlah sumbu prasarana perkebunan dan perikanan yang ditungkal (unit)	25	29	25	63	45	50	50	
7.	Capaian pelayanan kesehatan (sambal %)	60	68	68	70	75	80	80	
8.	jumlah peningkatan kemampuan menghadapi bencana (pelawan)	31	40	284	344	404	434	434	
Misi 2: Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah									

NO.	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2013	REALISASI CAPAIAN KIMBERJA				TARGET CAPAIAN KIMBERJA	TARGET AKHIR RPJMD
			2014	2015	2016	2017		
Misi 3 : Mempuk kehidupan sosial yang agamis dan berakhlak mulia serta mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan berakhlak								
1.	Jumlah kasus kenakalan remaja, amoral dan asusila pada generasi muda (kasus)	N/A	0	0	0	0	0	0
2.	Jumlah penurunan konflik SARA bermunase agama (KH)	N/A	0	0	0	0	0	0
3.	Harapan lama Sekolah (tahun)	12,52	12,68	12,69	12,71	12,75	12,80	12,80
4.	Angka Melek Huruf (AMH) (%)	99,05	99,5	99,9	99,25	99,30	99,35	99,35
5.	Angka RLS (tahun)	9,25	9,42	9,42	9,8	9,92	10,2	10,2
Misi 4 : Menumbuhkan Masyarakat yang Berkelektuan, Sehat dan Berakhlak yang Mengusai Beragam Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni dan Budaya								
1.	Partisipasi tingkat partisipasi pemilih (%)	75,38	66,98	53,31	0	0	80	80
2.	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani secara terpadu (tahun)	100	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase layanan jaringan internet (%)	N/A	94	94	97	97	100	100
4.	Jumlah sarana pelayanan kesehatan yang terakreditasi (unit)	0	0	0	2	4	6	6
7.	Persentase jamahan kesehatan	93,01	73,5	81,73	70	72	75	75
8.	Jumlah kematian ibu melahirkan (orang)	28,9/1000 KH	15,4/100 KH	11,5/100 KH	24/1000 KH	23/1000 KH	22/1000 KH	22/1000 KH
9.	Persentase Perawatan kecurangan gila pada balita (%)	12,8	11,5	10,7	11,1	11	10,9	10,9
10.	Persentase orang ber PHS	41,2	33,04	52,02	55	60	65	65
11.	Jumlah PUS (Prasman Utsa Subur ber KB (KH)	7164	7311	8495	7413	7500	7550	7550
12.	Persentase PKKS yang memperoleh pelayanan social	41,36	47,89	57,36	58	58,50	50	50
13.	Persentase penduduk miskin (%)	2,17	2,25	2,22	2	1,9	1,75	1,75
14.	Jumlah desa/kel yang mempunyai masyarakat, emas dan kerang taruna (desa/kel)	N/A	37	37	37	37	37	37
15.	Nilai Status pengembangan kota layak anak	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya
16.	Jumlah organisasi wanita yang aktif (jumlah)	25	25	25	25	28	30	30

48

R

NO.	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2013	REALISASI CAPAIAN KINERJA				TARGET AKHIR RPJMD
			2014	2015	2016	2017	
17.	Jumlah cabang usaha nasional yang berkembang di Sawahlunto (cabang)	4	6	6	8	9	10
Misi 5: Menetapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Meyakini, Kreatif, Inovatif dan Efisien							
1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan (dokumen)	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Hasil evaluasi LAKIP Kota (nilai)	N/A	C	C	B	B	BB
3.	Pertentase kecurahan dokumen perencanaan dengan aturan	80	80	90	100	100	100
4.	Jumlah PAD (Rp. pertahunan %)	38,995	43,380	52,268	53,681	59,586	66,14
5.	Jumlah OPD yang memenuhi SPM	15	15	15	6	6	6
6.	Jumlah sistem pengelolan arsip secara elektronik dan pertukaran data (int. aplikasi)	N/A	1	1	1	1	1
7.	Pertentase wajib KTP yang memiliki KTP elektronik (%)	90,95	95,88	84,67	98	98	98
Misi 6: Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Daerah							
1.	Jumlah pendapatan asli daerah sektor pariwisata (Rp.)	1,484,335,722	1,468,809,170	1,372,461,022	1,675,000,000	1,797,050,000	1,850,000,000
2.	Jumlah kunjungan wisatawan (orang)	750,385	760,243	810,340	1,000,000	1,100,000	1,200,000
3.	Jumlah kunjungan museum (pengunjung)	11,008	16,420	11,213	16,734	19,244	22,121
Misi 7: Mempertegas Jaringan Sosial dan Ekonomi secara Nasional dan Internasional							
1.	Jumlah nota kerjasama dengan kab./kota dan atau lembaga	18	14	21	8	5	39
2.	Jumlah nilai PMDN (Rp.) dan nilai PMA (\$ juta.)	N/A	PMDN: 309,2300 PMA: 300	PMDN: 504,8300 PMA: 300	35M	36M	37M
3.	Panjang jalan yang memiliki sarana prasarana sesuai dengan standar (km)	110	115	118	121	124	127

RS

9.2 INDIKATOR KINERJA DAERAH

Pencapaian indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan waktu kepala daerah pada akhir periode masa jabatannya. Indikator Kinerja merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Pencapaian indikator kinerja daerah dilakukan berdasarkan kondisi tahun 2014 dan 2015, tendensi perkembangan dimasa lalu dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan.

Indikator kinerja daerah disajikan berdasarkan aspek dan fokus kinerja dengan pembagian wajib dan pilihan. Indikator kinerja yang disajikan berikut merupakan rekapitulasi dari kondisi kinerja outcome program pada Bab. VIII sebelumnya.

Tabel 9.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018

NO	ASPEK/FOKUS/BIKANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN				TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2014		2015		2016		2017		2018				
			Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	9			
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT														
1.1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,11	6,01	6	6,12	6,12	6,16	6,18	6,2	6,28	6,28	6,28			
1.2	Laju Inflasi (%)	4,12	6,37	6,31	5,82	6,35	5,33	6,4	4,84	6,45	6,45	4,84			
1.3	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Rp. Juta)	2.301.157,00	2.543.141,00	2.724.823,84	2.284.174	3.199.798,59	2.546.585	3.539.622,13	2.827.696	3.905.201,42	3.905.201,42	3.905.201,42			
1.4	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (Rp. Juta)	2.001.854,07	2.122.241,26	2.249.594,67	749.435,05	2.375.571,97	788.860,72	2.522.382,32	823.960,43	2.680.787,93	2.680.787,93	2.680.787,93			
1.5	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (Rp. Juta)	39,02	42,66	45,27	37,85	51,98	41,78	56,22	45,93	60,65	60,65	60,65			
1.6	Jumlah Perindustri (Juta)	58.972	59.603	60.186	61.561	60.778	63.765	61.398	65.214	61.898	61.898	61.898			
1.7	Tingkat Kemiskinan (%)	2,28	2,25	2,22	2,01	1,91	1,97	1,74	1,75	1,57	1,57	1,57			
1.8	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,16	6,38	7,18	4,8	7,03	4,4	7,03	3,9	6,88	6,88	6,88			
1.9	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,07	69,61	69,87	70,82	71,43	72,89	72,89	72,89	72,89	72,89	72,89			
	a. Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,52	12,68	12,69	12,71	12,71	12,75	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80			
	b. Angka Harapan Hidup (Tahun)	69,14	69,17	69,27	72,95	69,43	73,16	69,63	73,38	69,81	69,81	69,81			
	c. Pengeluaran per kapita (Ribu/kapita/Tahun)	8.665	8.780	8.931	637,06	9.201	638,96	9.432	640,87	9.530	9.530	9.530			
	d. Rata-rata Lama Sekolah	9,45	9,65	9,66	9,68	10,09	9,68	10,23	10,1	10,1	10,1	10,1			
B	ASPEK PELAYANAN UMUM														
I	LAYANAN URUSAN WAJIB														
1	Urutan Pendidikan														
	a. APK SD/MI/Paket A (%)	107,9	112,99	110,73	116,8	116,8	118,58	118,58	120,36	120,36	120,36	120,36			
	b. APK SMP/MTs/Paket B (%)	91,48	89,13	86,45	85,42	84,42	86,305	86,305	89,19	89,19	89,19	89,19			
	c. APK SMA/SMK/MA/Paket C (%)	98,77	79,77	95,25	83,596	95,25	84,684	95,25	85,772	95,25	95,25	95,25			

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA WERKSGEDAMEN DAERAH)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	REALISASI CAPAIAN KINERJA						TARGET CAPAIAN KINERJA						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			TAHUN			TAHUN			TAHUN			TAHUN			
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	d. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	92,52	100	96,346	97,614	97,614	98,882	96,882	100,15	100,15	100,15	100,15	100,15	100,15	100,15
	e. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	68,16	85,63	76,43	67,52	76,43	71,76	76,43	75,02	76,43	76,43	76,43	76,43	76,43	76,43
	f. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C (%)	79,07	76,43	82,37	70,36	70,36	75,34	75,34	80,32	80,32	80,32	80,32	80,32	80,32	80,32
	g. Angka Pulus Sekolah (APS) SD/MI (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	h. Angka Pulus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	1,79	0,14	0,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i. Angka Pulus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA (%)	0,86	0,72	1,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	k. Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	l. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	99,46	99,87	99,90	99,8	100	99,90	100	100	100	100	100	100	100	100
	m. Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA (%)	100	99,84	99,97	99,95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Urusan Kesehatan														
	1. Angka Kelangkaan Hidup Bersih (%)	99,13	99,32	99,41	99,5	99,5	99,59	99,39	99,68	99,68	99,68	99,68	99,68	99,68	99,68
	2. Persentase Balita Gizi Buruk (%)	0,31	0,23	0,26	0,23	0,23	0,21	0,21	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
	3. Rasio penyandu per satuan balita (%)	16,11	16,42	16,37	15,87	15,87	15,75	15,75	15,63	15,63	15,63	15,63	15,63	15,63	15,63
	4. Rasio pukesmas, policlinik, pusku per satuan penduduk (%)	0,58	0,48	0,53	0,51	0,51	0,49	0,49	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
	5. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (%)	0,0169	0,0167	0,0166	0,0161	0,0161	0,0158	0,0158	0,0156	0,0156	0,0156	0,0156	0,0156	0,0156	0,0156
	6. Rasio dokter per satuan penduduk (%)	0,31	0,48	0,39	0,43	0,43	0,47	0,47	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
	7. Rasio tenaga medis per	6,61	6,69	7,38	7,7	7,7	8,02	8,02	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN					TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2014		2015		2016		2017		2018			
			Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	9		
	setuan penduduk (%)													
	8. Cakupan kompikasi kelahiran yang ditangani (%)	100	100	97,9	100	100	100	100	100	100	100	100		
	9. Cakupan perolehan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	98,7	99,04	76,9	100	100	100	100	100	100	100	100		
	10. Cakupan desa/keurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)	97,3	54,05	98,78	99,26	99,26	99,74	99,74	100	100	100	100		
	11. Cakupan Balita Gizi Buruk penanganannya dan mendapat perawatan (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
	12. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	51,15	44,21	56,75	56,75	56,75	57,353	57,353	60,551	60,551	60,551	60,551		
	13. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
	14. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	9,12	12,2	46,4	100	100	100	100	100	100	100	100		
	15. Cakupan Kunjungan bayi (%)	80,85	87,7	99,2	87,91	87,91	89,8	89,8	91,69	91,69	91,69	91,69		
	16. Persentase balita gizi buruk (%)	0,31	0,19	0,56	0,44	0,44	0,32	0,32	0,2	0,2	0,2	0,2		
3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang													
	1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	67,5	68,77	70,92	72,63	72,63	73,34	73,34	75,05	75,05	75,05	75,05		
	2. Rasio jaringan irigasi (%)	5,43	5,43	5,48	5,5	5,5	5,53	5,53	5,56	5,56	5,56	5,56		
	3. Rumenh tinggal bersantiasa (RT)	75,53	7,847	8,455	11,367	11,367	12,038	12,038	12,709	12,709	12,709	12,709		
	4. Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah per HPL/HGB (%)	10,77	12,8	11,21	11,55	11,55	11,78	11,78	12	12	12	12		
	5. Rasio bangunan ber LMB per satuan bangunan (%)	0,48	0,33	0,52	0,54	0,54	0,56	0,56	0,58	0,58	0,58	0,58		

RL

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	REALISASI CAPAIAN KINERJA						TARGET CAPAIAN KINERJA						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD			
			TAHUN			TAHUN			TAHUN			TAHUN						
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	6. Luas wilayah produktif (%)	82,09	82,09	15,354	82,40	15,378	82,89	15,402	83	83								
	7. Luas wilayah industri (%)	35,31	35,83	0,07	35,91	0,07	35,96	0,07	35,98	0,07								
4	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman																	
	1. Rasio rumah layak huni (%)	85,35	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
	2. Rasio Perumahan layak huni (%)	94,1	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
	3. Rumah tangga dengan air minum layak (%)	87,85	89	91	91	93	93	93	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
	4. Rumah tangga pengguna listrik (%)	95,75	95,75	95,96	95,96	96,03	96,03	96,03	96,1	96,1	96,1	96,1	96,1	96,1	96,1	96,1	96,1	96,1
	5. Lingkungan permukiman sehat (%)	17	16,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. Persentase luas permukiman yang tertata (%)	11,22	11,22	15,61	15,61	16,23	16,23	16,23	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84
5	Urusan Ketenteraman, Kebersihan Umum dan Perlindungan Masyarakat																	
	1. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota (%)	0,003	0,0033	0,0025	0,0025	0,0023	0,0023	0,0023	0,0021	0,0021	0,0021	0,0021	0,0021	0,0021	0,0021	0,0021	0,0021	0,0021
	2. Tingkat waktu tanggap (response time) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMMK)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	3. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (kegiatan)	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg
	4. Kegiatan pembinaan politik daerah (kegiatan)	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg
6	Urusan Sosial																	
	1. PMKS yang memperoleh bantuan (%)	41,36	47,89	50	51	100	100	25	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	2. Peranginan panyandang masalah kesejahteraan sosial/Peranginan PMKS (%)	75	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

sk

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	REALISASI CAPAIAN KINERJA						TARGET CAPAIAN KINERJA						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD			
			TAHUN 2014			TAHUN 2015			TAHUN 2016			TAHUN 2017				TAHUN 2018		
			Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah		Sebelum		Sesudah
			2014	2015	2014	2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017		2018	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
7	Urusan Tenaga Kerja 1. Angka partisipasi angkatan kerja (%) 2. Pencari kerja yang ditempatkan (%)	67,5 19,97	65,30 12,02	69,91 81	75,05 81,5	75,05 81,5	75,81 82	75,81 82	76,57 82,5	76,57 82,5	76,57 82,5							
8	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1. Partisipasi Perempuan Yang Menduduki Jabatan Struktural di Pemerintahan (%) 2. Persentase partisipasi perempuan di Lembaga Legislatif (%) 3. Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur (%)																	
9	Urusan Pangan 1. Ketersediaan Pangan Utama (Ton/ha) (%) 2. Penguatan daerah rawan pangan (%)	11.063,57	9.483,78	10.456,83	-	17.850	-	18.234	-	19.875	19.875							
10	Urusan Pertanahan 1. Persentase Luas Lahan Bersertifikat (%) 2. Penyelesaian kasus tanah Negara (%) 3. Penyelesaian izin lokasi (%)	8,56 100 100	8 0 100	10,14 100 100	10,62 100 100	10,62 100 100	11,09 100 100	11,09 100 100	11,57 100 100	11,57 100 100	11,57 100 100							
11	Urusan Lingkungan Hidup 1. Persentase penanganan sampah (%) 2. Persentase penduduk berakses air minum (%)	15,4 87,85	63,64 91,16	80 89	17,954 91	80 91	18,305 93	85 93	19,655 95	85 95	85 95							

R

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	REALISASI CAPAIAN KINERJA				TARGET CAPAIAN KINERJA								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			TAHUN 2014		2015		2016		2017		2018				
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	3. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan artdel (%) 4. Rasio daya tampung TPSS terhadap jumlah penduduk (m ² /1000 jiwa) 5. Penegakan hukum lingkungan (%)	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	9		
		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
		2,2		8,17	8,08	1,9	8,2	1,9	8,3	1,9	8,5	8,5	8,5		
		100		0	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
11	Kependudukan dan Cakupan Sipil 1. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk (%) 2. Rasio bayi berakte kelahiran (%) 3. Kepemilikan KTP (juta)														
		98		96	91	100	100	100	100	100	100	100	100		
		58		85	85	0,7	85	0,76	86	0,81	86	86	86		
		40,969		41,294	41,619	41,944	41,944	42,269	42,269	42,594	42,594	42,594	42,594		
12	Pembudayaan Masyarakat dan Desa 1. Rata-rata jumlah kelompok bisnis lembaga pembudayaan masyarakat (LPM) 2. Rata-rata jumlah kelompok bisnis PKK (%) 3. Jumlah LSM (Buat) 4. PKK aktif (%) 5. Pestaorasi aktif (%)														
		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		5,3		5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3		
		11		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11		
		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
13	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1. Rata-rata jumlah anak per keluarga (Orang) 2. Rasio Akseptor KB (%)														
		2,04		1,58	1,62	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04		
		73,98		74,65	83	76,85	76,85	77,93	77,93	79,01	79,01	79,01	79,01		
14	Urusan Perhubungan 1. Jumlah arus penumpang														
		363.305		290.950	112.482	1.663.305	1.663.305	1.736.475	1.736.475	1.451.608	1.451.608	1.451.608	1.451.608		

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN						TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2014		2015		2016		2017		2018		Selesai		
			Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah			
1	2 1. angkutan umum (Orang) 2. Jumlah uji KIR angkutan umum (Buah) 3. Laina pengujian kelayakan angkutan umum 4. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	9			
			1.658	1.811	1.755	1.755	1.950	1.950	2.145	2.145	2.145	2.145			
			20 menit	20 menit	20 menit	20 menit	20 menit	20 menit	20 menit	20 menit	20 menit	20 menit			
			0.032	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02			
16	Usuran Komunikasi dan Informatika														
	1. Rasio varetel/warnet terhadap penduduk (Buah)	30	32	28	28	28	28	28	28	28	28	28			
	2. Web site milik pemerintah daerah (Buah)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	3. Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada			
16	Usuran Koperasi dan Usaha Kecil Menengah														
	1. Persentase koperasi aktif (%)	80,77	83,33	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
	2. Jumlah UKM non BPR/LKM UKM (Unit)	417	437	331	481	481	492	492	500	500	500	500			
	3. Jumlah BPR/BPRS/LKM (Unit)	6	34	34	6	34	6	35	6	35	35	35			
17	Usuran Penanaman Modal														
	1. Jumlah investor berskala nasional PMDN (Perusahaan)	14	14	15	20	20	22	22	24	24	24	24			
	2. Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN (Juta)	242.765	279.180	468,3	660,78	660,78	853,26	853,26	1.045,74	1.045,74	1.045,74	1.045,74			
18	Usuran Kepemanduan dan Olahraga														
	1. Jumlah organisasi pemuda (Unit)	15	17	17	16	17	17	17	18	18	18	18			
	2. Jumlah organisasi olahraga (Unit)	25	24	25	24	25	24	25	24	26	26	26			

30

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN				TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2014		2015		2016		2017		2018		
			Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	9	
19	Statistik Ketersediaan data informasi statistik daerah. (Ada/Tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
20	Urusan Kebudayaan 1. Penyelenggaraan festival seni dan budaya. (kali) 2. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya. (Buah) 3. Berada, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (Buah)	2 30 23	9 15 36	9 9 40	5 9 29	5 9 29	8 9 31	8 9 31	8 9 33	8 9 33	8 9 33	8 9 33	
21	Urusan Perpustakaan Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun. (orang)	24.793	33.545	44.042	41.700	41.700	47.207	47.207	47.207	52.715	52.715	52.715	
22	Urusan Kesehatan Tertib Asap (Jumlah SKPD)					26		26		26		26	
II	Layanan Urusan Pilihan												
1	Urusan Kelautan dan Perikanan Produksi perikanan (ton)	103,66	134,22	164,83	105	170	105	175	106	180	180	180	
2	Urusan Perikanan 1. Jumlah penambahan kreatifitas wisata baru (Buah) 2. Angka kunjungan wisatawan (Kunjungan) 3. Jumlah homestay terstandar (Buah)	746.141	760.243	810.340	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	4.970.583	
3	Urusan Pertanian 1. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar. (%)	5,01	5,01	5,05	5,07	5,07	5,15	5,15	5,2	5,2	5,2	5,2	

NO	ASPEK/TOPIK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN		TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
			2014		2015		2016		2017			2018	
			Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	9	
	2. Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB (%)	9,68	9,55	12,03	10,39	10,39	10,57	10,57	10,76	10,76	10,76	10,76	
	3. Jumlah produksi padi (Ton(GKG)/Luas panen)	13.000	13.350	13.792	14.205	5.01	14.632	5.03	15.070	5.1	24,87	24,87	
	4. Luas penanaman padi/jaja (ha)	71.750	244.276	249.794	72.350	152	72.550	153	72.750	154	72.750	72.750	
	5. Luas penanaman sayuran (ha)	145	132	151	148	138	149	139	150	140	150	150	
	6. Populasi tanaman buah-buahan (barang)	115	290	137	118	250.044	119	250.294	120	250.544	1.244.952	1.244.952	
	7. Kawasan agrowisata (lokasi)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	8. Produktivitas karet kering (kg/ha)	700	690	1019,05	800	800	850	850	900	900	900	900	
	9. Produktivitas kakao kering (kg/ha)	700	792,58	902,42	800	800	800	800	800	800	800	800	
	10. Jumlah penyuluh yang berkompeten di bidangnya (orang)	34	38	36	40	40	40	40	40	40	40	40	
	11. Populasi ternak Sapi akhir tahun (Ekor)	6.252	7.043	7.026	6.693	7.200	6.874	7.380	7.005	7.600	36.249	36.249	
	12. Populasi ternak kerbau (Ekor)	1.771	1.820	1.804	1.836	1.836	1.858	1.858	1.880	1.880	1.880	1.880	
	13. Populasi ternak kambing Akhir Tahun (Ekor)	4.225	4.159	3.773	4.630	4.030	4.774	4.174	4.922	4.922	4.922	4.922	
	14. Populasi ternak ayam pedaging (Ekor)	40.832	179.578	221.057	41.820	51.820	42.154	60.154	42.492	65.492	578.101	578.101	
	15. Populasi ternak ayam petelur (Ekor)	53.380	39.388	55.086	57.484	57.484	58.922	58.922	60.395	60.395	60.395	60.395	
4	Urusan Perdagangan												
	1. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	14,92	14,87	13,18	13,39	13,39	13,6	13,6	13,81	13,81	13,81	13,81	
	2. Tingkat kepuasan pedagang kakilima dalam menempati tempat berjualan (%)	90	100	92	100	100	100	100	100	100	100	100	
	3. Adanya peluang untuk promosi (kali)	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	

NO	ASPEK/FORUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	REALISASI CAPAIAN KINERJA						TARGET CAPAIAN KINERJA						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD				
			TAHUN 2014			TAHUN 2015			TAHUN 2016			TAHUN 2017				TAHUN 2018			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4. Ketersediaan sembako di pasar (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	5. Aka ukur yang ditera ulang (Buah)	750	244	366	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
	6. Jumlah pasar terseloka (Buah)	9	4	4	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
5	Urusan Kesehatan																		
	1. Luas hutan kota (ha)	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
	2. Luas hutan produksi yang dimanfaatkan masyarakat (ha)	-	13,83	85	150	150	200	200	200	200	200	200	200	200	250	250	250	250	250
6	Urusan Perindustrian																		
	1. Kontribusi sektor Industri terhadap PDSE (%)	11,1	12,02	11,57	9,95	11,57	9,74	12,00	12,00	12,00	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
	2. Pertumbuhan Industri (%)	7,24	7,24	7,24	14,59	14,59	15,81	15,81	15,81	15,81	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03
	3. Jumlah IKM yang menerima bantuan kemasan produk dan mampu meningkatkan asetnya (IKM)	-	10	10	57	57	62	62	62	62	67	67	67	67	67	67	67	67	67
	4. Jumlah kelompok industri asli (IKM)	1	1	1	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	5. Jumlah sentra serjutan hasil IKM dan kerajinan (Buah) yang meningkat secaraplamnya	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	6. Jumlah peternak sorgket yang meningkat secaraplamnya (Orang)	-	50	27	824	824	874	874	874	874	924	924	924	924	924	924	924	924	924
	7. Jumlah IKM paupan disainasi serfibat hali dan AKG (IKM)	-	10	10	42	42	47	47	47	47	52	52	52	52	52	52	52	52	52
	8. Jumlah perajin sorgket menggunakan bahan baku berwarna alami (IKM)	-	2	4	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	9. Penerapan Gugus Kendali Mutu (Kelompok)	10	1	0	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	10. Jumlah sentra industri potensial (Unit)	5	10	10	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9

R

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	REALISASI CAPAIAN KINERJA						TARGET CAPAIAN KINERJA						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD			
			TAHUN			TAHUN			2016			2017				2018		
			2014	2015	2016	2014	2015	2016	Sebelum	Seandainya	Setelah	Sebelum	Seandainya	Setelah		Sebelum	Seandainya	Setelah
			2014	2015	2016	Sebelum	Seandainya	Setelah	Sebelum	Seandainya	Setelah	Sebelum	Seandainya	Setelah		Sebelum	Seandainya	Setelah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	11. Jumlah perajin cerdra mata dan souvenir (IKM)	13	5	39	18	18	23	23	28	28	28	28	28	28	28	28		
	12. Jumlah IKM pangan yang berbahan baku coklat (kelompok)	1	2	2	8	8	10	10	12	12	12	12	12	12	12	12		
III	Fungsi Peningkatan																	
1	Perencanaan																	
	1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	ada	ada	ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		
	2. Tersedianya dokumen perencanaan RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		
	3. Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPd	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		
2	Penelitian dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pemda (Buah)	4 buah	4 buah	4 buah	4 buah	4 buah	4 buah	4 buah	4 buah	4 buah	4 buah	4 buah	4 buah	4 buah	4 buah	4 buah		
3	Keuangan																	
	1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.484.335.722	1.468.809.370	1.372.461.022	-	1.675.000.000	-	1.797.050.000	-	1.850.000.000	1.850.000.000	1.850.000.000	1.850.000.000	1.850.000.000	1.850.000.000	1.850.000.000		
	2. Jumlah dan rucun pajak dan retribusi daerah (Buah)	25	26	26	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29		
C	Aspek Daya Saing Daerah																	
	1. Produktivitas total daerah (Rp. Juta)	2.317.700,00	2.605.217,96	1.875.910,94	2.030.121,14	2.030.121,14	2.181.331,34	2.181.331,34	2.332.541,54	2.332.541,54	2.332.541,54	2.332.541,54	2.332.541,54	2.332.541,54	2.332.541,54	2.332.541,54		
	2. Nilai Tukar Petani (NTP)	7	7	97,74	100,61	100,61	104,23	104,23	104,23	104,23	104,23	104,23	104,23	104,23	104,23	104,23		
	3. Lama proses perijinan (Hari)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
	4. Jumlah Perda yang mendukung kelincahan (Buah)	15	13	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14		

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

10.1 PEDOMAN TRANSISI

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk mengantisipasi jangam sampai terjadi kekosongan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, maka RPJMD ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Kota Sawahlunto Tahun 2019 (Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019) dan Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2019 yang merupakan hasil pertama dibawah kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil pemilihan kepala daerah Tahun 2018 yang akan datang.

Pedoman transisi ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RRPD setelah RPJMD ini berakhir, dengan tujuan antara lain untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD ini dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi tahun 2019 yang akan datang.

Dengan demikian maka RRPD masa transisi (Tahun 2019) merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil pemilihan kepala daerah tahun 2018 yang akan datang.

10.2 KAIDAH PELAKSANAAN

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018 merupakan pedoman bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah. Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah. Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD kedalam renstra Organisasi Perangkat Daerah. RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RRPD Kota Sawahlunto 5 (lima) tahun kedepan.

1. RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Organisasi Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah.
2. Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD kedalam renstra Organisasi Perangkat Daerah.
3. RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RRPD Kota Sawahlunto 5 (lima) tahun kedepan.
4. Walikota dan Wakil Walikota
5. Dalam pelaksanaan RPJMD Tahun 2013-2018, setiap Organisasi Perangkat Daerah perlu mengupayakan penguatan peran stakeholders dalam mendukung pelaksanaan RPJMD tersebut dan melakukan sosialisasi baik kepada seluruh komponen aparat yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto, instansi terkait maupun masyarakat luas;
6. RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018, merupakan dasar untuk mengevaluasi laporan hasil kinerja kepala daerah terpilih untuk masa lima tahun dan tahunan, yang mana visi dan misi pembangunan yang ingin dicapai selaras dengan strategi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018.

10.3 PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018, maka dilaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018, sebagai berikut:

1. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah;
2. Kepala Bappeda Kota Sawahlunto menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
3. Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Perangkat Daerah periode sebelumnya;
4. Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD.
5. Kepala Bappeda Kota Sawahlunto menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada angka (3);
6. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (4) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ttd

ALI YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


HARISMAN, SH
NIP. 19601210 198302 1 004